



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

2019

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2019





KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Pertanian adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran (BA 018) Tahunan Tahun 2019 (Audited) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara pada Kementerian Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada para pimpinan dalam pengambilan keputusan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Jakarta, April 2020
Menteri Pertanian,



SYAHRUL YASIN LIMPO



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
Pernyataan Tanggung Jawab	xii
Surat Representasi Manajemen	xiii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	91
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	137
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	161
F. Pengungkapan Penting Lainnya	167
VI Lampiran dan Daftar	



DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A.1	Rekapitulasi Pedoman/Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
Lampiran B.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kementerian Pertanian
Lampiran B.2	Realisasi per jenis Belanja berdasarkan Program
Lampiran B.3.1	Jumlah dan Komposisi Pegawai per Eselon 1 berdasarkan Jabatan Pegawai
Lampiran B.3.2	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Pertanian
Lampiran B.4.1	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kementerian Pertanian
Lampiran B.4.2	Rincian Jenis Bantuan Pemerintah Berdasarkan Program
Lampiran B.4.3	Alokasi Kegiatan Pengembangan Korporasi Usahatani
Lampiran B.4.4	Rincian Penyebaran Kegiatan AUTP
Lampiran B.4.5	Rincian Penyebaran Kegiatan AUTS/K
Lampiran B.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kementerian Pertanian
Lampiran C.1.1-C.1.2	Monitoring Penyelesaian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran dan Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran
Lampiran C.2.1-C.2.2	Monitoring daftar saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Daftar Rekening Bendahara Penerimaan
Lampiran C.3.1-C.3.2	Monitoring daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dan Daftar Rekening Lainnya
Lampiran C.5.1	Rincian Nilai Kontrak dan Masa Kontrak atas Sewa Kantor Pada Satker Badan Karantina
Lampiran C.5.2	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Pada Satker Badan Karantina
Lampiran C.7	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Bukan Pajak
Lampiran C.8	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Lampiran C.9	Rincian Mutasi Piutang BLU per Debitur
Lampiran C.10.1-C.10.3	Rincian Penyisihan Piutang PNPB dan Bagian Lancar TP/TGR serta Piutang BLU
Lampiran C.11.1	Rincian Persediaan Jadi pada Satker Badan Layanan Umum Ditjen Peternakan dan Kewan
Lampiran C.11.2	Rincian Peralatan dan Mesin Banper milik Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian yang berada di gudang rekanan
Lampiran C.11.3	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Atas Persediaan
Lampiran C.11.4	Rincian Mutasi Persediaan MAK 526 Per Eselon I atas Pencatatan Persediaan
Lampiran C.11.5	Penjelasan Selisih Belanja Barang 526 Dengan Mutasi Tambah Persediaan 526
Lampiran C.11.6	Rincian Persediaan yang Masih Dalam Proses Pembangunan Fisik maupun Proses Penyelesaian Hibah ke Pemda/Masyarakat per Satker
Lampiran C.12	Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Lampiran C.13	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR
Lampiran C.19	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran C.20.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran C.20.2	Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Lampiran C.21	Rincian Aset Tak Berwujud
Lampiran C.24	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
Lampiran C.25	Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Lampiran D.1.1.	Rincian Perbandingan Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 2018
Lampiran D.1.2	Perbedaan Nilai LRA Pendapatan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO
Lampiran D.4	Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2019 dan 2018
Lampiran D.7	Rincian Penjelasan Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Bantuan Pemerintah
Lampiran D.12	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Lampiran D.15	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Lampiran E.3.3	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2019 dan 2018
Lampiran E.3.4	Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2019 dan 2018
Lampiran E.3.5	Rincian Koreksi Lain-lain Per 31 Desember 2019 dan 2018
Lampiran E.4.2.1	Transfer Keluar
Lampiran E.4.2.2	Transfer Masuk
Lampiran E.4.2.3	Rincian Selisih Transfer Masuk dan Transfer Keluar
Lampiran F.2.1	Monitoring Daftar Temuan dan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Tindak Lanjut atas Temuan BPK Tahun 2018
Lampiran F.2.2.1	Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri (LK PLN)
Lampiran F.2.2.2	Monitoring Hibah dan Data Donor Pemberi Hibah
Lampiran F.2.3	Monitoring Daftar Satker Inaktif Kementerian Pertanian
Lampiran F.2.4	Rincian Permasalahan dalam Aplikasi E Rekon LK
Lampiran F.2.6.1	Monitoring Tunda Bayar Ditjen Tanaman Pangan TA 2018
Lampiran F.2.6.2	Monitoring Tunda Bayar Ditjen Tanaman Pangan TA 2019
Lampiran F.2.9	Rincian Luas Tanah yang Bersertifikat maupun belum Bersertifikat
Lampiran F.2.10.1	Monitoring Daftar Penghapusan
Lampiran F.2.10.2	Monitoring Daftar Persetujuan Pemindahtanganan BMN Kementerian Pertanian
Lampiran F.2.11	Monitoring Daftar Pemanfaatan BMN Kementerian Pertanian
Lampiran F.2.12	Monitoring Daftar Permasalahan terhadap aset-aset BMN Kementerian Pertanian
Lampiran F.2.13.1	Rekapitulasi Pengembalian Sisa Tunggakan DPM-LUEP
Lampiran F.2.13.2	Rekapitulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengembalian DPM-LUEP
Lampiran F.2.15.1	Mekanisme Bank Garansi di Ditjen Tanaman Pangan
Lampiran F.2.15.2	Rekapitulasi penyetoran Jasa Giro pada Ditjen Tanaman Pangan di Rekening Penampungan Lain
Lampiran F.2.16	Analisa Pendapatan
Lampiran F.2.17	Rincian rekapitulasi Input Data Penyaluran Belanja MAK 526 TA 2019
Lampiran F.2.18	Perubahan Koreksi Penilaian Kembali TA 2019 Per Eselon 1 Per Akun
Lampiran F.2.20	Pelaporan Hewan Ternak



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel A.2.1	Rincian Perbandingan Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan (SAIBA)	11
Tabel A.2.2	Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja	15
Tabel A.2.3	Rincian Satuan Kerja di Lingkup Kementerian Pertanian	16
Tabel A.5.1	Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih	19
Tabel A.5.2	Masa Manfaat Aset Tetap	23
Tabel A.5.3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	24
Tabel B.1.1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Eselon1	27
Tabel B.1.2	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	28
Tabel B.1.3	Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	29
Tabel B.1.4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain	30
Tabel B.1.5	Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	30
Tabel B.2.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	32
Tabel B.2.2	Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program	32
Tabel B.2.3	Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	33
Tabel B.3.1	Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	33
Tabel B.3.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Per Eselon 1	34
Tabel B.4.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Per Eselon I	34
Tabel B.4.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang akun Detail	35
Tabel B.4.3	Perbandingan Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	37
Tabel B.4.4	Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang Per Eselon I	38
Tabel B.4.5	Rincian Belanja 526 Ditjen Tanaman Pangan	38
Tabel B.4.6	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Tanaman Buah Berkelanjutan Ditjen Hortikultura	40
Tabel B.4.7	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura	41
Tabel B.4.8	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Sistem Perbenihan Ditjen Hortikultura	41
Tabel B.4.9	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ditjen Hortikultura	42
Tabel B.4.10	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Sistem Perlindungan hortikultura dan Dukungan Manajemen Ditjen Hortikultura	43
Tabel B.4.11	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura	43
Tabel B.4.12	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan	46
Tabel B.4.13	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Dukungan Perlindungan Ditjen Perkebunan	47
Tabel B.4.14	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Tanaman Semusim dan Rempah Ditjen Perkebunan	50
Tabel B.4.15	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ditjen Perkebunan	50

Tabel B.4.16	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Perbenihan Tanaman Ditjen Perkebunan	51
Tabel B.4.17	Pagu dan Realisasi Belanja Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan	51
Tabel B.4.18	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Pengujian Dan Pengawasan Mutu Benih Ditjen Perkebunan	51
Tabel B.4.19	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Ditjen PKH	52
Tabel B.4.20	Target dan Realisasi Belanja 526 Per Kegiatan Ditjen PKH	53
Tabel B.4.21	Target dan Realisasi Belanja 526 Barang Satker Pusat Ditjen PSP	54
Tabel B.4.22	Target dan Realisasi Belanja 526 Alsintan Satker TP Ditjen PSP	54
Tabel B.4.23	Pagu dan Realisasi Belanja 526 OPAL Satker TP Ditjen PSP	55
Tabel B.4.24	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Saprodi Satker DK-TP Ditjen PSP	56
Tabel B.4.25	Realisasi Belanja 526 Uang-SID Ditjen PSP	59
Tabel B.4.26	Target dan Realisasi Belanja 526 Uang -Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen PSP	61
Tabel B.4.27	Target dan Realisasi Belanja 526 Uang- Optimasi Lahan Ditjen PSP	61
Tabel B.4.28	Target dan Realisasi Belanja 526 Uang- SID Perluasan Sawah Ditjen PSP	62
Tabel B.4.29	Target dan Realisasi Belanja 526 Uang- Data Lahan Ditjen PSP	62
Tabel B.4.30	Target dan Realisasi Belanja 526 BEKERJA Badan Litbang	64
Tabel B.4.31	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Barang -BEKERJA Badan Litbang	64
Tabel B.4.32	Pagu dan Realisasi Belanja 526 Uang -BEKERJA Badan Litbang	65
Tabel B.4.33	Lokasi Pembangunan TTP Per Tahun Badan Litbang	65
Tabel B.4.34	Pagu dan Realisasi Pembangunan TTP Badan Litbang	66
Tabel B.4.35	Target Dan Realisasi Pembangunan TTP Badan Litbang	67
Tabel B.4.36	Pagu dan Realisasi Kegiatan Denfarm Badan Litbang	68
Tabel B.4.37	Target Dan Realisasi Kegiatan Denfarm Badan Litbang	68
Tabel B.4.38	Nilai Aset Kegiatan Denfarm Badan Litbang	68
Tabel B.4.39	Pagu dan Realisasi Kegiatan Mandiri Pakan Badan Litbang	69
Tabel B.4.40	Target Dan Realisasi Kegiatan Mandiri Pakan Badan Litbang	69
Tabel B.4.41	Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Akun Badan PPSDMP	69
Tabel B.4.42	Target dan Realisasi Belanja 526 per Output Badan PPSDMP	70
Tabel B.4.43	Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Kegiatan Badan PPSDMP	70
Tabel B.4.44	Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Kegiatan di BKP	75
Tabel B.4.45	Target dan Realisasi Belanja 526 per Output di BKP	76
Tabel B.4.46	Target dan Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani	83
Tabel B.5.1	Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	84
Tabel B.5.2	Rincian Realisasi Belanja Modal Per Eselon I	84
Tabel B.5.1.1	Perbandingan Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	85
Tabel B.5.1.2	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Per Eselon I	85
Tabel B.5.2.1	Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	86
Tabel B.5.2.2	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per Eselon I	86
Tabel B.5.3.1	Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	87
Tabel B.5.3.2	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Eselon 1	87

Tabel B.5.4.1	Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	88
Tabel B.5.4.2	Realisasi Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan Per Eselon 1	88
Tabel B.5.5.1	Perbandingan Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	89
Tabel B.5.5.2	Realisasi Belanja Modal Lainnya Per Eselon 1	89
Tabel B.5.5.3	Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Pengadaan Aset Ekstrakomptabel	89
Tabel B.5.6	Perbandingan Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	90
Tabel C.1	Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018	91
Tabel C.2	Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018	91
Tabel C.3.1	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018	92
Tabel C.3.2	Rincian Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I	92
Tabel C.3.3	Rincian Proyek Hibah pada Setjen	93
Tabel C.3.4	Pertanggungjawaban Nilai LS-Bendahara per Eselon I	94
Tabel C.4.1	Perbandingan Rincian Kas dan Bank pada BLU	95
Tabel C.5.1	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I	95
Tabel C.5.2	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Berasal dari MAK 526 Perolehan TA 2019 yang Dicatat Kembali	96
Tabel C.5.3	Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Satker Badan Karantina Pertanian	97
Tabel C.5.4	Rincian Belanja Dibayar Dimuka Khusus dari Belanja 526	97
Tabel C.6.1	Rincian Pendapatan yang Masih harus Diterima per Satker Ditjen PSP	98
Tabel C.7	Perbandingan Piutang PNBPN per 31 Desember 2019 dan 2018	98
Tabel C.8	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I	99
Tabel C.8.2	Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 2018	99
Tabel C.10	Rincian Penyisihan Piutang Lancar	100
Tabel C.11.1	Rincian Persediaan per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	101
Tabel C.11.2	Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018	102
Tabel C.11.3	Rincian Persediaan Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Pemda per 31 Desember 2019	103
Tabel C.11.4	Rincian Mutasi Persediaan MAK 526 per Eselon I atas Pencatatan Persediaan	103
Tabel C.11.5	Rincian Persediaan MAK 526 per Akun	104
Tabel C.11.6	Rincian Persediaan Yang Telah Diserahkan Kepada Masyarakat Namun Belum Dilengkapi Pertanggungjawaban Yang Memadai	104
Tabel C.11.7	Rincian Persediaan MAK 526 per Akun Berdasarkan Tahun Pengadaan	105
Tabel C.11.8	Perbandingan Belanja Barang 526 dengan Mutasi Tambah Persediaan 526 per Eselon I	105
Tabel C.12	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon 1	106
Tabel C.14	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018	107
Tabel C.14.1	Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2019	107
Tabel C.14.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah per 31 Desember 2019	107

Tabel C.14.3	Rincian Pencatatan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019	109
Tabel C.14.4	Rincian Tanah berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	109
Tabel C.15.1	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	110
Tabel C.15.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	110
Tabel C.15.3	Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan	111
Tabel C.15.4	Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	111
Tabel C.15.5	Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai Aset Ekstrakomtabel	113
Tabel C.15.6	Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	114
Tabel C.16.1	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	114
Tabel C.16.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	114
Tabel C.16.3	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan	116
Tabel C.16.4	Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	116
Tabel C.16.5	Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	119
Tabel C.17.1	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019	119
Tabel C.17.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019	119
Tabel C.17.3	Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan	121
Tabel C.17.4	Rincian Pencatatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019	121
Tabel C.17.5	Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	122
Tabel C.18.1	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	123
Tabel C.18.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	123
Tabel C.18.3	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan	123
Tabel C.18.4	Rincian Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	124
Tabel C.18.5	Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	124
Tabel C.19.1	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019	124
Tabel C.19.2	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019	125
Tabel C.19.3	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan	125
Tabel C.19.4	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	125
Tabel C.19.5	Rincian Pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan per per 31 Desember 2019	126
Tabel C. 20.1	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	126
Tabel C. 21.1	Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud Per Jenis Aset	127
Tabel C. 21.2	Aset Tak Berwujud per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	128

Tabel C. 21.3	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019	128
Tabel C. 21.4	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019	128
Tabel C. 21.5	Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Amortisasi	129
Tabel C. 21.6	Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud dari Belanja Modal	129
Tabel C.22.1	Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	131
Tabel C.22.2	Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019	132
Tabel C.22.3	Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain – Lain per 31 Desember 2019	132
Tabel C.22.4	Rincian Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan	133
Tabel C.23	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019	133
Tabel C. 24	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	133
Tabel C 24.1	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018	134
Tabel C.24.2	Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018	134
Tabel C.25.1	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Eselon I	135
Tabel C.25.2	Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018	135
Tabel D.	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)	137
Tabel D.1	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)	137
Tabel D.2.1	Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018	138
Tabel D.2.2	Rincian Mutasi Beban Pegawai	139
Tabel D.3.1	Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018	140
Tabel D.3.2	Perbedaan atas Beban Persediaan dengan Pemakaian Barang Persediaan	140
Tabel D.4	Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Barang Dan Jasa	143
Tabel D.5.1	Perbandingan Beban Pemeliharaan Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018	148
Tabel D.5.2	Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Pemeliharaan	149
Tabel D.6.1	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018	150
Tabel D.6.2	Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Perjalanan Dinas	152
Tabel D.7.1	Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2019 dan 2018	152
Tabel D.7.2	Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Bantuan Pemerintah	154
Tabel D.8	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018	154
Tabel D.9	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018	155
Tabel D.10	Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk Periode Yang Berakhir per 31 Desember 2019 dan 2018	155
Tabel D.12.1	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	156

Tabel D.12.2	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)	157
Tabel D.13	Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	157
Tabel D.15.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	158
Tabel D.15.2	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO)	159
Tabel D.16	Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018	160
Tabel E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan Periode 31 Desember 2019 dan 2018	161
Tabel E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi Periode 31 Desember 2019 dan 2018	161
Tabel E.4	Transaksi Antar Entitas Periode 31 Desember 2019 dan 2018	163
Tabel E.4.3	Rincian Pengesahan Hibah Langsung	165
Tabel F.2.2.1	Rekapitulasi Proyek Pinjaman	167
Tabel F.2.2.2	Rekapitulasi Komitmen Pinjaman	167
Tabel F.2.2.3	Rekapitulasi Realisasi Pinjaman	168
Tabel F.2.2.4	Rekapitulasi Tujuan Pinjaman	169
Tabel F.2.2.5	Rekapitulasi Komitmen Hibah Terencana	170
Tabel F.2.2.6	Rekapitulasi Realisasi Hibah Terencana	170
Tabel F.2.2.7	Rekapitulasi Komitmen Hibah Langsung	171
Tabel F.2.2.8	Rekapitulasi Realisasi Hibah Langsung	171
Tabel F.2.3.1	Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif	173
Tabel F.2.3.2	Rekapitulasi Neraca Percobaan Satker Inaktif	173
Tabel F.2.5	Neraca Satker Konsolidasi Per 31 Desember 2019 dan 2018	175
Tabel F.2.6.1	Rincian Tagihan Pengadaan Bantuan Alsintan TA. 2018 Yang Belum Dibayarkan	177
Tabel F.2.8	Progress Alih Status TNI Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian TA 2015 – 2020	186
Tabel F.2.9	Rekapitulasi Dokumen Kepemilikan Tanah	187
Tabel F.2.13	Daftar Nomor Rekening DPM-LUEP	189
Tabel F.2.15.1	Piutang (Bank Garansi) Pada Ditjen Hortikultura	191
Tabel F.2.15.2	Piutang (Bank Garansi) Pada Badan Litbang	192
Tabel F.2.18.1	Jumlah Satker yang Melaksanakan Revaluasi BMN	193
Tabel F.2.18.2	Kenaikan Nilai Neraca Hasil Revaluasi BMN	194
Tabel F.2.18.3	Jenis Transaksi BMN Hasil Revaluasi BMN	194
Tabel F.2.18.4	Hasil Revaluasi BMN per Eselon I	194
Tabel F.2.18.5	Jumlah Satker yang Membukukan Hasil Revaluasi BMN	196
Tabel F.2.18.6	Penurunan Nilai Neraca yang Dibukukan dari Hasil Revaluasi BMN	196
Tabel F.2.18.7	Jenis Transaksi BMN yang Dibukukan dari Hasil Revaluasi BMN	197
Tabel F.2.18.8	Hasil Revaluasi BMN yang Dibukukan per Eselon I	197
Tabel F.2.18.9	Kenaikan Nilai Neraca dari Koreksi Hasil Revaluasi BMN	198
Tabel F.2.18.10	Jenis Transaksi BMN dari Koreksi Hasil Revaluasi BMN	199
Tabel F.2.18.11	Koreksi Hasil Revaluasi BMN per Eselon I	199
Tabel F.2.20	Penyertaan Modal Negara Pada Kementerian Pertanian	204



DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR

Gambar B.1 Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2019

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2020

Menteri Pertanian,

SYAHRUL YASIN LIMPO



REPRESENTASI MANAJEMEN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta , 22 Mei 2020

Nomor : R.05/PW.030/M/5/2020
Sifat : Sangat Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Representasi Manajemen atas
Laporan Keuangan Kementerian
Pertanian Tahun 2019

**Yth.: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta 10210**

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, Laporan Perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Kementerian Pertanian memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;

9. Kementerian Pertanian telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkaskan secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Kementerian Pertanian dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
18. Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi Covid-19 dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2019; dan
19. Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua pengungkapan yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi Covid-19 tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019. Bersama ini kami sampaikan pula Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 *Audited* sebagai asersi final Kementerian Pertanian.



Menteri Pertanian

Syahrul Yasin Limpo



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp835.528.496.743,00 atau mencapai 175,39% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp476.395.228.000,00.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp19.424.292.887.561,00 atau mencapai 88,97% dari alokasi anggaran sebesar Rp21.831.606.427.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp89.032.488.278.485,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp4.330.521.255.742,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp21.461.587.935,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp84.090.449.609.192,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp590.055.825.616,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp301.177.306.287,00 dan Rp88.731.310.972.198,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp575.928.029.800,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp23.489.031.101.909,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp(22.913.103.072.109,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp166.821.229.566,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(22.746.281.842.543,00).

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp25.807.319.732.927,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(22.746.281.842.543,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar Rp66.943.545.782.251,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp18.726.727.299.563,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp88.731.310.972.198,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk sampai dengan 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

The logo of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia is a yellow shield with a red border. Inside the shield is a green stylized flame or flower-like symbol. The text "LAPORAN REALISASI ANGGARAN" is written in bold black capital letters across the center of the shield.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% THD ANGGARAN	31 DESEMBER 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	476.395.228.000	835.528.496.743	175,39	703.694.122.290
JUMLAH PENDAPATAN		476.395.228.000	835.528.496.743	175,39	703.694.122.290
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2.555.468.711.000	2.520.263.223.317	98,62	2.430.897.301.335
Belanja Barang	B.4	18.350.711.334.000	16.020.690.039.440	87,30	18.536.529.810.452
Belanja Modal	B.5	925.426.382.000	883.339.624.804	95,45	869.175.725.907
JUMLAH BELANJA		21.831.606.427.000	19.424.292.887.561	88,97	21.836.602.837.694



II. NERACA

KEMENTERIAN PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	266.681.076	348.601.261
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	14.061.000	1.400.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	192.184.569.582	16.728.092.179
Kas pada Badan Layanan Umum	C.4	103.390.209.184	90.650.947.758
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.5	544.750.050.814	7.199.940.494.192
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	1.240.370.197	39.400.000
Piutang Bukan Pajak	C.7	112.842.918.084	101.880.036.002
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.8	21.474.181.169	24.227.611.824
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.9	1.263.092.570	508.804.231
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar	C.10	(26.292.955.894)	(20.195.157.639)
Persediaan	C.11	3.379.388.077.960	889.356.431.578
JUMLAH ASET LANCAR		4.330.521.255.742	8.303.486.661.386
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan	C.12	21.641.534.363	9.199.782.860
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi			
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	(179.946.428)	(132.861.669)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		21.461.587.935	9.066.921.191

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
ASET TETAP			
Tanah	C.14	76.634.434.244.419	11.608.949.370.893
Peralatan dan Mesin	C.15	6.548.535.528.157	6.225.890.240.250
Gedung dan Bangunan	C.16	5.968.056.274.799	4.734.934.884.794
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	636.398.426.494	608.350.078.280
Aset Tetap Lainnya	C.18	72.003.399.911	72.295.320.166
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	109.794.054.699	14.198.879.909
Akumulasi Penyusutan	C.20	(5.878.772.319.287)	(6.058.717.115.122)
JUMLAH ASET TETAP		84.090.449.609.192	17.205.901.659.170
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	94.884.700.643	92.020.243.837
Aset Lain-lain	C.22	772.510.080.456	716.975.689.013
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(277.338.955.483)	(267.250.832.428)
JUMLAH ASET LAINNYA		590.055.825.616	541.745.100.422
JUMLAH ASET		89.032.488.278.485	26.060.200.342.169
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	295.808.434.356	247.540.754.802
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	5.102.190.855	4.991.253.179
Uang Muka dari KPPN	C.26	266.681.076	348.601.261
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		301.177.306.287	252.880.609.242
JUMLAH KEWAJIBAN		301.177.306.287	252.880.609.242
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	88.731.310.972.198	25.807.319.732.927
JUMLAH EKUITAS		88.731.310.972.198	25.807.319.732.927
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		89.032.488.278.485	26.060.200.342.169

The logo of Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry is a yellow octagonal shield with a grey border. Inside the shield is a red circular band. In the center of the shield is a green stylized plant with five leaves and a purple crescent-shaped base.

LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	575.928.029.800	505.882.376.741
JUMLAH PENDAPATAN		575.928.029.800	505.882.376.741
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.536.610.660.611	2.436.911.825.470
Beban Persediaan	D.3	475.494.311.401	534.795.883.074
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.259.328.500.767	3.642.207.825.041
Beban Pemeliharaan	D.5	289.308.159.594	269.415.153.972
Beban Perjalanan Dinas	D.6	2.157.586.168.979	1.907.412.856.604
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	13.889.019.897.241	5.009.427.912.150
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	875.459.266.153	771.362.654.956
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	6.224.137.163	2.345.388.111
JUMLAH BEBAN		23.489.031.101.909	14.573.879.499.378
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(22.913.103.072.109)	(14.067.997.122.637)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.10		
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	(111.749.124.193)	(144.572.660.209)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	8.148.326.869	11.384.732.827
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	119.897.451.062	155.957.393.036
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	278.570.353.759	379.054.338.377
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	304.690.111.793	760.581.735.377
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	26.119.758.034	381.527.397.000
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		166.821.229.566	234.481.678.168
SURPLUS/ (DEFISIT) - LO		(22.746.281.842.543)	(13.833.515.444.469)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN PERTANIAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
EKUITAS AWAL	E.1	25.807.319.732.927	18.462.335.723.500
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(22.746.281.842.543)	(13.833.515.444.469)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	6.012.466.860	779.470.625
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	53.236.319.515	0
Selisih Revaluasi Aset	E.3.3	66.730.256.356.574	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.4	143.537.164.072	(18.361.046.098)
Lain-lain	E.3.5	10.503.475.230	(40.762.028.933)
Jumlah		66.943.545.782.251	(58.343.604.406)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	18.726.727.299.563	21.236.843.058.302
EKUITAS AKHIR	E.5	88.731.310.972.198	25.807.319.732.927

The logo of Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry is a yellow shield-shaped emblem with a grey border. Inside the shield is a pink circular band. At the center of the emblem is a green stylized plant or tree with five leaves and a purple curved line at the bottom, resembling a smile.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Entitas berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 mempunyai visi *“Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani”*. Dalam rangka mewujudkan visi ini, maka misinya adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan kedaulatan pangan.
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian.
- Mewujudkan kesejahteraan petani.
- Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Kelembagaan Kementerian Pertanian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
2. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan lainnya.
4. Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman hortikultura lainnya.
5. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya.
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
7. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian.

9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
10. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan.
11. Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

Kementerian Pertanian dalam melaksanakan visi dan misinya mempunyai program Bantuan Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :06 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, bentuk Bantuan Pemerintah meliputi:

1. Pemberian Penghargaan. Fungsi Penghargaan diberikan untuk pembentukan perilaku perseorangan, dosen, mahasiswa/siswa/alumni, santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, penyuluh pertanian, petani, petani milenial, petani andalan, santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok tani dan/ atau gabungan kelompok tani, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, UPJA, sehingga memiliki kebanggaan terhadap profesi yang ditekuni dan kuatnya motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi mencapai swasembada pangan dan pertanian.
2. Beasiswa. Bantuan diberikan kepada bukan Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kompetensi generasi muda di bidang pertanian berupa bantuan Beasiswa Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian.
3. Bantuan Operasional. Bantuan diberikan kepada petani, petani andalan, petani milenial, santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, mahasiswa/siswa/alumni, pemuda tani, yang tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau Lembaga pemerintah/ nonpemerintah sebagai bentuk fasilitasi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan operasional usaha tani serta meningkatkan kinerja dan produktivitas di lahan pertanian.
4. Bantuan Sarana/Prasarana. Bantuan Pemerintah kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah/ nonpemerintah, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan untuk meningkatkan aktivitas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta mampu memenuhi kebutuhan utama/dasar kegiatan usahatani.
5. Bantuan Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan. Bantuan diberikan kepada kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, kelompok masyarakat lainnya, lembaga pemerintah, dan/ atau lembaga

nonpemerintah dalam bentuk uang atau barang untuk fasilitasi peningkatan kebutuhan dasar penopang kegiatan usaha tani di daerah.

6. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Bantuan tersebut dalam bentuk uang atau barang diberikan kepada perseorangan, rumah tangga miskin, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelompok masyarakat, santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, kelompok santri tani milenial atau pemuda keagamaan lainnya, petani milenial, petani andalan, kelompok petani milenial, kelompok petani andalan, Lembaga pemerintah, dan/atau Lembaga nonpemerintah sebagai stimulan usaha, motor penggerak utama dalam mengatasi akses pembiayaan dan permodalan produksi pertanian serta pemulihan atas resiko usaha tani yang dialami karena bencana kekeringan dan puso.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pertanian di atas, sudah diterbitkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis Bantuan Pemerintah sesuai dengan karakteristik Eselon I terkait. Peraturan tersebut dapat dijelaskan pada **Lampiran A.1**.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Pertanian.

Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Kementerian Pertanian termasuk didalamnya jenjang struktural dibawah Kementerian Pertanian seperti Eselon I, Sekretariat Wilayah, serta Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) laporan keuangan seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian melalui aplikasi e-Rekon LK per tanggal 3 Mei 2020.

Pendekatan yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan yaitu dengan cara:

1. Proses kapitalisasi aset tetap dilakukan melalui pengiriman secara elektronik dari aplikasi SIMAK-BMN secara berjenjang.
2. Satker melakukan unggah (*upload*) data berupa Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA berbentuk file kirim ke KPPN yang sudah melalui proses verifikasi oleh Tim Verifikator dan reviu oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
3. Pengumpulan data melalui pengunduhan dari Aplikasi e-Rekon-LK keluaran Kementerian Keuangan, dimana Satker melakukan upload data berupa Arsip Data Komputer (ADK) ke Aplikasi e-Rekon-LK untuk kemudian diunduh secara berjenjang melalui Aplikasi e-Rekon-LK tingkat konsolidasi. Pada penyusunan LK Tahun 2019 ini diunduh berdasarkan Aplikasi e-Rekon-LK tanggal 3 Mei 2020.

Sesuai dengan buku Nota Keuangan APBN, pada tahun 2019 Kementerian Pertanian menerima alokasi Pagu Anggaran Awal APBN senilai Rp21.686.516.683.000,00. Selama periode berjalan, Kementerian Pertanian telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai

dengan arahan pimpinan di kementerian, kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 jumlah pagu anggaran yang tercatat senilai Rp21.831.606.427.000,00. Adapun rincian perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi yang tercatat Laporan Keuangan (SAIBA) pada Tahun 2019 pada Tabel A.2.1.

Tabel A.2.1 Rincian Perbandingan Pagu Anggaran Awal (Nota Keuangan APBN) dan Revisi Laporan Keuangan (SAIBA) Tahun 2019

(dalam rupiah)

No	Eselon I	Nilai Pagu Awal	Revisi Pagu	Selisih
1	SETJEN	1.434.152.891.000	1.787.690.530.000	353.537.639.000
2	ITJEN	94.408.464.000	94.136.261.000	(272.203.000)
3	DITJEN TAN PANGAN	6.010.019.254.000	5.928.348.242.000	(81.671.012.000)
4	DITJEN HORTIKULTURA	1.040.378.419.000	1.040.063.787.000	(314.632.000)
5	DITJEN PERKEBUNAN	1.114.218.315.000	1.116.345.160.000	2.126.845.000
6	DITJEN PKH	2.073.121.296.000	2.089.592.037.000	16.470.741.000
7	DITJEN PSP	4.927.538.742.000	4.646.356.942.000	(281.181.800.000)
8	BADAN LITBANG	1.865.476.595.000	1.907.162.394.000	41.685.799.000
9	BADAN PPSDMP	1.595.698.560.000	1.602.896.004.000	7.197.444.000
10	BKP	678.688.925.000	679.706.664.000	1.017.739.000
11	BARANTAN	852.815.222.000	939.308.406.000	86.493.184.000
	JUMLAH	21.686.516.683.000	21.831.606.427.000	145.089.744.000

Berdasarkan tabel di atas, pagu pada Tahun 2019 Kementerian Pertanian mengalami kenaikan. Dasar hukum penetapan dan faktor yang mempengaruhi perubahan per Eselon I dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Sekretariat Jenderal

- a. Penambahan pada RM melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Penambahan tersebut untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%. Kekurangan dipenuhi melalui realokasi anggaran antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

- b. Penambahan Anggaran HLN pada Satker PSE – KP senilai Rp1.776.016.000,00. Ditetapkan melalui Surat Plh. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Nomor: S-3248/WPB.13/BD.01.03/2019 tanggal 23 Desember 2019.

- 1) Pendorong dana (ACFIGR) Register 2YYMH8ZA jumlah 340.750AUD name Project No.AGB/2012/099 Improving milk supply, competitiveness and livelihoods in smallholder dairy chains in Indonesia No register;

- 2) Pendorong dana IFPRI Register 2DC3X2BA name Project No.2019x019.ICA Inclusive Agriculture Value Chain Financing;
 - 3) Pendorong Australia Centre for internasional Agricultural Research (ACIAR) name project Agriculture Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia Upland Landscape Register 2JNEH3FA jumlah 228.743AUD dan Pendorong dana (ICASEPS) Register 2QKBB1PA jumlah 136.448AUD name Project Development of Area-wide Management Approaches for Fruit Flies in Mango For Indonesia And The Asia –Pacific Region(ICASEPS)
2. Inspektorat Jenderal
- Pengurangan RM sebagai dukungan untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
3. Ditjen Tanaman Pangan
- Pengurangan RM sebagai dukungan untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
4. Ditjen Hortikultura
- Pengurangan RM sebagai dukungan untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
5. Ditjen Perkebunan
- a. Pengurangan RM sebagai dukungan untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
 - b. Penambahan RM yang berasal dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) untuk Biaya Penagihan/Collecting Fee dan Pengendalian, Percepatan Pengembalian Pinjaman Petani Proyek PIR/UPP Perkebunan TA. 2019. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1420/AG/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

6. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Penambahan RM untuk memenuhi kekurangan Belanja Pegawai Ditjen PKH yang berasal dari realokasi anggaran antar Eselon I lingkup Kementan. Tambahan Anggaran dialokasikan ke 20 Satker Ditjen PKH. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1607/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
- b. Penambahan PNBPN pada 8 Satker Ditjen PKH.
- c. Penambahan BLU pada Satker BBIB Singosari dan Pusvetma. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1437/AG/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

7. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengurangan RM sebagai dukungan untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

8. Badan Litbang Pertanian dipengaruhi oleh :

- a. Pengurangan RM sebagai dukungan untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai sehubungan dengan kenaikan Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Pertanian yang semula senilai 70% menjadi 80%, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tanggal 14 November 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1602/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
- b. Perubahan anggaran PLN Project SMARTD berupa Luncuran, Percepatan dan Droploan pada Tahun 2019. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-818/AG/2019 tanggal 14 Mei 2019, Nomor: S-337/AG/2019 tanggal 28 Februari 2019, dan Nomor: S-2287/AG/2019 tanggal 8 November 2019.
- c. Penambahan anggaran PNBPN pada 62 Satker Badan Litbang. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-337/AG/2019 tanggal 28 Februari 2019 Nomor: S-384/AG/2019 tanggal 11 Maret 2019, Nomor: S-1493/AG/2019 tanggal 16 Agustus 2019, dan Nomor: S-2035/AG/2019 tanggal 18 Oktober 2019.
- d. Penambahan Anggaran Hibah Luar Negeri (HLN) pada 18 Satker Badan Litbang Pertanian ditetapkan melalui:
 - 1) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh Nomor: S-2452/WPB.01/2019 tanggal 23 Desember 2019.
 - 2) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Yogyakarta Nomor: S-1934/WPB.15/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - 3) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Selatan Nomor: S-3041/WPB.19/BD.02/2019 tanggal 30 Desember 2019.
 - 4) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. NTB Nomor: S-1229/WPB.23/2019 tanggal 31 Desember 2019.

- 5) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. NTT Nomor: S-1528/WPB.24/2019 tanggal 30 Desember 2019.
 - 6) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumsel Nomor: S-023/WPB.07/2020 tanggal 17 Januari 2020.
 - 7) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta Nomor: S-121/WPB.12/2020 tanggal 17 Januari 2020.
 - 8) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Nomor: S-3155/WPB.13/BD.01.03/2019 tanggal 13 Desember 2019.
 - 9) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Riau Nomor: S-2026/WPB.04/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - 10) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur Nomor: S-4820/WPB16/2019 tanggal 17 Desember 2019.
 - 11) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Timur Nomor: S-5169/WPB.16/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - 12) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Nomor: S-3403/WPB.13/BD.0103/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - 13) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur Nomor: S-1629/WPB.20/2019 tanggal 27 Desember 2019.
 - 14) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Nomor: S-1539/WPB.13/BD.01.03/2019 tanggal 28 Juni 2019.
 - 15) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Nomor: S-3148/WPB.13/BD.01.03/2019 tanggal 23 Desember 2019.
 - 16) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Tengah Nomor: S-5145/WPB.14/BD.0103/2019 tanggal 30 Desember 2019.
 - 17) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat Nomor: S-3302/WPB.13/BD.01.03/2019 tanggal 26 Desember 2019.
 - 18) Surat Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. Jawa Barat Nomor: S-3476/ WPB.13/BD.01.03/2019 tanggal 27 Desember 2019.
9. BPPSDMP dipengaruhi oleh:
- a. Penambahan PLN pada Project SIMURP senilai Rp8.818.516.000,00 dan Project YESS senilai Rp3.419.867.000,00. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1639/AG/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
 - b. Pengurangan anggaran PLN yang disebabkan oleh Droploan Project Readsni senilai Rp12.094.508.000,00. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-2548/AG/2019 tanggal 12 Desember 2019.
 - c. Penambahan anggaran PNPB pada Satker PPMKP Ciawi dan Satker BPPSDMP senilai Rp6.133.040.000,00. Selain itu pada Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa/Palembang, POLBANGTAN Malang, POLBANGTAN Medan dan POLBANGTAN Gowa, senilai Rp920.529.000,00. Pengesahan melalui :
 - 1) Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-544/AG/2019 tanggal 4 April 2019.
 - 2) Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-2038/AG/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

- 3) Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-2226/AG/2019 tanggal 6 November 2019.
10. Badan Ketahanan Pangan
 Penambahan RM untuk memenuhi kekurangan Belanja Pegawai BKP yang berasal dari realokasi anggaran antar Eselon I. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1606/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
11. Badan Karantina Pertanian
 - a. Penambahan RM untuk memenuhi kekurangan Belanja Pegawai Badan Karantina Pertanian yang berasal dari realokasi anggaran antar Eselon I lingkup Kementan. Ditetapkan melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-1606/AG/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
 - b. Penambahan anggaran PNBPN Badan Karantina Pertanian.
 - 1) Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-2060/AG/2019 tanggal 21 Oktober 2019.
 - 2) Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor: S-2584/AG/2019 tanggal 13 Desember 2019.

Keterangan penjelasan kenaikan pagu:

RM= sumber dana rupiah murni

PLN = sumber dana pinjaman luar negeri

BLU = sumber dana Badan Layanan Umum

PNBP = sumber dana PNBP

Tabel A.2.2 Pagu Anggaran dan Jumlah Satuan Kerja yang Terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Tahun 2019

Tahun Anggaran	Jumlah Satker	Jenis Sumber Dana
		APBN (Rp)
2019	636	21.831.606.427.000
2018	632	24.038.510.833.000
2017	768	22.112.685.629.000

Jumlah satuan kerja di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2019 sebanyak 636 satker (DIPA), termasuk Satker Konsolidasi. Satker Konsolidasi dibentuk dalam rangka menyajikan jumlah nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada TA 2017 dan 2018, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 dan Nomor : S-892/PB/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Kementerian Pertanian sudah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Satker Konsolidasi sudah melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) pada LK 2018 dan Semester I Tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA.
2. Setiap satker yang memiliki BMN obyek IP melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Unaudited*) menggunakan aplikasi SIMAK BMN.

Perkembangan pencatatan hasil IP dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam penjelasan Calk Pengungkapan Lainnya F.2.18, halaman 188.

Satker Konsolidasi selain menyajikan nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (*revaluasi*) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian juga menyajikan nilai koreksi akun Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat (526) ke akun Belanja Dibayar Dimuka dikarenakan dokumen pendukung pertanggungjawaban dalam proses pemenuhan.

Pembentukan satker konsolidasi mengacu pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Pembentukan Satker Konsolidasi Pada Laporan keuangan TA 2018 (*Audited*).

Tabel A.2.3 Rincian Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pertanian TA 2019

No	Kode Eselon I	Nama Eselon I	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
1	01	Sekretariat Jenderal	15	-	-	-	-	-	-	-	15
2	02	Inspektorat Jenderal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	03	Ditjen Tanaman Pangan	1	-	2	-	33	-	38	-	74
4	04	Ditjen Hortikultura	1	-	-	-	34	-	51	-	86
5	05	Ditjen Perkebunan	1	-	4	-	33	-	64	-	102
6	06	Ditjen Peternakan	1	-	23	-	33	-	-	-	57
7	08	Ditjen Prasarana & Sarana Pertanian	1	-	-	-	55	-	37	-	93
8	09	Badan Litbang	1	-	63	-	-	-	-	-	64
9	10	Badan PPSDMP	1	-	20	-	34	-	-	-	55
10	11	BKP	1	-	-	-	34	-	-	-	35
11	12	Badan Karantina	1	-	52	-	-	-	-	-	53
12	55	Satker Konsolidasi	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah			26	-	164	-	256	-	190	-	636

Keterangan:

M : Menyampaikan LK

TM : Tidak Menyampaikan LK

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya

untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Satker melakukan unggah (*upload*) data berupa Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA ke Aplikasi e-Rekon-LK, kemudian entitas pelaporan konsolidasi termasuk Kementerian mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) melalui pengunduhan dari Aplikasi e-Rekon-LK tingkat konsolidasi. Aplikasi e-Rekon-LK belum bisa menyajikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan CaLK antara lain: analisa belanja/pendapatan LRA dengan LO maupun rincian aset per NUP seperti yang bisa disajikan oleh aplikasi SIMAK-BMN.

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Pertanian menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat senilai pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau senilai nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat senilai nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan

Kuangan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Beban yang berasal dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (526) dan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang dan jasa (57) diakui dan disajikan sebagai beban apabila sudah diterbitkan berita acara serah terima (BAST).

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- 2) Kas Lainnya di BLU digunakan menampung dana yang sepenuhnya belum mutlak menjadi penerimaan satker BLU diantaranya adalah penerimaan penjualan layanan yang ada pada satker BLU yang pada saat uang diterima oleh satker BLU namun pelanggan belum menerima secara penuh layanan dari satker BLU selain menampung penerimaan yang belum bisa diakui menjadi penerimaan satker BLU.
- 3) Kas pada Badan Layanan Umum merupakan rekening operasional yang berasal dari penerimaan satker BLU yang sudah mutlak menjadi penerimaan satker BLU. Kas BLU meliputi saldo uang tunai, saldo rekening dan deposito yang berada dibawah tanggung jawab bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satker Badan Layanan Umum (BLU).
- 4) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan senilai nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat senilai nilai nominal.
- 5) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Tabel A.5.1 Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Kementerian Pertanian

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 7) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar (kapitalisasi) apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- c) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP Sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada peraturan tersebut pada Pasal 12 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

1. Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526111);
2. Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526112);
3. Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526113);
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526114);
5. Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526115);
6. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526211);
7. Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemda (526212); dan
8. Belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526311).

Sedangkan pada Pasal 36 bahwa persediaan yang langsung diserahkan kepada pihak penerima, transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/pemda dibuktikan dengan dokumen sumber pengeluaran persediaan untuk:

- a) Satuan Kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dapat berupa:
- a. BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja;
 - b. BAST Persediaan antara kepala satuan kerja atau PPK dengan penerima;
 - c. BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD; atau
 - d. Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.
- b) Kantor Pusat dan Kantor Daerah dapat berupa:
- (1) Surat Keputusan Hibah;
 - (2) BAST Persediaan antara Eselon I dengan penerima/SKPD;

- (3) BAST Persediaan antara kepala satuan kerja/PPK dengan penerima;
- (4) BAST Persediaan antara pihak pelaksana pengadaan dengan penerima dan diketahui oleh satuan kerja; atau
- (5) Surat pernyataan persediaan telah diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah dari Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang ditunjuk.

Disamping itu, Pasal 43 menjelaskan bahwa seluruh pelaporan persediaan pada tanggal pelaporan dicatat berdasarkan *opname* fisik. Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah Persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Persediaan yang belum dipakai. *Opname* fisik Persediaan sebagaimana dimaksud dilakukan secara sensus per semester atau periode laporan.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan No : S-1984/PB/2017 Tanggal 21 Februari 2017 Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526) berupa uang yang meliputi:

Belanja Tanah Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526121)
Belanja Alsin Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526122)
Belanja Gedung & Bangunan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526123)

Belanja Jalan, Irigasi dan Jringan Untuk Diserahkan Kpd Masy/Pemda dalam bentuk uang (526124)

Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah dalam bentuk uang (526312)

Hal ini dipertegas melalui Keputusan Dirjen Perbendaharaan No KEP-154/PB/2019 tentang Perubahan Kedua atas KEP-311/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 Pasal 16, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah berupa uang yang meliputi:

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2019), penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

- (3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
- (4) PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Sedangkan dalam Pasal 19, mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah berupa barang adalah Mekanisme penyerahan BMN dari satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini untuk lingkup Kementerian Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 1/Permentan/RC.110/12/2018 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 Pasal 31 juga menyatakan bahwa Penerima Bantuan Pemerintah harus membuat laporan fisik dan keuangan kegiatan termasuk permasalahan atau kendala yang dihadapi dan menyampaikan kepada Tim Teknis daerah kabupaten/ kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.

b. Aset Tetap

- 1) Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 3) Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- 4) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- 5) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.

- 6) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca.
- 7) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan.

c. Penyusutan Aset Tetap

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel A.5.2. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa,

kerjasama pemanfaatan BMN) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 788/Kpts/PL.310/11/2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang Kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagai berikut :

Kegiatan		Pengelola Barang		
		KPKNL	Kanwil DJKN	PKNSI
Jenis dan Nilai BMN		Tanah dan Bangunan		
		sd 5 M	>5 sd 10 M	>10 sd 25 M
		Selain Tanah dan Bangunan		
		sd 2,5	>2,5 sd 5 M	>5 sd 10M
a.	Mendatangi surat pernyataan, surat keterangan, dan naskah dinas lain terkait PSP BMN	Satker	Satker	Satker
b.	Mengusulkan sewa	Satker	Eselon I	Sekjen
c.	Penetapan pelaksana sewa dan penandatanganan perjanjian sewa	Satker	Satker	Satker
d.	Mengusulkan pinjam pakai	Satker	Eselon I	Sekjen
e.	Penandatanganan pinjam pakai	Eselon I	Eselon I	Eselon I
f.	Mengusulkan KSP	Satker	Eselon I	Sekjen
g.	Pemilihan Mitra KSP dan penandatanganan perjanjian Kerjasama	Satker	Satker	Satker

e. Piutang Jangka Panjang

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan senilai nilai yang dapat direalisasikan.

f. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan senilai nilai tercatat neto yaitu senilai harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut.

Tabel A.5.3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- 5) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan senilai nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

g. Aset Hewan Ternak dan Tumbuhan

- 1) Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan laporan keuangan periode TA 2019 sedang menyusun konsep kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tumbuhan. Apabila konsep tersebut sudah selesai direncanakan akan disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan untuk dibahas lebih lanjut.
- 2) Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Kepala Biro KP nomor: B-5928/PL.210/A/12/2018 tgl 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/Tanaman Yang Diperoleh Dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal, yaitu senilai nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah senilai Rp835.528.496.743,00 atau mencapai 175,39% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp476.395.228.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut.

Tabel B.1.1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per Eselon I

Eselon I	Nilai Estimasi (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	% Realisasi
SEKRETARIAT JENDERAL	10.839.014.000	16.215.202.142	149,60
INSPEKTORAT JENDERAL	15.000.000	27.288.455	181,92
DITJEN TAN. PANGAN	4.764.561.000	170.953.911.635	3588,03
DITJEN HORTIKULTURA	2.359.444.000	7.405.060.655	313,85
DITJEN PERKEBUNAN	1.701.013.000	6.147.791.609	361,42
DITJEN PKH	92.156.080.000	173.002.518.032	187,73
DITJEN PSP	100.000.000	30.059.356.396	30059,36
BADAN LITBANG	68.734.449.000	83.450.862.006	121,41
BADAN PPSDMP	13.806.825.000	18.056.401.529	130,78
BADAN KET. PANGAN	0	2.998.777.179	~
BADAN KARANTINA	281.918.842.000	327.211.327.105	116,07
JUMLAH	476.395.228.000	835.528.496.743	175,39

Berdasarkan Tabel B.1.1 terdapat pendapatan yang realisasinya melebihi estimasi pendapatan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal karena meningkatnya Pendapatan Administrasi penegakan Hukum yang berasal dari pendapatan Perizinan Pertanian, selain itu dipengaruhi meningkatnya Pendapatan Lain-lain yaitu kontribusi pada Penerimaan Kembali Belanja pegawai Tahun anggaran Yang lalu (TAYL) yang merupakan pengembalian belanja Tunjangan Kinerja pegawai,
2. Inspektorat Jenderal karena adanya pendapatan lelang.
3. Ditjen Tanaman Pangan karena pendapatan penjualan/lelang BMN, meningkatnya jasa pengujian dan sertifikasi pada beberapa UPT, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah, pengembalian belanja MAK 526.
4. Ditjen Hortikultura karena meningkatnya pendapatan atas penyelesaian ganti kerugian negara.
5. Ditjen Perkebunan karena meningkatnya pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya yang signifikan dari TA sebelumnya yaitu terdapat pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan provinsi Jawa Tengah (039153) yang merupakan Penjualan Tebu pada Balai Perbenihan, Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB (239128) merupakan penjualan panen tebu kegiatan penerapan varietas tebu adaptif, Satker BBPPTP Medan merupakan penjualan Agens Pengendali Hayati (APH) dalam Tabung Reaksi, satker BPTP Pontianak, BBPPTP Surabaya dan BBPPTP Ambon.

6. Ditjen Peternakan dan Keswan karena Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah.
7. Ditjen PSP karena meningkatnya pengembalian belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Pendapatan dari pemberian sertifikasi.
8. Badan Litbang Pertanian karena meningkatnya PNBPN yang bersumber dari kegiatan kerjasama yaitu pada satker Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Balai Penelitian Tanaman Serealia, Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian, meningkatnya pendapatan royalti alih teknologi pada satker Balai PATP, meningkatnya penjualan hasil-hasil pertanian dan peternakan, diantaranya penjualan benih-benih komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta bibit-bibit hewan ternak, terdapat Pengembalian PNBPN pada akun 425112 senilai Rp16.017.011.955,00 yang disebabkan kesalahan input nominal pada Setoran SIMPONI senilai Rp16.033.045.000,00 yang seharusnya senilai Rp16.033.045,00 pada Satker Puslitbangbun.
9. BPPSDMP karena meningkatnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBPN yang berlaku pada Kementerian Pertanian, meningkatnya Meningkatnya pendapatan layanan Pendidikan dan atau pelatihan karena adanya optimalisasi kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan atau pelatihan (diklat), meningkatnya pendapatan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran Yang Lalu baik penerimaan kembali belanja pegawai, belanja barang ataupun belanja modal
10. Badan Ketahanan Pangan karena meningkatnya pendapatan yang berasal dari pengembalian perjalanan dinas, pengembalian belanja mak 526, pengembalian DPM-LUEP, pengembalian atas honor narasumber dan moderator dan pengembalian atas kegiatan lainnya.
11. Badan Karantina Pertanian karena meningkatnya pelayanan tindak karantina atas lalu lintas komoditi pertanian tumbuhan dan hewan yang melalui pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan, sesuai sertifikat pelepasan karantina pertanian sebanyak 1.405.128 sertifikat sampai dengan 31 Desember 2019 dan sebanyak 777 sertifikat pelepasan desember 2019 yang disetor ke kas negara TA 2020 serta meningkatnya Tindak Karantina dalam rangka perjalanan tindak karantina ke Instalasi Karantina tumbuhan dan hewan sementara yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Tabel B.1.2 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Kode Akun	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Pendapatan Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	% Realisasi
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) dan Pendapatan dari Penjualan	73.110.000	0	0	0	0,00
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	35.232.353.000	41.883.896.506	0	41.883.896.506	118,88
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	2.772.129.565	0	2.772.129.565	~
4249	Pendapatan BLU Lainnya	0	5.671.093.101	0	5.671.093.101	~
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN. dan luran Badan	63.367.708.000	91.230.087.131	16.017.011.955	75.213.075.176	118,69
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	32.802.058.000	44.559.626.341	0	44.559.626.341	135,84

Kode Akun	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Pendapatan Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Pendapatan Netto (Rp)	% Realisasi
4253	Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	265.857.253.000	282.462.819.223	39.671.700	282.423.147.523	106,23
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	53.964.952.000	56.121.468.127	0	56.121.468.127	104,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	25.076.959.000	49.113.179.202	0	49.113.179.202	195,85
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	5.500.000	11.988.720.303	0	11.988.720.303	217.976,73
4258	Pendapatan Denda	335.000	13.258.118.495	0	13.258.118.495	3.957.647,31
4259	Pendapatan Lain-Lain	15.000.000	252.524.042.404	0	252.524.042.404	1.683.493,62
	Jumlah	476.395.228.000	851.585.180.398	16.056.683.655	835.528.496.743	175,39

Pada Tahun 2019, terdapat mata anggaran estimasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (423141) senilai Rp73.110.000,00 pada pada satker PSEKP, Eselon I Sekretariat Jenderal namun tidak terdapat realisasinya. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam perencanaan, seharusnya memakai mata anggaran pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan (425131).

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU dan Pendapatan BLU Lainnya selalu tidak ada estimasi karena atas tarif pendapatan tersebut belum terakomodir dalam aplikasi penyusunan target PNBK.

Berdasarkan Tabel B.1.2 terdapat beberapa pendapatan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU pada Ditjen Peternakan dan Keswan kepada pihak ketiga secara signifikan berupa penjualan vaksin pada satker Pusat Veteriner Farma senilai Rp.12.871.344.400,00 maupun penjualan semen beku satker Balai Inseminasi Buatan Singosari Ditjen PKH senilai Rp.28.364.933.756,00.
2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU berupa pendapatan dari jasa tindakan BLU satker Pusat Veteriner Farma Ditjen PKH dari instansi lainnya, yaitu:

Tabel B.1.3 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama BLU

Tanggal	SPM	Nama	Uraian	Jumlah
15/01/2019	13	IPB Shigeta Pharmaceutical. PT, Bogor	kerjasama profit sharing kerjasama produksi vaksin kombinasi ND, Ai	281.397.188
22/01/2019	13	Biotis Prima Agrisindo.PT	kerjasama tool manufacturing vaksin Ai	331.490.632
19/03/2019	103	Biotis Prima Agrisindo.PT, Bogor	kerjasama tool manufacturing	411.360.750
28/03/2019	193	BRI	Kerjasama lahan kosong untuk ATM BRI	66.000.000
29/05/2019	255	PT Jazerah	Kerjasama pemanfaatan lahan kosong untuk bazar	25.000.000
25/07/2019	318	PT Jazerah	Kerjasama pemanfaatan lahan kosong untuk bazar	3.130.995
25/11/2019	686	PT Indomarco	Kerjasama pemanfaatan lahan kosong	1.653.750.000
Total Pendapatan Kerjasama				2.772.129.565

3. Pendapatan BLU Lainnya pada Ditjen Peternakan dan Keswan merupakan pendapatan dari jasa perbankan berupa penyimpanan uang BLU di bank. Pada satker Balai Inseminasi Buatan Singosari Ditjen PKH senilai Rp.4.467.086.235,00, sedangkan satker Pusat Veteriner Farma senilai Rp.1.204.006.866,00.
4. Pendapatan Denda merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

5. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan merupakan pendapatan dari penjualan, pengelolaan dan pemanfaatan BMN.
6. Pendapatan Jasa Lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari perjalanan Tindak Karantina berupa pemeriksaan karantina diluar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan.
7. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan. dan Pengelolaan yang berasal dari angsuran dan pelunasan TP/TGR
8. Pendapatan lain-lain yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel B.1.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-lain

Kode Akun	Uraian	Nilai Estimasi (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)
4259	Pendapatan Lain-lain		
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TA yang Lalu	15.000.000	3.339.916.030
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TA yang Lalu	0	246.446.184.872
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TA yang Lalu	0	1.949.985.299
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TA yang Lalu	0	696.276.113
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	7.127.120
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	84.552.970
	Jumlah Pendapatan	15.000.000	252.524.042.404

Berikut ini disajikan perbandingan realisasi pendapatan TA 2018 dan TA 2019.

Tabel B.1.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Pendapatan	Realisasi Pendapatan Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Pendapatan Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	41.883.896.506	0	41.883.896.506	35.299.337.681	6.584.558.825
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2.772.129.565	0	2.772.129.565	1.157.147.834	1.614.981.731
Pendapatan BLU Lainnya	5.671.093.101	0	5.671.093.101	3.637.274.394	2.033.818.707
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	91.230.087.131	16.017.011.955	75.213.075.176	74.931.681.662	281.393.514
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	44.559.626.341	0	44.559.626.341	43.353.773.589	1.205.852.752
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	282.462.819.223	39.671.700	282.423.147.523	267.493.327.963	14.929.819.560
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	56.121.468.127	0	56.121.468.127	30.673.919.399	25.447.548.728
Pendapatan Jasa Lainnya	49.113.179.202	0	49.113.179.202	54.656.001.030	(5.542.821.828)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	11.988.720.303	0	11.988.720.303	31.568.808.072	(19.580.087.769)
Pendapatan Denda	13.258.118.495	0	13.258.118.495	7.294.322.319	5.963.796.176
Pendapatan Lain-Lain	252.524.042.404	0	252.524.042.404	153.628.528.347	98.895.514.057
Jumlah	851.585.180.398	16.056.683.655	835.528.496.743	703.694.122.290	131.834.374.453

Terdapat pengembalian Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan yang secara signifikan dipengaruhi pengembalian senilai Rp16.017.011.955,00 karena kesalahan pencatatan dokumen setoran SIMPONI senilai Rp16.033.045.000,00 yang seharusnya senilai Rp16.033.045,00 pada Badan Litbang Pertanian.

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan senilai Rp131.834.374.453,00 atau 18,73% dibandingkan TA 2018. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya Pendapatan Jasa Layanan Umum merupakan pelayanan BLU pada Ditjen Peternakan dan Keswan kepada pihak ketiga secara signifikan berupa penjualan vaksin pada satker Pusat Veteriner Farma senilai Rp.12.871.344.400,00 maupun penjualan semen beku satker Balai Inseminasi Buatan Singosari Ditjen PKH senilai Rp.28.364.933.756,00.
2. Meningkatnya Pendapatan Hasil Kerjasama BLU berupa pendapatan dari jasa tindakan BLU satker Pusat Veteriner Farma Ditjen PKH dari instansi lainnya seperti yang disajikan dalam tabel B.1.3 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama BLU senilai Rp2.772.129.565,00.
3. Meningkatnya Pendapatan BLU Lainnya pada Ditjen Peternakan dan Keswan merupakan pendapatan dari jasa perbankan berupa penyimpanan uang BLU di bank. Pada satker Balai Inseminasi Buatan Singosari Ditjen PKH senilai Rp.4.467.086.235,00, sedangkan satker Pusat Veteriner Farma senilai Rp.1.204.006.866,00.
4. pendapatan jasa layanan BLU, secara signifikan berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya BLU berupa penjualan vaksin pada satker Pusat Veteriner Farma maupun penjualan semen beku satker Balai Inseminasi Buatan Singosari Ditjen PKH.
5. Meningkatnya pendapatan BLU lainnya berupa pendapatan dari jasa perbankan berupa penyimpanan uang BLU di bank..
6. Meningkatnya pendapatan hasil kerjasama BLU satker Pusat Veteriner Farma Ditjen PKH dari instansi lainnya seperti penjelasan Tabel B.2 di atas.
7. Meningkatnya pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang berasal dari meningkatnya kontrak kerjasama yang dikelola oleh Badan Litbang Pertanian dan Badan PSDM Pertanian.
8. Meningkatnya pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan merupakan pendapatan yang berasal dari perjalanan Tindak Karantina berupa pemeriksaan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan, jasa *on side review* kunjungan kelayakan ke tempat importir ternak.
9. Meningkatnya Pendapatan Denda merupakan penerimaan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
10. Meningkatnya pendapatan lain-lain yang merupakan penerimaan kembali belanja atas tahun anggaran sebelumnya, terutama merupakan penerimaan kembali atas belanja barang tahun anggaran yang lalu.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi PNBK per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.1.**

B.2. BELANJA

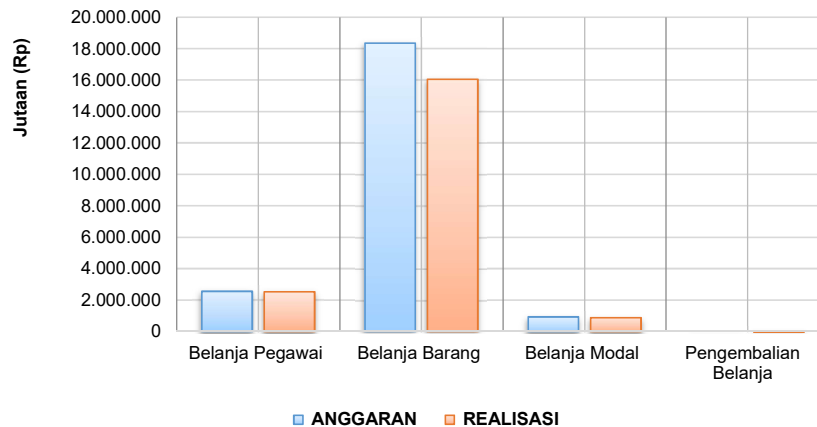
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah senilai Rp19.424.292.887.561,00 atau 88,97% dari anggaran belanja senilai

Rp21.831.606.427.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel B.2.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

Uraian	Periode yang berakhir 31 Desember 2019				% Real Anggaran
	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	
Belanja Pegawai	2.555.468.711.000	2.521.480.959.336	1.217.736.019	2.520.263.223.317	98,62
Belanja Barang	18.350.711.334.000	16.056.626.642.690	35.936.603.250	16.020.690.039.440	87,30
Belanja Modal	925.426.382.000	883.358.821.504	19.196.700	883.339.624.804	95,45
Jumlah Belanja	21.831.606.427.000	19.461.466.423.530	37.173.535.969	19.424.292.887.561	88,97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Gambar B.2



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2019 ditunjukkan pada Tabel B.2.2.

Tabel B.2.2 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

Uraian Program Kementerian Pertanian	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi netto (Rp)	% Realisasi
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1.787.690.530.000	1.759.201.893.171	1.550.310.553	1.757.651.582.618	98,32
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	94.136.261.000	90.647.593.101	653.977.728	89.993.615.373	95,60
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	5.928.348.242.000	4.700.711.407.378	3.262.358.187	4.697.449.049.191	79,24
Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1.040.063.787.000	949.830.992.113	5.154.843.377	944.676.148.736	90,83
Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1.116.345.160.000	1.073.909.521.563	1.168.048.350	1.072.741.473.213	96,09
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2.089.592.037.000	1.969.343.021.974	7.707.858.804	1.961.635.163.170	93,88

Uraian Program Kementerian Pertanian	Anggaran (Rp)	Realisasi bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi netto (Rp)	% Realisasi
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	4.646.356.942.000	4.012.581.109.267	3.991.827.128	4.008.589.282.139	86,27
Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1.907.162.394.000	1.818.349.692.708	1.384.777.534	1.816.964.915.174	95,27
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	910.455.608.000	850.436.131.575	3.970.478.640	846.465.652.935	92,97
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	679.706.664.000	661.031.848.779	1.369.431.165	659.662.417.614	97,05
Program Peningkatan Kualitas Pengkantinnaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	939.308.406.000	931.794.104.798	199.771.994	931.594.332.804	99,18
Program Pendidikan Pertanian	692.440.396.000	643.629.107.103	6.759.852.509	636.869.254.594	91,97
Jumlah Belanja	21.831.606.427.000	19.461.466.423.530	37.173.535.969	19.424.292.887.561	88,97

Tabel rincian Realisasi per jenis belanja berdasarkan program disajikan pada **Lampiran B.2.**

Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2018 senilai Rp21.836.602.837.694,00 maka realisasi belanja Tahun 2019 senilai Rp19.424.292.887.561,00 mengalami penurunan senilai Rp2.412.309.950.133,00 atau 11,05%. Hal ini disebabkan secara signifikan dipengaruhi oleh penurunan realisasi anggaran belanja bantuan pemerintah.

Tabel B.2.3 Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Pegawai	2.555.468.711.000	2.520.263.223.317	2.530.327.123.000	2.430.897.301.335	89.365.921.982
Belanja Barang	18.350.711.334.000	16.020.690.039.440	20.570.035.536.000	18.536.529.810.452	(2.515.839.771.012)
Belanja Modal	925.426.382.000	883.339.624.804	938.148.174.000	869.175.725.907	14.163.898.897
Jumlah	21.831.606.427.000	19.424.292.887.561	24.038.510.833.000	21.836.602.837.694	(2.412.309.950.133)

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp2.520.263.223.317,00 dan Rp2.430.897.301.335,00. Realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan senilai Rp89.365.921.982,00 atau 3,68% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi penambahan pegawai CPNS.

Jumlah dan komposisi pegawai per eselon 1 berdasarkan jabatan pegawai dapat dilihat pada **Lampiran B.3.1.**

Tabel B.3.1. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	1.286.792.271.542	781.212.716	1.286.011.058.826	1.267.008.551.771	19.002.507.055
Belanja Gaji & Tunjangan Non PNS	540.200.000	0	540.200.000	516.126.000	24.074.000

Uraian Belanja Pegawai	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Honorarium	490.600.000	0	490.600.000	2.474.363.200	(1.983.763.200)
Belanja Lembur	43.471.470.900	3.305.850	43.468.165.050	38.819.062.200	4.649.102.850
Belanja Tunj.Khusus & Bel.Pegawai Transito	1.190.186.416.894	433.217.453	1.189.753.199.441	1.122.079.198.164	67.674.001.277
Jumlah	2.521.480.959.336	1.217.736.019	2.520.263.223.317	2.430.897.301.335	89.365.921.982

Realisasi belanja honorarium untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp1.983.763.200,00 dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi perubahan akun belanja honorarium pada Ditjen Perkebunan menjadi akun belanja barang operasional.

Tabel B.3.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per Eselon I

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
SEKRETARIAT JENDERAL	1.286.717.358.000	1.276.147.124.692	489.849.539	1.275.657.275.153	99,14
INSPEKTORAT JENDERAL	23.022.873.000	22.736.337.510	70.995.106	22.665.342.404	98,45
DITJEN TAN. PANGAN	46.940.901.000	41.677.303.393	14.039.617	41.663.263.776	88,76
DITJEN HORTIKULTURA	23.834.531.000	23.649.046.024	5.047.608	23.643.998.416	99,20
DITJEN PERKEBUNAN	69.380.234.000	68.697.247.592	17.548.146	68.679.699.446	98,99
DITJEN PETERNAKAN &KH	145.411.265.000	142.223.360.509	35.944.752	142.187.415.757	97,78
DITJEN PSP	22.453.704.000	22.372.295.469	17.363.893	22.354.931.576	99,56
BADAN LITBANG	480.274.501.000	473.422.907.738	427.402.754	472.995.504.984	98,48
BADAN PPSDMP	147.806.057.000	144.137.111.285	29.349.788	144.107.761.497	97,50
BADAN KET. PANGAN	21.395.550.000	20.027.741.224	17.015	20.027.724.209	93,61
BADAN KARANTINA	288.231.737.000	286.390.483.900	110.177.801	286.280.306.099	99,32
Jumlah	2.555.468.711.000	2.521.480.959.336	1.217.736.019	2.520.263.223.317	98,62

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.3.2**.

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp16.020.690.039.440,00 dan Rp18.536.529.810.452,00.

Tabel B.4.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per Eselon I

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
SEKRETARIAT JENDERAL	446.663.786.000	431.621.644.108	1.060.461.014	430.561.183.094	96,39
INSPEKTORAT JENDERAL	68.113.388.000	65.084.019.392	582.982.622	64.501.036.770	94,70

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
DITJEN TAN. PANGAN	5.788.026.172.000	4.577.005.798.724	3.248.318.570	4.573.757.480.154	79,02
DITJEN HORTIKULTURA	1.009.855.840.000	919.888.252.439	5.149.795.769	914.738.456.670	90,58
DITJEN PERKEBUNAN	1.033.162.714.000	992.137.209.840	1.150.500.204	990.986.709.636	95,92
DITJEN PKH	1.833.785.962.000	1.721.169.573.484	7.671.808.052	1.713.497.765.432	93,44
DITJEN PSP	4.612.051.438.000	3.980.781.964.408	3.974.463.235	3.976.807.501.173	86,23
BADAN LITBANG	1.244.605.236.000	1.176.778.719.296	954.561.780	1.175.824.157.516	94,47
BADAN PPSPMP	1.210.990.588.000	1.110.644.332.617	10.684.703.661	1.099.959.628.956	90,83
BADAN KET. PANGAN	639.569.170.000	622.710.189.399	1.369.414.150	621.340.775.249	97,15
BADAN KARANTINA	463.887.040.000	458.804.938.983	89.594.193	458.715.344.790	98,89
Jumlah	18.350.711.334.000	16.056.626.642.690	35.936.603.250	16.020.690.039.440	87,30

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 belum mencapai kinerja maksimal (dibawah 90%), hal ini disebabkan secara signifikan oleh belum maksimalnya kinerja keuangan pada Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Lebih lanjut dijelaskan pada Ditjen Tanaman Pangan disebabkan terdapatnya pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah dengan realisasi dibawah 90%, yaitu pada kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai (68,41%) dan Padi (57,42%) senilai Rp.86.522.354.618,00. Rendahnya minat petani untuk menanam kedelai dan lebih memilih menanam tanaman yang lebih menguntungkan, pasar kedelai yang tidak menarik, banyak penggunaan kedelai impor, tidak ada jaminan pasar setelah panen, hal tersebut menyebabkan rendahnya realisasi bantuan pemerintah pada komoditas kedelai. Pada kegiatan padi terdapat pengembangan padi rawa (SERASI) di Provinsi Sumatera Selatan (100.000 ha), Kalimantan Selatan (35.000 ha), adapun realisasi bantuan yg diberikan berupa benih padi, dolomit, pupuk hayati, NPK dan herbisida/pestisida, rendahnya realisasi disebabkan telatnya penyelesaian pekerjaan fisik (infrastruktur) mengakibatkan bantuan yang diberikan juga mengalami keterlambatan (tidak bisa dilaksanakan secara maksimal) senilai Rp.957.367.337.324,00.

Sedangkan pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian penyebab tidak maksimalnya realisasi yaitu menurunnya pelaksanaan belanja bantuan pemerintah. Kendala secara signifikan yaitu lahan Survei Investigasi dan Desain (SID) yang disediakan oleh Balai Sumber Daya Lahan Pertanian (BSDLP) sebagian bisa dipergunakan sebagian tidak, dan tidak tercapainya target lahan rawa program OPLAH Selamatkan Rawat Sejahterakan Petani (SERASI) senilai Rp.373.912.811.220,00.

Tabel B.4.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

Uraian Belanja Barang	Anggaran	Realisasi Netto	% Realisasi
Belanja Barang Operasional	460.666.209.000	446.839.099.272	97,00
Belanja Barang Non Operasional	2.575.890.333.000	2.359.077.398.768	91,58
Belanja Barang Persediaan	407.352.861.000	395.860.578.196	97,18
Belanja Jasa	538.245.030.782	457.452.249.406	84,99

Uraian Belanja Barang	Anggaran	Realisasi Netto	% Realisasi
Belanja Pemeliharaan	275.255.118.000	265.117.808.479	96,32
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.345.801.596.218	2.127.767.823.313	90,71
Belanja Perjalanan Luar Negeri	38.201.008.000	29.498.297.111	77,22
Belanja Barang BLU	27.769.853.000	26.239.909.684	94,49
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	4.352.599.543.000	4.085.324.898.632	93,86
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	9.374.065.000	7.809.216.042	83,31
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	7.319.555.717.000	5.819.702.760.537	79,51
Jumlah	18.350.711.334.000	16.020.690.039.440	87,30

Berdasarkan tabel di atas, masih ada realisasi belanja barang akun detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 yang belum mencapai kinerja maksimal (dibawah 90%), yaitu:

1. Belanja Jasa dampak adanya penghematan penggunaan air, listrik, serta penggunaan komunikasi dengan surat dan telepon yang tergantikan penggunaan whatsapp, email, google drive. Hal ini terjadi hampir di seluruh eselon I.
2. Belanja Perjalanan Luar Negeri pada Ditjen Hortikultura karena :
 - a. Kendala visa yang tidak terbit untuk menghadiri *Jeddah International Trade Fair*.
 - b. Kendala kondisi keamanan negara tujuan untuk menghadiri pameran di *Fruit Logistica Hongkong*.
 - c. Kebijakan terkait jangka waktu keberangkatan Tim Reviu GAP Ke China dan India yang semula dianggarkan selama 1 minggu menjadi hanya 3 hari dalam rangka efisiensi anggaran.
 - d. Tidak ada panggilan dari penyelenggara dalam rangka menghadiri pelatihan *Postharvest Technology of Fruit and Vegetables Crops for Developing Countries* di Thailand.
 - e. Kebijakan terkait jangka waktu keberangkatan dalam rangka Kunjungan Kerja Menteri Pertanian ke Argentina yang semula dianggarkan selama 8 hari, pelaksanaannya hanya sampai 5 hari dalam rangka efisiensi anggaran.

Selain itu pada Badan Litbang Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Ditjen Tanaman Pangan disebabkan penurunan perjalanan dinas luar negeri dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan ini berdasarkan penugasan dari tingkat kementerian sesuai dengan perjanjian/event yang tiap tahunnya bervariasi dan tidak dapat diprediksi.

3. Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah Ditjen Tanaman Pangan diakibatkan pengadaan saprodi kegiatan OPAL yang tidak dilaksanakan karena proses untuk membuka blokir sudah periode triwulan IV sehingga proses pengadaan terlalu dekat dengan akhir tahun.
4. Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda pada Ditjen Tanaman Pangan telatnya penyelesaian infrastruktur lahan padi rawa (SERASI) menyebabkan bantuan saprodi juga mengalami keterlambatan (penyerapan tidak maksimal). Selain itu pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, lahan Survei Investigasi dan Desain (SID) yang disediakan oleh Balai Sumber Daya Lahan Pertanian (BSDLP)

sebagian bisa dipergunakan sebagian tidak, dan tidak tercapainya target lahan rawa program OPLAH

Tabel B.4.3 Perbandingan Realisasi Belanja Barang akun Detail untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja Barang	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Barang Operasional	447.079.272.774	240.173.502	446.839.099.272	410.931.790.775	35.907.308.497
Belanja Barang Non Operasional	2.362.213.062.514	3.135.663.746	2.359.077.398.768	2.598.730.879.395	(239.653.480.627)
Belanja Barang Persediaan	395.867.628.108	7.049.912	395.860.578.196	407.287.096.061	(11.426.517.865)
Belanja Jasa	458.157.140.844	704.891.438	457.452.249.406	532.194.619.759	(74.742.370.353)
Belanja Pemeliharaan	265.134.241.530	16.433.051	265.117.808.479	239.173.692.972	25.944.115.507
Belanja Perjalanan DN	2.152.108.722.312	24.340.898.999	2.127.767.823.313	1.876.768.303.423	250.999.519.890
Belanja Perjalanan LN	30.646.258.745	1.147.961.634	29.498.297.111	29.323.067.826	175.229.285
Belanja Barang BLU	26.239.909.684	0	26.239.909.684	16.656.624.578	9.583.285.106
Belanja Barang untuk diserahkan Kepada masyarakat/Pemda	4.087.213.577.707	1.888.679.075	4.085.324.898.632	6.974.830.465.721	(2.889.505.567.089)
Belanja Barang Penunjang DK dan TP untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	7.810.016.542	800.500	7.809.216.042	3.886.900.166	3.922.315.876
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda	5.824.156.811.930	4.454.051.393	5.819.702.760.537	5.446.746.369.776	372.956.390.761
Jumlah	16.056.626.642.690	35.936.603.250	16.020.690.039.440	18.536.529.810.452	(2.515.839.771.012)

Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp2.515.839.771.012,00 atau 13,57% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan secara signifikan oleh menurunnya pelaksanaan belanja bantuan pemerintah.

Realisasi belanja barang non operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp239.653.480.627,00 dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan secara signifikan oleh menurunnya pembayaran honor output kegiatan.

Realisasi belanja barang pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan senilai Rp25.944.115.507,00 dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan secara signifikan oleh meningkatnya pemeliharaan peralatan dan mesin.

Realisasi belanja barang perjalanan dalam negeri untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan senilai Rp250.999.519.890,00 dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan secara signifikan oleh meningkatnya kegiatan monitoring, evaluasi dan supervisi kegiatan bantuan pemerintah.

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 per mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran B.4.1**.

Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Berdasarkan tabel B.4.3 diatas, jumlah realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda MAK 526) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 senilai Rp9.919.180.406.179,00 dikurangi pengembalian belanja senilai Rp6.343.530.968,00

sehingga realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) netto adalah senilai Rp9.912.836.875.211,00 atau 84,86% dari jumlah pagu anggaran senilai Rp11.681.529.325.000,00.

Dari jumlah realisasi belanja MAK 526, dapat dikelompokkan untuk belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp6.904.620.549.722,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp3.008.216.325.489,00.

Tabel B.4.4 Alokasi Belanja 526 Barang dan Uang per Eselon 1

Eselon I	Belanja 526 Uang		Belanja 526 Barang		Grand Total	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Ditjen Tan. Pangan	648.636.973.000	551.900.283.251	4.591.669.557.000	3.538.252.400.223	5.240.306.530.000	4.090.152.683.474
Ditjen Hortikultura	0	0	714.635.003.000	640.855.108.141	714.635.003.000	640.855.108.141
Ditjen Perkebunan	27.960.346.000	23.898.225.524	638.682.254.000	617.843.519.813	666.642.600.000	641.741.745.337
Ditjen PKH	107.197.958.000	105.918.500.000	718.507.927.000	678.208.353.580	825.705.885.000	784.126.853.580
Ditjen PSP	2.365.411.889.000	1.988.460.731.199	1.066.543.751.000	1.000.852.023.549	3.431.955.640.000	2.989.312.754.748
Badan Litbang	61.617.000.000	61.463.000.000	326.447.158.000	299.608.796.175	388.064.158.000	361.071.796.175
Badan PPSDMP	6.015.000.000	5.959.387.500	61.646.809.000	57.714.013.265	67.661.809.000	63.673.400.765
Badan Ket.Pangan	273.250.000.000	270.616.198.015	73.307.700.000	71.286.334.976	346.557.700.000	341.902.532.991
Total	3.490.089.166.000	3.008.216.325.489	8.191.440.159.000	6.904.620.549.722	11.681.529.325.000	9.912.836.875.211

Rincian Jenis Bantuan Pemerintah Berdasarkan program dapat dilihat pada **Lampiran B.4.2.**

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Alokasi Belanja bantuan pemerintah (526) pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2019 yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan realisasi senilai Rp4.091.340.553.176,00 dikurangi pengembalian belanja senilai Rp1.187.869.702,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat netto adalah senilai Rp4.090.152.683.474,00 atau 78,05% dari pagu anggarannya senilai Rp5.240.306.530.000,00. Dari total realisasi belanja MAK 526 secara netto senilai Rp4.090.152.683.474,00 tersebut, dapat dikelompokkan menjadi belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp3.538.252.400.223,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp551.900.283.251,00. Adapun rincian belanja 526 per kegiatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.4.5 Rincian Belanja 526 Ditjen Tanaman Pangan

KEGIATAN		BANPEM		
		BARANG	UANG	JUMLAH
1761	AKABI	77.863.431.425	208.607.109.234	286.470.540.659
611	Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai	51.973.842.950	205.490.484.234	257.464.327.184
612	Fasilitasi Penerapan Budidaya Ubi Kayu	7.198.500.000	0	7.198.500.000
614	Fasilitasi Penerapan Budidaya Kacang Tanah	9.956.895.000	2.516.625.000	12.473.520.000
615	Fasilitasi Penerapan Budidaya Kacang Hijau	2.755.771.875	0	2.755.771.875
616	Fasilitasi Penerapan Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	3.750.000	0	3.750.000

KEGIATAN	BANPEM		
	BARANG	UANG	JUMLAH
617 Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman AKABI	0	0	0
618 Fasilitas Penerapan Budidaya Ubi Jalar Untuk Papua	5.974.671.600	600.000.000	6.574.671.600
1762 SEREALIA	1.147.328.030.511	87.293.704.250	1.234.621.734.761
621 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi	722.742.188.221	87.293.704.250	810.035.892.471
622 Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung	415.529.166.840	0	415.529.166.840
624 Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	6.400.300.450	0	6.400.300.450
627 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Untuk Merauke	2.656.375.000	0	2.656.375.000
1763 PERBENIHAN	1.347.489.167.507	17.895.499.898	1.365.384.667.405
632 Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	1.229.025.800	0	1.229.025.800
633 Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat	1.327.531.677.109	17.895.499.898	1.345.427.177.007
634 Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Sistem	18.728.464.598	0	18.728.464.598
635 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi	0	0	0
636 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung	0	0	0
637 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai	0	0	0
638 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Palawija Lainnya	0	0	0
1764 DITLIND	137.772.495.020	144.469.507.000	282.242.002.020
641 Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	251.742.995	2.984.565.000	3.236.307.995
642 Fasilitas Dukungan Teknis Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT	0	0	0
643 Hasil Pengujian Mutu Produk Tanaman	0	0	0
644 Penerapan Penanganan DPI	1.063.460.000	33.945.292.000	35.008.752.000
645 Sarana dan Bahan Pengendalian OPT	136.457.292.025	107.539.650.000	243.996.942.025
1766 MANAJEMEN	25.805.132.327	3.295.762.700	29.100.895.027
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	25.805.132.327	3.295.762.700	29.100.895.027
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	0	0
994 Layanan Perkantoran	0	0	0
5885 PPHP	801.994.143.433	90.338.700.169	892.332.843.602
851 Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	667.371.350.439	46.490.563.069	713.861.913.508
852 Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	6.913.553.173	3.000.000.000	9.913.553.173
853 Fasilitas Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	707.385.530	0	707.385.530
854 Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan	25.000.000	0	25.000.000
855 Fasilitas Dukungan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Hasil TP	0	0	0
856 Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU	126.976.854.291	40.848.137.100	167.824.991.391

2. Direktorat Jenderal Hortikultura

Pada TA 2019, Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani (526xxx) untuk menunjang pembangunan tanaman Hortikultura senilai Rp640.855.108.141,- dari anggaran senilai Rp714.635.003.000,- atau 89.68 %. Adapun bentuk bantuan pemerintah yang disalurkan ke penerima bantuan seluruhnya dalam bentuk barang pada kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan meliputi berbagai kegiatan pengembangan komoditas buah. Target awal kegiatan Kawasan buah Semester II TA 2019 seluas 9.411 Ha, namun realisasi fisik outputnya sampai dengan 31 Desember 2019 senilai 9.309 Ha. Sedangkan target awal untuk kegiatan Kawasan Florikultura Semester II TA 2019 seluas 12.000 m² dengan capaian realisasi fisik untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 seluas 12.000 m². Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani senilai Rp94.027.797.973,00 atau 93,63 % dari anggaran senilai Rp100.420.790.000,00 berupa belanja barang fisik lainnya dalam bentuk pemberian sarana produksi untuk menjamin keberhasilan pengembangan kawasan buah lainnya, kawasan jeruk, kawasan florikultura, kawasan mangga, kawasan manggis, dan kawasan pisang.

Tabel B.4.6 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Tanaman Buah Berkelanjutan Ditjen Hortikultura

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI
5886	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	024	Kawasan Buah Lainnya	8.981.900.000	8.263.784.690
		027	Kawasan Jeruk	30.084.310.000	28.137.040.482
		054	Kawasan Florikultura	1.191.500.000	1.158.021.237
		065	Kawasan Buah di Wilayah Perbatasan	7.465.800.000	7.085.160.825
		066	Kawasan Mangga	11.494.500.000	11.175.581.079
		067	Kawasan Manggis	12.082.000.000	11.373.311.413
		068	Kawasan Pisang	29.120.780.000	26.834.898.247
TOTAL				100.420.790.000	94.027.797.973

b. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Kegiatan ini untuk peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat. Bantuan Pemerintah yang diberikan untuk kawasan bawang merah, aneka cabai, tanaman obat dan sayuran lain. Sasaran kegiatan peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat Semester II TA 2019 seluas 29.728 Ha dengan realisasi fisik senilai 27.647 Ha sedangkan target awal untuk kegiatan Fasilitasi Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat yaitu 12 bulan dengan realisasi fisik selama 12 bulan.

Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani senilai Rp474.950.226.015,00 atau 88,52 % dari anggaran senilai Rp536.560.445.000,00.

Bantuan Pemerintah dilaksanakan yaitu fasilitasi bantuan sarana produksi berupa barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat/pemda melalui belanja bantuan dalam bentuk barang pada kawasan bawang merah, kawasan sayuran lainnya, Kawasan aneka cabai, kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan, Kawasan tanaman obat, serta Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.

Tabel B.4.7 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Ditjen Hortikultura

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI
1771	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	024	Kawasan Bawang Merah	93.543.320.000	89.617.446.269
		025	Kawasan Sayuran Lainnya	312.592.420.000	260.945.447.416
		051	Kawasan Aneka Cabai	121.824.705.000	116.335.236.345
		073	Fasilitas Teknis Dukungan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	200.000.000	198.219.100
		080	Kawasan sayuran dan tanaman obat di wilayah perbatasan	2.400.000.000	2.370.290.800
		085	Kawasan Tanaman Obat	6.000.000.000	5.483.586.085
TOTAL				536.560.445.000	474.950.226.015

c. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura

Kegiatan ini untuk pengembangan sistem perbenihan hortikultura. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi bantuan sarana produksi.

Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani senilai Rp15.577.530.250,00 atau 81,45 % dari anggaran senilai Rp19.125.332.000,00. Adapun target output senilai 3.468.427 buah/batang/unit dengan realisasi fisik senilai 3.428.251 buah/batang/unit. Sedangkan target Fasilitas teknis Dukungan Perbenihan Hortikultura yaitu 12 bulan dengan capaian output fisik 12 bulan. Bantuan Pemerintah ini berupa fasilitasi bantuan sarana produksi yang dilaksanakan oleh Pusat dan Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten dalam bentuk pemberian bantuan kepada produsen/penangkar/ kelompok penangkar yang membutuhkan sarana dan prasarana dengan akun belanja barang fisik lainnya yang diserahkan kepada masyarakat yang terdiri dari benih buah lainnya, benih bawang merah, benih jeruk, benih sayuran lainnya, benih cabai dan sarana prasarana benih hortikultura, serta fasilitas teknis dukungan perbenihan hortikultura.

Tabel B.4.8 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Sistem Perbenihan Ditjen Hortikultura

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI
1772	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	022	Benih Buah Lainnya	2.196.802.000	1.282.137.260
		024	Benih Bawang Merah	3.572.630.000	3.079.401.210
		027	Benih Jeruk	35.060.000	35.058.800
		060	Sertifikasi, Pengawasan dan Pengembangan Varietas Benih Hortikultura	73.000.000	70.802.500
		072	Benih Sayuran Lainnya	32.800.000	28.650.500
		073	Fasilitas teknis Dukungan perbenihan hortikultura	7.100.000.000	5.069.721.865
		074	Sarana Prasarana Benih Hortikultura	6.027.720.000	5.924.438.115
		075	Benih Cabai	87.320.000	87.320.000
TOTAL				19.125.332.000	15.577.530.250

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas hortikultura melalui fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Bantuan Pemerintah yang diberikan berupa fasilitasi sarana prasarana pasca panen, sarana prasarana pengolahan dan fasilitasi pemasaran. Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani senilai Rp48.735.950.603,00 atau 96,74 % dari anggaran senilai Rp50.376.594.000,00. Adapun target output senilai 801 Unit dengan realisasi fisik senilai 799 Unit. Sedangkan pada kegiatan GHP Hortikultura, target awal adalah sebanyak 85 kelompok dengan capaian output sebanyak 84 kelompok. Bantuan Pemerintah ini berupa fasilitasi bantuan sarana produksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Propinsi/Kabupaten dalam bentuk pemberian bantuan kepada kelompok tani/gapoktan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota berupa Fasilitasi pasca panen cabai dan bawang merah dan fasilitasi pasca panen dan pengolahan hortikultura lainnya, GHP Hortikultura, Pemasaran untuk hortikultura dan Pengembangan mutu dan sertifikasi.

Tabel B.4.9 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ditjen Hortikultura

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI
5887	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	055	Pengembangan Mutu dan Standarisasi	615.100.000	407.094.772
		061	GHP Hortikultura	70.718.000	70.340.320
		062	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah	32.567.352.000	31.857.516.819
		064	Fasilitas Pasca panen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya	16.070.024.000	15.495.689.612
		065	Pemasaran Produk Hortikultura	1.053.400.000	905.309.080
TOTAL				50.376.594.000	48.735.950.603

e. Pengembangan Sistem Perlindungan hortikultura dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya

Kegiatan ini dimaksudkan dengan melakukan pendampingan untuk mendukung pemberian bantuan pemerintah yang berupa pengendalian OPT cabai dan bawang merah, tanaman hortikultura lainnya, serta desa pertanian organik. Pengembangan kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya dalam rangka mendukung operasional teknis kegiatan meliputi layanan perkantoran dan layanan dukungan manajemen eselon I. Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke kelompok tani senilai Rp7.447.799.500,00 atau 92,68 % dari anggaran senilai Rp8.036.017.000,00. Adapun target output untuk kegiatan penanganan OPT serta Dampak perubahan iklim dan bencana alam senilai 1.930 Ha dengan realisasi fisik senilai 1.898 Ha. Sedangkan target output untuk kegiatan Desa Pertanian Organik sebanyak 250 desa dengan capaian fisik output 250 desa. Untuk kegiatan Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura, target output selama 12 bulan dengan capaian output 12 bulan.

Tabel B.4.10 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Sistem Perlindungan hortikultura dan Dukungan Manajemen Ditjen Hortikultura

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI
1773	Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura	061	Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah	488.604.000	430.887.800
		062	Pengendalian OPT Hortikultura Lainnya	826.290.000	744.195.315
		063	Desa Pertanian Organik	2.200.873.000	2.132.224.170
		064	Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Hortikultura	484.000.000	482.096.315
		066	Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	4.036.250.000	3.658.395.900
TOTAL				8.036.017.000	7.447.799.500

f. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya berupa Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dalam rangka mendukung operasional teknis kegiatan meliputi : Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah (526211) dan Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Daerah (526212). Bantuan Pemerintah yang telah diserahkan ke Pemda senilai Rp115.803.800,00 atau 99,98 % dari anggaran senilai Rp115.825.000,00.

Tabel B.4.11 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Hortikultura

KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	KODE OUTPUT	URAIAN OUTPUT	PAGU	REALISASI
1774	Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	115.825.000	115.803.800
TOTAL				115.825.000	115.803.800

3. Direktorat Jenderal Perkebunan

Program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi anggaran dari ABPN. Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan dimaksud, Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan bentuk bantuan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok tani pekebun. Belanja 526 berbentuk barang untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar, dengan nama bantuan:
 - 1) Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi seluas 12.100 Ha, 12.126.000 Batang:
 - Peremajaan Kopi Robusta seluas 1.600 Ha berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKU Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Lambung Barat dan Kabupaten Tanggamus;
 - Rehabilitasi Kopi Robusta seluas 200 Ha berlokasi di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang;
 - Perluasan Kopi Robusta seluas 100 Ha berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas;

- Intensifikasi Kopi Arabika seluas 100 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat;
 - Peremajaan Kopi Arabika seluas 5.640 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Gayo Lues, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanatoraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Bangli, Provinsi Papua, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - Perluasan Kopi Arabika seluas 4.000 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang, Kabupaten Situbondo, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Kota Sungai Penuh, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTT, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa;
 - Perluasan Kopi Liberika seluas 450 Ha berlokasi di Provinsi Riau, Kabupaten Kep. Meranti, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kubu Raya;
 - Perluasan Kopi Libtukom seluas 10 Ha berlokasi di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bantuan Pengolahan dan Pascapanen (60 KT/Unit) berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Provinsi DIY, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tanatoraja, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTT, Kabupaten Manggarai, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Riau, Kabupaten Kep. Meranti, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kotamobago, Provinsi Banten, Kabupaten Serang;
- 2) Bantuan Pengembangan Tanaman Kakao seluas 8.000 Ha, 8.000.000 Batang
- Peremajaan Kakao seluas 6.660 Ha berlokasi di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Barat,

- Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari;
- Perluasan Kakao seluas 1.340 Ha berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi NTT, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Papua dan Kabupaten Keerom;
 - Pengolahan Cokelat sebanyak 3 Unit berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara;
- 3) Bantuan Pengembangan Tanaman Karet seluas 16.010 Ha, 3.080.000 Batang
- Peremajaan Karet seluas 5.210 Ha berlokasi di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmas Raya, Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Barat;
 - Perluasan Karet seluas 800 Ha berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Provinsi Papua dan Kabupaten Boven Digoel;
 - Intensifikasi Karet seluas 10.000 Ha berlokasi di Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKU, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Kota Baru;
 - Bantuan Pascapanen dan Pengolahan (58 KT/Unit) berlokasi di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmas Raya, Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Jambi, Kabupaten Tebo, Kabupaten Baranghari, Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKI, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara;
- 4) Bantuan Pengembangan Tanaman Kelapa seluas 14.125 Ha, 1.586.000 Batang
- Peremajaan Kelapa seluas 11.925 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Riau, Kabupaten Inhil, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kep. Meranti, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten

- Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Banggai, Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kep. Selayar, Kabupaten Wajo, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Bali, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTT, Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Provinsi Papua, Kabupaten Nabire, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kep. Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pahuwato;
- Perluasan Kelapa seluas 1.400 Ha berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Kabupaten Bombana, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Kep. Riau, Kabupaten Lingga;
 - Intensifikasi Kelapa seluas 800 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Boyolali;
 - Bantuan Pascapanen dan Pengolahan (50KT/Unit) berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolmong, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Bombana, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi NTT, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara;

Rincian output sebagai berikut :

Tabel B.4.12 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Tanaman Tahunan dan Penyegar Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	1777001 Pengembangan Tanaman Kopi	Ha	100.194.828.000	96.526.386.100	96,09	11.830	11.830	100,00
2	1777002 Pengembangan Tanaman Kakao	Ha	96.596.017.000	95.295.332.330	98,57	7.730	7.730	100,00
3	1777003 Pengembangan Tanaman Karet	Ha	95.481.817.000	91.443.260.933	95,53	16.010	15.860	99,06
4	1777004 Pengembangan Tanaman Kelapa	Ha	33.955.901.000	33.017.719.354	97,17	14.125	14.125	100,00
5	1777005 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya	Ha	10.557.584.000	10.264.286.745	97,20	1.800	1.800	100,00
6	1777006 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Papua dan Papua Barat	Ha	7.852.608.000	7.566.296.200	96,53	540	540	100,00
7	1777007 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan	Bulan	3.677.460.000	3.571.550.300	95,36	12	12	100,00

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
	Tanaman Tahunan dan Penyegar							
	Total Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar		348.316.215.000	337.684.831.962	96,72			99,75

b. Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

Berlokasi di 33 Provinsi (Jawa Barat, Aceh, Bali, NTB, Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua, Babel, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Kep. Riau, dan Kalimantan Utara). Rincian output sebagai berikut :

Tabel B.4.13 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Dukungan Perlindungan Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	1779001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	Ha	9.456.649.000	9.307.831.340	97,99	7.350	7.350	100,00
2	1779002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	KT	1.890.376.000	1.856.106.750	98,15	7	7	100,00
3	1779003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	Desa	1.034.338.000	1.008.878.000	98,44	155	160	103,23
4	1779004 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	Bulan	590.000.000	582.668.851	99,35	12	12	100,00
	Total Dukungan Perlindungan Perkebunan		12.971.363.000	12.755.484.941	98,48			101,17

c. Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

1) Bantuan Pengembangan Tanaman Tebu seluas 13.800 Ha, 18.000.000 Mata

- Penanaman Tebu seluas 2.550 Ha berlokasi Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKI, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Provinsi NTB, Kabupaten Dompu, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo;
- Intensifikasi Tebu seluas 11.250Ha berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Provinsi DIY, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magentan, Kabupaten Lamongan, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Gorontalo, Kabupaten

- Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bonw, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng;
- Bantuan Penyediaan Sumber Air (63 Paket) berlokasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Lampung, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi Gorontalo;
- 2) Bantuan Pengembangan Tanaman Lada seluas 6.585 Ha, 3.104.000 Batang
- Perluasan Lada seluas 850 Ha berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, Tana Toraja, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Rehabilitasi Lada seluas 2.180 Ha berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung Timur;
 - Intensifikasi Lada seluas 3.555 Ha berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Kabupaten Lahat, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten PPU, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur;
 - Pengadaan Pascapanen (6 KT/Unit) berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten PPU, Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Selatan;
- 3) Bantuan Pengembangan Tanaman Pala seluas 27.636 Ha, 2.122.320 Batang
- Perluasan Pala seluas 9.136 Ha berlokasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kep. Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kep. Selayar, Kabupaten Enrekang, Kota Palopo, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kep. Sula, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kota Ternate, Kota Tidore, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana;
 - Rehabilitasi Pala seluas 17.100 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa,

- Kabupaten Kep. Sangihe, Kabupaten Kep. Talaud, Kabupaten Kep. Sitaro, Kota Bitung, Maluku, Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Buru Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Papua, Kabupaten Fak-Fak;
- Intensifikasi Pala seluas 1.400 Ha berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 - Bantuan Pascapanen (9KT) berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Sitaro, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fak-fak.
- 4) Bantuan Pengembangan Tanaman Cengkeh seluas 12.520 Ha, 534.600 Batang
- Intensifikasi Cengkeh seluas 4.340 Ha berlokasi Provinsi Jawa Timur Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolamo Utara, Kabupaten Bolamo Selatan, Kabupaten Bolamo Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon, Provinsi NTT, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur;
 - Peremajaan Cengkeh seluas 100 Ha berlokasi di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng;
 - Perluasan Cengkeh seluas 630 Ha berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara;
 - Rehabilitasi Cengkeh seluas 7.450 Ha berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolamo Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Kabupaten Toli-toli, Provinsi Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Palopo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Provinsi NTT, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera

- Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Ternate, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango;
- Bantuan Pascapanen (6KT) berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang.

Tabel B.4.14 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Tanaman Semusim dan Rempah Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	5888001 Pengembangan Tanaman Tebu	Ha	78.106.810.000	73.849.238.474	94,49	15.250	15.103	99,04
2	5888002 Pengembangan Tanaman Rempah	Ha	124.246.753.000	122.831.860.372	98,55	46.256	46.256	100,00
3	5888003 Pengembangan Tanaman Semusim lainnya	Ha	4.511.262.000	4.304.824.025	95,32	1.617	1.586	98,08
4	5888004 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah di Papua dan Papua Barat	Ha	2.539.600.000	2.539.500.000	95,38	700	700	100,00
5	5888005 Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Bulan	623.840.000	591.925.896	96,70	12	12	100,00
	Total Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah		210.028.265.000	204.117.348.767	96,93			99,72

d. Dukungan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sebanyak 245 KT berlokasi di 33 Provinsi (Jawa Barat, Aceh, Bali, NTB, Bengkulu, Riau, Jambi, Kalimantan Selatan, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, DIY, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua, Babel, Gorontalo, Papua Barat, Sulawesi Barat, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Kep. Riau, Kalimantan Utara).

Tabel B.4.15 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	5889001 Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan	KT	16.655.359.000	16.005.923.510	95,96	106	106	100,00
2	5889002 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Bulan	2.071.500.000	1.894.746.000	97,34	12	12	100,00
3	5889003 Fasilitas Pengolahan Hasil Perkebunan	Unit	37.203.372.000	36.336.016.008	97,43	136	136	100,00
4	5889004 Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Perkebunan	KT	80.000.000	74.326.000	97,17	36	36	100,00
5	5889005 Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan	KT	336.000.000	313.398.400	95,55	30	30	100,00
6	5889007 Pengolahan Sagu Papua dan Papua Barat	Unit	2.246.200.000	2.241.000.000	98,62	6	6	100,00
	Total Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		58.592.431.000	56.865.409.918	97,06			100,00

- e. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan seluas 4.077 Ha berupa Pengembangan Kebun Sumber Benih Unggul Tanaman Perkebunan

Tabel B.4.16 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Perbenihan Tanaman Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	5890001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Ha	26.018.809.000	20.761.150.620	81,98	4.080	3.678	90,15
2	5890002 Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Bulan	3.468.042.000	3.042.578.965	94,36	12	12	100,00
	Total Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan		29.486.851.000	23.803.729.585	85,77			88,62

f. Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya

Tabel B.4.17 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	1780950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	5.912.950.000	5.259.084.241	95,18	109	109	100,00
	Total Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan		5.912.950.000	5.259.084.241	95,62			100,00

g. Dukungan Pengujian Dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan di 4 UPT Pusat;

- 1) Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan;
- 2) Pengawasan Dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan.

Tabel B.4.18 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Pengujian Dan Pengawasan Mutu Benih Ditjen Perkebunan

No	Kode>Nama Output	Satuan	Keuangan			Fisik		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	Realisasi (%)
1	1781002 Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Pkt Tek	39.500.000	39.500.000	98,01	39	39	100,00
2	1781003 Fasilitas Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Bulan	1.295.025.000	1.216.355.923	91,96	12	12	100,00
	Total Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan		1.334.525.000	1.255.855.923	96,54			99,18

4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun 2019 dua program utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) dan Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#Bekerja) dengan anggaran senilai Rp825.705.885.000,00 telah terealisasi 94,96% dengan realisasi belanja Netto senilai Rp784.126.853.580,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel B.4.19 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Ditjen PKH

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PENGEMBALIAN BELANJA	REALISASI NETTO
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.077.001.000	13.484.256.082	0	13.484.256.082
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	6.157.295.000	5.810.725.508	0	5.810.725.508
526114	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	340.000.000	340.000.000	0	340.000.000
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	690.366.486.000	651.321.715.541	29.955.000	651.291.760.541
526122	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	96.114.000.000	95.934.000.000	953.500.000	94.980.500.000
526212	Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	7.537.145.000	7.251.611.449	0	7.251.611.449
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	11.083.958.000	11.070.000.000	132.000.000	10.938.000.000
Jumlah Belanja		825.705.885.000	785.242.308.580	1.115.455.000	784.126.853.580

Dari realisasi belanja 526 Netto senilai Rp784.126.853.580,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 tersebut bantuan dalam bentuk barang senilai Rp678.208.353.580,00 dan dalam bentuk uang senilai Rp105.918.500.000,00. Berdasarkan output kegiatan utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel B.4.20 Target dan Realisasi Belanja 526 Per Kegiatan Ditjen PKH

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Output	Nama Output	Satuan	Total Pagu	Total Belanja Netto	Volume Fisik	
							Target	Realisasi
1783	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	400	Hijauan Pakan Ternak	Ha	5.854.325.000	5.484.215.051	1.837	1.841
		401	Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	12.236.293.000	11.092.649.297	1.587	1.431
		402	Mutu dan keamanan pakan	Sampel	465.850.000	462.044.470	5.000	7.237
1783 Total					18.556.468.000	17.038.908.818		
1784	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	402	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	22.464.822.000	21.724.709.164	3.526.450	3.536.652
		403	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor	703.235.000	702.647.500	67.780	59.821
		406	Kelembagaan Veteriner	Unit	4.950.000	4.125.000	381	380
1784 Total					23.173.007.000	22.431.481.664		
1785	Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak	319	Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	47.348.596.000	45.762.201.680	3.000.000	3.586.374
		400	Benih Ternak Unggul	Dosis	178.000.000	176.550.000	4.576.700	6.317.762
		402	Pengembangan ternak	Ekor	83.580.348.000	80.799.608.624	9.617	8.665

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Kode Output	Nama Output	Satuan	Total Pagu	Total Belanja Netto	Volume Fisik	
							Target	Realisasi
			ruminansia potong					
		403	Pengembangan ternak ruminansia perah	Ekor	5.319.381.000	4.939.941.300	327	327
		404	Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	642.073.535.000	607.923.391.752		
1785 Total					778.499.860.000	739.601.693.356		
1786	Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	400	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Unit Usaha	1.115.700.000	799.750.500	135	173
		401	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	126.328.000	124.774.500	25.821	127.965
		402	Pengendalian Pemotongan Betina produktif	Lokasi	14.000.000	14.000.000	80	83
1786 Total					1.256.028.000	938.525.000		
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	678.927.000	675.576.200	61	61
		951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	350.000.000	347.000.000	15	15
1787 Total					1.028.927.000	1.022.576.200		
5891	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak	400	Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	2.170.595.000	2.155.809.474	17	17
		401	Sarana Pemasaran Peternakan	Unit	1.021.000.000	937.859.068	5	5
5891 Total					3.191.595.000	3.093.668.542		
Grand Total					825.705.885.000	784.126.853.580		

5. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Realisasi belanja dan pagu MAK 526 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 31 Desember 2019 senilai Rp2.989.312.754.748,00 atau 87,10% dari pagu anggaran senilai Rp3.431.955.640.000,00. Dari realisasi tersebut, yang berbentuk bantuan berupa barang senilai Rp1.000.852.023.549,00, sedangkan yang berupa uang senilai Rp1.988.460.731.199,00.

A. Belanja 526 berbentuk barang, pagu senilai Rp1.066.543.751.000-. Dengan realisasi senilai Rp1.000.852.023.549,00 atau 93,84% untuk kegiatan Bantuan Alat dan mesin pertanian (alsintan) Pusat dan tugas pembantuan.

1. Belanja 526 Barang Satker Dana Pusat

Alsintan memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha tani untuk memberikan mutu hasil yang lebih baik dan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kegiatan pengolahan tanah, traktor roda 2, pompa air, transplanter yang merupakan Unit Pelayanan Jasa Alsintan dapat berkontribusi dalam upaya peningkatan intensitas

pertanaman di berbagai ekologi lahan. Selain itu melalui pemanfaatan alsintan akan mendukung upaya pemecahan masalah kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian yang banyak terjadi di daerah.

Belanja 526 barang Dana Pusat terealisasi senilai Rp780.967.119.607,00 dari pagu senilai Rp829.182.190.000,00 atau 94,22% yang dibelanjakan untuk kegiatan operasional satker dana Pusat.

Tabel B.4.21 Target dan Realisasi Belanja 526 Barang Satker Pusat Ditjen PSP

No	Uraian Output	Satuan	Target		Realisasi	
		Volume	Volume	Rp	Volume	Rp
1	TR2	Unit	5.817	160.620.500.000	5.813	158.563.946.563
2	TR4	Unit	950	318.250.000.000	950	314.326.111.500
3	Pompa air	Unit	8.289	130.807.500.000	8.289	104.182.150.209
4	Sprayer	Unit	17.365	12.662.000.000	17.365	12.068.130.660
5	Cultivator	Unit	3.027	47.432.000.000	3.012	43.062.617.375
6	Tunggakan biaya pengadaan alsintan TA 2018	Paket	1	159.110.190.000	1	148.764.163.300
Jumlah			35.449	828.882.190.000	35.430	780.967.119.607

2. Belanja 526 Barang Satker Tugas Pembantuan

Belanja 526 barang satker Dana Tugas Pembantuan terealisasi senilai Rp219.884.903.942,00 dari pagu senilai Rp237.361.561.000,00 atau 92,64%. Realisasi ini terdiri dari :

- Belanja barang berupa Alat dan Mesin Pertanian dengan realisasi senilai Rp212.602.050.650,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel B.4.22 Target dan Realisasi Belanja 526 Alsintan Satker TP Ditjen PSP

No	Uraian Output	Satuan	Target		Realisasi	
		Volume	Volume	Rp	Volume	Rp
1	Traktor Roda 2	Unit	4.187	112.055.891.500	4.148	106.056.450.858
2	Pompa air	Unit	4.771	91.542.506.000	4.771	84.623.208.993
3	Rice Transplanter	Unit	45	2.742.021.000	37	2.564.409.000
4	Cultivator	Unit	1.235	19.312.780.000	1.134	16.728.406.074
5	Hand Sprayer	Unit	1.000	851.137.500	1.000	808.749.500
6	Traktor Roda 4	Unit	4	1.391.047.000	4	1.354.511.225
7	Alat Tanam Jagung	Unit	100	349.629.000	100	321.200.000
8	Alat Pemotong Rumput	Unit	50	120.150.000	50	115.115.000
9	Laptop	Unit	2	30.000.000	2	30.000.000
Jumlah			11.394	228.395.162.000	11.246	212.602.050.650

b. Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL)

Terdapat 31 satker yang mengadakan kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) menggunakan akun belanja bantuan pemerintah bentuk barang dengan realisasi senilai Rp4.593.459.117,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.23 Pagu dan Realisasi Belanja 526 OPAL Satker TP Ditjen PSP

SATKER	AKUN	PAGU	SERAPAN
069140 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	526212	350.000.000	349.162.000
079132 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	526212	450.000.000	-
099322 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	526212	150.000.000	150.000.000
329082 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	526212	150.000.000	99.996.200
109125 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	526212	50.000.000	50.000.000
269116 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	526212	50.000.000	50.000.000
119137 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN	526212	150.000.000	49.500.000
129119 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. LAMPUNG	526212	200.000.000	200.000.000
633656 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	526212	300.000.000	-
029168 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	526212	250.000.000	250.000.000
039158 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	526212	650.000.000	448.569.500
049094 DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	526212	150.000.000	149.145.450
059185 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	526212	500.000.000	399.862.000
299387 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	526212	100.000.000	100.000.000
139134 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	526212	250.000.000	249.990.000
149120 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	526212	400.000.000	398.673.637
159114 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	526212	100.000.000	99.990.000
169121 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	526212	100.000.000	99.880.930
417672 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	526212	100.000.000	100.000.000
239133 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	526212	50.000.000	50.000.000
249165 DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	526212	150.000.000	150.000.000
229108 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI	526212	50.000.000	50.000.000
179110 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	526212	100.000.000	100.000.000
340146 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	526212	50.000.000	50.000.000
189138 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	526115	350.000.000	350.000.000
199133 DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN	526212	200.000.000	149.850.000
209114 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	526115	50.000.000	50.000.000
219095 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	526212	50.000.000	50.000.000
289108 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	526212	50.000.000	50.000.000
259104 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI PAPUA	526212	150.000.000	148.839.400
339091 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	526212	150.000.000	150.000.000

- c. Belanja Penunjang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berupa laptop, komputer, drone, printer, dan pengadaan saprodi dengan realisasi senilai Rp2.689.394.175,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel B.4.24 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Saprodi Satker DK-TP Ditjen PSP

Kode Satker	Nama Satker	Akun	Pagu	Realisasi
119139	Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	526115	29.400.000	25.860.000
029029	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	526211	205.000.000	204.555.000
039014	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	526211	15.000.000	15.000.000
079027	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	526211	30.000.000	29.790.000
109007	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	526211	151.000.000	149.989.500
119004	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	526211	261.000.000	223.770.000
189018	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	526211	140.000.000	138.917.500
229029	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali	526211	11.000.000	10.950.000
089011	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	526212	3.000.000	3.000.000
109125	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi	526212	6.000.000	5.909.318
169120	Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur	526212	14.500.000	14.081.900
189138	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	526212	20.200.000	19.800.000
229029	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bali	526212	14.849.000	14.800.000
259104	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Papua	526212	255.000.000	100.474.000
269116	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu	526212	110.000.000	108.871.957
340146	Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat	526212	10.000.000	10.000.000
417672	Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	526212	10.000.000	10.000.000
209114	Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara	526311	1.500.000.000	1.491.625.000
309034	Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	526212	40.000.000	40.000.000
339091	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	526311	72.000.000	72.000.000
Total			2.897.949.000	2.689.394.175

B. Belanja 526 berbentuk uang dengan realisasi senilai Rp1.988.460.731.199,00 atau 84,06% dari pagu senilai Rp2.365.411.889.000,00 untuk kegiatan :

1. Belanja Bantuan Pemerintah 526 Bentuk Uang satker Kantor Pusat

Belanja 526 bentuk uang Kantor Pusat terealisasi senilai Rp124.137.869.600,00 dari pagu Rp133.000.000.000,00 atau 93,34% yang terdiri dari :

a. Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian (Pada Kegiatan 1794.006)

Kegiatan Percontohan Pembangunan Embung Dam Parit/Long Storage sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi senilai Rp86.600.502.000,00 dari pagu senilai Rp91.000.000.000,00.

b. Optimasi Lahan (Pada Kegiatan 1795.007)

Kegiatan penyiapan lahan optimasi lahan berupa kegiatan Jalan Usaha Tani (JUT) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi senilai Rp17.999.600.000,00 dari pagu senilai Rp18.000.000.000,00.

c. Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (Pada Kegiatan 1796.002)

Kegiatan pilot percontohan model pengembangan pertanian korporasi berbasis mekanisasi telah terealisasi senilai Rp4.000.000.000 dari pagu senilai Rp4.000.000.000.

d. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Pada Kegiatan 1797.950)

Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp15.537.767.600,00 dari pagu senilai Rp20.000.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

- Padat Karya Produktif Infrastruktur
Kegiatan padat karya produktif infrastruktur dengan pagu senilai Rp18.000.000.000,00, sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi senilai Rp13.807.767.600,00.
- Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsive Gender (PUG)
Pada TA 2019, telah dialokasikan anggaran untuk Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender melalui integrasi ternak kambing atau itik senilai Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi capaian sampai dengan 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.730.000.000,00. Konsep pengembangan pilot project ini diutamakan mendorong peran aktif petani laki-laki dan perempuan secara optimal dan proporsional dalam memaksimalkan program pembangunan pertanian khususnya dalam optimalisasi lahan. Adanya integrasi ternak diharapkan petani mendapat nilai tambah tidak hanya dari produksi pertaniannya tetapi hasil dari pengembangan ternaknya. Adapun pemanfaatan kotoran untuk meningkatkan kesuburan lahan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk an organik dan meningkatkan nilai tambah dari pengembangan produk pertanian organik yang lebih sehat dan harga yang menguntungkan.

Tujuan Kegiatan :

- Optimalisasi lahan pertanian melalui integrasi ternak kambing/itik dan pemanfaatan kotoran serta urinenya sebagai pupuk organik;
- Menerapkan kegiatan responsive gender (partisipasi petani laki-laki dan perempuan) dalam pilot percontohan optimalisasi lahan mendukung Ketahanan Pangan;
- Menyusun data terpilah dari pelaksanaan pengembangan pilot percontohan optimalisasi lahan mendukung Ketahanan Pangan;
- Menyusun data terpilah dari pelaksanaan pengembangan pilot percontohan optimalisasi lahan responsive gender.

2. **Belanja 526 berbentuk uang Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan realisasi senilai Rp1.864.322.861.599,00 atau 83,51% dari pagu senilai Rp2.232.441.889.000,00.**

a) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

Beberapa kegiatan 526 untuk jaringan irigasi yaitu :

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan/penyempurnaan jaringan irigasi guna mengembalikan/meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula sehingga menambah luas areal tanam dan/atau meningkatkan intensitas pertanaman (IP). Selain itu kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk peningkatan jaringan irigasi yaitu kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah

luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Selama tahun 2019, bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi tersier terealisasi senilai Rp159.880.000.000,00 dari pagu senilai Rp160.000.000.000,00.

2) Pengembangan Embung/DamParit/LongStorage

Pengembangan Embung/DamParit/LongStorage bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan ketersediaan sumber air ditingkat usaha tani sebagai suplesi air irigasi untuk komoditas. Tanaman Pangan dan mengurangi resiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani dimusim kemarau. Selama tahun 2019, bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan pengembangan embung terealisasi senilai Rp47.999.916.640,00 dari pagu senilai Rp48.000.000.000,00.

3) Pengembangan Sumber Air (Irigasi Perpipaan/Perpompaan)

Maksud Kegiatan Pengembangan Irigasi Perpompaan/Perpipaan adalah kegiatan pemanfaatan sumber air permukaan setempat sebagai suplesi air irigasi, melalui sistem gravitasi (menggunakan pipa) dan/atau pengambilan air (menggunakan pompa).

Selama tahun 2019, bantuan pemerintah dalam bentuk uang untuk kegiatan perpompaan terealisasi senilai Rp52.027.674.779,00 dari pagu senilai Rp54.946.838.000,00, sedangkan untuk kegiatan perpipaan terealisasi senilai Rp12.207.615.000,00 dari pagu senilai Rp12.411.700.000,00.

4) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian

Kegiatan ini terealisasi senilai Rp2.325.187.000,00 per 31 Desember 2019 dari pagu senilai Rp2.325.187.000,00. Realisasi tersebut ada pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatanannya berupa Pilot Percontohan Ditjen PSP mendukung aspek air dalam hal penanganan infrastruktur pasca HPS Tahun 2018.

5) Survei Investigasi dan Desain Irigasi Pertanian

Kegiatan Survei Investigasi dan Desain (SID) Pengembangan Jaringan Irigasi merupakan kegiatan awal sebelum dilaksanakannya kegiatan pengembangan jaringan irigasi. Kegiatan ini dapat dijadikan acuan/dasar pengalokasian kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, kegiatan ini terealisasi senilai Rp2.931.458.000,00 dari pagu senilai Rp2.931.458.000,00. Adapun rincian realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel B.4.25 Realisasi Belanja 526 Uang-SID Ditjen PSP

Kode Satker	Nama Satker	Realisasi (Rp)
029029	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat	809.991.000
039014	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	855.000.000
049028	Dinas Pertanian Provinsi D.I. Yogyakarta	179.592.000
059004	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	907.665.000
299008	Dinas Pertanian Provinsi Banten	179.210.000
TOTAL		2.931.458.000

b) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Kegiatan perluasan sawah meliputi :

1) Perluasan Areal Sawah

Perluasan Areal Sawah adalah suatu usaha penambahan luasan/baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan dengan kondisi yang belum dan atau lahan terlantar yang dapat diusahakan untuk usaha tani sawah. Upaya penambahan baku lahan tanaman pangan melalui perluasan sawah sangat penting dalam upaya mempercepat pencapaian surplus beras dan swasembada beras berkelanjutan. Pada TA.2019, pembangunan fisik perluasan sawah dilaksanakan dengan pola swakelola dengan instansi pemerintah lainnya yaitu Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat dengan target sasaran kegiatan ini adalah terealisasinya kegiatan perluasan sawah seluas 6.000 Ha.

Unit cost per hektar pekerjaan cetak sawah senilai Rp.16.000.000/Ha untuk kabupaten di lingkup Provinsi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara dan senilai Rp.19.000.0000/Ha untuk Kabupaten di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Komponen kegiatan perluasan sawah yang dibiayai terdiri :

- Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Sawah;
- Operasional Kegiatan Perluasan Sawah;
- Dokumen Lingkungan;
- Pengawasan Kegiatan Perluasan Sawah;
- Bantuan Saprodi Mendukung Kegiatan Perluasan Sawah.

Tahapan pelaksanaan kegiatan perluasan sawah sebagai berikut:

- Penyusunan Tim Swakelola (Tim Perencana, Pelaksana, Pengawas dan Penerima Hasil Pekerjaan).
- Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pedoman Teknis kegiatan perluasan sawah pola swakelola dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian yang menangani perluasan sawah di Kabupaten/Kota.
- Kegiatan sosialisasi bertujuan agar kelompok tani calon penerima manfaat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
- Penetapan Petani dan Lokasi Hasil identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.
- Pembuatan Kerangka Acuan Kerja (jadwal, RAB, desain/gambar rencana kerja dan atau spesifikasi teknis).
- Penyampaian surat penawaran pekerjaan perluasan sawah oleh KPA kepada IPL dilampiri KAK dan dokumen perencanaan.

- Penandatanganan naskah kerja sama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Kepala Pelaksana Swakelola (Kasdam di masing-masing KODAM)
- Penandatanganan kontrak pelaksanaan antara PPK dengan Pelaksana Swakelola.
- Penyusunan dokumen lingkungan.
- Koordinasi, dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.
- Pelaksanaan kegiatan (konstruksi) Pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dilakukan melalui pola swakelola dengan TNI AD. Konstruksi perluasan sawah dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan CPCL dan telah mempunyai desain atau minimal telah memiliki gambar kerja. Pekerjaan dimulai dari pembersihan lahan (*land clearing*), perataan (*land leveling*) dan olah tanah.
- Sawah yang telah selesai dicetak harus segera dimanfaatkan atau ditanami dengan komoditas tanaman pangan utamanya padi. Sawah yang telah selesai dicetak dilarang dialihfungsikan untuk fungsi-fungsi yang lain.

Tahun 2019, kegiatan perluasan sawah/cetak sawah dengan jumlah anggaran Rp 109.868.000.000,00 terealisasi dalam bentuk uang senilai Rp 109.863.882.300,00 (99,99%). Data dari direktorat teknis realisasi senilai Rp 111.355.507.300,00 pada table di bawah ini merupakan nilai total realisasi bentuk uang dan bentuk barang senilai Rp 1.491.625.000,00 berupa penyediaan saprodi pada Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (209114)

Tabel B.4.26 Target dan Realisasi Belanja 526 Uang -Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen PSP

No	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
			volume	Rp	volume	Rp
1	Konstruksi cetak sawah	Ha	6.000	99.000.000.000	6.000	98.998.761.300
2	Saprodi	Ha	6.000	12.000.000.000	6.000	11.989.389.000
3	Pengawasan kegiatan Cetak sawah	paket	5	168.000.000	5	167.750.000
4	Penyusunan Dokumen Lingkungan Kegiatan Cetak Sawah	dokumen	6	200.000.000	6	199.607.000
Jumlah				111.368.000.000		111.355.507.300

2) Optimasi Lahan

Optimasi lahan rawa sebagai lahan pangan TA 2019, pemerintah memberikan bantuan pendanaan kepada kelompok tani yang melakukan usahatani di lahan rawa untuk memperbaiki kondisi infrastruktur lahan dengan prioritas pada kegiatan perbaikan tata air mikro/ mezzo, rehabilitasi atau membangun pintu-pintu air serta infrastruktur yang dibutuhkan lahan sawah di rawa, sesuai

dengan rekomendasi teknis dari para ahli rawa baik di Badan Litbang Pertanian/ BPTP atau Perguruan Tinggi setempat. Kegiatan Optimasi Lahan Rawa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi dalam bentuk uang senilai Rp 1.427.525.588.500,00 dari pagu senilai Rp 1.750.202.550.000,00. Data dari direktorat teknis senilai Rp 1.427.565.588.500,00 pada tabel di bawah ini merupakan nilai total realisasi bentuk uang dan realisasi dalam bentuk barang senilai Rp 40.000.000,00.

Tabel B.4.27 Target dan Realisasi Belanja 526 Uang- Optimasi Lahan Ditjen PSP

No	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
			Volume (ha)	(Rp)	Volume (ha)	(Rp)
1	Optimasi Lahan Rawa	4.300.000	404.109	1.737.668.700.000	337.024,94	1.416.155.385.500
2	Persiapan Optimasi Lahan Rawa (SID) 2019	50.000	200.604	10.030.200.000	199.604	9.980.200.000
	Persiapan Optimasi Lahan Rawa (SID) 2020	50.000	50.073	2.503.650.000	28.600	1.430.000.000
Jumlah			654.786	1.750.202.550.000	565.228,94	1.427.565.585.500

3) SID Perluasan Sawah

Perluasan sawah merupakan rangkaian kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai dari kompilasi usulan, identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) dan kemudian disempurnakan melalui kegiatan survei dan investigasi calon lokasi serta pembuatan desain terhadap lokasi yang layak untuk dijadikan sawah baru. Jumlah pagu anggaran kegiatan SI CPCL dan pemetaan desain beserta pendukungnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp8.301.000.000,00 dengan realisasi Rp6.916.765.680,00 (83,32%).

Pelaksanaan kegiatan SI-CPCL dan Pemetaan Desain dapat dilakukan dengan jasa konsultan, swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain (IPL) maupun swakelola dilaksanakan sendiri oleh Penanggung Jawab Anggaran dalam hal ini Dinas Pertanian (swakelola mandiri). Jika pekerjaan swakelola dengan instansi lain atau swakelola mandiri menggunakan tenaga ahli non PNS, maka pengadaannya berpedoman kepada tata cara pengadaan konsultan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

Tahapan pelaksanaan kegiatan SID perluasan sawah sebagai berikut :

- Persiapan
- Sosialisasi dan koordinasi
- Pengumpulan data primer dan sekunder
- Tabulasi dan pengolahan data
- Penentuan kelayakan calon lokasi
- Survey dan pengukuran lokasi secara terestris dan pembuatan desain, meliputi pengukuran lapangan, penyediaan peta dasar teknis, pembuatan peta situasi lokasi skala 1 : 1000, Pembuatan peta topografi skala 1 : 1000 dan Pembuatan peta rancangan/desain skala 1 : 1000
- Pembuatan daftar petani pemilik/penggarap

- Analisis harga satuan dan perhitungan biaya konstruksi perluasan sawah
Data target dan realisasi untuk kegiatan SID Perluasan sawah yaitu :

Tabel B.4.28 Target dan Realisasi Belanja 526 Uang- SID Perluasan Sawah Ditjen PSP

No	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi*)	
			(volume)	(Rp)	(volume)	(Rp)
1	SID	ha	21.900	8.150.000.000	18.183,13	6.766.776.180
Jumlah				8.150.000.000		6.766.776.180

4) Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Kegiatan ini memiliki pagu senilai Rp80.116.224.000,00 dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp40.869.393.200,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dengan realisasi senilai Rp200.000.000,00 pada Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung.
- Kegiatan Lahan Pertanian Pembangunan Berkelanjutan dengan realisasi senilai Rp5.293.923.000,00.
- Kegiatan Pengembangan Pilot Project mendukung Sumber Daya Lahan di Provinsi Papua senilai Rp21.075.400.000,00
- Kegiatan Pilot Percontohan Ditjen PSP mendukung Aspek Lahan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp11.747.366.000,00.
- Kegiatan Penanganan Infrastruktur pasca HPS 2018 yang kegiatannya terdiri dari ferosemen, pemasangan pipa dan peninggian tanggul di Kabupaten Barito Kuala senilai Rp2.232.796.000,00.
- Sisanya senilai Rp319.908.200,00,00 terdapat pada satker berikut ini:
 - Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (169027) senilai Rp100.000.000,00 berupa SID.
 - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (199133) senilai Rp219.908.000,00 berupa SID optimasi lahan rawa.

5) Data Lahan Pertanian

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemetaan geospasial cetak sawah, memiliki realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp 1.925.370.000,00. Berikut adalah rinciannya :

Tabel B.4.29 Target dan Realisasi Belanja 526 Uang- Data Lahan Ditjen PSP

No	Provinsi	Kode Satker	Pagu	Akun	Total Realisasi	%
1	Kalimantan Barat	139032	1.792.320.000	526312	1.249.850.000	69,73%
2	NTB	239011	1.058.960.000	526312	320.000.000	30,22%
3	Kalimantan Selatan	159004	355.520.000	526312	355.520.000	100,00%
Total			3.206.800.000		1.925.370.000	60,04%

6. Badan Litbang Pertanian

Realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda MAK 526) per 31 Desember 2019 senilai Rp361.152.592.925,00 dikurangi pengembalian belanja senilai Rp80.796.750,00 sehingga realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (MAK 526) netto adalah senilai Rp361.071.796.175,00 atau 93,07% dari jumlah pagu anggaran senilai Rp388.064.158.000,00.

Dari jumlah realisasi belanja MAK 526, dapat dikelompokkan untuk belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp299.640.092.925,00 dikurangi pengembalian belanja senilai Rp31.296.750,00 sehingga belanja bantuan pemerintah berupa barang netto adalah senilai Rp299.608.796.175,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp61.512.500.000,00 dikurangi pengembalian belanja senilai Rp49.500.000,00 sehingga belanja bantuan pemerintah berupa uang netto adalah senilai Rp61.463.000,00.

Penjelasan Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda pada Badan Litbang Pertanian adalah sebagai berikut:

a. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (#BEKERJA)

Kegiatan Bekerja adalah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian yang terintegrasi. Tujuan Program #Bekerja untuk mendiseminasikan inovasi hasil penelitian bibit unggul ayam kampung dan itik lokal dalam rangka melaksanakan pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.

Program #Bekerja merupakan upaya Kementan dalam mengentaskan kemiskinan di tanah air berbasis pertanian dengan tiga tahapan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Target Program menjangkau 1.000 desa di 100 kabupaten dan 10 provinsi dengan Jumlah *Day Old Chicken* (DOC) atau *Day Old Duck* (DOD) 3 Juta Ekor. Bibit yang dibagikan merupakan unggas lokal hasil penelitian pemuliaan Balitbangtan yang mempunyai produktivitas telur lebih tinggi, yaitu Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) dan itik master. Untuk pembagian ke masyarakat diberikan masing-masing 50 ekor per Rumah Tangga Miskin (RTM).

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, tanggal 13 Februari 2019; lokasi kegiatan Bekerja di tahun 2019 berada di Provinsi Jawa Barat yang meliputi : Kab. Karawang, Kab. Majalengka, Kab. Cianjur, Kab. Garut, Kab. Sukabumi, Kab. Tasikmalaya, Kab. Indramayu, Kab. Bandung, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan, Kab. Purwakarta, Kab. Bandung Barat, Kab. Sumedang.

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Permentan No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, tanggal 27 Mei 2019 berada pada provinsi Jawa Tengah (3 Kab. : Tegal, Pekalongan, Batang) dan Jawa Timur (2 Kab. : Bayuwangi dan Situbondo).

Program Bekerja 2019 merupakan kelanjutan dari program Bekerja di tahun 2018. Berdasarkan data Badan Litbang Pertanian 31 Desember 2019 total pagu Rp365.956.384.000,00 dengan realisasi bruto senilai Rp339.467.534.417,00 dan realisasi netto senilai Rp339.386.737.667,00 atau senilai 92,76% dari total anggaran. Sedangkan secara bentuk bantuan program bekerja dibagi dalam bentuk barang dan uang. Untuk program BEKERJA dalam bentuk barang adalah senilai Rp304.339.384.000,00

telah direalisasikan senilai Rp277.955.034.417,00 atau 91,33% dari total anggaran. Untuk total pagu program BEKERJA dalam bentuk uang adalah senilai Rp61.617.000.000,00 dan telah direalisasikan senilai Rp61.512.500.000,00 atau 99,83% dari total anggaran. Rincian pagu dan realiasi program BEKERJA sebagai berikut:

Rincian target dan realiasi program #BEKERJA dalam bentuk barang sebagai berikut :

Tabel B.4.30 Target dan Realisasi Belanja 526 BEKERJA Badan Litbang

No	Satker	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
				(volume)	(Rp)	(volume)	(Rp)
1	BB Biogen	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	853.759	38.045.830.000	853.759	33.691.857.972
2	Balitnak	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	1.117.350	58.640.271.000	1.117.350	54.715.576.623
3	Puslitbangnak	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	1.045.850	53.206.086.000	1.045.850	47.429.345.150
4	BPATP	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	361.500	17.148.365.000	361.500	16.857.637.974
5	BPTP Jabar	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	933.150	53.864.041.000	933.150	52.111.186.181
6	BPTP NTB	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	Paket Teknologi	2	5.771.282.000	2	5.693.088.000
7	BB Pasca Panen	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	682.350	31.901.576.000	682.350	29.160.884.503
8	BBP2TP	Peningkatan Produksi Ternak Unggas Melalui Diseminasi Inovasi mendukung Pengentasan Kemiskinan	Ekor	1.006.050	45.761.933.000	1.006.050	36.264.161.264
Jumlah				6.000.011	304.339.384.000	6.000.011	275.923.737.667

Tabel B.4.31 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Barang -BEKERJA Badan Litbang

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
1	BB Biogen	526112	1.348.775.000	980.851.657	72,72	0	980.851.657
2	BB Biogen	526115	36.697.055.000	32.711.006.315	89,14	0	32.711.006.315
3	Balitnak	526112	1.893.578.000	1.550.901.200	81,90	0	1.550.901.200
4	Balitnak	526115	56.746.693.000	53.164.675.423	93,69	0	53.164.675.423
5	Puslitbangnak	526112	1.543.356.000	1.471.328.536	95,33	0	1.471.328.536
6	Puslitbangnak	526115	51.662.730.000	45.958.016.614	88,96	0	45.958.016.614
7	BPATP	526112	621.525.000	579.293.486	93,21	0	579.293.486
8	BPATP	526115	16.526.840.000	16.278.344.488	98,50	0	16.278.344.488
9	BPTP Jabar	526112	2.003.842.000	1.651.991.100	82,44	0	1.651.991.100
10	BPTP Jabar	526115	51.860.199.000	50.459.195.081	97,30	0	50.459.195.081
11	BPTP NTB	526112	98.200.000	96.975.000	98,75	0	96.975.000
12	BPTP NTB	526115	5.673.082.000	5.596.113.000	98,64	0	5.596.113.000

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
13	BB Pasca Panen	526112	1.059.108.000	784.252.650	74,05	20.586.000	763.666.650
14	BB Pasca Panen	526115	30.842.468.000	28.407.928.603	92,11	10.710.750	28.397.217.853
15	BBP2TP	526112	1.475.244.000	1.078.392.600	73,10	0	1.078.392.600
16	BBP2TP	526115	44.286.689.000	37.185.768.664	83,97	0	37.185.768.664
Jumlah			304.339.384.000	277.955.034.417	91,33	31.296.750	277.923.737.667

Tabel B.4.32 Pagu dan Realisasi Belanja 526 Uang -BEKERJA Badan Litbang

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
1	BB Biogen	526122	8.537.500.000	8.507.000.000	99,64	4.500.000	8.502.500.000
2	Balitnak	526122	11.173.500.000	11.173.000.000	100	0	11.173.000.000
3	Puslitbangnak	526122	10.458.500.000	10.345.000.000	98,91	2.000.000	10.343.000.000
4	BPATP	526122	3.615.000.000	3.615.000.000	100	0	3.615.000.000
5	BPTP Jabar	526122	10.948.500.000	10.948.500.000	100	0	10.948.500.000
6	BB Pasca Panen	526122	6.823.500.000	6.863.500.000	100,59	40.000.000	6.823.500.000
7	BBP2TP	526122	10.060.500.000	10.060.500.000	100	3.000.000	10.057.500.000
Jumlah			61.617.000.000	61.512.500.000	99,83	49.500.000	61.463.000.000

b. Pembangunan Taman Teknologi Pertanian (TTP)

Taman Teknologi Pertanian (TTP) merupakan salah satu upaya untuk mempercepat hilirisasi inovasi pertanian hingga ke daerah-daerah. Dengan adanya TTP diharapkan berbagai macam hasil inovasi teknologi pertanian dapat diinformasikan dan diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu Badan Litbang Pertanian membangun dan mengoptimalkan 26 TTP di seluruh Indonesia. Pembangunan TTP dimulai tahun 2015 sebanyak 16 unit, kemudian dilanjutkan pada 2016 sebanyak 10 unit, tahun 2017 tidak ada penambahan unit, tahun 2018 sebanyak 5 unit dan tahun 2019 sebanyak 1 unit dari total yang ditargetkan sebanyak 100 unit hingga 2019.

Tabel B.4.33 Lokasi Pembangunan TTP Per Tahun Badan Litbang

No	Satker	Lokasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	BPATP	Cigombong		Tidak ada penambahan Unit		
2	BPTP NAD	Aceh Besar				
3	BPTP Sumatera Barat	Lima Puluh Kota				
4	BPTP Sumatera Selatan	Banyuasin				
5	BPTP Jawa Barat	Garut				
6	BPTP Jawa Barat	Cirebon				
7	BPTP Jateng	Tegal				
8	BPTP Yogyakarta	Gunung Kidul				
9	BPTP Jawa Timur	Pacitan				
10	BPTP Jawa Timur	Lamongan				
11	BPTP NTT	Timor Tengah Selatan				
12	BPTP Kalimantan Tengah	Bukit Batu				

No	Satker	Lokasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
13	BPTP Kalimantan Selatan	Tapin				
14	BPTP Kalimantan Selatan	Tanah Laut				
15	BPTP Sulawesi Tengah	Banggai				
16	BPTP Sulawesi Selatan	Bone				
17	BPTP Bali		Tabanan			
18	BPTP Jambi		Tanjung Jabung Timur			
19	BPTP Jawa Timur		Gresik			
20	BPTP Kalimantan Timur		Kutai Kartanegara			
21	BPTP NTB		Sumbawa Barat			
22	BPTP Riau		Siak			
23	BPTP Sulawesi Selatan		Pangkep			
24	BPTP Sulawesi Tenggara		Bombana			
25	BPTP Sumatera Selatan		Oku			
26	BPTP Sumatera Selatan		Muba			
27	BPTP Lampung				Cahaya Negeri	
28	BPTP Yogyakarta				Kulon Progo	
29	BPTP Jawa Barat				Bandung Barat	
30	BPTP Jawa Timur				Trenggalek	
31	BPTP Sulbar				Mamuju Tengah	
32	Puslitbangbun					Kab. Bandung
TOTAL		16 unit	10 Unit		5 Unit	1 unit

Pengembangan TTP dilakukan bekerjasama dengan daerah, namun atas usulan pemerintah daerah sementara Badan Litbang Pertanian sebagai pendamping baik teknologi maupun sumber daya manusia. Namun demikian, kerja sama dengan daerah hanya bersifat sementara atau selama tiga tahun untuk kemudian pengelolaannya diserahkan ke daerah setelah itu.

Belanja 526 TTP adalah belanja 526 untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dalam bentuk Pembangunan Taman Teknologi Pertanian. Pada TA 2019 senilai anggaran TTP mencapai senilai Rp8.628.320.000,00 dengan realiasi bruto dan netto per 31 Desember 2019 senilai Rp8.266.988.600,00. Rincian belanja 526xxx pada TTP per 31 Desember 2019 disajikan sebagai berikut:

Tabel B.4.34 Pagu dan Realisasi Pembangunan TTP Badan Litbang

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
1	Puslitbangbun	526112	512.500.000	504.494.900	98.44	0	504.494.900
2	Puslitbangbun	526113	1.919.620.000	1.909.562.000	99.48	0	1.909.562.000
3	BPTP Sulbar	526112	322.000.000	320.600.000	99.57	0	320.600.000
4	BPTP Sulbar	526113	2.155.000.000	2.147.500.000	99.65	0	2.147.500.000

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
5	BPTP Sulbar	526115	80.000.000	79.900.000	99.88	0	79.900.000
6	BPTP Jatim	526112	347.000.000	345.377.400	99.53	0	345.377.400
7	BPTP Jatim	526113	855.000.000	814.927.000	95.31	0	814.927.000
8	BPTP Jatim	526115	50.000.000	49.500.000	99.00	0	49.500.000
9	BPTP YOGYA	526112	171.400.000	161.343.400	94.13	0	161.343.400
10	BPTP YOGYA	526113	2.215.800.000	1.933.783.900	87.27	0	1.933.783.900
Jumlah			8.628.320.000	8.266.988.600	95.81	0	8.266.988.600

Tabel B.4.35 Target Dan Realisasi Pembangunan TTP Badan Litbang

No	Satker	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
				(volume)	(Rp)	(volume)	(Rp)
1	Puslitbangun	Taman Teknologi Pertanian	Kabupaten	1	2.432.120.000	1	2.414.056.900
2	BPTP Sulbar	Taman Teknologi Pertanian	Kabupaten	1	2.557.000.000	1	2.548.000.000
3	BPTP Jatim	Taman Teknologi Pertanian	Kabupaten	1	1.252.000.000	1	1.209.804.400
4	BPTP DIY	Taman Teknologi Pertanian	Kabupaten	1	2.387.200.000	1	2.095.127.300
Jumlah				4	8.628.320.000	4	8.266.988.600

Sampai dengan 31 Desember 2019 Badan Litbang Pertanian mencatat dalam neraca aset persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda TTP senilai Rp33.145.227.096,00 dan sudah diserahkan masyarakat senilai Rp27.029.466.718,00. Proses penyerahan ke masyarakat/Pemda persentasenya terlihat kecil dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan kendala dalam proses serah terima dan mengakibatkan barang persediaan 526 tersebut masih tercatat dalam neraca. Permasalahan dan kendalanya antara lain:

1. Proses pembangunan aset persediaan 526 belum selesai 100% dan bersifat *multi years*.
2. Belum dilakukan audit oleh APIP. barang-barang dan aset 526 yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemda
3. Proses pengajuan hibah dan penghapusan membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama.
4. Masih adanya permasalahan dan sengketa hukum di lokasi TTP.
5. Belum dibentuknya tim inventarisasi dan penyerahan barang hibah persediaan 526.
6. Belum bersedianya Pemda menerima Hibah.

c. Program Kegiatan Denfarm

Pada tahun 2019 Badan Litbang Pertanian melalui satker BB Padi Sukamandi (kelanjutan tahun 2018) dan BB Pascapanen melakukan kegiatan Denfarm Pertanian modern berbasis korporasi yang merupakan kegiatan bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang berlokasi di Kecamatan Jayakarta. Kabupaten Karawang. Anggaran kegiatan ini adalah senilai Rp13.238.954.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp13.184.333.158,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.4.36 Pagu dan Realisasi Kegiatan Denfarm Badan Litbang

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
1	BB Padi	526112	600.000.000	589.500.000	98,25	0	589.500.000
2	BB Padi	526113	1.214.976.000	1.192.068.630	98,11	0	1.192.068.630
3	BB Padi	526114	3.930.243.000	3.925.647.835	99,88	0	3.925.647.835
4	BB Pasca Panen	526112	5.290.585.000	5.277.671.000	99,76	0	5.277.671.000
5	BB Pasca Panen	526113	1.353.109.000	1.350.532.862	99,81	0	1.350.532.862
6	BB Pasca Panen	526311	850.041.000	848.912.831	99,87	0	848.912.831
Jumlah			13.238.954.000	13.184.333.158	99,59	0	13.184.333.158

Tabel B.4.37 Target Dan Realisasi Kegiatan Denfarm Badan Litbang

No	Satker	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
				(volume)	(Rp)	(volume)	(Rp)
1	BB Padi	Diseminasi Inovasi Teknologi Komoditas Strategis Tanaman Pangan	Teknologi	2	5.745.219.000	2	5.707.216.465
2	BB Pasca Panen	Model Pengembangan Pertanian Modern dan Berkelanjutan Berbasis Korporasi	Model	1	7.493.735.000	1	7.477.116.693
Jumlah				3	13.238.954.000	3	13.184.333.158

Sedangkan nilai aset persediaan diserahkan kepada masyarakat/pemda yang tercatat dalam neraca per 31 Desember 2019 dari kegiatan Denfarm Pertanian modern berbasis korporasi adalah senilai Rp18.023.480.035,00 dan yang telah diserahkan kepada masyarakat adalah senilai Rp132.526.000,00. Rincian per akun disajikan sebagai berikut:

Tabel B.4.38 Nilai Aset Kegiatan Denfarm Badan Litbang

Akun	Nilai Aset BB Padi	Nilai Aset BB Pasca Panen	Total	Telah Diserahkan kepada Masyarakat
117122	0	696.542.710	696.542.710	79.035.000
117124	2.867.962.000	0	2.867.962.000	0
117126	185.974.000	0	185.974.000	0
117127	79.381.500	19.500.000	98.881.500	53.491.000
117129	14.174.119.825	0	14.174.119.825	0
Total	17.307.437.325	716.042.710	18.023.480.035	132.526.000

Besarnya nilai aset yang belum diserahkan kepada masyarakat/pemda karena kegiatan tersebut masih berlanjut sampai akhir tahun 2019 sehingga proses penyerahannya menunggu kegiatan dan proses pengadaan terlaksana 100%.

d. Program Kegiatan Mandiri Pakan

Kegiatan mandiri pakan merupakan kegiatan kelanjutan program bekerja yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian pakan dari potensi daerah yang dimiliki. Anggaran kegiatan ini senilai Rp168.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp161.236.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.4.39 Pagu dan Realisasi Kegiatan Mandiri Pakan Badan Litbang

No	Satker	Akun	Revisi DIPA	Realisasi	Prosentase	Pengembalian Belanja	Belanja Netto
1	BPTP Jatim	526112	60.000.000	59.831.750	99,72	0	59.831.750
2	BPTP Jatim	526113	20.000.000	19.500.000	97,50	0	19.500.000
3	BPTP Sulsel	526311	88.000.000	81.905.000	93,07	0	81.905.000
Jumlah			168.000.000	161.236.750	95,97	0	161.236.750

Tabel B.4.40 Target Dan Realisasi Kegiatan Mandiri Pakan Badan Litbang

No	Satker	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
				(volume)	(Rp)	(volume)	(Rp)
1	BB Padi	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	Model Teknologi	1	80.000.000	2	79.331.750
2	BB Pasca Panen	Diseminasi dan Penyiapan Teknologi Untuk Dimanfaatkan Pengguna	Model Teknologi	1	88.000.000	1	81.905.000
Jumlah				2	168.000.000	3	161.236.750

e. Program Kegiatan ACIAR

Kegiatan hibah dari ACIAR merupakan kegiatan untuk meningkatkan keuntungan produksi sapi potong yang berupa pemberian peralatan dan mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi peternak sapi tersebut. Kegiatan ini anggarannya senilai Rp32.000.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp32.000.000,00 pada satker BPTP Jawa Timur menggunakan akun 526112 berupa 1 (satu) Model Teknologi.

f. Program Kegiatan Upsus

Kegiatan UPSUS/Upaya Khusus merupakan kegiatan hibah berupa selang air yg digunakan Untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian agar dapat segera tanam dan menambah luas tambah tanam di kecamatan Gandus kota Palembang. Kegiatan ini senilai Rp40.500.000,00 dan realisasi per 31 Desember 2019 senilai Rp40.500.000,00 pada satker BB Pasca Panen menggunakan akun 526112 berupa 1 (satu) Paket Teknologi.

7. Badan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP)

Jumlah realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda MAK 526 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 senilai Rp63.847.071.496,00 dikurangi pengembalian belanja senilai Rp173.670.731,00 sehingga realisasi belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda (MAK 526) netto adalah senilai Rp63.673.400.765,00 dari jumlah pagu anggaran senilai Rp67.661.809.000,00.

Dari sejumlah realisasi belanja MAK 526 dapat dikelompokkan untuk belanja bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp57.714.013.265,00 dan belanja bantuan pemerintah berupa uang senilai Rp5.959.387.500,00.

Realisasi belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda berdasarkan detail akun adalah sebagai berikut :

Tabel B.4.41 Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Akun Badan PPSPMP

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kpd masy/Pemda	15.938.512.000	14.527.560.321	0	14.527.560.321	91,15
Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kpd masy/Pemda	4.550.092.000	4.249.363.050	0	4.249.363.050	93,39
Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kpd masy/Pemda bentuk uang	6.015.000.000	5.961.000.000	1.612.500	5.959.387.500	99,08
Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi untuk diserahkan ke Pemda	40.000.000	39.985.000	0	39.985.000	99,96
Belanja barang lainnya untuk diserahkan kpd masyarakat/Pemda	41.118.205.000	39.069.163.125	172.058.231	38.897.104.894	94,60
Jumlah Belanja	67.661.809.000	63.847.071.496	173.670.731	63.673.400.765	94,11

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per out put dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel B.4.42 Target dan Realisasi Belanja 526 per Output Badan PPSPMP

No	Uraian Output	Satuan Volume	Target		Realisasi	
			(volume)	(Rp)	(volume)	(Rp)
1	001 / Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian	Orang	29.875	7.899.030.000	29.705	7.654.726.000
2	003 / Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani	Unit	2.680	1.655.512.000	2.663	1.650.508.500
3	003 / Peningkatan Kinerja Penyuluh	Orang	44.897	40.000.000	43.934	39.985.000
4	010 / Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Petani	6.000	560.000.000	6.000	514.416.000
5	001 / Program Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	Lokasi	90	4.276.175.000	80	2.620.361.000
6	004 / Mahasiswa/Alumni dari Perguruan Tinggi yang Melakukan Pendampingan Dalam Kegiatan Peningkatan Produksi Komoditas Strategis Pertanian	Orang	1.631	42.649.092.000	1.631	40.613.710.394
7	006 / Siswa yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian di SMK-PP	Siswa	22.733	10.582.000.000	22.733	10.579.693.871
Jumlah				67.661.809.000		63.673.400.765

Tabel B.4.43 Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Kegiatan Badan PPSPMP

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)	1.655.512.000	1.650.508.500	99,70
2	Pengadaan Benih Padi dalam rangka Fasilitas Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Project IPDMIP	838.025.000	837.419.050	99,93
3	Pengadaan Buku Paket Rekomendasi Pengelolaan Lahan	297.150.000	0	0
4	Bantuan Fasilitas Perbanyakan Benih dalam rangka dukungan pada BBI/BPTP	969.000.000	0	0
5	Pengadaan Soil Tester dan Fertilizer Kit	2.172.000.000	1.782.941.950	82,09
6	Pengadaan Sarana Pembelajaran dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dalam bentuk uang	6.015.000.000	5.959.387.500	99,08
7	Pengadaan Sarana Pembelajaran dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dalam bentuk barang	41.118.205.000	38.897.104.894	94,60
8	Pengadaan Pakan Ayam Program Bekerja di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pandeglang	3.314.417.000	3.311.444.000	99,91
9	Pengadaan Alat Pendukung Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan BPPSPMP	40.000.000	39.985.000	99,96
10	Pengadaan bantuan praktik siswa bagi SMK PP	10.582.000.000	10.579.693.871	99,98
11	Pengadaan Alat Pengolah Data Dalam Rangka mendukung Manajemen Project SIMURP	560.000.000	514.416.000	91,86
12	Pengadaan Domba dalam rangka Pembinaan Desa Mitra/Pemberdayaan Masyarakat	100.500.000	100.500.000	100,00
	Total	67.661.809.000	63.673.400.765	94,11

Penjelasan alokasi Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan Sarana dan Prasarana bagi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S)

a. Tujuan :

Meningkatkan kemampuan penyelenggara dalam menyelenggarakan pemberdayaan petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S).

Menjamin Penyelenggaraan pemberdayaan petani sesuai dengan prinsip, tahapan, dan peran P4S.

b. Kriteria Penilaian:

- P4S dengan klasifikasi madya atau utama yang aktif dan berkinerja baik, yang memiliki keunggulan dalam salah satu atau lebih dari 7 (tujuh) komoditas utama.
- P4S belum pernah memperoleh hibah atau dari program sejenis (APBN/APBD)
- Lokasi P4S diutamakan berada di wilayah terluar, terisolir atau tertinggal
- Untuk mengetahui keaktifan dan kinerja P4S dilakukan melalui kegiatan reklasifikasi

2. Pengadaan Benih Padi dalam rangka Fasilitasi Kegiatan Sekolah Lapang (SL) Project IPDMIP

a. Tujuan :

- Mengadakan dan mendistribusikan bantuan pemerintah berupa benih padi pokok/label ungu kepada petani peserta sekolah lapang (SL) di Kabupaten Pati, provinsi Jawa Tengah.
- Mengadakan benih pokok/label ungu untuk digunakan dalam kerjasama NPIU dengan petani penangkar di lokasi IPDMIP di Provinsi Jawa Tengah untuk memperbanyak benih pokok menjadi benih sebar.

b. Kriteria Penerima :

- Petani anggota kelompok tani calon peserta sekolah lapangan Tahun 2019 yang ditetapkan oleh dinas pertanian kabupaten lokasi proyek IPDMIP.
- Kelompok tani yang memiliki rekomendasi dari Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih sebagai penangkar benih padi, diusulkan oleh dinas pertanian kabupaten lokasi proyek IPDMIP, dan bersedia melaksanakan perbanyakan benih padi pokok menjadi benih padi sebar melalui swakelola.

3. Pengadaan Buku Paket Rekomendasi Pengelolaan Lahan

Salah satu komponen dalam Proyek IPDMIP adalah peningkatan produktivitas dan layanan pertanian, yang arahnya pada perbaikan kinerja usahatani melalui penerapan teknologi rekomendasi yang dapat meningkatkan hasil, mutu, dan efisiensi. Untuk mendorong terwujudnya tujuan komponen tersebut, para penyuluh pertanian di lapangan perlu dibekali dengan informasi yang sah tentang berbagai rekomendasi teknologi spesifik lokasi, baik menyangkut benih, varietas, cara tanam, pupuk, penggunaan air, dan sebagainya.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) sampai dengan saat ini telah mengeluarkan paket buku Rekomendasi Pengelolaan Lahan yang berisi berbagai rekomendasi teknologi budidaya komoditas pertanian prioritas di setiap kabupaten. Proyek IPDMIP memandang paket buku tersebut sangat relevan untuk membekali para penyuluh pertanian dalam memberikan rekomendasi teknologi spesifik lokasi kepada para petani di daerah irigasi.

a. Tahapan

- 1) Tim Kerja NPIU melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) untuk merumuskan bentuk kerjasama dalam pengadaan paket buku Rekomendasi Pengelolaan Lahan;
- 2) Tim Kerja NPIU melakukan identifikasi kabupaten berikut kecamatan/BPP pelaksana Proyek IPDMIP yang layak mendapat distribusi paket buku RPL tersebut;
- 3) Tim Pengadaan NPIU melaksanakan proses pengadaan paket buku RPL bekerjasama dengan perusahaan jasa percetakan;
- 4) Pelaksana pekerjaan mendistribusikan paket buku RPL ke seluruh kabupaten lokasi Proyek IPDMIP terpilih

b. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah berupa paket buku Rekomendasi Pengelolaan Lahan (RPL) diberikan kepada kabupaten/DPIU yang tercatat aktif melaksanakan Proyek IPDMIP,

dengan kriteria: (i) mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk kegiatan IPDMIP selama dua tahun (2018 dan 2019); (ii) mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk kegiatan IPDMIP selama tahun berjalan (2019).

4. Bantuan Fasilitasi Perbanyakan Benih dalam rangka Dukungan pada BBI/BPTP

Proyek IPDMIP menyediakan dukungan teknis yang bisa diakses oleh BBI di lokasi proyek agar BBI dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas outputnya dan sekaligus dapat bekerjasama dengan proyek untuk memproduksi benih padi pokok/label ungu untuk kebutuhan perbanyakan benih sebar bagi petani penangkar benih padi di lokasi sasaran Proyek. Bantuan teknis ini dapat diakses oleh setiap BBI di lokasi Proyek IPDMIP dengan mengajukan usulan/proposal yang kemudian akan direview dan diverifikasi oleh Tim IPDMIP untuk menyepakati bentuk dukungan teknis yang akan diberikan kepada BBI. Ruang lingkup dukungannya bisa berupa bantuan peralatan dan penguatan kapasitas SDM benih di BBI. Pada Tahun Anggaran 2019 ini walau anggaran untuk kegiatan ini sudah dialokasikan, namun kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena Proyek IPDMIP belum memiliki Tenaga Ahli Benih yang bertugas antara lain melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh BBI.

5. Pengadaan Soil Tester dan Fertilizer Kit

Salah satu sarana produksi yang diberikan dalam budidaya padi adalah pupuk, baik pupuk kimia maupun pupuk organik. Petani memberikan pupuk untuk memenuhi kebutuhan tanaman akan unsur hara guna mendukung tingkat produksi atau hasil yang tinggi. Selain itu, pemberian sejumlah pupuk untuk mencapai ketersediaan hara esensial yang seimbang dan optimum di dalam tanah, sehingga memungkinkan tercapainya produktivitas yang tinggi, mutu yang baik, efisiensi pemupukan, terpeliharanya kesuburan tanah dan mengurangi pencemaran lingkungan.

Untuk membantu para petani di daerah irigasi mengetahui kondisi status hara tanah-nya secara akurat sebagai dasar pemberian pupuk secara berimbang, Proyek IPDMIP akan melakukan pengadaan Perangkat Uji Tanah, baik untuk sawah (PUTS) maupun rawa (PUTR). Selain itu, Proyek IPDMIP juga akan melakukan pengadaan Perangkat Uji Pupuk. Perangkat uji tanah dan Perangkat uji pupuk tersebut akan didistribusikan ke Balai Penyuluhan Pertanian lokasi Proyek IPDMIP.

a. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan dengan sebagai berikut:

- 1) Tim Kerja NPIU melakukan koordinasi dengan Balai Penelitian Tanah untuk merumuskan bentuk kerjasama dalam pengadaan perangkat uji pupuk;
- 2) Tim Kerja NPIU melakukan identifikasi kabupaten berikut kecamatan/BPP pelaksana Proyek IPDMIP yang layak mendapat distribusi perangkat uji pupuk;
- 3) Tim Kerja NPIU merumuskan MOU Swakelola dan Kontrak Pengadaan Perangkat Uji Pupuk dengan Balai Penelitian Tanah;
- 4) Balai Penelitian Tanah melaksanakan kerjasama swakelola pengadaan Perangkat Uji Pupuk dan pendistribusiannya ke seluruh kabupaten lokasi Proyek IPDMIP terpilih

b. Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah berupa Perangkat Uji Tanah dan Perangkat Uji Pupuk diberikan kepada kabupaten/DPIU yang tercatat aktif melaksanakan Proyek IPDMIP, dengan kriteria: (i) mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk kegiatan IPDMIP selama dua tahun (2018 dan 2019); (ii) mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk kegiatan IPDMIP selama tahun berjalan (2019).

Penerima Bantuan Pemerintah berupa Perangkat Uji Tanah dan Perangkat Uji Pupuk adalah 67 DPIU/Dinas Pertanian, yang selanjutnya meminjam-pakaikan perangkat tersebut kepada 362 Balai Penyuluhan Pertanian.

6. Pengadaan Sarana Pembelajaran dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM)

Pengadaan sarana pembelajaran terdiri dari :

- Pengadaan Kandang Ayam dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dalam bentuk uang senilai Rp5.959.387.500,00
- Pengadaan Ayam, Pakan, dan Vitamin Ayam dalam rangka Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) dalam bentuk barang senilai Rp38.897.104.894,00

a. Tujuan :

- Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap santri tani milenial.
- Memberikan kesempatan kepada santri tani milenial untuk mempelajari bidang pertanian melalui pendekatan kelompok.

b. Penerima :

- 1987 Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) penerima bantuan dalam bentuk uang (pengadaan kandang ayam)
- 2007 Kelompok Santri Tani Milenial (KSTM) penerima bantuan dalam bentuk barang berupa Ayam, Pakan dan Vitamin Ayam.

7. Pengadaan Pakan Ayam Program Bekerja di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pandeglang

a. Tujuan :

- Membentuk kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi
- Membentuk gabungan kelompok tani sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani/produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro.
- Membentuk Rumah Tangga Miskin (RTM) pra sejahtera menjadi petani maju.

b. Penerima :

Penerima Pakan Ayam Program Bekerja terdiri dari 5091 RTM yang tersebar di kecamatan - kecamatan di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pandeglang dengan total Pakan Ayam senilai Rp3.311.444.000,00.

8. Pengadaan Alat Pendukung Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan BPPSDMP

Bantuan Pemerintah ini merupakan belanja barang penunjang dana dekonsentrasi untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Pemda berupa pengadaan alat pengolahan data dalam

mendukung Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan BPPSDMP pada satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Aceh. Pengadaan bantuan pemerintah ini berupa tiga unit laptop dan satu unit printer untuk dukungan Penyusunan Rancangan Program/Kegiatan BPPSDMP.

9. Bantuan Praktik Siswa
 - a. Tujuan :
Memberikan bantuan peralatan praktik kepada siswa SMK PP dan SMK bidang keahlian agri bisnis dan agro teknologi
 - b. Penerima :
87 SMK / SMK PP binaan Pusat Pendidikan, BPPSDMP.
10. Pengadaan Alat Pengolah Data Dalam Rangka Mendukung Manajemen Project SIMURP
 - a. Tujuan :
Untuk meningkatkan pelayanan irigasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan sistim irigasi di daerah irigasi terpilih seluas 276.000 hektar, dan meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP) Padi (%) dari target 180% menjadi 200%.
 - b. Penerima :
8 Pemda provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat) dan 16 Pemda Kabupaten (Indramayu, Cirebon, Karawang, Subang, Purworejo, Purbalingga, Banjarnegara, Jember, Banyuasin, Katingan, Bone, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Lombok Tengah).
11. Pengadaan Domba dalam rangka Pembinaan Desa Mitra/Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Tujuan :
Menumbuhkan usaha bersama kelompok tani
 - b. Penerima :
6 (Enam) kelompok tani di desa lemah duhur, kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

8. Badan Ketahanan Pangan (BKP)

Belanja Mak 526 ini di anggarkan untuk mencapai Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan dan rawan pangan maka pada TA. 2019 dianggarkan senilai Rp 346.557.700.000,00 yaitu dalam bentuk barang senilai Rp73.307.700.000,00 dan dalam bentuk uang Rp273.250.000.000,00. Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp341.902.532.991,00 yaitu realisasi dalam bentuk barang senilai Rp71.286.334.976,00 dan realisasi berupa uang senilai Rp270.616.198.015,00. Belanja MAK 526 dianggarkan untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :

Tabel B.4.44 Pagu dan Realisasi Belanja 526 per Kegiatan di BKP

KETERANGAN	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	221.693.960.000	218.956.199.875	98.77
Barang	115.613.960.000	113.270.001.860	97.97
Uang	106.080.000.000	105.686.198.015	99.63

KETERANGAN	Grand Total		
	Pagu	Realisasi	%
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	47.475.000.000	45.299.617.213	95.42
Barang	44.225.000.000	42.049.617.213	95.08
Uang	3.250.000.000	3.250.000.000	100.00
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	268.779.525.000	260.740.119.194	97.01
Barang	104.859.525.000	99.060.119.194	94.47
Uang	163.920.000.000	161.680.000.000	98.63
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	141.758.179.000	134.666.481.332	95.00
Barang	141.758.179.000	134.666.481.332	95.00
Grand Total	679.706.664.000	659.662.417.614	97.05

Rincian Pagu dan Realisasi Fisik per output kegiatan sebagai berikut :

Tabel B.4.45 Target dan Realisasi Belanja 526 per Output di BKP

KETERANGAN	Grand Total			Fisik		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Ket
1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	156.356.500.000	155.370.503.695	99.37	1.781	1.777	
1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat	26.580.000.000	26.579.860.675	100.00	443	443	Unit
Bantuan uang - 526312	26.580.000.000	26.579.860.675	100.00	443	443	Unit
1814.112 Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen	276.500.000	275.795.112	99.75	13	13	Lokasi
Bantuan Barang - 526211	276.500.000	275.795.112	99.75	13	13	Lokasi
1814.113 Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina	129.500.000.000	128.514.847.908	99.24	1.325	1.321	
Bantuan Barang - 526311	50.000.000.000	49.408.510.568	98.82	500	500	Gapoktan
Bantuan uang - 526312	79.500.000.000	79.106.337.340	99.50	1.325	1.321	Gapoktan
1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	4.558.500.000	4.546.678.590	99.74	14	14	
1815.106 Kawasan Mandiri Pangan	4.550.000.000	4.538.378.590	99.74	13	13	Lokasi
Bantuan Barang - 526311	1.300.000.000	1.288.378.590	99.11	13	13	Lokasi
Bantuan uang - 526312	3.250.000.000	3.250.000.000	100.00	13	13	Lokasi
1815.107 Pemantauan Ketersediaan, akses dan Kerawanan Pangan	8.500.000	8.300.000	97.65	1	1	Rekomendasi
Bantuan Barang - 526211	8.500.000	8.300.000	97.65	1	1	Rekomendasi
1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	168.944.200.000	166.133.072.383	98.34	4.629	4.544	
1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan	160.670.000.000	158.680.000.000	98.76	4.600	4.517	Kelompok
Bantuan uang - 526312	160.670.000.000	158.680.000.000	98.76	4.600	4.517	Kelompok
1816.105 Pengembangan Pangan Lokal	8.250.000.000	7.428.872.383	90.05	25	23	Unit
Bantuan Barang - 526311	5.000.000.000	4.428.872.383	88.58	10	9	Unit
Bantuan uang - 526312	3.250.000.000	3.000.000.000	92.31	25	23	Kelompok

KETERANGAN	Grand Total			Fisik		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	Ket
1816.107 Percepatan pengankaragaman konsumsi pangan	24.200.000	24.200.000	100.00	4	4	Unit
Bantuan Barang - 526211	24.200.000	24.200.000	100.00	4	4	Unit
1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	16.698.500.000	15.852.278.323	94.93	337	322	
1817.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	16.698.500.000	15.852.278.323	94.93	335	320	
Bantuan Barang - 526112	127.000.000	126.025.492	99.23	3	3	Rekomendasi
Bantuan Barang - 526115	16.550.000.000	15.704.752.831	94.89	331	316	Paket
Bantuan Barang - 526211	21.500.000	21.500.000	100.00	1	1	Uniti
Grand Total	346.557.700.000	341.902.532.991	98.66	7.268	7.171	

1. Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan

Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat. dan antisipasi kebutuhan pangan.

Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan tersebut TA. 2019 senilai Rp156.356.500.000,00 yang terdiri atas pagu banper barang Rp50.276.500.000,00 dan banper uang Rp106.080.000.000,00 Sampai dengan 31 Desember 2019, dana bantuan yang terealisasi senilai Rp155.370.503.695,00 yang terdiri atas realisasi banper barang Rp49.684.305.680,00 dan banper uang Rp105.686.198.015,00.

Dana Bantuan tersebut di berikan untuk membantu pelaksanaan kegiatan : (1)Lumbung Pangan Masyarakat (2) Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen dan (3) Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat - Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)

➤ Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung. pengisian cadangan pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.

Anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan Lumbung Pangan di TA. 2019 di alokasikan senilai Rp26.580.000.000,00 berupa uang. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp26.579.860.675,00.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terdapat pengembalian sisa dana senilai Rp 139.325 berasal dari Provinsi Gorontalo dari 5 kelompok LPM. dengan rincian sebagai berikut:

1. LPM Olimohulo Indah : Rp 14.200.-
2. LPM Mulyorejo : Rp. 76.125.-
3. LPM Sumber Rejeki : Rp. 6.000.-
4. LPM Dataran Tinggi I : Rp. 21.500.-
5. LPM Bima Jaya : Rp. 21.500.-.

- Lembaga Distribusi Pangan yang Dibina melalui kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat – Toko Tani Indonesia (PUPM-TTI)
Badan Ketahanan Pangan meluncurkan program kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) – Toko Tani Indonesia (TTI) merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis. rantai distribusi pemasaran yang terintegrasi agar lebih efisien. harga konsumen dapat ditransmisikan dengan baik kepada harga petani. informasi pasar anatr wilayah berjalan dengan baik dan mencegah penyalahgunaan *marketpower* oleh pelaku usaha tertentu.

Anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan PUPM-TTI di tahun 2019 terbagi atas :

- Tahap penumbuhan di alokasikan di 22 Provinsi (Sumatera Barat. Sumatera Selatan. Sumatera Utara. Riau. Jambi. Bengkulu. Jawa Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah. Jawa Timur. Aceh. Bali. Lampung. Kalimantan Selatan. Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Nusa Tenggara Barat. Sulawesi Selatan. Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah. Gorontalo dan Banten) senilai Rp80.000.000.000 yang di targetkan pada 500 PUPM @Rp160.000.000 yang terdiri dari banper uang Rp. 60.000.000 dan banper barang Rp. 100.000.000 dipergunakan untuk untuk pengadaan alat mesin (sudah termasuk instalasi. mesin penggerak dan ongkos kirim) berupa Husker atau rice polisher apabila masih terdapat sisa dana dapat digunakan untuk pembelian sealer/timbangan/alat jahit kemasan
- Tahap pengembangan di alokasikan di 16 provinsi (Aceh. Sumatera Utara. Sumatera Barat. Sumatera Selatan. Lampung. Banten. Jawa Barat. Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Timur. Bali. Nusa Tenggara Barat. Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan. Sulawesi Selatan dan Gorontalo) senilai Rp27.300.000.000 yang di berikan kepada 455 PUPM @Rp60.000.000
- Untuk Pembinaan di alokasikan di 7 Provinsi (Sumatera Selatan. Lampung. Banten. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat)) senilai Rp22.200.000.000 yang di berikan kepada 370 PUPM @Rp60.000.000

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp128.514.847.908 yang terdiri atas realisasi banper barang Rp49.408.510.568 dan banper uang Rp79.106.337.340 yaitu untuk tahap penumbuhan sebanyak 500 Gapoktan, tahap pengembangan 451 Gapoktan dan pembinaan 370 Gapoktan. Untuk banper Tahap Pengembangan terdapat 4 Gapoktan yang tidak mencairkan dana yaitu di Propinsi Aceh 1 gapoktan, Sumatera Utara 2 gapoktan dan Sumatera Selatan 1 gapoktan. Gapoktan tidak memenuhi syarat sesuai petunjuk teknis untuk pencairan dana operasional.

- Layanan Stabilisasi Harga komoditas pangan strategis di tingkat Produsen dan Konsumen.

Untuk menunjang kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan maka di anggarkan bantuan pemerintah berupa barang yang dipergunakan untuk fasilitasi TTIC guna menjaga stabilitasi harga komoditas pangan senilai Rp276.500.000 pada 13 provinsi. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp275.795.112.

2. Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan upaya memantapkan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri sekaligus pengurangan jumlah penduduk rawan pangan.

Intervensi kegiatan dilakukan melalui :

- a. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA;
- b. Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- c. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- d. Pemantauan stok gabah di penggilingan dan pedagang;
- e. Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU);
- f. Pelaksanaan Kajian.

Alokasi anggaran belanja mak 526 untuk kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan TA. 2019 senilai Rp4.558.500.000,00 terdiri atas banper berupa barang Rp1.308.500.000,00 dan banper berupa uang Rp3.250.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019, dana bantuan yang terealisasi senilai Rp4.546.678.590,00 terdiri atas realisasi banper barang Rp1.288.378.590,00 dan banper uang Rp3.250.000.000,00.

➤ Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

Kegiatan Kawasan Mandiri Pangan (KMP) yang dilakukan Badan Ketahanan Pangan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 merupakan intervensi dalam pengentasan daerah rentan rawan pangan. Proses dan tahapan yang dirancang cukup ideal selama 4 (empat) tahun dalam satu kawasan melalui pemberdayaan masyarakat terutama pelaku yang tergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Kelembagaan petani yang telah terbentuk dari kegiatan KMP di daerah rentan rawan pangan dipandang masih perlu difasilitasi dan diperkuat. Dalam rangka memperkuat kelembagaan KMP yang telah terbentuk dan sejalan dengan perubahan dan dinamika yang ada, maka pada tahun 2019 dilakukan penyempurnaan kegiatan KMP dengan mentransformasikannya menjadi Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU).

Tujuan dari kegiatan PKU yaitu: untuk meningkatkan nilai tambah produk komoditas kelompok tani dan meningkatkan pendapatan. Sasaran PKU 2019 adalah 13 lokasi di daerah rentan rawan pangan yang mempunyai potensi sumber daya pangan untuk pengembangan usaha berdasarkan data FSVA Nasional 2018 prioritas 3, 4 dan 5 dan atau persentase Rumah Tangga Miskin Petani (RTM-P) >20% dan atau daerah stunting berdasarkan data hasil pemantauan Situasi Pangan dan Gizi (PSG) tahun 2017. Kementerian Kesehatan (indikator FSVA Nasional 2018).

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di TA. 2019 senilai Rp4.550.000.000,00. Alokasi berupa barang senilai Rp1.300.000.000,00 dan berupa uang senilai Rp3.250.000.000,00 di targetkan 13 Kawasan pada 13 Kabupaten/Kota di 12 provinsi masing-masing senilai Rp350.000.000,00 per Kabupaten/Kota. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah di realisasikan senilai Rp4.043.888.000,00 dengan perincian berupa barang senilai Rp793.888.000,00 dan berupa uang senilai Rp3.250.000.000,00.

Alokasi kegiatan PKU dilaksanakan di 12 Provinsi 13 Kabupaten dengan rincian kegiatan usahanya dapat dilihat pada **Lampiran B.4.3.**

➤ **Pemantauan Ketersediaan akses dan Kerawanan Pangan**

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2019 senilai Rp8.500.000,00 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah di realisasikan senilai Rp8.300.000,00.

3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan dan memasyarakatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Sasaran output kegiatan adalah meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar.

Alokasi anggaran belanja mak 526 pada TA. 2019 senilai Rp168.944.200.000,00 yaitu anggaran dalam bentuk barang senilai Rp5.024.200.000,00 dan dalam bentuk uang senilai Rp166.133.072.383,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 dana bantuan yang terealisasi senilai Rp158.990.601.560,00 yaitu realisasi dalam bentuk barang senilai Rp4.453.072.383,00 dan dalam bentuk uang senilai Rp161.680.000.000,00.

➤ **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)**

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kegiatan KRPL juga dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk penanganan daerah stunting. Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (Bekerja). penanganan wilayah rentan rawan pangan dan pengembangan daerah perbatasan. Pada KRPL yang mendukung kegiatan Bekerja. akan diberikan bantuan ternak unggas dan sarannya untuk peningkatan produksi ternak unggas melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan peningkatan konsumsi pangan dan gizi.

Pendekatan pengembangan KRPL dilakukan melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). . yaitu dengan membangun kebun bibit. demonstrasi plot (demplot). serta kebun sekolah yang berada di lingkungan kelompok. Pengembangan KRPL harus mengutamakan sumber daya lokal disertai pemanfaatan sumberdaya lokal (local wisdom) dan pemberdayaan masyarakat

Secara konsepsional kegiatan KRPL tahun 2019 dilaksanakan dalam 2 tipe. yaitu:

1. Kegiatan KRPL Bekerja

Kegiatan KRPL Bekerja adalah kegiatan KRPL yang dialokasikan untuk mendukung program Bekerja secara langsung. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program Bekerja berdasarkan Permentan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Kegiatan KRPL Bekerja merupakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan berbasis tanaman dan ternak. Budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sumber karbohidrat. vitamin dan mineral. sedangkan ternak selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber pendapatan rumah tangga

dalam rangka pengentasan kemiskinan. Komponen kegiatan KRPL Bekerja: (1) pengembangan pekarangan. (2) ternak unggas. dan (3) kandang. KRPL Bekerja terdiri atas 744 kelompok dengan mendapat bantuan pemerintah senilai @Rp65.000.000. dimanfaatkan untuk: (1) Pengembangan ternak: obat-obatan untuk 1.350 ekor; (2) Pembuatan kandang: bahan dan sarana pendukungnya; dan (3) pengembangan pekarangan anggota: benih/bibit tanaman. media tanam. pupuk. polybag. pot. rak. peralatan pengairan sederhana. dan sarana pendukung lainnya

2. Kegiatan KRPL Non Bekerja

Kegiatan KRPL Non Bekerja merupakan kegiatan KRPL yang tidak termasuk lokasi Bekerja BKP sesuai Permentan Nomor 43 Tahun 2018. Komponen kegiatan KRPL Non Bekerja: (1) kebun bibit desa. (2) demplot. dan (3) pengembangan pekarangan.

KRPL non bekerja terdiri atas :

- Tahap penumbuhan/reguler terdiri atas 1.556 kelompok dengan mendapat bantuan pemerintah senilai @Rp50.000.000,00 dengan rincian: Kebun Bibit Rp20.000.000,00. Demplot Rp9.000.000. Pengembangan Pekarangan Anggota Rp21.000.000,00.
- Tahap pengembangan terdiri atas 2.300 kelompok dengan mendapat bantuan pemerintah senilai @Rp15.000.000.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini dalam bentuk uang di tahun 2019 senilai Rp160.670.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah di realisasikan senilai Rp158.680.000.000,00.

➤ Pengembangan Pangan Lokal melalui Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL)

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah melaksanakan program pengembangan pangan lokal sejak tahun 2012 melalui kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) dan pada tahun 2018 bertransformasi menjadi kegiatan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L). Kegiatan ini dirasakan masih belum efisien dan efektif karena skala usaha yang tercipta belum terlalu besar yang mengakibatkan harga produk yang dihasilkan relatif tinggi sehingga tidak mampu bersaing di pasar. Selain itu, banyak ditemui permasalahan pada sisi jaminan kontinuitas bahan baku serta pemasaran belum digarap dengan intensif yang berakibat ketidakstabilan produksi dan produk yang dihasilkan mengalami kesulitan dalam penjualan.

Pada tahun 2019 kegiatan pengembangan pangan lokal mencakup dua kegiatan, yaitu Pengembangan Industri Pangan Lokal (PIPL) dan Pengembangan Pangan Pokok Lokal (P3L) Tahap Pengembangan. Kegiatan PIPL merupakan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal dengan skala usaha yang lebih besar dengan fokus untuk menghasilkan bahan baku industri pengolahan pangan berbasis tepung. Sedangkan kegiatan P3L tahap pengembangan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan P3L tahun 2018. Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal diharapkan dapat lebih mendorong terwujudnya industrialisasi pangan lokal yang menghasilkan produk pangan yang berdaya saing.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan ini di tahun 2019 yaitu berupa barang senilai Rp5.000.000.000,00 dan berupa uang senilai Rp3.250.000.000,00.

Anggaran ini untuk tahap penumbuhan senilai Rp6.000.000.000 dengan bantuan berupa barang senilai @Rp500.000.000 dan berupa uang senilai @Rp100.000.000,00 untuk 10 kelompok dan untuk Tahap pengembangan P3L dengan bantuan berupa uang senilai @Rp150.000.000 untuk 15 kelompok di 13 Propinsi.

Sampai pada 31 Desember 2019. Realisasi kegiatan PIPL tahap penumbuhan berupa barang senilai Rp4.428.876.184,00 dan berupa uang Rp900.000.000,00 sedangkan untuk kegiatan P3L tahap pengembangan telah direalisasikan senilai Rp2.100.000.000,00.

➤ **Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Untuk mendukung kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Badan Ketahanan Pangan di tahun 2019 mengalokasikan anggaran bantuan pemerintah berupa barang senilai Rp24.200.000. sampai dengan 31 Desember 2019 telah di realisasikan senilai Rp24.200.000. yaitu pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan D.I. Yogyakarta yang di pergunakan untuk membeli peralatan untuk mendukung kegiatan tersebut berupa terdiri dari Komputer (pc unit). Notebook. printer dan kamera.

4. Dukungan Manajemen Dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini di tujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah ini digunakan untuk mendukung percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Kementerian Pertanian akan melaksanakan Obor Pangan Lestari (OPAL) sebagai sarana percontohan untuk masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan OPAL berupa barang di tahun 2019 senilai Rp16.550.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah di realisasikan senilai Rp15.704.752.831,00.

Terdapat 15 paket anggaran OPAL yang tidak dicairkan yaitu di Provinsi Jawa Timur sebanyak 5. Sumatera Utara sebanyak 2. Nusa Tenggara Timur sebanyak 5. Sulawesi Barat sebanyak 1. Bali sebanyak 1 dan Maluku sebanyak 1.

Alokasi anggaran bantuan pemerintah untuk kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Lainnya Rp127.000.000,00 yang telah direalisasikan senilai Rp126.025.492,00.

Realisasi barang di Propinsi Bengkulu berupa Laptop, di propinsi D.I Yogyakarta berupa komputer, scanner, camera dan printer.

Untuk Realisasi barang di Badan Ketahanan Pangan Pusat berupa Pompa Air diserahkan ke-4 (empat) KWT di daerah Lampung. yaitu KWT Asoka MAndiri Makmur. KWT Mukti Tani. KWT Kamboja III dan KWT Brayat Hati Makmur.

9. Belanja Non Operasional Namun Direalisasikan Sebagai Bantuan Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Terdapat belanja non operasional namun direalisasikan sebagai bantuan yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Belanja barang non operasional tersebut adalah Kegiatan Asuransi Usaha Tani (AUT).

Realisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya untuk kegiatan Asuransi Usaha Tani per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 162.285.901.440,00. Kegiatan Asuransi Usaha Tani yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian (Ditjen PSP) ada dua yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Asuransi usaha tani padi diberikan kepada 1.569.318 petani senilai Rp. 139.855.501.440,00 dan 66.658 peternak sapi/kerbau senilai Rp. 22.430.400.000,00 sehingga seluruhnya senilai Rp. 162.285.901.440,00. Kegiatan AUTP tersebar di 24 provinsi dan 236 Kabupaten sedangkan kegiatan AUTS/K tersebar di 28 provinsi dan 280 Kabupaten. Rincian Penyebaran Kegiatan AUTP dan AUTS/K dapat dilihat pada **Lampiran B.4.4 dan Lampiran B.4.5**. Anggaran dan realisasi kegiatan tersebut tahun 2019 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel B.4.46 Target dan Realisasi Kegiatan Asuransi Usaha Tani

Kegiatan	Anggaran		Realisasi		KET
	Unit	Nilai (Rp)	Unit	Nilai (Rp)	
AUTS	150.000 ekor	24.000.000.000	140.190	22.430.400.000	
AUTP	1.000.000 Ha	144.000.000.000	971.218,76	139.855.501.440	

a. Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K)

Asuransi Usaha Tani/Ternak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional. Hal ini dilatarbelakangi fakta bahwa pangan, termasuk didalamnya produk pangan asal ternak merupakan kebutuhan dasar warga negara yang harus dijamin ketersediaannya oleh Pemerintah. Dalam rangka penguatan skala ekonomi dan kelembagaan peternak, Pemerintah mengupayakan serangkaian kebijakan, antara lain melalui Ditjen PSP yaitu memfasilitasi Asuransi Ternak Sapi (AUTS) yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan usaha dan memungkinkan sapi dapat digunakan sebagai agunan bila memerlukan pinjaman uang untuk modal.

Bantuan AUTS adalah melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah Rp160.000,00 (80 %) dari premi yang harus dibayar senilai Rp200.000,00 sehingga peternak hanya membayar 20 % atau Rp40.000,00/ekor untuk masa pertanggungan satu tahun dengan uang pertanggungan senilai Rp10.000.000,00/ekor.

Pada periode Tahun 2019, capaian jumlah asuransi ternak sapi/Kerbau (AUTS/K) adalah sebanyak 140.190 ekor atau senilai 93,46% dari target sejumlah 150.000 ekor. Sedangkan capaian realisasi keuangan adalah senilai Rp. 22.430.400.000 atau 93,46% dari target senilai Rp.24.000.000.000,00. Kegiatan asuransi ternak sapi ini mulai dilaksanakan sebagai program kegiatan prasarana dan sarana pertanian pada tahun 2016.

b. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP merupakan salah satu program yang dikembangkan untuk mewujudkan peranan pemerintah dalam aspek perlindungan dan pemberdayaan petani. Bantuan AUTP adalah melalui pembayaran bantuan premi dari pemerintah Rp144.000,00 (80 %) dari premi yang harus dibayar senilai Rp180.000,00 sehingga petani lahan hanya membayar 20 % atau Rp36.000,00/Ha untuk pertanggungan satu musim tanam sehingga peetani lahan hanya membayar 20% atau Rp36.000,00/ha/musim tanam dengan uang pertanggungan senilai Rp6.000.000,00/Ha.

Pada periode tahun 2019, capaian jumlah asuransi pertanian (AUTP) seluas 971.218,76 ha dari target seluas 1.000.000 ha. Realisasi keuangan adalah senilai Rp139.855.501.440,00 dari target senilai Rp144.000.000.000,00 (97,12%).

B.5 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp883.339.624.804,00 dan Rp869.175.725.907,00. Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan senilai Rp14.163.898.897,00 atau 1,63% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh peningkatan pengadaan peralatan dan mesin serta pembangunan gedung dan bangunan.

Tabel B.5.1 Perbandingan Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Tanah	29.380.033.886	0	29.380.033.886	90.746.973.810	(61.366.939.924)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	426.364.006.344	17.718.000	426.346.288.344	344.648.486.343	81.697.802.001
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	381.879.485.134	1.478.700	381.878.006.434	340.623.329.830	41.254.676.604
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.939.705.837	0	21.939.705.837	38.922.004.810	(16.982.298.973)
Belanja Modal Lainnya	12.447.642.241	0	12.447.642.241	23.145.707.814	(10.698.065.573)
Belanja Modal BLU	11.347.948.062	0	11.347.948.062	31.089.223.300	(19.741.275.238)
Jumlah	883.358.821.504	19.196.700	883.339.624.804	869.175.725.907	14.163.898.897

Tabel B.5.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per Eselon I

Eselon I	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Realisasi
Sekretariat Jenderal	54.309.386.000	51.433.124.371	0	51.433.124.371	94,70
Inspektorat Jenderal	3.000.000.000	2.827.236.199	0	2.827.236.199	94,24
Ditjen Tan. Pangan	93.381.169.000	82.028.305.261	0	82.028.305.261	87,84
Ditjen Hortikultura	6.373.416.000	6.293.693.650	0	6.293.693.650	98,75
Ditjen Perkebunan	13.802.212.000	13.075.064.131	0	13.075.064.131	94,73
Ditjen PKH	110.394.810.000	105.950.087.981	106.000	105.949.981.981	95,97
Ditjen PSP	11.851.800.000	9.426.849.390	0	9.426.849.390	79,54
Badan Litbang	182.282.657.000	168.148.065.674	2.813.000	168.145.252.674	92,24
Badan PPSDMP	244.099.359.000	239.283.794.776	16.277.700	239.267.517.076	98,02
Badan Ket. Pangan	18.741.944.000	18.293.918.156	0	18.293.918.156	97,61
Badan Karantina	187.189.629.000	186.598.681.915	0	186.598.681.915	99,68
JUMLAH	925.426.382.000	883.358.821.504	19.196.700	883.339.624.804	95,45

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran B.5**.

B.5.1 BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp29.380.033.886,00 dan Rp90.746.973.810,00. Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp61.366.939.924,00 atau 67,62% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan pengadaan tanah.

**Tabel B.5.1.1 Perbandingan Belanja Modal Tanah
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian Belanja Modal Tanah	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Tanah	17.811.214.150	0	17.811.214.150	64.306.282.730	(46.495.068.580)
Pembebasan Tanah	3.095.345.900	0	3.095.345.900	0	3.095.345.900
Pembayaran Honor Tim Tanah	72.725.550	0	72.725.550	163.600.000	(90.874.450)
Pembuatan Sertifikat Tanah	758.811.100	0	758.811.100	500.350.000	258.461.100
Pengukuran dan Pematangan Tanah	7.499.799.000	0	7.499.799.000	25.759.259.000	(18.259.460.000)
Pengukuran Tanah	115.000.000	0	115.000.000	2.632.080	112.367.920
Perjalanan Pengadaan Tanah	27.138.186	0	27.138.186	14.850.000,00	12.288.186
Jumlah	29.380.033.886	0	29.380.033.886	90.746.973.810	(61.366.939.924)

Tabel B.5.1.2 Realisasi Belanja Modal Tanah per Eselon I Tahun 2019

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
DITJEN TANAMAN PANGAN	4.823.700.000	3.226.870.736
DITJEN PERKEBUNAN	193.000.000	187.992.000
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	7.225.840.000	7.197.407.000
BADAN LITBANG	2.168.508.000	257.400.000
BADAN KARANTINA	18.521.883.000	18.510.364.150
Jumlah	32.932.931.000	29.380.033.886

B.5.2 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp426.346.288.344,00 dan Rp344.648.486.343,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan senilai Rp81.697.802.001,00 atau 23,70% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pengadaan peralatan dan mesin yang signifikan pada satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp.52.807.760.132,00, satker Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Bogor senilai Rp.25.296.852.050,00, satker Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok senilai

Rp.17.773.356.865,00, satker Kantor Pusat Badan Ketahanan Pangan senilai Rp.15.455.712.000,00.

Tabel B.5.2.1 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja Modal Peralatan/Mesin	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Peralatan dan Mesin	423.576.577.962	16.405.000	423.560.172.962	342.697.207.755	80.862.965.207
Bahan Baku Peralatan dan Mesin	800.980.876	0	800.980.876	15.392.500	785.588.376
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	383.635.000	0	383.635.000	177.335.000	206.300.000
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
Perencanaan dan Pengawasan	64.014.000	0	64.014.000	174.950.250	(110.936.250)
Perjalanan	146.524.477	1.313.000	145.211.477	446.113.838	(300.902.361)
Penambahan Nilai	1.390.274.029	0	1.390.274.029	1.137.487.000	252.787.029
Jumlah	426.364.006.344	17.718.000	426.346.288.344	344.648.486.343	81.697.802.001

Tabel B.5.2.2 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Eselon I Tahun 2019

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	34.886.407.000	34.342.693.370
INSPEKTORAT JENDERAL	2.500.000.000	2.464.374.799
DITJEN TANAMAN PANGAN	57.400.949.000	54.714.232.392
DITJEN HORTIKULTURA	5.920.573.000	5.842.250.650
DITJEN PERKEBUNAN	8.358.782.000	8.028.150.339
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	49.583.201.000	48.051.271.131
DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	11.455.140.000	9.059.139.390
BADAN LITBANG	100.229.038.000	94.518.669.346
BADAN PPSDMP	62.381.471.000	61.076.177.506
BADAN KETAHANAN PANGAN	15.455.712.000	15.057.391.598
BADAN KARANTINA	93.556.489.000	93.191.937.823
Jumlah	441.727.762.000	426.346.288.344

B.5.3 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp381.878.006.434,00 dan Rp340.623.329.830,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan senilai Rp41.254.676.604,00 atau 12,11%

dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan gedung dan kantor untuk mendukung kegiatan.

**Tabel B.5.3.1 Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Gedung dan Bangunan	255.195.393.912	182.700	255.195.211.212	184.083.562.465	71.111.648.747
Bahan Baku Gedung dan Bangunan	78.895.500	0	78.895.500	120.247.000	(41.351.500)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	1.079.892.000	0	1.079.892.000	732.620.400	347.271.600
Perencanaan dan Pengawasan	7.766.998.590	0	7.766.998.590	8.964.986.559	(1.197.987.969)
Perizinan	299.910.000	0	299.910.000	32.308.680	267.601.320
Pengosongan dan Pembongkaran	2.850.000	0	2.850.000		2.850.000
Perjalanan	1.696.951.907	1.296.000	1.695.655.907	1.338.142.176	357.513.731
Penambahan Nilai	115.758.593.225	0	115.758.593.225	145.351.462.550	(29.592.869.325)
Jumlah	381.879.485.134	1.478.700	381.878.006.434	340.623.329.830	41.254.676.604

**Tabel B.5.3.2 Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan per Eselon I Tahun 2019**

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	15.941.699.000	13.692.307.201
DITJEN TANAMAN PANGAN	31.028.841.000	23.959.912.133
DITJEN PERKEBUNAN	4.217.250.000	3.889.976.225
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	33.327.625.000	32.680.460.088
BADAN LITBANG	68.551.519.000	62.642.942.822
BADAN PPSDMP	173.631.432.000	170.157.625.120
BADAN KETAHANAN PANGAN	2.937.732.000	2.903.442.158
BADAN KARANTINA	72.154.399.000	71.951.340.687
Jumlah	401.790.497.000	381.878.006.434

B.5.4 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp21.939.705.837,00 dan Rp38.922.004.810,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp16.982.298.973,00 atau 43,63% dibandingkan periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh menurunnya kebutuhan jalan, jembatan irigasi untuk mendukung kegiatan.

Tabel B.5.4.1 Perbandingan Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Jalan dan Jembatan	8.938.255.000	0	8.938.255.000	12.849.672.325	(3.911.417.325)
Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	14.650.000	0	14.650.000	18.260.000	(3.610.000)
Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	407.615.500	0	407.615.500	305.512.000	102.103.500
Perjalanan Jalan dan Jembatan	5.124.400	0	5.124.400	0	5.124.400
Irigasi	2.534.846.695	0	2.534.846.695	5.201.443.380	(2.666.596.685)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	7.260.000	0	7.260.000	19.000.000	(11.740.000)
Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	29.900.000	0	29.900.000	103.739.000	(73.839.000)
Jaringan	3.620.442.005	0	3.620.442.005	4.825.420.290	(1.204.978.285)
Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	4.868.787.565	0	4.868.787.565	13.535.665.485	(8.666.877.920)
Penambahan Nilai Irigasi	1.005.314.500	0	1.005.314.500	697.994.000	307.320.500
Penambahan Nilai Jaringan	507.510.172	0	507.510.172	1.365.298.330	(857.788.158)
Jumlah	21.939.705.837	0	21.939.705.837	38.922.004.810	(16.982.298.973)

Tabel B.5.4.2 Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan per Eselon I Tahun 2019

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	284.240.000	281.110.000
DITJEN TANAMAN PANGAN	34.500.000	34.111.000
DITJEN PERKEBUNAN	798.180.000	761.189.067
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	1.548.811.000	1.540.519.000
BADAN LITBANG	10.738.382.000	10.135.454.265
BADAN PPSDMP	6.694.956.000	6.655.938.250
BADAN KARANTINA	2.541.615.000	2.531.384.255
Jumlah	22.640.684.000	21.939.705.837

B.5.5 BELANJA MODAL LAINNYA

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp12.447.642.241,00 dan Rp23.145.707.814,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp10.698.065.573,00 atau 46.22% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018.

**Tabel B.5.5.1 Perbandingan Belanja Modal Lainnya
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018**

Uraian Belanja Modal Lainnya	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Belanja Modal Lainnya	11.265.210.841	0	11.265.210.841	16.709.825.034	(5.444.614.193)
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.182.431.400	0	1.182.431.400	6.435.882.780	(5.253.451.380)
Jumlah	12.447.642.241	0	12.447.642.241	23.145.707.814	(10.698.065.573)

Tabel B.5.5.2 Realisasi Belanja Modal Lainnya per Eselon I Tahun 2019

Eselon I	Anggaran	Realisasi Netto (Rp)
SEKRETARIAT JENDERAL	3.197.040.000	3.117.013.800
INSPEKTORAT JENDERAL	500.000.000	362.861.400
DITJEN TANAMAN PANGAN	93.179.000	93.179.000
DITJEN HORTIKULTURA	452.843.000	451.443.000
DITJEN PERKEBUNAN	235.000.000	207.756.500
DITJEN PETERNAKAN & KESWAN	5.500.286.000	5.132.376.700
DITJEN PRASARANA & SARANA PERTANIAN	396.660.000	367.710.000
BADAN LITBANG	595.210.000	590.786.241
BADAN PPSDMP	1.391.500.000	1.377.776.200
BADAN KETAHANAN PANGAN	348.500.000	333.084.400
BADAN KARANTINA	415.243.000	413.655.000
Jumlah	13.125.461.000	12.447.642.241

Dari Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 senilai Rp12.447.642.241,00, yang dipergunakan untuk pengadaan hewan ternak dan tercatat sebagai aset ekstrakomptabel senilai Rp5.536.160.000,00 sebagai berikut:

Tabel B.5.5.3 Realisasi Belanja Modal Lainnya Untuk Pengadaan Aset Ekstrakomptabel TA 2019

Eselon I	Satker	Nama Satker	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp)
Ditjen PKH	238823	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Sapi Potong	21	386.550.000
Ditjen PKH	238823	Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden	Sapi Perah	191	3.942.500.000
Ditjen PKH	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Kambing	5	14.500.000
Ditjen PKH	411956	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	Sapi Potong	1	40.470.000
Badan Litbang	412013	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Bogor	Sapi Potong	18	229.410.000
Badan Litbang	567428	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	Sapi Potong	2	67.950.000
Badan Litbang	648737	Loka Penelitian Kambing Potong. Sei Putih Sumatera Utara	Kambing	3	99.000.000
Badan PSDMP	412101	Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang. Ntt	Sapi Potong	23	192.280.000
Badan PSDMP	417413	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa	Kambing	12	61.600.000
Badan PSDMP	417413	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa	Sapi Potong	10	200.000.000

Eselon I	Satker	Nama Satker	Jenis	Jumlah	Nilai (Rp)
Badan PSDMP	417413	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa	Ayam Petelur	2.000	199.100.000
Badan PSDMP	417428	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari	Babi	4	11.800.000
Badan PSDMP	417428	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari	Kambing	4	16.500.000
Badan PSDMP	417428	Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari	Sapi Potong	4	74.500.000
Grand Total				2.298	5.536.160.000

B.5.6 BELANJA MODAL BLU

Realisasi Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp11.347.948.062,00 dan Rp31.089.223.300,00. Realisasi Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami penurunan senilai Rp19.741.275.238,00 atau 63,50% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh menurunnya kebutuhan peralatan dan mesin, gedung dan kantor untuk mendukung kegiatan.

Tabel B.5.6 Perbandingan Belanja Modal BLU untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Belanja Modal BLU	Realisasi Bruto 31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2019 (Rp)	Realisasi Netto 31 Desember 2018 (Rp)	Naik (Turun) (Rp)
Peralatan dan Mesin	257.154.600	0	257.154.600	10.828.135.400	(10.570.980.800)
Gedung dan Bangunan	11.035.823.462	0	11.035.823.462	19.960.627.900	(8.924.804.438)
Lainnya	54.970.000	0	54.970.000	300.460.000	(245.490.000)
Jumlah	11.347.948.062	0	11.347.948.062	31.089.223.300	(19.741.275.238)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET LANCAR

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp266.681.076,00 dan Rp348.601.261,00 dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel C.1 Perbandingan Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	18.141.779	70.373.605	(52.231.826)	(74,22)
2	Ditjen Tanaman Pangan	218.165.600	46.276.000	171.889.600	371,44
3	Ditjen Hortikultura	0	6.018.000	(6.018.000)	(100)
4	Ditjen Perkebunan	0	105.280	(105.280)	(100)
5	Ditjen Peternakan dan Keswan	0	179.973.376	(179.973.376)	(100)
6	Ditjen PSP	0	1.626.000	(1.626.000)	(100)
7	Badan Litbang Pertanian	15	0	15	0,00
8	Badan PPSDMP	0	44.229.000	(44.229.000)	(100)
9	Badan Ket.Pangan	30.373.682	0	30.373.682	0,00
	Jumlah	266.681.076	348.601.261,00	(81.920.185)	(23,50)

Daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan daftar rekening Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 disajikan pada **Lampiran C.1.1 dan C.1.2.**

C.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.061.000,00 dan Rp1.400.000,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di Bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel C.2 Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen Tanaman Pangan	936.000	0	936.000	0,00
2	Badan Litbang	13.125.000	1.400.000	11.725.000	837,50
	Jumlah	14.061.000	1.400.000	12.661.000	904,36

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 pada tabel diatas merupakan saldo Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan periode 31 Desember 2019 yang belum disetorkan ke Kas Negara yakni pada satker :

- a. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp936.000,00 merupakan penerimaan negara pada akun 425112 yaitu pendapatan dari penjualan hasil pertanian.
- b. Balai Penelitian Tanaman Jeruk & Buah Subtropika Malang sebesar Rp13.125.000,00 merupakan penerimaan negara pada akun 425434 yaitu Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek berupa hasil penjualan benih jeruk.

Daftar saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan daftar rekening Bendahara Penerimaan dapat disajikan pada **Lampiran C.2.1**, dan **C.2.2**.

C.3 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp192.184.569.582,00 dan Rp16.728.092.179,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut.

Tabel C.3.1 Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

Keterangan	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	184.935.722.842	12.617.533.940	172.318.188.902	1.365,70
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	5.176.458.461	2.476.800.247	2.699.658.214	109,00
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	64.970	100.000.000	(99.935.030)	(99,94)
Kas Lainnya di BLU	2.072.323.309	1.533.757.992	538.565.317	35,11
Jumlah	192.184.569.582	16.728.092.179	175.456.477.403	1.048,87

Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I sebagai berikut.

Tabel C.3.2 Rincian Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	447.933.060	578.654.143	(130.721.083)	(22,59)
2	Ditjen Tanaman Pangan	184.632.933.802	11.296.175.396	173.336.758.406	1.534,47
3	Ditjen Hortikultura	0	4.352.500	(4.352.500)	(100,00)
4	Ditjen Perkebunan	64.970	0	64.970	0,00
5	Ditjen Peternakan dan Kewan	2.072.323.309	1.633.757.992	438.565.317	26,84
6	Ditjen PSP	5.001.906	7.585	4.994.321	65.844,71
7	Badan Litbang	4.728.545.988	3.205.922.913	1.522.623.075	47,49
8	Badan PPSDMP	400.000	9.221.650	(8.821.650)	(95,66)
9	Badan Ketahanan Pangan	291.598.872	0	291.598.872	0,00
10	Badan Karantina Pertanian	5.767.675	0	5.767.675	0,00
	Jumlah	192.184.569.582	16.728.092.179	175.456.477.403	1.048,87

Rincian daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 disajikan pada **Lampiran C.3.1**.

Berdasarkan tabel diatas, rincian jenis Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan pada beberapa Eselon I yakni sebagai berikut.

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp447.933.060,00 yakni merupakan Kas Lainnya dari Hibah Langsung berada pada Satker Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) yang terdiri dari :

Tabel C.3.3 Rincian Proyek Hibah pada Setjen

NO	NAMA PROJECT	DONOR	NO REGISTER	PERIODE	SALDO 31 DESEMBER 2019
1	Improving Milk Supply, Competitiveness and Livelihoods in Smallholder Dairy Chains in Indonesia (Indodairy)	ACIAR	2YYMH8ZA	13 Juni 2016 s.d. 31 Mei 2020	34.353.026
2	Agricultural Policy Research to Support Natural Resource Management in Indonesia's Upland Landscape (IndoGreen)	ACIAR	2JNEH3FA	1 Feb 2018 s.d 31 Des 2021	247.033.584
3	Inclusive Agriculture Value Chain Financing (Indo Finance)	IFPRI	2DCBX28A	01 Februari 2019 s.d. 01 Februari 2020	126.817.584
4	Development of Area Wide Management Approach For Fruit Flies in Mango For Indonesia, Philipines, Australia and The Asia Pasific Region(Indo Wam)	ACIAR	2QKBB1PA	25 September 2018 sd 30 Juni 2023	39.728.866
Jumlah					447.933.060

2. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp184.632.933.802,00 terdapat pada 4 (empat) satker yang diantaranya berasal dari pengembalian belanja 526 yang belum disetor ke kas negara dan Rekening Penampung Lainnya (RPL) atas penyaluran bantuan pemerintah transfer uang ke kelompok tani menggunakan mekanisme RPL, nilai di RPL tersebut akan disalurkan kembali ke poktan.
3. Ditjen Perkebunan sebesar Rp64.970,00 terdapat di 2 (dua) satker yakni Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp17.390,00 berupa pendapatan jasa pemeriksaan lapangan benih karet okulasi dalam polibeg siap tanam dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.Kolaka Utara sebesar Rp47.580,00 berupa pendapatan jasa giro.
4. Ditjen Peternakan dan Keswan sebesar Rp2.072.323.309,00 yang terdiri dari berupa kas pada satker Badan Layanan Umum yang belum menjadi pendapatan satker untuk itu dicatat sebagai kas lainnya di BLU, yaitu pada Pusat Veteriner Farma sebesar Rp108.193.757,00 merupakan penerimaan atas penjualan vaksin / antigen yang pengirimannya belum dilakukan satker dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Rp1.964.129.552,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Saldo sebesar Rp165.281.038,00 merupakan dana titipan yang terdapat rekening dana kelolaan satker BBIB Singosari yang akan dipergunakan sebagai biaya pengepakan dan ongkos kirim produk layanan.
 - b. Saldo sebesar Rp1.789.848.514,00 merupakan peneirnaan atas penjualan semen beku yang belum dilakukan pengirimannya.
 - c. Saldo sebesar Rp9.000.000,00 berupa penerimaan atas kegiatan bimtek yang belum dilaksanakan kegiatannya.
5. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp5.001.906,00 terdapat di 2 (dua) satker yakni Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp1.906,00 berupa jasa giro, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Bengkulu sebesar

Rp5.000.000,00 berupa Pengembalian dari sisa perjalanan dinas yang belum disetor per 31 desember 2019

6. Badan Litbang sebesar Rp4.728.545.988,00 terdapat pada 16 (enam belas) satker yang berasal dari sisa dana hibah yang masih berlanjut di tahun 2020.
7. Badan PPSDMP sebesar Rp400.000,00 yang terdapat di satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Kalimantan Barat yang merupakan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) yang diberikan untuk ke penyuluh, pada saat per 31 Desember 2019 uang masih di rekening Bendahara pengeluaran.
8. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp291.598.872,00 yang terdapat pada 9 (sembilan) Satker yang berasal dari pengembalian sisa dana Bantuan Pemerintah Tahun 2019 dan sudah dilakukan penyetoran di tahun 2020.
9. Badan Karantina Pertanian sebesar Rp5.767.675,00 terdapat di 2 (dua) satker yakni Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang sebesar Rp3.470.100,00 merupakan uang perjalanan dinas pegawai yang belum diberikan kepada pegawai dan dibulan januari 2020 telah diberikan ke pegawai yang bersangkutan sesuai kwitansi dan Sekretariat Badan Karantian sebesar Rp2.297.575,00 yang setoran pengembalian tunjangan kinerja di BBKP Surabaya.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari belanja 521, 522, & 524 pendukung belanja 526 antara lain dilaksanakan melalui mekanisme pencairan langsung kepada bendahara pengeluaran secara langsung (LS- Bendahara). Pada laporan keuangan ini masih terdapat LS Bendahara Pengeluaran Pembantu yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp14.781.328.518,00, namun sudah disetorkan pada TA 2020. Adapun rincian per eselon I dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel C.3.4 Pertanggungjawaban Nilai LS-Bendahara Per Eselon I

No	Eselon I	LS Bendahara (Rp)	Pertanggungjawaban (Rp)	Sisa Yang Harus Dipertanggung jawabkan (Rp)	Setor Jan-Apr 2020 (Rp)	Belum Dipertanggung-jawabkan (Rp)
1	Setjen	113.182.122.831	113.014.441.631	167.681.200	167.681.200	-
2	TP	134.898.519.278	127.150.663.407	7.747.855.871	7.749.148.571	(1.292.700)
3	Horti	62.326.429.839	62.326.399.839	30.000	30.000	-
4	Bun	66.624.138.802	59.919.623.291	6.704.515.511	417.237.576	6.287.277.935
5	PKH	70.896.679.137	70.515.887.744	380.791.393	380.941.393	(150.000)
6	PSP	126.656.174.210	124.926.840.281	1.729.333.929	1.532.011.579	197.322.350
7	Litbang	35.084.914.199	34.526.070.839	558.843.360	558.843.360	-
8	PPSDMP	121.650.677.297	119.939.277.397	1.711.399.900	1.711.399.900	-
9	BKP	66.737.335.155	62.380.196.931	4.357.138.224	2.264.064.639	2.093.073.585
10	Karantina	46.810.445.164	46.810.445.164	-	-	-
11	Disbun Sumsel	1.034.339.193	1.018.624.193	15.715.000		15.715.000
	Jumlah	845.901.775.105	822.528.470.717	23.373.304.388	14.781.328.518	8.593.388.870

Selanjutnya sebagai informasi kas lainnya dan setara kas terkait Rekening Penampung Lainnya (RPL) per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan antara lain nilai kas bantuan benih yg tidak dilanjutkan penyalurannya, kas lainnya di BLU, dan kas lainnya dari hibah. Untuk yang memiliki Rekening Penampung Lainnya (RPL) ada di beberapa Eselon I, dapat dilihat pada Lampiran C.3.2.

C.4 KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp103.390.209.184,00 dan Rp90.650.947.758,00 yang merupakan kas berada dibawah tanggung jawab Bendahara BLU yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tupoksi masing-masing satuan kerja.

Daftar secara rinci nama satker dan Saldo Kas di Bendahara pada BLU per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel C.4.1 Perbandingan Rincian Kas dan Bank pada BLU

No	Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	Penerimaan BLU (Rp)	Belanja BLU (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Pusat Veteriner Farma	27.828.607.751	17.495.099.181	14.341.401.110	30.982.305.822
2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari	62.822.340.007	32.832.019.991	23.246.456.636	72.407.903.362
	Jumlah	90.650.947.758	50.327.119.172	37.587.857.746	103.390.209.184

C.5 BELANJA DIBAYAR DIMUKA (*PREPAID*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp544.750.050.814,00 dan Rp7.199.940.494.192,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel C.5.1 Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen Tanaman Pangan	187.784.241.457	1.098.159.451.870	(910.375.210.413)	(82,90)
2	Ditjen Hortikultura	0	724.315.539.268	(724.315.539.268)	(100,00)
3	Ditjen Perkebunan	1.717.366.446	686.446.567.716	(684.729.201.270)	(99,75)
4	Ditjen Peternakan dan Kewan	0	476.723.480.222	(476.723.480.222)	(100,00)
5	Ditjen PSP	343.949.037.110	3.817.282.965.670	(3.473.333.928.560)	(90,99)
6	Badan Litbang	4.503.000.000	190.429.305.793	(185.926.305.793)	(97,64)
7	Badan PPSDMP	0	41.022.305.634	(41.022.305.634)	(100,00)
8	Badan Ketahanan Pangan	6.695.000.000	165.433.166.083	(158.738.166.083)	(95,95)
9	Badan Karantina Pertanian	101.405.801	127.711.936	(26.306.135)	(20,60)
	Jumlah	544.750.050.814	7.199.940.494.192	(6.655.190.443.378)	(92,43)

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 pada tabel di atas, merupakan hak yang masih harus diterima atas barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Penyelesaian Satker konsolidasi atas Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2018 sebesar Rp7.199.812.662.256,00 adalah melalui aplikasi BAST BANPEM dengan mengunggah dokumen pertanggungjawaban berupa berita acara serah terima, dokumentasi penyaluran dan pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementan.

Untuk pencatatan dalam laporan keuangan, atas penyelesaian Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp7.199.812.662.256,00 tersebut dialokasikan menjadi beban bantuan pemerintah

yang diserahkan kepada Pemda/masyarakat.

Berikut ini disajikan rincian mutasi penambahan dan pengurangan Belanja Dibayar Dimuka khusus dari belanja 526xxx pada tabel dibawah ini :

Tabel C.5.2 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Khusus dari Belanja 526

No	Uraian Eselon I	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Ditjen Tanaman Pangan	1.098.159.451.870	187.784.241.457	1.098.159.451.870	187.784.241.457
2	Ditjen Hortikultura	724.315.539.268	0	724.315.539.268	0
3	Ditjen Perkebunan	686.446.567.716	1.717.366.446	686.446.567.716	1.717.366.446
4	Ditjen Peternakan dan Keswan	476.723.480.222	0	476.723.480.222	0
5	Ditjen PSP	3.817.282.965.670	343.949.037.110	3.817.282.965.670	343.949.037.110
6	Badan Litbang	190.429.185.793	4.503.000.000	190.429.185.793	4.503.000.000
7	Badan PSDMP	41.022.305.634	0	41.022.305.634	0
8	Badan Ketahanan Pangan	165.433.166.083	6.695.000.000	165.433.166.083	6.695.000.000
Jumlah		7.199.812.662.256	544.648.645.013	7.199.812.662.256	544.648.645.013

Berdasarkan data per 31 Desember 2019 tersebut, diantaranya terdapat Belanja Dibayar Dimuka yang berasal dari MAK 526 perolehan TA 2019 yang dicatat kembali karena belum dibuktikan kelengkapan penyaluran belanja MAK 526 sebesar Rp544.648.645.013,00.

Tabel C.5.3 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Berasal Dari MAK 526 perolehan TA 2019 yang dicatat kembali

Kegiatan	Ditjen TP	Ditjen Bun	Ditjen PSP	Badan Litbang	BKP	Jumlah
Alsin	8.171.702.000					8.171.702.000
Bekerja				4.503.000.000		4.503.000.000
Benih	45.330.279.454	870.495.446				46.200.774.900
Cetak Sawah			73.708.721.300			73.708.721.300
Irigasi			54.007.668.000			54.007.668.000
KRPL					6.695.000.000	6.695.000.000
Ongkir Alsin	2.381.605.603		38.167.415.333			40.549.020.936
Oplah Rawa			178.065.232.477			178.065.232.477
Perlindungan	131.900.654.400	846.871.000				132.747.525.400
Jumlah	187.784.241.457	1.717.366.446	343.949.037.110	4.503.000.000	6.695.000.000	544.648.645.013

Penjelasan belanja dibayar dimuka per Eselon I yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp187.784.241.457,00 merupakan belanja bantuan Pemerintah (Banpem) berupa Uang yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya atas penggunaan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat berasal dari kegiatan AKABI sebesar Rp27.104.527.204,00, SERELIA sebesar Rp18.225.752.250,00 dan Direktorat Perlindungan Rp131.900.654.400,00 serta PPHTP sebesar Rp10.553.307.603,00 yang terdapat pada 23 (dua puluh tiga) Satker.
2. Ditjen Perkebunan sebesar Rp1.717.366.446,00 merupakan belanja bantuan Pemerintah (Banpem) berupa Uang yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya atas penggunaan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat yang terdapat pada 13 (tigabelas) Satker.

3. Ditjen PSP sebesar Rp343.949.037.110,00 merupakan belanja bantuan Pemerintah (Banpem) berupa Uang yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya atas penggunaan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat berasal dari kegiatan Irigasi sebesar Rp54.007.668.000,00, Optimasi Lahan sebesar Rp178.065.232.477,00 dan Cetak Sawah sebesar Rp73.708.721.300,00 serta ongkos kirim Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.167.415.333,00 yang terdapat pada 34 (tiga puluh empat) Satker.
4. Badan Litbang sebesar Rp4.503.000.000,00 merupakan belanja bantuan Pemerintah (Banpem) berupa Uang yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya atas penggunaan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat yang terdapat pada 6 (enam) Satker yang berasal dari kegiatan Bekerja.
5. Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp6.695.000.000,00 merupakan belanja bantuan Pemerintah (Banpem) berupa Uang yang belum lengkap dokumen pertanggungjawabannya atas penggunaan bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat berasal dari kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebesar Rp3.695.000.000,00, Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) sebesar Rp60.000.000,00 dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebesar Rp2.940.000.000,00 yang terdapat pada 8 (delapan) Satker.

Selain Belanja Dibayar Dimuka dari akun Belanja 526 terdapat Belanja Dibayar Dimuka pada Badan Karantina Pertanian sebesar Rp101.405.801 yang terdiri dari sewa kantor sebesar Rp89.405.801,00 dan sewa internet (indihome) sebesar Rp12.000.000,00, dapat dilihat rincian nilai kontrak dan masa kontrak atas sewa tersebut pada **Lampiran C.5.1** dan rincian Satker Badan Karantina dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel C.5.4 Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per Satker Badan Karantina

Kode Satker	Nama Satker	Nilai	Ket.
237732	Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru	862.250	Sewa Kantor
238052	Balai Besar Karantina Pertanian Makassar	4.794.000	Sewa Kantor
412172	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong	12.000.000	Sewa Internet
499440	Balai Karantina Pertanian Kelas I Manado	6.666.667	Sewa Kantor
499459	Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu	15.000.000	Sewa Kantor
499465	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	14.721.634	Sewa Kantor
499471	Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram	6.111.250	Sewa Kantor
649458	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika	41.250.000	Sewa Kantor
	Jumlah	101.405.801	

Berdasarkan rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dapat disajikan per Satker pada **Lampiran C.5.2**.

C.6 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp1.240.370.197,00 dan Rp39.400.000,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 terdapat pada 3 (tiga) Eselon I yakni Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Litbang Pertanian, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp1.203.417.197,00 merupakan pendapatan bunga yang masih ada di rekening Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) untuk kegiatan optimasi lahan yang terdapat pada 4 (empat) Satker dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel C.6.1 Rincian Pendapatan yang Masih harus Diterima Per Satker Ditjen PSP

Kode Satker	Nama Satker	Nilai (Rp)
119137	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan	952.607.416
149120	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	24.405.710
159114	Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan	154.033.955
199133	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi	72.370.116
Jumlah		1.203.417.197

2. Badan Litbang Pertanian sebesar Rp2.833.000,00 yang terdapat pada Satker Balai Besar Pengkajian & Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor merupakan pembayaran sewa ATM BNI selama 2 bulan sejak habis masa TMT kontraknya per 31 Oktober 2019. Pendapatan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak BNI dan sudah disetorkan ke kas Negara bersamaan pembayaran perpanjangan sewa sampai 31 Oktober 2022.
3. Badan Badan PPSDMP sebesar Rp34.120.000,00 yang terdapat pada Satker Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu Malang Jawa Timur sebesar Rp34.120.000,00 merupakan penjualan susu bulan Desember 2019 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan penjualan susu tersebut sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada tanggal 27 Januari 2020 dengan NTPN :D0C0E48VU9656R0C sebesar Rp34.120.000,00.

C.7 PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp112.842.918.084,00 dan Rp101.880.036.002,00. Rincian Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian per Eselon I per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel C.7 Perbandingan Piutang PNBP per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	386.836.306	3.000.000	26.118.506	363.717.800
2	Inspektorat Jenderal	29.439.600	4.560.000	19.639.600	14.360.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	43.739.206.731	47.927.417.686	43.496.168.626	48.170.455.791
4	Ditjen Hortikultura	773.700.463	820.145.909	272.519.046	1.321.327.326
5	Ditjen Perkebunan	185.471.000	1.051.907.287	222.739.577	1.014.638.710
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	54.924.163.174	47.034.347.106	49.238.235.650	52.720.274.630
7	Ditjen PSP	218.648.160	0	218.648.160	0
8	Badan Litbang	1.278.354.035	8.822.013.385	1.012.573.431	9.087.793.989
9	Badan PSDMP	147.695.000	117.180.496	239.345.000	25.530.496
10	Badan Ketahanan Pangan	39.025.000	0	20.000.000	19.025.000
11	Badan Karantina Pertanian	157.496.533	1.892.829.411	1.944.531.602	105.794.342
Jumlah		101.880.036.002	107.673.401.280	96.710.519.198	112.842.918.084

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Berdasarkan tabel C.7 diatas, rincian atas mutasi penambahan dan pengurangan Piutang PNBPN per debitor disajikan pada **Lampiran C.7**.

C.8 BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp21.474.181.169,00 dan Rp24.227.611.824,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel C.8. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No	Eselon I	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	2.126.877.984	56.238.400	132.880.900	2.050.235.484
2	Inspektorat Jenderal	0	0	0	0
3	Ditjen Tanaman Pangan	5.775.500.693	0	598.501.475	5.176.999.218
4	Ditjen Hortikultura	7.708.293.895	456.881.814	1.178.456.162	6.986.719.547
5	Ditjen Perkebunan	4.465.124.870	3.092.007.660	4.352.791.531	3.204.340.999
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	574.994.408	86.585.610	65.534.718	596.045.300
7	Ditjen PSP	994.801.750	987.301.750	994.801.750	987.301.750
8	Badan Litbang	2.479.581.553	455.072.709	801.305.426	2.133.348.836
9	Badan PSDMP	22.050.000	224.696.000	0	246.746.000
10	Badan Ketahanan Pangan	74.517.671	66.422.864	48.496.500	92.444.035
11	Badan Karantina Pertanian	5.869.000	0	5.869.000	0
	Jumlah	24.227.611.824	5.425.206.807	8.178.637.462	21.474.181.169

Berdasarkan tabel C.8.1 diatas, rincian atas mutasi penambahan dan pengurangan Bagian Lancar TP/TGR per debitor disajikan pada **Lampiran C.8**.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel C.8.2 Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
Bagian Lancar TP	4.297.895.285,00	4.339.722.353,00
Bagian Lancar TGR	17.176.285.884,00	19.887.889.471,00
Jumlah	21.474.181.169,00	24.227.611.824,00

C.9 PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM

Nilai Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.263.092.570,00 dan Rp508.804.231,00. Dari saldo piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum sebesar Rp1.263.092.570,00 berada pada satker lingkup Ditjen Peternakan dan Keswan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari sebesar Rp1.260.678.570,00 terdiri dari rincian sebagai berikut :
 - a. Sisa Piutang penerimaan semen beku TA 2018 yang belum lunas sebesar Rp211.966.470,00;
 - b. Piutang Penerimaan semen beku sebesar Rp641.334.600,00;
 - c. Piutang Penerimaan Bimtek sebesar Rp393.182.500,00;
 - d. Piutang penerimaan layanan Inseminasi Buatan sebesar Rp250.000,00;
 - e. Piutang atas sewa sarana prasarana sebesar Rp13.945.000,00
2. Satker Pusat Veteriner Farma sebesar Rp2.414.000 berupa piutang penerimaan penjualan vaksin

Berikut ini dapat disajikan rincian atas mutasi penambahan dan pengurangan piutang BLU per debitur per 31 Desember 2019 dan 2018 pada **Lampiran C.9**.

C.10 PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - PIUTANG LANCAR

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.292.955.894,00 dan Rp20.195.157.639,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.10. Rincian Penyisihan Piutang Lancar

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Piutang Bukan Pajak					
1	Sekretariat Jenderal	316.102.075	303.596.515	12.505.560	4,12
2	Inspektorat Jenderal	71.800	147.198	(75.398)	(51,22)
3	Ditjen Tanaman Pangan	482.675.194	259.271.786	223.403.408	86,17
4	Ditjen Hortikultura	241.371.273	253.353.520	(11.982.247)	(4,73)
5	Ditjen Perkebunan	1.004.618.662	927.355	1.003.691.307	108231,62
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	6.123.281.767	1.378.725.459	4.744.556.308	344,13
7	Ditjen PSP	0	1.093.241	(1.093.241)	(100,00)
8	Badan Litbang	305.371.144	209.800.929	95.570.215	45,55
9	Badan PSDMP	127.652	738.475	(610.823)	(82,71)
10	Badan Ketahanan Pangan	1.902.500	195.125	1.707.375	875,02
11	Badan Karantina Pertanian	528.972	787.484	(258.512)	(32,83)
Jumlah		8.476.051.039	2.408.637.087	6.067.413.952	251,90
Bagian Lancar TP/TGR					
1	Sekretariat Jenderal	1.994.278.276	1.994.661.489	(383.213)	(0,02)

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2	Ditjen Tanaman Pangan	3.602.916.680	3.621.830.656	(18.913.976)	(0,52)
3	Ditjen Hortikultura	5.792.544.353	5.562.646.817	229.897.536	4,13
4	Ditjen Perkebunan	3.198.144.665	4.370.892.887	(1.172.748.222)	(26,83)
5	Ditjen Peternakan dan Keswan	509.892.619	538.796.404	(28.903.785)	(5,36)
6	Ditjen PSP	987.301.750	4.974.008	982.327.742	19749,22
7	Badan Litbang	1.692.680.866	1.667.722.337	24.958.529	1,50
8	Badan PSDMP	23.173.480	22.050.000	1.123.480	5,10
9	Badan Ketahanan Pangan	9.244.403	372.588	8.871.815	2381,13
10	Badan Karantina Pertanian	0	29.345	(29.345)	(100,00)
Jumlah		17.810.177.092	17.783.976.531	26.200.561	0,15
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU					
1	Ditjen Peternakan dan Keswan	6.727.763	2.544.021	4.183.742	164,45
Jumlah		6.727.763	2.544.021	4.183.742	164,45
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih		26.292.955.894	20.195.157.639,00	6.097.798.255	30,19

Rincian atas penyisihan piutang PNPB dan Bagian Lancar TP/TGR serta piutang BLU disajikan secara lengkap pada **Lampiran C.10.1, C.10.2, C.10.3**.

C.11 PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah senilai Rp3.379.388.077.960,00 dan Rp889.356.431.578,00.

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini disajikan perbandingan rincian persediaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel C.11.1 Rincian Persediaan per Eselon I per tanggal 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.746.838.402	1.440.483.905	306.354.497	21,27
2	Inspektorat Jenderal	503.427.386	326.731.230	176.696.156	54,08
3	Ditjen Tanaman Pangan	1.938.469.547.220	3.907.487.078	1.934.562.060.142	45.509,11
4	Ditjen Hortikultura	465.442.810.702	2.494.947.102	462.947.863.600	18.555,42
5	Ditjen Perkebunan	483.046.420.822	14.350.545.446	468.695.875.376	3.266,05
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	125.706.716.762	174.314.618.842	-48.607.902.080	-55,34
7	Ditjen PSP	241.222.175.061	540.091.075.980	-298.868.900.919	-66,04

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
8	Badan Litbang	84.460.062.034	124.272.264.264	-39.812.202.230	-32,04
9	Badan PSDMP	540.443.693	979.211.071	-438.767.378	-44,81
10	Badan Ketahanan Pangan	6.443.685.400	548.000	6.443.137.400	1.175.755,00
11	Badan Karantina	31.805.950.478	27.178.518.660	4.627.431.818	17,03
	Jumlah	3.379.388.077.960	889.356.431.578	2.490.031.646.382	279,98

Rincian jenis persediaan pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.11.2 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Persediaan	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Barang Konsumsi	36.272.404.768	233.134.264.011	224.714.045.449	44.692.623.330
Bahan untuk Pemeliharaan	277.407.098	5.787.962.656	5.712.492.707	352.877.047
Suku Cadang	6.232.407.948	22.025.215.331	21.271.663.193	6.985.960.086
Pita Cukai, Materai dan Leges	1.200.000	57.927.000	59.127.000	0
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	34.185.060.589	138.284.341.524	143.677.352.808	28.792.049.305
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	25.644.189.800	848.377.791.411	703.900.375.022	170.121.606.189
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	571.224.681.136	2.461.861.426.518	2.143.600.779.838	889.485.327.816
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.773.604.900	842.836.323	2.686.420.323	2.930.020.900
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	260.974.000	991.578.633.421	524.726.221.687	467.113.385.734
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	79.381.500	224.505.397.055	158.033.260.891	66.551.517.664
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	31.842.128.525	5.220.216.737.521	3.678.028.756.258	1.574.030.109.788
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	41.539.182.498	100.277.745.460	125.779.941.030	16.036.986.928
Bahan Baku	85.738.829.113	205.474.623.845	218.973.016.233	72.240.436.725
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0	27.650.000	27.650.000	0
Persediaan Lainnya	51.284.979.703	75.678.327.111	86.908.130.366	40.055.176.448
Jumlah	889.356.431.578	10.528.130.879.187	8.038.099.232.805	3.379.388.077.960

Dari tabel di atas, persediaan jadi pada satker BLU dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari mempunyai persediaan jadi senilai Rp15.514.195.648,00 berupa semen beku sebanyak 3.538.822 dosis.
2. Satker Pusat Veteriner Farma mempunyai persediaan jadi senilai Rp1.963.568.000,00 berupa telur ayam SAN, vaksin dan hewan mencit.

Rincian persediaan jadi pada Satker Badan Layanan Umum di Eselon I Ditjen Peternakan dan Keswan dapat dilihat lebih rinci pada **Lampiran C.11.1**.

Kementerian Pertanian menyajikan akun persediaan hewan ternak sebagai bagian dari akun Persediaan Lainnya, selain itu terdapat pula Hewan ternak yang tersaji pada laporan BMN Aset Tetap Lainnya maupun ekstrakomptabel. Pelaporan Hewan ternak sampai dengan saat ini belum dapat direkonsiliasi antar akun (Persediaan dan Aset Lainnya) dan antar laporan (intrakomptabel, ekstrakomptabel dan direktorat teknis). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada CaLK F.2.21. **Pelaporan Hewan Ternak, hal 205.**

Adapun Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat milik Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian yang berada di gudang rekanan sebagaimana terlampir pada **Lampiran C.11.2.**

Persediaan yang berasal dari belanja 526 terkait Peralatan dan Mesin yang Diserahkan kepada Pemerintah Daerah/PEMDA sebagai brigade senilai Rp605.677.756.036,00 sebanyak 11.828 unit yang berada pada eselon I yakni Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Berikut ini disajikan rincian Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Pemda sebagai brigade pada tabel dibawah ini :

Tabel C.11.3 Rincian Persediaan Peralatan dan Mesin yang Diserahkan ke Pemda per 31 Desember 2019

Satker Pelaksana	Populasi		Alsintan yang Diserahkan kepada Pemda/Sekolah/Universitas		Status dicatat di BMD	
	Jumlah (Unit)	Total Nilai (Rp)	Jumlah (Unit)	Total Nilai (Rp)	Belum	Sudah
Satker Kantor Pusat	36,124	632.454.200.807	2,818	119.176.059.845	v	-
Satker Tugas Pembantuan (TP Prov)	11,226	212.786.997.436	1,932	35.603.096.369	v	-
Total Ditjen PSP	47,350	845.241.198.243	4,750	154.779.156.214		
Satker Kantor Pusat	6,650	623.123.639.248	2,789	333.823.447.840	v	-
Satker Tugas Pembantuan (TP Prov)	4,289	117.075.151.982	4,289	117.075.151.982	v	-
Total Ditjen TP	10,939	740.198.791.230	7,078	450.898.599.822		
Jumlah	58,289	1.585.439.989.473	11,828	605.677.756.036		

Rincian atas mutasi penambahan dan pengurangan Persediaan dijelaskan pada **Lampiran C.11.3.**

Informasi Lainnya atas Persediaan 526

Rincian mutasi persediaan MAK 526 per eselon I atas pencatatan persediaan pada Kementerian Pertanian sampai dengan per 31 Desember 2019 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel C.11.4 Rincian Mutasi Persediaan MAK 526 per Eselon I atas Pencatatan Persediaan

No	Eselon	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)
			Penambahan	Pengurang	
1	Ditjen Tanaman Pangan	0	5.709.948.270.777	3.774.652.791.973	1.935.295.478.804
2	Ditjen Hortikultura	326.077.700	1.104.806.769.740	640.720.648.280	464.412.199.160
3	Ditjen Perkebunan	14.265.585.231	1.100.507.544.039	631.920.477.680	482.852.651.590
4	Ditjen Peternakan dan Keswan	74.754.071.626	763.005.115.485	819.532.405.273	18.226.781.838
5	Ditjen Prasarana Sarana Pertanian	540.091.075.980	852.339.104.749	1.151.223.085.868	241.207.094.861

No	Eselon	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)
			Penambahan	Pengurang	
6	Badan Litbang	80.101.392.411	318.715.842.671	332.194.122.411	66.623.112.671
7	Badan PPSDMP	11.000.000	58.528.405.796	58.539.405.796	-
8	Badan Ketahanan Pangan	0	78.093.855.976	71.650.170.576	6.443.685.400
	Jumlah	709.549.202.948	9.985.944.909.233	7.480.433.107.857	3.215.061.004.324

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan rincian mutasi persediaan MAK 526 dapat dilihat pada **Lampiran C.11.4**.

Rincian masing-masing persediaan MAK 526 per akun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel C.11.5 Rincian Persediaan MAK 526 per Akun

Akun	Uraian	Nilai
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	28.792.049.305
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	170.121.606.189
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	889.485.327.816
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	2.930.020.900
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	467.113.385.734
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	66.551.517.664
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	1.574.030.109.788
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	16.036.986.928
	TOTAL	3.215.061.004.324

Berdasarkan tabel per 31 Desember 2019 tersebut, diantaranya terdapat persediaan MAK 526 perolehan TA 2019 yang dicatat kembali karena belum dibuktikan kelengkapan penyaluran persediaan MAK 526 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11.6 Rincian Persediaan Yang Telah Diserahkan Kepada Masyarakat Namun Belum Dilengkapi Pertanggungjawaban Yang Memadai

Kegiatan	Ditjen TP	Ditjen Horti	Ditjen Bun	Ditjen PSP	Balitbang	BKP	TOTAL
Barang/Persediaan :							
Alsin	611.219.827.841			57.822.583.921			669.042.411.762
Bekerja					8.604.112.973		8.604.112.973
Benih	1.109.947.819.869	141.094.595.554	235.148.510.660				1.486.190.926.083
KRPL						6.443.685.400	6.443.685.400
Pemasaran		16.715.272.067	11.230.801.079				27.946.073.146
Perlindungan	77.681.243.253	3.353.332.351	7.696.086.614				88.730.662.218
Pupuk	136.446.587.841	302.359.633.988	228.662.053.237				667.468.275.066
SUB TOTAL	1.935.295.478.804	463.522.833.960	482.737.451.590	57.822.583.921	8.604.112.973	6.443.685.400	2.954.426.146.648

Nilai persediaan dari Belanja 526 senilai Rp3.215.061.004.324,00 dapat diklasifikasikan sesuai tahun pengadaannya, yaitu berasal dari pengadaan Tahun 2019 adalah senilai Rp.228.994.664.234,00 dan berasal dari pengadaan sebelum tahun 2019 senilai Rp.2.986.066.340.090,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C.11.7 Rincian Persediaan MAK 526 per Akun Berdasarkan Tahun Pengadaan

Akun	Uraian	< 2019	2019	Total
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	17.660.012.159	11.132.037.146	28.792.049.305
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	4.716.545.700	165.405.060.489	170.121.606.189
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	190.520.169.677	698.965.158.139	889.485.327.816
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	2.808.520.900	121.500.000	2.930.020.900
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	260.974.000	466.852.411.734	467.113.385.734
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	79.381.500	66.472.136.164	66.551.517.664
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/ Pemerintah Daerah	2.171.768.000	1.571.858.341.788	1.574.030.109.788
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	10.777.292.298	5.259.694.630	16.036.986.928
TOTAL		228.994.664.234	2.986.066.340.090	3.215.061.004.324

Selanjutnya, apabila mutasi penambahan persediaan MAK 526 pada tabel C.11.5 sebesar Rp9.985.944.909.233,00 dibandingkan dengan realisasi belanja 526 barang sebesar Rp6.904.620.549.722,00 masih terdapat selisih sebesar Rp(3.081.324.359.511,00). Adapun rincian per eselon I disajikan sebagai berikut.

Tabel C.11.8 Perbandingan Belanja Barang 526 dengan Mutasi Tambah Persediaan 526 per Eselon I

No	Eselon I	Realisasi Belanja 526 (Rp)	Mutasi Tambah Persediaan 526 (Rp)	Selisih (Rp)
1	Ditjen Tanaman Pangan	3.538.252.400.223	5.709.948.270.777	-2.171.695.870.554
2	Ditjen Hortikultura	640.855.108.141	1.104.806.769.740	-463.951.661.599
3	Ditjen Perkebunan	617.843.519.813	1.100.507.544.039	-482.664.024.226
4	Ditjen Peternakan dan Kewan	678.208.353.580	763.005.115.485	-84.796.761.905
5	Ditjen Prasarana Sarana Pertanian	1.000.852.023.549	852.339.104.749	148.512.918.800
6	Badan Litbang	299.608.796.175	318.715.842.671	-19.107.046.496
7	Badan PPSDMP	57.714.013.265	58.528.405.796	-814.392.531
8	Badan Ketahanan Pangan	71.286.334.976	78.093.855.976	-6.807.521.000
Jumlah		6.904.620.549.722	9.985.944.909.233	-3.081.324.359.511

Berdasarkan tabel C.11.5 dapat dijelaskan lebih rinci penjelasan selisih antara belanja barang 526 dengan mutasi tambah persediaan 526 per satker pada lampiran C.11.5.

Berdasarkan tabel C.11.4, nilai Persediaan Diserahkan Kepada Masyarakat pada Badan Litbang antara lain berupa :

1. Persediaan Taman Teknologi Pertanian senilai Rp33.145.227.096,00;
2. Program BEKERJA senilai Rp9.716.137.988,00
3. Denfarm senilai Rp23.405.735.187,00
4. Sistem Usaha Pertanian Inovatif senilai Rp346.398.400,00
5. UPBS senilai Rp9.614.000,00

Adapun persediaan pada Badan Litbang yang masih dalam proses pembangunan fisik maupun proses penyelesaian hibah ke Pemerintah Daerah/masyarakat dengan rincian per Satker dapat dilihat pada **Lampiran C.11.6**.

PIUTANG JANGKA PANJANG

C.12 TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp21.641.534.363,00 dan Rp9.199.782.860,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per Eselon I

No.	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Ditjen Tanaman Pangan	19.233.857.830	9.042.914.825,00	10.190.943.005	112,70
2	Ditjen Hortikultura	2.403.964.536	131.775.535,00	2.272.189.001	1.724
3	Badan Litbang	3.711.997	25.092.500,00	(21.380.503)	(85,21)
	Jumlah	21.641.534.363	9.199.782.860,00	12.441.751.503	135,24

Berdasarkan tabel di atas, dapat dirinci mutasi penambahan dan pengurangan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dijelaskan pada **Lampiran C.12**.

C.13. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp179.946.428,00 dan Rp132.861.669,00. Penyisihan piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang perhitungan.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tagihan TP/TGR per Unit Eselon I dapat dilihat pada **Lampiran C.13**.

ASET TETAP

Nilai Aset Tetap Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 2018 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah masing-masing senilai Rp84.090.449.609.192,00 dan Rp17.205.901.659.170,00. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel C.14 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Tanah	76.634.434.244.419	11.608.949.370.893	65.025.484.873.526	560,13
2	Peralatan dan Mesin	6.548.535.528.157	6.225.890.240.250	322.645.287.907	5,18
3	Gedung dan Bangunan	5.968.056.274.799	4.734.934.884.794	1.233.121.390.005	26,04
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	636.398.426.494	608.350.078.280	28.048.348.214	4,61
5	Aset Tetap Lainnya	72.003.399.911	72.295.320.166	(291.920.255)	(0,40)
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	109.794.054.699	14.198.879.909	95.595.174.790	673,26
7	Akumulasi Penyusutan	-5.878.772.319.287	-6.058.717.115.122	179.944.795.835	(2,97)
Jumlah		84.090.449.609.192	17.205.901.659.170	66.884.547.950.022	388,73

Kementerian Pertanian melaksanakan penilaian kembali BMN pada tahun 2017-2018. Perkembangan pencatatan hasil IP dalam Laporan Keuangan Tahun 2019 sebagaimana tersaji dalam penjelasan **CaLK F.2.18. Pengungkapan Lainnya**.

C. 14 TANAH

Tanah yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp 76.634.434.244.419,00 dan Rp11.608.949.370.893,00. Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut.

Tabel C.14.1 Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	11.608.949.370.893	79.468.585.573.727	14.443.100.700.201	76.634.434.244.419

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Tabel C.14.2. Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Transfer Keluar	201.177.151.400
Transfer Masuk	201.177.151.400
Revaluasi Aset Tetap	68.771.525.554.711
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	111.213.028.184
Koreksi Reklasifikasi Persediaan. Aset tetap. Aset Lainnya	218.939.581.000
Beban Kerugian Pelepasan Aset	651.406.266
Saldo Awal	6.127.473.000
Pembelian	299.000.000
Transfer Masuk	6.098.404.614.700
Hibah (Masuk)	24.349.800.800
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	19.788.860.986
Reklasifikasi Masuk	228.333.296.700
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	97.994.500

Pengembangan Nilai Aset	376.360.000
Pengembangan Melalui KDP	1.558.413.900
Koreksi Kesalahan input IP	2.303.112.626.680
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	83.177.600.000
Koreksi Penilaian Kembali BMN	770.884.138.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	492.683.000
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	36.740.438.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali	4.603.883.500
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	100.920.154.000
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	2.502.451.000
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	281.906.850.000
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	225.062.000
Total Mutasi Tambah	79.468.585.573.727
Mutasi Kurang	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	48.393.574.000
Transfer Keluar	201.177.151.400
Transfer Masuk	201.177.151.400
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	172.891.538.045
Koreksi Reklasifikasi Persediaan. Aset tetap. Aset Lainnya	218.939.581.000
Beban Kerugian Pelepasan Aset	651.406.266
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	43.764.110.600
Transfer Keluar	6.004.615.331.700
Hibah (Keluar)	74.870.740.628
Reklasifikasi Keluar	224.981.613.700
Koreksi Pencatatan	109.180.238
Koreksi Transfer Masuk	12.371.691.002
Koreksi Kesalahan input IP	6.366.691.571.224
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	25.562.376.000
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	811.568.341.000
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	30.833.850.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	1.161.627.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	3.339.864.998
Total Mutasi Kurang	14.443.100.700.201

Rincian pencatatan belanja modal Tanah adalah sebagai berikut.

Tabel C.14.3. Rincian Pencatatan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI
Pencatatan Tanah SAIBA	76.634.434.244.419
Pencatatan Tanah SIMAK	76.634.434.244.419
Selisih	-
Pencatatan Simak dari Belanja Modal	
Belanja Modal Tanah	17.811.214.150

URAIAN	NILAI
Belanja Modal Pembebasan Tanah	3.095.345.900
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	72.725.550
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	758.811.100
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	7.499.799.000
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	115.000.000
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	27.138.186
Total Belanja Modal Tanah	29.380.033.886
Hibah (Masuk)	24.349.800.800
Pembelian	299.000.000
Pengembangan KDP	27.310.481.336
Pengembangan Nilai Aset	376.360.000
Perolehan/Penambahan KDP	1.333.200.550
Total Pencatatan Tanah	53.668.842.686
Selisih	(24.288.808.800)

Dari tabel di atas antara belanja modal tanah dengan pencatatan pada Simak BMN terdapat selisih lebih catat senilai Rp24.288.808.800,00 disebabkan sebagai berikut :

1. Kesalahan pencatatan terkait realisasi belanja Gedung bangunan yang dicatat sebagai tanah pada Eselon 1 Ditjen Peternakan Satker Balai Besar Veteriner Maros. Sulawesi Selatan senilai Rp84.017.000,00.
2. Kesalahan pencatatan terkait realisasi belanja tanah yang dicatat sebagai Aset Lainnya pada Eselon 1 Ditjen Perkebunan Satker Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya senilai (Rp60.000.000,00).
3. Kesalahan pencatatan terkait realisasi belanja tanah yang dicatat sebagai Aset Lainnya pada Eselon 1 Ditjen Perkebunan Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan senilai (Rp99.992.000,00).
4. Kesalahan pencatatan terkait realisasi belanja Aset lainnya yang di catat sebagai Tanah pada Eselon 1 Ditjen Peternakan Satker Balai Besar Veteriner Maros. Sulawesi Selatan Senilai Rp14.983.000,00.
5. Terdapat Hibah Langsung pada Eselon 1 Badan PSDM satker Sekretariat Badan PSDM senilai Rp24.300.000.000,00 dari Pemda Propinsi Jawa Barat, dan Hibah Langsung pada Eselon 1 Badan Karantina Pertanian satker Balai Karantina Pertanian Kelas II Kendari senilai Rp49.800.800,00 dari Pemda Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Tabel C.14.4. Rincian Tanah berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	6.341.700.292.000	6.378.352.773.000	(36.652.481.000)	(0,57)
2	Ditjen Tanaman Pangan	1.567.040.438.936	1.550.221.115.200	16.819.323.736	1,08
3	Ditjen Hortikultura	307.675.861.000	332.457.159.104	(24.781.298.104)	(7,45)
4	Ditjen Perkebunan	1.812.228.436.639	1.843.132.078.267	(30.903.641.628)	(1,68)
5	Ditjen Peternakan dan Kewan	9.382.083.085.000	13.970.733.154.000	(4.588.650.069.000)	(32,84)
6	Badan Litbang	48.117.607.041.926	46.967.477.294.602	1.150.129.747.324	2,45
7	Badan SDMP	7.410.126.303.198	7.507.906.271.200	(97.779.968.002)	(1,30)

8	Badan Karantina Pertanian	1.695.972.785.720	1.720.122.996.370	(24.150.210.650)	(1,40)
9	Satker Konsolidasi	-	68.661.453.470.850	68.661.453.470.850	(100,00)
Jumlah		76.634.434.244.419	11.608.949.370.893	65.025.484.873.526	560,13

C.15 PERALATAN DAN MESIN

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing masing senilai Rp6.548.535.528.157.00 dan Rp6.225.890.240.250.00. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel C.15.1 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Peralatan dan Mesin	6.225.890.240.250	614.689.276.136	292.043.988.229	6.548.535.528.157

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel C.15.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	7.000.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	519.880.869
Koreksi Lainnya	19.954.000
Saldo Awal	10.173.397.404
Pembelian	383.288.307.944
Transfer Masuk	164.808.367.201
Hibah (Masuk)	2.887.800.200
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	32.889.178.562
Reklasifikasi Masuk	8.573.597.846
Perolehan Lainnya	1.657.024.948
Penyelesaian Pembangunan Langsung	35.000.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1.858.523.149
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	1.718.942.400
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	5.762.000
Pengembangan Nilai Aset	3.777.320.363
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	112.625.000
Pengembangan Melalui KDP	523.964.250
Transaksi Normalisasi BMN	1.832.630.000
Total Mutasi Tambah	614.689.276.136
Mutasi Kurang	
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	519.880.869
Koreksi Lainnya	19.954.000
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7.000.000

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	69.596.367.076
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.488.265.140
Transaksi Normalisasi BMN	105.530.002
Penghapusan	25.497.537.646
Transfer Keluar	164.989.985.019
Hibah (Keluar)	21.235.368.067
Reklasifikasi Keluar	6.148.354.346
Koreksi Pencatatan	707.483.369
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	40.883.000
Usulan Barang Hibah DK/TP	1.637.108.125
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	50.271.570
Total Mutasi Kurang	292.043.988.229

Adapun nilai saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

**Tabel C.15.3 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019
Setelah Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2018	6.225.890.240.250
Mutasi Tambah	614.689.276.136
Mutasi Kurang	(292.043.988.229)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019	6.548.535.528.157
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	(5.175.230.663.237)
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2019	1.373.304.864.920

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019.

Tabel C.15.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Peralatan dan Mesin SAIBA	6.548.535.528.157
Pencatatan Peralatan dan Mesin SIMAK	6.548.535.528.157
Selisih	-
Pencatatan SIMAK dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423.560.172.962
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	800.980.876
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	383.635.000
Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	64.014.000
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	145.211.477
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1.390.274.029
Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU	257.154.600
Total Belanja Peralatan dan Mesin	426.603.442.944
Hibah (Masuk)	2.887.800.200

Pembelian	383.288.307.944
Pengembangan KDP	28.001.604.618
Pengembangan Nilai Aset	3.777.320.363
Penyelesaian Pembangunan Langsung	35.000.000
Perolehan/Penambahan KDP	8.075.902.194
Total Pencatatan Peralatan dan Mesin	426.065.935.319
Selisih	537.507.625

Dari tabel di atas pencatatan pada SIMAK BMN dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdapat selisih kurang catat senilai Rp537.507.625,00 disebabkan sebagai berikut :

1. Kesalahan pencatatan dari realisasi Persediaan dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Ditjen Hortikultura satker Direktorat Jenderal Hortikultura senilai Rp.7.200.000,00
2. Pencatatan langsung tanpa melalui kiriman dari SIMAK BMN Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi senilai (Rp.7.000.000,00)
3. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan dicatat sebagai Peralatan dan mesin pada Eselon 1 Setjen satker Biro Umum Dan Pengadaan senilai Rp.431.669.680,00
4. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong senilai (Rp.41.000.000,00)
5. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau senilai Rp.5.196.000,00
6. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari senilai (Rp.171.162.500,00)
7. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Jalan dan Jembatan pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari senilai (Rp.59.750.000,00)
8. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Irigasi pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor senilai (Rp.195.250.000,00)
9. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Jaringan pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan senilai (Rp.170.895.000,00)
10. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset Lainnya pada Eselon 1 Setjen satker Biro Umum Dan Pengadaan senilai (Rp.145.190.500,00)
11. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset Lainnya pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan senilai (Rp.173.295.000,00)
12. Kesalahan pencatatan dari realisasi Aset Lainnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Veteriner Denpasar senilai Rp.53.471.000,00

13. Kesalahan pencatatan dari realisasi Aset Lainnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong senilai Rp.87.323.500,00
14. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Aset Lainnya pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor senilai (Rp.310.000.000,00)
15. Kesalahan pencatatan dari realisasi Aset Lainnya dicatat sebagai Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Badan BKP satker Badan Ketahanan Pangan senilai Rp.47.879.400,00
16. Hibah Langsung pada Eselon 1 Ditjen Hortikultura satker Direktorat Jenderal Hortikultura senilai Rp.80.300.000,00 dari JICA (*Japan Cooperation Agency*).
17. Hibah Langsung pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan senilai Rp.2.712.400.000,00 dari *The United States Department, of States/Biosecurity Engagement Program* (Kedutaan Besar AS) untuk proyek *Biosecurity Upgrades at Disease Investigation Centers* (DIC) Wates and Maros.
18. Hibah Langsung pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor senilai Rp.89.716.050,00 dari *FAO*.
19. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tanpa melalui kiriman Simak BMN pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Sukamandi senilai Rp.310.000,00
20. Realisasi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada Eselon 1 Badan Karantina, satker Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu senilai Rp. 2.830.000
21. Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker BLU Pusat Veteriner Farma Surabaya senilai Rp.17.484.150,00 dari Bank Mandiri Cabang Surabaya.
22. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin dicatat sebagai Beban Keperluan Perkantoran pada Eselon 1 Ditjen TP satker Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karawang Jabar senilai (Rp.2.599.000,00).
23. Dicatat sebagai Ekstrakomtabel senilai (Rp.2.797.145.405,00) pada delapan Eselon 1 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel C.15.5. Rincian Pencatatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai Aset Ekstrakomtabel

Eselon 1	Satker	Jumlah (Rp)
Sekretariat Jenderal	6	(316.470.045)
Ditjen Hortikultura	1	(12.100.000)
Ditjen Perkebunan	1	(6.232.980)
Ditjen Peternakan dan Keswan	7	(226.351.100)
Ditjen PSP	1	(63.615.000)
Badan Litbang	18	(250.873.500)
BPPSDMP	10	(1.762.267.780)
Badan Ketahanan Pangan	1	(159.235.000)
Total	45	(2.797.145.405)

Adapun rincian saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.15.6 Rincian Peralatan dan Mesin berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	455.122.996.054	455.173.704.620	(50.708.566)	(0,01)
2	Inspektorat Jenderal	26.946.397.436	24.734.688.637	2.211.708.799	8,94
3	Ditjen Tanaman Pangan	554.150.809.073	518.439.552.275	35.711.256.798	6,89
4	Ditjen Hortikultura	179.335.952.272	187.613.177.091	(8.277.224.819)	(4,41)
5	Ditjen Perkebunan	420.762.611.272	415.153.809.534	5.608.801.738	1,35
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	1.098.239.885.030	1.052.524.263.601	45.715.621.429	4,34
7	Ditjen PSP	880.858.909.660	874.238.166.801	6.620.742.859	0,76
8	Badan Litbang	1.465.080.204.071	1.359.864.063.465	105.216.140.606	7,74
9	BPPSDMP	594.735.493.658	545.561.852.661	49.173.640.997	9,01
10	Badan Ketahanan Pangan	52.253.829.266	44.260.902.534	7.992.926.732	18,06
11	Badan Karantina Pertanian	821.048.440.365	748.326.059.031	72.722.381.334	9,72
	Jumlah	6.548.535.528.157	6.225.890.240.250	322.645.287.907	5,18

C.16 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing senilai Rp5.968.056.274.799,00 dan Rp4.734.934.884.794,00. Mutasi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel C.16.1. Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Gedung dan Bangunan	4.734.934.884.794	2.588.462.430.621	1.355.341.040.616	5.968.056.274.799

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel C.16.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	10.059.979.177
Transfer Keluar	27.382.665.450
Transfer Masuk	23.528.908.984
Revaluasi Aset Tetap	1.449.044.728.251
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	68.330.447.494
Koreksi Reklasifikasi Persediaan, Aset tetap, Aset Lainnya	1.863.683.346
Beban Kerugian Pelepasan Aset	93.498.023
Saldo Awal	2.879.724.652
Pembelian	2.839.893.000
Transfer Masuk	329.562.473.940
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	133.955.149.863
Reklasifikasi Masuk	26.232.538.393

Perolehan Lainnya	37.550.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	13.383.800.306
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	24.187.657.259
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	7.558.798.238
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	2.790.000
Pengembangan Nilai Aset	49.333.306.113
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	12.167.948.243
Pengembangan Melalui KDP	93.748.045.746
Transaksi Normalisasi BMN	146.970.000
Koreksi Transfer Masuk	9.891.726.523
Koreksi Kesalahan input IP	238.270.393.486
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	1.205.846.173
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	5.699.388.178
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	12.417.281.025
Koreksi Penilaian Kembali BMN	9.104.532.236
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	2.230.059.986
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	11.490.942.000
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	537.783.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	3.616.295.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali	3.296.168.896
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	492.996.900
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	8.942.675.740
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	13.247.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	4.585.342.000
Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	327.196.000
Total Mutasi Tambah	2.588.462.430.621
Mutasi Kurang	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11.645.687.298
Transfer Keluar	27.382.665.450
Transfer Masuk	23.528.908.984
Revaluasi Aset Tetap	1.578.991.610
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.531.256.307
Koreksi Reklasifikasi Persediaan, Aset tetap, Aset Lainnya	1.863.683.346
Beban Kerugian Pelepasan Aset	93.498.023
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	52.727.840.220
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	3.035.695.203
Transaksi Normalisasi BMN	7.411.515.238
Penghapusan	2.097.360.300
Transfer Keluar	324.905.768.886
Hibah (Keluar)	13.052.691.300
Reklasifikasi Keluar	25.420.845.914
Koreksi Pencatatan	17.238.647.184
Koreksi Transfer Masuk	13.247.000

Koreksi Kesalahan input IP	129.666.712.100
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	5.851.702.819
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	637.857.833.244
Koreksi Penilaian Kembali BMN	1.727.310.233
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	7.205.928.102
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	16.189.498.256
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	7.328.806.500
Koreksi Nilai barang Berlebih	1.248.608.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali	428.076.687
Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	1.942.462.212
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	127.632.000
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	8.238.168.200
Total Mutasi Kurang	1.355.341.040.616

Adapun nilai saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel C.16.3 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2018	4.734.934.884.794
Mutasi Tambah	2.588.462.430.621
Mutasi Kurang	(1.355.341.040.616)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019	5.968.056.274.799
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	(524.822.572.147)
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2019	5.443.233.702.652

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019.

Tabel C.16.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan Gedung Bangunan SAIBA	5.968.056.274.799
Pencatatan Gedung Bangunan SIMAK	5.968.056.274.799
Selisih Pencatatan	0
Pencatatan Simak BMN dari realisasi Belanja Modal	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	255.195.211.212
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	78.895.500
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	1.079.892.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	7.766.998.590
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	299.910.000
Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama, Gedung dan Bangunan	2.850.000
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	1.695.655.907
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	115.758.593.225

Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU	11.035.823.462
Jumlah Realisasi Belanja	392.913.829.896
Pembelian	2.839.893.000
Pengembangan KDP	294.557.306.513
Pengembangan Nilai Aset	49.333.306.113
Penyelesaian Pembangunan Langsung	13.383.800.306
Perolehan/Penambahan KDP	24.209.441.336
Jumlah Pencatatan	384.323.747.268
Selisih Kurang Catat	8.590.082.628

Selisih pencatatan pada SIMAK BMN dari realisasi belanja modal Gedung bangunan terdapat selisih kurang catat senilai Rp.8.590.082.628,00 disebabkan sebagai berikut

1. Dicatat sebagai Piutang Lainnya pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan senilai (Rp2.583.341.972,00) disebabkan gagal kontrak (Bank garansi).
2. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Tanah Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan senilai (Rp84.017.000,00).
3. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada Eselon 1 Setjen satker Biro Umum Dan Pengadaan senilai (Rp431.669.680,00).
4. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborong-borong senilai Rp41.000.000,00.
5. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau senilai (Rp5.196.000,00).
6. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari senilai Rp171.162.500,00.
7. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Jalan dan Jembatan Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari senilai (Rp195.565.000,00).
8. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Jalan dan Jembatan Belum Diregister pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor senilai (Rp614.162.000,00).
9. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen TP satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai (Rp512.689.000,00).
10. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan senilai (Rp391.611.638,00).
11. Kesalahan pencatatan dari realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai

- Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Sibarongborong senilai Rp2.000.000,00.
12. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Badan SDM satker Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian senilai (Rp178.249.300,00).
 13. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Badan BKP satker Badan Ketahanan Pangan senilai (Rp2.903.442.158,00).
 14. Dicatat sebagai Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar pada Eselon 1 Ditjen Perkebunan satker Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya senilai (Rp405.569.292,00) yang akan dibayar pada tahun berikutnya.
 15. Dicatat sebagai Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar pada Eselon 1 Badan Karantina satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu senilai Rp72.000.000,00 sebagai Peralatan dan mesin yang akan dibayar pada tahun berikutnya.
 16. Dicatat sebagai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Eselon 1 Badan Karantina satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende senilai Rp1.821.912,00.
 17. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Ditjen Perkebunan satker Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan senilai (Rp15.000.000,00).
 18. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong Padang Mangatas senilai (Rp168.981.000,00).
 19. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa senilai (Rp19.173.000,00).
 20. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah senilai (Rp21.000.000,00).
 21. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu senilai (Rp24.850.000,00).
 22. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Badan Litbang satker Loka Penelitian Sapi Potong, Grati Jawa Timur senilai (Rp14.000.000,00).
 23. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan senilai (Rp8.000.000,00).
 24. Dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari senilai (Rp301.550.000,00).

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.16.5 Rincian Gedung dan Bangunan per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	854.760.394.516	834.586.140.740	20.174.253.776	2,42
2	Inspektorat Jenderal	329.071.000	379.263.000	(50.192.000)	(13,23)
3	Ditjen Tanaman Pangan	177.102.972.148	161.507.869.265	15.595.102.883	9,66
4	Ditjen Hortikultura	120.412.023.377	115.893.226.661	4.518.796.716	3,90
5	Ditjen Perkebunan	353.480.003.305	342.263.350.588	11.216.652.717	3,28
6	Ditjen Peternakan dan Keswan	686.683.045.536	698.345.928.436	(11.662.882.900)	(1,67)
7	Ditjen PSP	2.603.284.929	2.915.800.999	(312.516.070)	(10,72)
8	Badan Litbang	2.045.603.168.832	2.597.831.307.868	(552.228.139.036)	(21,26)
9	BPPSDMP	815.071.150.332	666.031.838.607	149.039.311.725	22,38
10	Badan Ketahanan Pangan	864.181.000	864.181.000		0,00
11	Badan Karantina Pertanian	911.146.979.824	802.995.197.337	108.151.782.487	13,47
12	Satker Konsolidasi	0	-1.488.679.219.707	1.488.679.219.707	(100,00)
Jumlah		5.968.056.274.799	4.734.934.884.794	1.233.121.390.005	26,04

C.17 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing masing senilai Rp636.398.426.494,00 dan Rp608.350.078.280 Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel C.17.1 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	608.350.078.280	220.875.645.448	192.827.297.234	636.398.426.494

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel C.17.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan,Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11.027.186
Transfer Keluar	1.601.709.409
Transfer Masuk	941.638.525
Revaluasi Aset Tetap	80.040.175.121
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9.123.565.675
Beban Kerugian Pelepasan Aset	8.227.268
Saldo Awal	199.140.000
Pembelian	1.685.079.255
Transfer Masuk	30.396.499.177
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	8.857.060.400
Reklasifikasi Masuk	2.561.314.590

Perolehan Lainnya	4.825.200
Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.367.583.995
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	297.649.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	29.731.000
Pengembangan Nilai Aset	2.312.125.922
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	214.929.768
Pengembangan Melalui KDP	8.879.925.465
Koreksi Transfer Masuk	2.809.068.000
Koreksi Kesalahan input IP	62.374.804.450
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	178.199.000
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	406.637.979
Koreksi Penilaian Kembali BMN	182.713.000
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	548.246.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	17.290.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali	682.205.063
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	25.496.000
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	3.118.779.000
Total Mutasi Tambah	220.875.645.448
Mutasi Kurang	
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	13.685
Transfer Keluar	1.601.709.409
Transfer Masuk	941.638.525
Revaluasi Aset Tetap	37.894.527.628
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.290.350
Beban Kerugian Pelepasan Aset	8.227.268
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.669.857.359
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	257.502.718
Transaksi Normalisasi BMN	50.975.000
Penghapusan	642.462.900
Transfer Keluar	30.631.999.177
Hibah (Keluar)	2.889.545.000
Reklasifikasi Keluar	4.858.043.000
Koreksi Pencatatan	1.786.012.800
Koreksi Transfer Masuk	3.118.779.000
Koreksi Kesalahan input IP	100.148.695.867
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	1.038.150.626
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	344.698.079
Koreksi Penilaian Kembali BMN	66.361.000
Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	219.186.000
Koreksi Nilai barang Berlebih	1.592.830.000
Koreksi BMN ditemukan Kembali	502.543.843
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	2.558.248.000
Total Mutasi Kurang	192.827.297.234

Adapun nilai saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

**Tabel C.17.3 Rincian Saldo Jalan, irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019
Setelah Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2018	608.350.078.280
Mutasi Tambah	220.875.645.448
Mutasi Kurang	(192.827.297.234)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019	636.398.426.494
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	(176.927.011.136)
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2019	459.471.415.358

Berikut ini disajikan rincian pencatatan dari belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel C.17.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019**

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencatatan JIJ SAIBA	636.398.426.494
Pencatatan JIJ SIMAK	636.398.426.494
Selisih	-
Pencatatan SIMAK dari belanja Modal JIJ	
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	8.938.255.000
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	14.650.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	407.615.500
Belanja Modal Perjalanan Jalan dan Jembatan	5.124.400
Belanja Modal Irigasi	2.534.846.695
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Irigasi	7.260.000
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	29.900.000
Belanja Modal Jaringan	3.620.442.005
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	4.868.787.565
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	1.005.314.500
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	507.510.172
Total Belanja	21.939.705.837
Pembelian Jalan dan Jembatan	242.520.000
Pembelian Irigasi	352.090.000
Pembelian Jaringan	1.090.469.255
Pengembangan KDP	11.678.439.100
Pengembangan Nilai Aset Jalan dan Jembatan	1.221.496.200
Pengembangan Nilai Aset Irigasi	680.593.400
Pengembangan Nilai Aset Jaringan	410.036.322
Penyelesaian Pembangunan Langsung Jalan dan Jembatan	1.136.376.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung Irigasi	859.908.295

Penyelesaian Pembangunan Langsung Jaringan	1.371.299.700
Perolehan/Penambahan KDP	4.148.194.565
Total Pencatatan	23.191.422.837
Selisih Lebih Catat	(1.251.717.000)

Dari tabel di atas terdapat selisih lebih catat dari belanja sebesar Rp1.251.717.000,00 di sebabkan sebagai berikut

1. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai JIJ pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor senilai Rp195.250.000,00.
2. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai JIJ pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan senilai Rp170.895.000,00.
3. Kesalahan pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai JIJ pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari senilai Rp59.750.000,00.
4. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai JIJ pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari senilai Rp195.565.000,00.
5. Kesalahan pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai JIJ pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor senilai Rp614.162.000,00.
6. Dicatat sebagai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan senilai Rp16.095.000,00.

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.17.5 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon 1	31 Desember 2019 (Rp)	31Desember2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretaris Jenderal	19.303.896.858	19.864.084.438	(560.187.580)	(2,82)
2	Ditjen Tanaman Pangan	6.191.745.771	11.719.799.171	(5.528.053.400)	(47,17)
3	Ditjen Hortikultura	21.172.485.098	22.039.716.698	(867.231.600)	(3,93)
4	Ditjen Perkebunan	10.403.891.793	9.849.203.726	554.688.067	5,63
5	Ditjen Peternakan dan Keswan	141.432.712.902	149.508.055.502	(8.075.342.600)	(5,40)
6	Ditjen PSP	71.454.000	71.454.000	0	0,00
7	Badan Litbang	268.039.327.873	300.541.300.220	(32.501.972.347)	(10,81)
8	BPPSDMP	76.411.288.812	60.841.751.712	15.569.537.100	25,59
10	Badan Karantina	93.371.623.387	85.189.649.132	8.181.974.255	9,60
11	Satker Konsolidasi	0	-51.274.936.319	51.274.936.319	(100,00)
	Jumlah	636.398.426.494	608.350.078.280	28.048.348.214	4,61

C.18 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp72.003.399.911,00 dan Rp72.295.320.166,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut.

Tabel C.18.1 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	72.295.320.166	177.197.967.527	177.489.887.782	72.003.399.911

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel C.18.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Pembelian	5.555.866.824
Transfer Masuk	168.221.684.690
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.670.700.000
Reklasifikasi Masuk	195.000.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung	523.472.013
Pengembangan Nilai Aset	31.244.000
Total Mutasi Tambah	177.197.967.527
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	167.927.140.544
Penghapusan	437.967.278
Transfer Keluar	5.641.192.460
Hibah (Keluar)	169.159.000
Reklasifikasi Keluar	3.238.450.000
Koreksi Pencatatan	75.978.500
Total Mutasi Kurang	177.489.887.782

Adapun nilai saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel C.18.3 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2018	72.295.320.166
Mutasi Tambah	177.197.967.527
Mutasi Kurang	(177.489.887.782)
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019	72.003.399.911
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2019	(1.792.072.767)
Saldo Nilai Buku Per 31 Desember 2019	70.211.327.144

Berikut ini disajikan rincian pencatatan Aset Tetap Lainnya terhadap belanja modal Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel C.18.4. Rincian Pencatatan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Belanja Modal Lainnya	4.928.151.437
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	1.182.431.400
Total Belanja	6.110.582.837
Pembelian Aset Tetap Renovasi	3.811.772.083
Pembelian Aset Tetap Lainnya	1.744.094.741
Pengembangan Nilai Aset tetap lainnya	31.244.000
Penyelesaian Pembangunan Langsung Aset tetap renovasi	523.472.013
Total Pencatatan SIMAK	6.110.582.837
Selisih	0

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.18.5 Rincian Aset Tetap Lainnya per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	12.623.784.172	12.079.866.131	543.918.041	4,50
2	Inspektorat Jenderal	161.717.175	106.861.055	54.856.120	51,33
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.039.560.150	2.528.046.150	511.514.000	20,23
4	Ditjen Hortikultura	501.698.222	501.698.222	0	0,00
5	Ditjen Perkebunan	11.665.158.237	16.448.539.737	(4.783.381.500)	(29,08)
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	6.597.516.467	6.047.523.310	549.993.157	9,09
7	Ditjen PSP	577.571.000	693.876.760	(116.305.760)	(16,76)
8	Badan Litbang	12.079.673.887	12.408.206.531	(328.532.644)	(2,65)
9	BPPSDMP	20.320.079.133	19.768.129.651	551.949.482	2,79
10	Badan Ketahanan Pangan	2.903.442.158	600.000	2.902.842.158	483.807,03
11	Badan Karantina Pertanian	1.533.199.310	1.711.972.619	(178.773.309)	(10,44)
Jumlah		72.003.399.911	72.295.320.166	(291.920.255)	(0,40)

C.19 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing senilai Rp109.794.054.699,00 dan Rp14.198.879.909,00. Berikut disajikan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut.

Tabel 19.1 Rincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.198.879.909	399.813.415.212	304.218.240.422	109.794.054.699

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut.

Tabel C.19.2 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Perolehan/Penambahan KDP	37.766.738.645
Pengembangan KDP	361.547.831.567
Transfer Masuk KDP	498.845.000
Total Mutasi Tambah	399.813.415.212
Mutasi Kurang	
Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.903.216
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	198.160.949.811
Pengembangan Melalui KDP	104.710.349.361
Koreksi Nilai KDP	471.988.834
Penghapusan/ Penghentian KDP	364.204.200
Transfer Keluar KDP	498.845.000
Total Mutasi Kurang	304.218.240.422

Adapun nilai saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel C.19.3 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2018	14.198.879.909
Mutasi Tambah	399.813.415.212
Mutasi Kurang	304.218.240.422
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019	109.794.054.699
Akumulasi Penyusutan	-
Saldo Perolehan Per 31 Desember 2019	109.794.054.699

Adapun rincian saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel C.19.4.Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretaris Jenderal	6.538.401.300	72.011.500	6.466.389.800	8979,66
2	Ditjen Hortikultura	93.073.750	142.243.750	(49.170.000)	(34,57)
3	Ditjen Perkebunan	6.859.200	6.859.200	0	0,00
4	Ditjen Peternakan dan Kewan	32.648.894.528	1.569.396.500	31.079.498.028	1980,35
5	Badan Litbang	649.765.500	7.617.448.490	(6.967.682.990)	(91,47)
6	BPPSDMP	62.409.249.060	4.393.730.286	58.015.518.774	1320,42
7	Badan Karantina Pertanian	7.447.811.361	397.190.183	7.050.621.178	1775,12
Total		109.794.054.699	14.198.879.909	95.595.174.790	673,26

Berdasarkan tabel C.19.4 diatas, berikut ini disajikan rincian per Eselon I atas Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran C.19**.

Tabel 19.5 Rincian Pembangunan Kontruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2019

Keterangan	Saldo 1 Januari 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	KDP Yang Menjadi Aset Definitif (Rp)	Saldo 31 Desember 2019 (Rp)
Tanah Dalam Pengerjaan	44.020.000	28.599.661.886	21.347.274.886	7.296.407.000
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	188.092.500	36.077.506.812	36.083.842.812	181.756.500
Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	14.307.756.709	317.974.574.815	229.394.003.325	102.888.328.199
Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	(340.989.300)	15.826.633.665	16.058.081.365	(572.437.000)
Jumlah	14.198.879.909	398.478.377.178	302.883.202.388	109.794.054.699

C.20 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing masing senilai Rp5.878.772.319.287,00 dan Rp6.058.717.115.122,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel C.20.1 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	76.634.434.244.419		76.634.434.244.419
2	Peralatan dan Mesin	6.548.535.528.157	(5.175.230.663.237)	1.373.304.864.920
3	Gedung dan Bangunan	5.968.056.274.799	(524.822.572.147)	5.443.233.702.652
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	636.398.426.494	(176.927.011.136)	459.471.415.358
5	Aset Tetap Lainnya	72.003.399.911	(1.792.072.767)	70.211.327.144
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	109.794.054.699		109.794.054.699
Jumlah		89.969.221.928.479	(5.878.772.319.287)	84.090.449.609.192

Rincian akumulasi penyusutan dan mutasi Penambahan dan Pengurangan penyusutan aset tetap disajikan pada **Lampiran C.20.1 dan C.20.2**.

ASET LAINNYA

C.21 ASET TAK BERWUJUD

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing senilai Rp94.884.700.643,00 dan Rp92.020.243.837,00. Aset Tak Berwujud terdiri dari Hak Cipta, Paten, Software, Lisensi, Hasil Kajian/Penelitian, dan Aset Tak Berwujud Lainnya.

Perbandingan Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Hak Cipta	28.025.000	29.625.000	(1.600.000)	(5,40)
2	Paten	529.681.000	529.681.000	0	0
3	Software	28.867.735.239	25.698.942.833	3.168.792.406	12,33
4	Lisensi	1.899.050.790	2.512.134.390	(613.083.600)	(24,40)
5	Hasil Kajian/Penelitian	24.960.236.864	24.960.236.864	0	0
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	38.599.971.750	38.289.623.750	310.348.000	0,81
Jumlah		94.884.700.643	92.020.243.837	2.864.456.806	3,11

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 113/Permentan/PL.140/9/2014 Tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud Lingkup Kementerian Pertanian dinyatakan bahwa:

1. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Aset ini merupakan hasil kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan.
2. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Hak Paten dan Hak Cipta tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
5. *Software* Komputer adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi (penghubung) atau pengguna (*user*) dan perangkat keras (*hardware*) yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *hard disk*, *external disk*, *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software* Komputer yang masuk dalam kategori ATB yaitu *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain.
6. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

7. Hasil Kajian adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/ atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

Berdasarkan tabel 21.1 di atas, berikut ini disajikan rincian jenis Aset Tak Berwujud per eselon I disajikan pada lampiran C.21. Rincian per unit Eselon I atas Aset Tak Berwujud sebagai berikut.

Tabel C.21.2 Aset Tak Berwujud per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	18.254.661.502	17.177.325.307	1.077.336.195	6,27
2	Inspektorat Jenderal	2.032.469.440	1.669.608.040	362.861.400	21,73
3	Ditjen Tanaman Pangan	903.702.275	810.523.275	93.179.000	11,50
4	Ditjen Hortikultura	1.228.817.000	777.374.000	451.443.000	58,07
5	Ditjen Perkebunan	1.624.890.408	1.417.133.908	207.756.500	14,66
6	Ditjen Peternakan	2.749.783.112	2.150.757.412	599.025.700	27,85
7	Ditjen PSP	33.871.305.100	33.386.095.100	485.210.000	1,45
8	Badan Litbang	29.789.767.306	29.930.559.829	(140.792.523)	(0,47)
9	Badan PSDMP	1.415.579.000	2.242.527.466	(826.948.466)	(36,88)
10	Badan Ketahanan Pangan	285.205.000	40.000.000	245.205.000	613,01
11	Badan Karantina Pertanian	2.728.520.500	2.418.339.500	310.181.000	12,83
Jumlah		94.884.700.643	92.020.243.837	2.864.456.806	3,11

Rincian mutasi aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel 21.3 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	92.020.243.837	6.840.571.390	3.976.114.584	94.884.700.643

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset tidak berwujud adalah sebagai berikut.

Tabel C.21.4 Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi tambah:	
Pembelian	4.197.369.000
Transfer Masuk	457.531.395
Reklasifikasi Masuk	281.160.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.216.395
Pengembangan Nilai Aset	1.482.494.600
Koreksi Pencatatan	419.800.000
Total Mutasi Tambah	6.840.571.390

Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2.302.133.562
Penghapusan	563.914.627
Transfer Keluar	455.315.000)
Reklasifikasi Keluar	280.310.000
Koreksi Pencatatan	374.441.395
Total Mutasi Kurang	3.976.114.584

Adapun nilai saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 setelah akumulasi amortisasi adalah sebagai berikut.

**Tabel C.21.5 Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019
Setelah Akumulasi Amortisasi**

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo per 31 Desember 2018	92.020.243.837
Mutasi Tambah	6.840.571.390
Mutasi Kurang	(3.976.114.584)
Saldo per 31 Desember 2019	94.884.700.643
Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2019	(21.894.137.302)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	72.990.563.341

Adapun rincian mutasi Aset Tak Berwujud dari belanja modal pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel C.21.6. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud dari Belanja Modal

URAIAN	NILAI (Rp)
Belanja modal lainnya	6.337.059.404
Belanja modal lainnya – BLU	54.970.000
Total Belanja Modal	6.392.029.404
Mutasi :	
Pembelian Software	3.811.514.000
Pembelian ATB Lainnya	385.855.000
Pengembangan nilai aset Software	1.192.659.600
Pengembangan nilai aset ATB Lainnya	289.835.000
Total Mutasi Aset	5.679.863.600
Selisih	712.165.804

Penjelasan selisih pencatatan antara Saiba dan Simak adalah sebagai berikut:

- Salah pencatatan dari realisasi Tanah Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Perkebunan satker Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (Bbp2Tp) Surabaya senilai Rp60.000.000
- Salah pencatatan dari realisasi Tanah Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Perkebunan satker Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (Bbp2Tp) Medan senilai Rp99.992.000

- Salah pencatatan dari realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Tanah Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Veteriner Maros, Sulawesi Selatan sebesar (Rp14.983.000)
- Salah pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Setjen satker Biro Umum Dan Pengadaan sebesar Rp145.190.500
- Salah pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp173.295.000
- Salah pencatatan dari realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Veteriner Denpasar senilai (Rp53.471.000)
- Salah pencatatan dari realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong senilai (Rp87.323.500)
- Salah pencatatan dari realisasi Peralatan dan Mesin Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor senilai Rp310.000.000
- Salah pencatatan dari realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Peralatan dan Mesin Belum Diregister pada Eselon 1 Badan BKP satker Badan Ketahanan Pangan senilai (Rp47.879.400)
- Salah pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen TP satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp512.689.000
- Salah pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan senilai Rp391.611.638
- Salah pencatatan dari realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Siborongborong senilai (Rp2.000.000)
- Salah pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Badan SDM satker Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian senilai Rp178.249.300
- Salah pencatatan dari realisasi Gedung dan Bangunan Belum Diregister dicatat sebagai Aset Lainnya yang Belum Diregister pada Eselon 1 Badan BKP satker Badan Ketahanan Pangan senilai Rp2.903.442.158
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Barang Non Operasional Lainnya pada Eselon 1 Setjen satker Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian (Pustaka) senilai Rp.225.810.000
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Ditjen PSP satker Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian senilai (Rp21.250.000)

- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin pada Eselon 1 Badan SDM satker Sekolah Pertanian Pembangunan Negeri Kupang, Ntt senilai (Rp242.770.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden senilai (Rp4.329.050.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Veteriner Denpasar senilai (Rp1.688.500)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Badan Litbang satker Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Bogor senilai (Rp229.410.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Badan Litbang satker Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara senilai (Rp67.950.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Badan Litbang satker Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih Sumatera Utara senilai (Rp99.000.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya pada Eselon 1 Badan SDM satker Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa senilai (Rp460.700.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari senilai (Rp14.500.000)
- Realisasi Aset Lainnya yang Belum Diregister dicatat sebagai Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU pada Eselon 1 Ditjen Peternakan satker Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari senilai (Rp40.470.000)

C.22 ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing senilai Rp772.510.080.456,00 dan Rp716.975.689.013,00. Aset Lain - lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Pertanian serta dalam proses penghapusan dari BMN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.22.1 Rincian Aset Lain-Lain per Eselon I per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	27.099.976.306	25.201.833.367	1.898.142.939	7,53
2	Ditjen Tanaman Pangan	61.236.670.463	58.808.505.504	2.428.164.959	4,13
3	Ditjen Hortikultura	10.041.801.750	11.837.678.118	(1.795.876.368)	(15,17)
4	Ditjen Perkebunan	244.210.956.455	247.073.110.541	(2.862.154.086)	(1,16)
5	Ditjen Peternakan	77.981.693.319	75.067.836.426	2.913.856.893	3,88
6	Ditjen PSP	2.046.907.192	42.768.000	2.004.139.192	4.686,07

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Badan Litbang	48.801.730.678	47.808.994.740	992.735.938	2,08
8	Badan PSDMP	260.490.917.055	261.784.937.834	(1.294.020.779)	(0,49)
9	Badan Ketahanan Pangan	1.132.290.000	2.109.665.706	(977.375.706)	(46,33)
10	Badan Karantina Pertanian	39.467.137.238	37.208.627.397	2.258.509.841	6,07
11	Satker Konsolidasi	0	(49.968.268.620)	49.968.268.620	(100)
Jumlah		772.510.080.456	716.975.689.013	55.534.391.443	7,75

Rincian mutasi Aset Lain-Lain yang tidak digunakan dalam pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel C.22.2. Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019

Aset Tetap	31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lain-Lain	716.975.689.013	344.191.607.381	288.657.215.938	772.510.080.456

Rincian mutasi tambah dan kurang atas aset lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel C.22.3 Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019

URAIAN	NILAI (Rp)
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	294.223.338.761
Reklasifikasi Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	49.968.268.620
Total Mutasi Tambah	344.191.607.381
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	26.444.040.303)
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan)	489.476.500
Usulan Barang Hibah DK/TP (BMN yang dihentikan)	13.699.600
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	42.333.848.654
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	169.665.427.099
Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	3.839.168.500
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	7.555.589.870
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	38.125.386.807
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	190.578.605
Total Mutasi Kurang	288.657.215.938

Adapun nilai saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 setelah akumulasi penyusutan adalah sebagai berikut.

Tabel C.22.4 Rincian Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 Setelah Akumulasi Penyusutan

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo per 31 Desember 2018	716.975.689.013
Mutasi Tambah	344.191.607.381
Mutasi Kurang	(288.657.215.938)

Saldo per 31 Desember 2019	772.510.080.456
Akumulasi Penyusutan sd 31 Desember 2019	(255.444.818.181)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	517.065.262.275

C.23 AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya yang dimiliki Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing senilai Rp277.338.955.483,00 dan Rp267.250.832.428,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel C.23 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Hak Cipta	28.025.000	2.489.640	25.535.360
2	Paten	529.681.000	247.426.754	282.254.246
3	Software	28.867.735.239	20.599.250.788	8.268.484.451
4	Lisensi	1.899.050.790	992.426.330	906.624.460
5	Hasil Kajian/Penelitian	24.960.236.864	0	24.960.236.864
6	Aset Tak Berwujud Lainnya	38.599.971.750	52.543.790	38.547.427.960
Jumlah		94.884.700.643	21.894.137.302	72.990.563.341
B	Aset Lain-Lain			
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	769.637.779.346	253.510.949.435	516.126.829.911
2	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2.872.301.110	1.933.868.746	938.432.364
Jumlah		772.510.080.456	255.444.818.181	517.065.262.275
Total		867.394.781.099	277.338.955.483	590.055.825.616

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp301.177.306.287,00 dan Rp252.880.609.242,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada di bawah ini.

Tabel C.24 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Utang Kepada Pihak Ketiga	295.808.434.356	247.540.754.802	48.267.679.554	19,50
Pendapatan Diterima Dimuka	5.102.190.855	4.991.253.179	110.937.676	2,22

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Uang Muka Dari KPPN	266.681.076	348.601.261	(81.920.185)	(23,50)
Jumlah	301.177.306.287	252.880.609.242	48.296.697.045	19,10

C.24 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp295.808.434.356,00 dan Rp247.540.754.802,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 24.1 Perbandingan Rincian Utang Pihak Ketiga per Eselon I

NO	Eselon I	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.860.078.335	1.609.228.883	250.849.452	15,59
2	Inspektorat Jenderal	120.382.837	374.005.132	(253.622.295)	(67,81)
3	Ditjen Tanaman Pangan	287.144.197.209	51.403.193.126	235.741.004.083	458,61
4	Ditjen Hortikultura	113.289.441	105.137.690	8.151.751	7,75
5	Ditjen Perkebunan	97.945.926	631.609.583	(533.663.657)	(84,49)
6	Ditjen Peternakan	867.298.454	1.112.045.397	(244.746.943)	(22,01)
7	Ditjen PSP	1.955.511.557	187.484.518.465	(185.529.006.908)	(98,96)
8	Badan Litbang	951.359.201	2.515.347.671	(1.563.988.470)	(62,18)
9	Badan PSDMP	593.731.102	593.725.843	5.259	0
10	Badan Ketahanan Pangan	29.427.053	45.840.571	(16.413.518)	(35,81)
11	Badan Karantina Pertanian	2.075.213.241	1.666.102.441	409.110.800	24,55
Jumlah		295.808.434.356	247.540.754.802	48.267.679.554	19,50

Pada Kementerian Pertanian, utang kepada pihak ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja modal yang masih harus dibayar, utang kepada pihak ketiga BLU dan utang kepada pihak ketiga lainnya.

Tabel C.24.2 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	1.138.285.940	1.124.328.935	13.957.005	1,24
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	292.945.477.182	215.870.054.750	77.075.422.432	35,70
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	72.000.000	426.971.292	(354.971.292)	(83,14)
Utang Kepada Pihak Ketiga BLU	165.281.038	350.002.591	(184.721.553)	(52,78)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	1.487.390.196	29.669.397.234	28.182.007.038	(94,99)
Dana Pihak Ketiga	0	100.000.000	(100.000.000)	(100,00)
Jumlah	295.808.434.356	247.540.754.802	48.267.679.554	19,50

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di masing-masing unit Eselon I disajikan pada lampiran C.24.

C.25 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.102.190.855,00 dan Rp4.991.253.179,00. Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa. Pendapatan Diterima Dimuka antara lain merupakan pendapatan sewa ruangan untuk mesin ATM, kantin, dan sewa tanah.

Tabel 25.1 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per Eselon I

No	Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	2.105.898.254	2.691.285.847	(585.387.593)	(21,75)
2	Ditjen Tanaman Pangan	0	35.000.000	(35.000.000)	(100)
3	Ditjen Hortikultura	2.098.100	6.294.300	(4.196.200)	(66,67)
4	Ditjen Peternakan	2.366.989.771	1.415.930.401	951.059.370	67,17
5	Badan Litbang	401.350.833	610.181.250	(208.830.417)	(34,22)
6	Badan PSDMP	225.853.897	224.228.048	1.625.849	0,73
7	Badan Karantina Pertanian	0	8.333.333	(8.333.333)	(100)
Jumlah		5.102.190.855	4.991.253.179	110.937.676	2,22

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Tabel C.25.2 Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	2.735.201.084	3.540.322.778	(805.121.694)	(22,74)
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	459.947.500	267.175.000	192.772.500	72,15
Pendapatan diterima dimuka BLU	1.907.042.271	1.183.755.401	723.286.870	61,10
Jumlah	5.102.190.855	4.991.253.179	110.937.676	2,22

Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga di masing-masing unit Eselon I disajikan pada lampiran C.25.

C.26 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp266.681.076,00 dan Rp348.601.261,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS

C.27 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp88.731.310.972.198,00 dan Rp25.807.319.732.927,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Apabila dibandingkan perbedaan nilai atas Pendapatan LRA dan LO sebagai berikut:

Tabel D. Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2019 (dalam Rupiah)

URAIAN	LRA	LO	SELISIH	REFERENSI
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	564.153.864.808	575.928.029.800	-11.774.164.992	Tabel D.1.1
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.148.326.869	8.148.326.869	0	Tabel D.12.2
Pendapatan Non Operasional Lainnya	263.226.305.066	304.690.111.793	-41.463.806.727	Tabel D.15.2
TOTAL	835.528.496.743	888.766.468.462	-53.237.971.719	

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp575.928.029.800,00 dan Rp505.882.376.741,00. Rincian Pendapatan Bukan Pajak Lainnya disajikan pada **Lampiran D.1.1.**

Tabel D.1 Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2019 (dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	89.924.000	89.924.000	0
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	557.694.350	557.694.350	0
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	41.236.278.156	41.990.566.495	-754.288.339
424242	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa		17.484.150	-17.484.150
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	2.772.129.565	2.772.129.565	0
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.659.564.678	5.659.564.678	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	2.932.775	2.932.775	0
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	53.898.757.630	54.198.995.560	-300.237.930
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	10.000.000	10.000.000	0
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	607.124.735	607.124.735	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.807.323.581	6.636.234.871	-828.911.290
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	0
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	24.809.250	24.809.250	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	6.713.733.111	6.761.083.111	-47.350.000
425252	Pendapatan Perizinan Pertanian	16.125.200.000	16.030.125.000	95.075.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	28.434.426.341	28.779.667.184	-345.240.843
425331	Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	282.423.147.523	282.323.848.832	99.298.691
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	197.907.430	197.907.430	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	7.949.319.000	7.949.319.000	0

AKUN	URAIAN	LRA	LO	SELISIH
425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	150.650.000	150.650.000	0
425431	Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	1.285.675.000	1.285.675.000	0
425434	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	12.071.527.850	17.623.027.850	-5.551.500.000
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	354.184.700	354.184.700	0
425436	Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	8.903.632.565	10.420.814.929	-1.517.182.364
425439	Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	25.208.571.582	25.202.761.982	5.809.600
425691	Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	3.306.632.592	3.306.649.982	-17.390
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	799.138.996	834.990.196	-35.851.200
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	45.007.407.614	45.055.004.114	-47.596.500
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.203.373.199	2.406.852.884	-1.203.479.685
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	13.258.118.495	14.583.327.087	-1.325.208.592
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	7.127.120	7.127.120	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	84.552.970	84.552.970	0
TOTAL		564.153.864.808	575.928.029.800	-11.774.164.992

Terdapat perbedaan nilai atas LRA Pendapatan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.774.164.992,00. Rincian penjelasan perbedaan tersebut disajikan pada **Lampiran D.1.2**.

D.2 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Saldo Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.536.610.660.611,00 dan Rp2.436.911.825.470,00. Rincian Beban Pegawai disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel D.2.1 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

Uraian Beban Pegawai	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/(Turun)
Beban Gaji Pokok PNS	887.875.640.082	866.700.912.718	2,44%
Beban Pambulatan Gaji PNS	12.694.726	12.465.041	1,84%
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	66.076.719.707	65.149.732.419	1,42%
Beban Tunj. Anak PNS	18.765.094.137	18.498.216.913	1,44%
Beban Tunj. Struktural PNS	19.011.264.749	18.981.454.456	0,16%
Beban Tunj. Fungsional PNS	101.740.217.536	104.402.720.832	-2,55%
Beban Tunj. PPh PNS	6.139.719.209	5.515.762.690	11,31%
Beban Tunj. Beras PNS	44.239.234.640	45.673.736.380	-3,14%
Beban Uang Makan PNS	116.691.387.559	116.833.046.800	-0,12%

Uraian Beban Pegawai	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/(Turun)
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	2.700.000	2.700.000	0,00%
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	2.003.805.000	1.763.055.000	13,66%
Beban Tunjangan Umum PNS	23.462.516.426	23.795.396.459	-1,40%
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	540.200.000	516.126.000	4,66%
Beban Uang Honor Tetap	490.600.000	2.474.363.200	-80,17%
Beban Uang Lembur	43.468.165.050	38.795.084.050	12,05%
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.189.753.199.441	1.122.079.198.164	6,03%
Beban Gaji dan Tunjangan	16.337.502.349	5.717.854.348	185,73%
Jumlah	2.536.610.660.611	2.436.911.825.470	4,09%

Jika dibandingkan dengan TA 2018, pada TA 2019 terdapat kenaikan atas beban pegawai. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan kinerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel D.2.2 Rincian Mutasi Beban Pegawai 31 Desember 2019 (dalam Rupiah)

Uraian Mutasi Beban Pegawai	Jumlah (Rp)	Keterangan
Kas dan Bank – BLU	16.337.502.349	
Piutang Lainnya	-4.200.000	Pembayaran Tunjangan Fungsional pada Satker Inspektorat Jenderal
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	14.134.945	
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.520.263.223.317	Realisasi Belanja Pegawai s.d. 31 Desember 2019
Jumlah	2.536.610.660.611,00	

Jika dibandingkan realisasi belanja pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.536.600.725.666,00 dengan beban pegawai sebesar Rp2.536.610.660.611,00 terdapat **selisih** sebesar **Rp9.934.945,00** dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

Piutang Lainnya	Inspektorat Jenderal	-Rp4.200.000,00
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Sekretariat Jenderal	-Rp21.870.240,00
	Inspektorat Jenderal	Rp37.707.100,00
	Ditjen Tanaman Pangan	-Rp226.925.868,00
	Ditjen Hortikultura	-Rp2.234.460,00
	Ditjen Peternakan	Rp33.897.469,00
	Badan Litbang Pertanian	Rp75.759.450,00
	Badan PPSDMP	-Rp3.632.885,00
	Badan Ketahanan Pangan	-Rp4.919.719,00
	Badan Karantina Pertanian	Rp126.354.098,00
	Jumlah	Rp9.934.945,00

Berdasarkan data selisih di atas, untuk transaksi Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar bernilai negatif merupakan Belanja Pegawai tahun 2018 yang dibayarkan TA 2019. Sedangkan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar bernilai positif merupakan Belanja Pegawai tahun 2019 yang akan dibayarkan TA 2020.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Saldo Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp475.494.311.401,00 dan Rp534.795.883.074,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.3.1 Perbandingan Beban Persediaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/
Beban Persediaan konsumsi	212.105.851.637	190.836.728.293	11,15%
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	59.127.000	49.117.000	20,38%
Beban Persediaan bahan baku	192.960.923.080	279.879.488.772	-31,06%
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	24.990.000	0	0,00%
Beban Persediaan Lainnya	70.343.419.684	64.030.549.009	9,86%
Jumlah	475.494.311.401	534.795.883.074	-11,09%

Kebijakan akuntansi persediaan telah ditetapkan tahun 2018, namun belum dilengkapi sistem akuntansi yang mengatur rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari identifikasi transaksi keuangan yang akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyajian nilai persediaan benih/bibit/hewan, penjurnalan baik di buku jurnal maupun buku besar, sampai penyajiannya dalam laporan keuangan.

Terdapat perbedaan nilai atas beban persediaan dengan pemakaian barang persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp884.205.821,00, perbedaan tersebut ada pada akun beban persediaan barang konsumsi selisih lebih sebesar Rp249.439.635,00, beban persediaan bahan baku selisih lebih sebesar Rp2.980.773.241,00, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga sebesar Rp24.990.000,00 dan beban persediaan lainnya selisih kurang sebesar Rp2.321.017.055,00.

Tabel D.3.2 Perbedaan atas beban persediaan dengan pemakaian barang persediaan per 31 Desember 2019

Jenis Beban Persediaan	Nilai Beban Persediaan	Pemakaian Barang Persediaan Berdasarkan SIMAK-BMN	Selisih
Barang Konsumsi	Rp212.105.851.637,00	Rp212.355.291.272,00	-Rp249.439.635,00
Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp59.127.000,00	Rp59.127.000,00	Rp0,00
Bahan Baku	Rp192.960.923.080,00	Rp195.941.696.321,00	-Rp2.980.773.241,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	Rp24.990.000,00		Rp24.990.000,00
Persediaan Lainnya	Rp70.343.419.684,00	Rp68.022.402.629,00	Rp2.321.017.055,00
Jumlah	Rp475.494.311.401,00	Rp476.378.517.222,00	-Rp884.205.821,00

Berdasarkan tabel di atas, selisih perbedaan atas nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Beban Persediaan Konsumsi sebesar Rp249.439.635,00, sebagai berikut.

Hasil Opname Fisik Lebih

018.01	411925	Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian	Rp49.963.250,00
018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Rp71.682.960,00
018.06	239523	Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional Ii Bukittinggi	Rp320.700,00
018.06	567282	Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Pakan	Rp93.500,00
018.09	500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	Rp92.353.878,00
Jumlah I			Rp214.414.288,00

Hasil Opname Fisik Kurang

018.01	411925	Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian	-Rp9.874.550,00
018.03	238251	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	-Rp1.485.698,00
018.05	567408	Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (Bbp2Tp) Medan	-Rp5.280.000,00
018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	-Rp42.790.360,00
018.06	239523	Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional Ii Bukittinggi	-Rp290.995.715,00
018.06	567282	Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Pakan	-Rp120.500,00
018.09	500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	-Rp14.442.100,00
018.09	567570	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Tengah	-Rp89.265.000,00
018.09	648737	Loka Penelitian Kambing Potong, Sei Putih Sumatera Utara	-Rp9.600.000,00
Jumlah II			-Rp463.853.923,00
Jumlah I + II			-Rp249.439.635,00

b. Beban Persediaan Bahan Baku sebesar Rp2.980.773.241,00, sebagai berikut.

Hasil Opname Fisik Lebih

018.06	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	Rp42.903.000,00
018.09	412050	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	Rp527.505.000,00
018.09	500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	Rp463.287.600,00
Jumlah I			Rp1.033.695.600,00

Hasil Opname Fisik Kurang

018.06	239001	Balai Inseminasi Buatan Lembang	-Rp4.011.000,00
018.09	412022	Balai Penelitian Tanaman Industri Dan Penyegar	-
018.09	412050	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	Rp3.147.436.800,00
018.09	500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	-Rp102.060.000,00
018.09	567296	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	-Rp14.730.300,00
018.09	567296	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	-Rp334.395.000,00
018.09	567318	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	-Rp50.027.930,00

018.09	567364	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	-Rp332.495.000,00
018.09	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat	-Rp29.312.811,00
Jumlah II			-
			Rp4.014.468.841,00
Jumlah I + II			-
			Rp2.980.773.241,00

c. Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
Strategis/berjaga-jaga

018.06	239551	Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional V Banjar Baru	Rp24.990.000,00
Jumlah I			Rp24.990.000,00

d. Beban Persediaan Lainnya sebesar Rp2.321.017.055,00, sebagai berikut.

Hasil Opname Fisik Lebih

018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	Rp241.165.150,00
018.09	412050	Balai Penelitian Tanaman Buah Tropika Solok	Rp2.195.064.000,00
018.09	500941	Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian Bogor	Rp4.602.000,00
Jumlah I			Rp2.440.831.150,00

Hasil Opname Fisik Kurang

018.06	239455	Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari	-Rp43.169.570,00
018.06	239523	Balai Penyidikan Dan Pengujian Veteriner Regional Ii Bukittinggi	-Rp5.404.525,00
018.09	634040	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Barat	-Rp71.240.000,00
Jumlah II			-Rp119.814.095,00
Jumlah I + II			Rp2.321.017.055,00

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Saldo Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.259.328.500.767,00 dan Rp3.642.207.825.041,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa periode 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada **Lampiran D.4**.

Rincian mutasi beban barang dan jasa per 31 Desember 2019 diuraikan sebagai berikut.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-Rp2.490.000,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Rp5.252.222.177,00
Kas dan Bank - BLU	Rp6.290.785.035,00
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	Rp26.426.135,00
Piutang Lainnya	-Rp497.200.000,00

Persediaan yang Belum Diregister	-Rp354.420.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp7.000.000,00
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	Rp2.799.744.405,00
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Rp301.550.000,00
Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp11.903.216,00
Aset Lainnya yang Belum Diregister	Rp5.280.978.500,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp207.960.354,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-Rp26.516.450.190,00
Hibah Langsung yang belum disahkan	Rp8.589.673.761,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp3.257.930.817.374,00
Beban Bahan	Rp1.110.104,00
Beban Langganan Telepon	-Rp1.110.104,00
Jumlah	Rp3.259.328.500.767,00

Jika dibandingkan realisasi belanja barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp3.269.473.824.586,00 dengan beban barang dan jasa sebesar Rp3.259.328.500.767,00 terdapat **selisih kurang** sebesar **Rp10.145.323.819,00**, dengan uraian sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp363.379.737,00
Inspektorat Jenderal	-Rp267.596,00
Ditjen Tanaman Pangan	-Rp195.304.694,00
Ditjen Hortikultura	Rp6.810.430.251,00
Ditjen Perkebunan	Rp29.894.835,00
Ditjen Peternakan	Rp3.766.516.741,00
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	-Rp26.243.080.952,00
Badan Litbang Pertanian	Rp347.471.386,00
Badan PPSDMP	Rp3.888.074.335,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp850.499.301,00
Badan Karantina Pertanian	Rp237.062.837,00
Jumlah	-Rp10.145.323.819,00

Adapun penjelasan atas selisih realisasi belanja dengan beban barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel D.4 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Barang Dan Jasa
(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Sekretariat Jenderal				
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.990.000	-233.800.000	-225.810.000	Pencatatan aset lainnya dari realisasi belanja non operasional senilai 225.810.000
Beban Langganan Listrik	1.481.220.046	-1.208.080.083	273.139.963	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 1.481.220.046 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 1.208.080.083
Beban Langganan Telepon	46.517.847	-46.938.118	-420.271	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 46.517.847 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 46.938.118
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	316.470.045	0	316.470.045	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
JUMLAH	1.852.197.938	-1.488.818.201	363.379.737	
Inspektorat Jenderal				
Beban Langganan Telepon	1.454.337	-1.721.933	-267.596	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 1.454.337 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 1.721.933
JUMLAH	1.454.337	-1.721.933	-267.596	
Ditjen Tanaman Pangan				
Beban Keperluan Perkantoran	2.599.000	0	2.599.000	Utang Jasa Internet menggunakan belanja keperluan kantor
Beban Langganan Listrik	174.359.668	-158.601.514	15.758.154	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 174.359.668 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 158.601.514
Beban Langganan Telepon	5.186.701	-7.342.549	-2.155.848	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 5.186.701 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 7.342.549
Beban Jasa Konsultan	92.717.000	-304.223.000	-211.506.000	Utang Jasa Konsultan Tahun 2019 senilai 92.717.000 dan Pembayaran Jasa Konsultan Tahun 2018 senilai 304.223.000
JUMLAH	274.862.369	-470.167.063	-195.304.694	
Ditjen Hortikultura				
Beban Langganan Listrik	107.229.465	-92.457.413	14.772.052	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 107.229.465 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 92.457.413
Beban Langganan Telepon	6.059.976	-6.201.777	-141.801	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 6.059.976 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 6.201.777
Beban Jasa Lainnya	6.783.700.000	0	6.783.700.000	Hibah Langsung berupa Jasa
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	12.100.000	0	12.100.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
JUMLAH	6.909.089.441	-98.659.190	6.810.430.251	
Ditjen Perkebunan				
Beban Langganan Listrik	82.098.191	-72.697.917	9.400.274	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 82.098.191 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 72.697.917
Beban Langganan Telepon	9.847.350	-11.100.070	-1.252.720	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 9.847.350 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 11.100.070
Beban Langganan Air	6.000.385	-2.389.300	3.611.085	Utang Langganan Air Tahun 2019 senilai 6.000.385 dan Pembayaran Langganan Air Tahun 2018 senilai 2.389.300
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6.232.980	0	6.232.980	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.903.216	0	11.903.216	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan
JUMLAH	116.082.122	-86.187.287	29.894.835	
Ditjen Peternakan				

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Beban Keperluan Perkantoran	9.000.000	-9.000.000	0	Utang TA 2019 dan Pembayaran Jasa Internet TA 2018 menggunakan belanja keperluan kantor
Beban Bahan	0	-497.200.000	-497.200.000	Pencairan bank garansi
Beban Bahan	0	-354.420.000	-354.420.000	Pencatatan persediaan menggunakan belanja bahan
Beban Barang Non Operasional Lainnya	9.995.000	0	9.995.000	Utang atas pengujian lab tahun 2019
Beban Langganan Listrik	803.552.912	-801.744.900	1.808.012	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 803.552.912 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 801.744.900
Beban Langganan Telepon	53.009.448	-63.472.149	-10.462.701	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 53.009.448 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 63.472.149
Beban Langganan Air	34.345.800	-31.692.470	2.653.330	Utang Langganan Air Tahun 2019 senilai 34.345.800 dan Pembayaran Langganan Air Tahun 2018 senilai 31.692.470
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	3.000.000	-916.500	2.083.500	Utang Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2019 senilai 3.000.000 dan Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2018 senilai 916.500
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	208.960.100	0	208.960.100	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	4.330.738.500	0	4.330.738.500	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	17.391.000	0	17.391.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU	14.500.000	0	14.500.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - BLU
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU	40.470.000	0	40.470.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya - BLU
JUMLAH	5.524.962.760	-1.758.446.019	3.766.516.741	
Ditjen PSP				
Beban Bahan	0	-590.000	-590.000	Pengembalian Belanja tahun 2019 yang belum disetor
Beban Barang Non Operasional Lainnya	174.000.000	0	174.000.000	Belanja barang yang masih harus dibayar berupa Ongkos Kirim Tahun 2019
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-26.498.072.508	-26.498.072.508	Pembayaran utang atas barang non operasional lainnya berupa Ongkos Kirim tahun lalu
Beban Langganan Listrik	34.795.602	-35.239.600	-443.998	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 34.795.602 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 35.239.600
Beban Langganan Telepon	8.081.259	-9.420.705	-1.339.446	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 8.081.259 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 9.420.705
Beban Sewa	0	-1.500.000	-1.500.000	Pengembalian Belanja tahun 2019 yang belum disetor

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	63.615.000	0	63.615.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	21.250.000	0	21.250.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
JUMLAH	301.741.861	-26.544.822.813	-26.243.080.952	
Badan Litbang Pertanian				
Beban Keperluan Perkantoran	120.000	0	120.000	Utang Langganan Internet Tahun 2019
Beban Keperluan Perkantoran	14.425.892	-25.434.507	-11.008.615	Utang Langganan Internet Tahun 2019 senilai 14.425.892 dan Pembayaran Langganan Internet Tahun 2018 senilai 25.434.507
Beban Langganan Listrik	719.410.426	-969.681.592	-250.271.166	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 719.410.426 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 969.681.592
Beban Langganan Listrik	0	-18.377.682	-18.377.682	Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 18.377.682
Beban Langganan Telepon	22.544.367	-35.186.470	-12.642.103	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 22.544.367 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 35.186.470
Beban Langganan Air	20.941.254	-36.071.302	-15.130.048	Utang Langganan Air Tahun 2019 senilai 20.941.254 dan Pembayaran Langganan Air Tahun 2018 senilai 36.071.302
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.125.000	-3.577.500	547.500	Utang Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2019 senilai 4.125.000 dan Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2018 senilai 3.577.500
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	7.000.000	0	7.000.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	250.873.500	0	250.873.500	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	396.360.000	0	396.360.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
JUMLAH	1.435.800.439	-1.088.329.053	347.471.386	
Badan PPSDMP				
Beban Keperluan Perkantoran	16.749.200	-27.631.647	-10.882.447	Utang Langganan Koran, Internet, TV kabel Tahun 2019 senilai 16.749.200 dan Pembayaran Daya Jasa, Listrik, Internet, TV kabel Tahun 2018 senilai 27.631.647
Beban Bahan	3.775.000	0	3.775.000	Utang Langganan Internet dan Publikasi Expose Tahun 2019
Beban Bahan	0	-1.110.104	-1.110.104	Pembayaran telepon menggunakan belanja bahan
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	-400.000	-400.000	Pengembalian Belanja tahun 2019 yang belum disetor
Beban Langganan Listrik	422.820.514	-421.031.867	1.788.647	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 422.820.514 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 421.031.867
Beban Langganan Telepon	70.549.650	-15.045.936	55.503.714	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 70.549.650 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 15.045.936

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Beban Langganan Telepon	1.110.104	0	1.110.104	Pembayaran telepon menggunakan belanja bahan
Beban Langganan Air	63.244.335	-95.458.355	-32.214.020	Utang Langganan Air Tahun 2019 senilai 63.244.335 dan Pembayaran Langganan Air Tahun 2018 senilai 95.458.355
Beban Jasa Lainnya	1.103.215.661	0	1.103.215.661	Hibah Langsung berupa Jasa
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.762.267.780	0	1.762.267.780	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	242.770.000	0	242.770.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	301.550.000	0	301.550.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	460.700.000	0	460.700.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya
JUMLAH	4.448.752.244	-560.677.909	3.888.074.335	
Badan Ketahanan Pangan				
Beban Langganan Listrik	25.449.678	-35.937.982	-10.488.304	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 25.449.678 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 35.937.982
Beban Langganan Telepon	3.977.375	-4.982.870	-1.005.495	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 3.977.375 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 4.982.870
Beban Jasa Lainnya	702.758.100	0	702.758.100	Hibah Langsung berupa Jasa
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	159.235.000	0	159.235.000	Merupakan Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
JUMLAH	891.420.153	-40.920.852	850.499.301	
Barantan				
Beban Keperluan Perkantoran	5.504.136	-3.881.717	1.622.419	Utang TA 2019 senilai Rp5.504.136 dan Pembayaran Jasa Internet TA 2018 senilai Rp3.881.717 menggunakan belanja keperluan kantor
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	241.000	-448.000	-207.000	Utang TA 2019 senilai Rp241.000 dan Pembayaran Jasa Pos TA 2018 senilai Rp448.000
Beban Langganan Listrik	1.319.396.293	-1.206.519.122	112.877.171	Utang Langganan Listrik Tahun 2019 senilai 1.319.396.293 dan Pembayaran Langganan Listrik Tahun 2018 senilai 1.206.519.122
Beban Langganan Telepon	158.078.312	-124.482.984	33.595.328	Utang Langganan Telepon Tahun 2019 senilai 158.078.312 dan Pembayaran Langganan Telepon Tahun 2018 senilai 124.482.984
Beban Langganan Air	82.698.742	-76.737.072	5.961.670	Utang Langganan Air Tahun 2019 senilai 82.698.742 dan Pembayaran Langganan Air Tahun 2018 senilai 76.737.072
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	-12.000.000	-12.000.000	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2018 senilai 12.000.000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	140.987.424	-78.605.269	62.382.155	Utang Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2019 senilai 140.987.424 dan Pembayaran Langganan Daya dan Jasa Lainnya Tahun 2018 senilai 78.605.269

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Beban Sewa	127.711.936	-89.405.801	38.306.135	Utang Sewa Tahun 2019 senilai 127.711.936 dan Pembayaran Sewa Tahun 2018 senilai 89.405.801
Beban Sewa	67.000	0	67.000	Utang Sewa Tahun 2019 senilai 67.000 dan
Beban Jasa Lainnya	0	-5.542.041	-5.542.041	Pembayaran Jasa Lainnya Tahun 2018 senilai 5.542.041
JUMLAH	1.834.684.843	-1.597.622.006	237.062.837	
TOTAL	23.591.048.507	-33.736.372.326	-10.145.323.819	

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Saldo Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp289.308.159.594,00 dan Rp269.415.153.972,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.5.1 Perbandingan Beban Pemeliharaan untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Pemeliharaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	101.223.050.662	80.278.726.205	26,09%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.642.883.355	7.513.002.895	28,35%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135.296.758.101	131.936.510.008	2,55%
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	1.114.844.181	1.661.001.660	-32,88%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.210.701.333	5.784.143.601	-9,91%
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.969.461.000	990.762.010	98,78%
Beban Pemeliharaan Irigasi	134.603.000	197.091.000	-31,71%
Beban Pemeliharaan Jaringan	4.602.774.833	3.159.457.976	45,68%
Beban Pemeliharaan Lainnya	2.550.286.771	2.910.704.932	-12,38%
Beban Pemeliharaan	566.904.866	1.280.430.100	-55,73%
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.657.259.585	5.729.893.177	-1,27%
Beban Persediaan suku cadang	21.067.627.907	27.574.660.816	-23,60%
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	271.004.000	398.769.592	-32,04%
Jumlah	289.308.159.594	269.415.153.972	7,38%

Rincian Mutasi beban pemeliharaan per 31 Desember 2019 diuraikan sebagai berikut.

Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari	
Hibah	Rp57.618.000,00
Kas dan Bank - BLU	Rp566.904.866,00
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp5.657.259.585,00
Suku Cadang	Rp21.067.627.907,00
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Rp271.004.000,00

Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp261.687.745.236,00
Jumlah	Rp289.308.159.594,00

Jika dibandingkan realisasi belanja pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp262.312.268.102,00 dengan beban pemeliharaan sebesar Rp289.308.159.594,00 terdapat **selisih** sebesar **Rp26.995.891.492,00**, selisih tersebut terdapat pada Eselon I sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal	Rp68.315.610,00
Inspektorat Jenderal	Rp228.000,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp1.432.516.488,00
Ditjen Hortikultura	Rp700.626.462,00
Ditjen Perkebunan	Rp36.445.850,00
Ditjen Peternakan	Rp14.463.674.913,00
Badan Litbang Pertanian	Rp8.464.260.564,00
Badan PPSDMP	Rp1.696.898.705,00
Badan Ketahanan Pangan	Rp132.924.900,00
Jumlah	Rp26.995.891.492,00

Adapun penjelasan atas selisih realisasi belanja dengan beban pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel D.5.2 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Pemeliharaan
(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Sekretariat Jenderal				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	55.652.820	0	55.652.820	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Persediaan suku cadang	12.662.790	0	12.662.790	Persediaan suku cadang tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
JUMLAH	68.315.610	0	68.315.610	
Inspektorat Jenderal				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	228.000	0	228.000	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
JUMLAH	228.000	0	228.000	
Ditjen Tanaman Pangan				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	49.104.095	0	49.104.095	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Persediaan suku cadang	1.383.412.393	0	1.383.412.393	Persediaan suku cadang tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
JUMLAH	1.432.516.488	0	1.432.516.488	
Ditjen Hortikultura				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	50.291.995	0	50.291.995	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Beban Persediaan suku cadang	650.334.467	0	650.334.467	Persediaan suku cadang tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
JUMLAH	700.626.462	0	700.626.462	
Ditjen Perkebunan				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21.445.850	0	21.445.850	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	15.000.000	0	15.000.000	Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
JUMLAH	36.445.850	0	36.445.850	
Ditjen Peternakan				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	614.485.430	-590.000	613.895.430	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Persediaan suku cadang	13.686.275.435	-24.649.952	13.661.625.483	Persediaan suku cadang tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	188.154.000	0	188.154.000	Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
JUMLAH	14.488.914.865	-25.239.952	14.463.674.913	
Badan Litbang Pertanian				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.046.191.640	0	3.046.191.640	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Persediaan suku cadang	5.358.218.924	0	5.358.218.924	Persediaan suku cadang tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	59.850.000	0	59.850.000	Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
JUMLAH	8.464.260.564	0	8.464.260.564	
Badan PPSDMP				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1.687.524.855	0	1.687.524.855	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Persediaan suku cadang	1.373.850	0	1.373.850	Persediaan suku cadang tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	8.000.000	0	8.000.000	Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan
JUMLAH	1.696.898.705	0	1.696.898.705	
Badan Ketahanan Pangan				
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	132.924.900	0	132.924.900	Persediaan bahan untuk pemeliharaan tahun lalu yang dikeluarkan Tahun 2019
JUMLAH	132.924.900	0	132.924.900	
TOTAL	27.021.131.444	-25.239.952	26.995.891.492	

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Saldo Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.157.586.168.979,00 dan Rp1.907.412.856.604,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.6.1 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	1.371.934.492.276	1.251.775.529.660	9,60%
Beban Perjalanan Tetap	31.912.023.389	32.015.996.637	-0,32%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	76.293.213.950	74.282.582.397	2,71%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119.348.014.985	120.665.489.890	-1,09%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	528.175.665.714	398.340.088.761	32,59%
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	5.390.259.993	6.007.215.340	-10,27%
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	24.108.037.118	23.315.852.486	3,40%
Beban Perjalanan	424.461.554	1.010.101.433	-57,98%
Jumlah	2.157.586.168.979	1.907.412.856.604	13,12%

Rincian Mutasi Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-Rp6.380.100,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	Rp8.374.666.033,00
Kas dan Bank – BLU	Rp424.461.554,00
Piutang Lainnya	-Rp360.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-Rp97.672.899,00
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp2.148.891.454.391,00
Jumlah	Rp2.157.586.168.979,00

Jika dibandingkan realisasi belanja perjalanan dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp2.157.690.581.978,00 dengan beban perjalanan dinas sebesar Rp2.157.586.168.979,00 terdapat **selisih kurang** sebesar **Rp104.412.999,00**, selisih tersebut terdapat pada Eselon I sebagai berikut.

Inspektorat Jenderal	-Rp291.421.799,00
Ditjen Tanaman Pangan	Rp198.500.000,00
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	-Rp2.910.000,00
Badan PPSDMP	-Rp5.111.100,00
Badan Karantina Pertanian	-Rp3.470.100,00
Jumlah	-Rp104.412.999,00

Adapun penjelasan atas selisih realisasi belanja dengan beban perjalanan dinas sebagai berikut:

Tabel D.6.2 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Perjalanan Dinas
(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN	TAMBAH	KURANG	SALDO	PENJELASAN
Inspektorat Jenderal				
Beban Perjalanan Biasa	0	-210.000	-210.000	Pengembalian Perjalanan Dinas TA 2019, dan sudah disetor Tahun 2020
Beban Perjalanan Biasa	0	-288.661.799	-288.661.799	Pembayaran Perjalanan Dinas yang belum dibayar Tahun 2018
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-150.000	-150.000	Pengembalian Perjalanan Dinas TA 2019, dan sudah disetor Tahun 2020
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	-2.400.000	-2.400.000	Pembayaran Perjalanan Dinas yang belum dibayar Tahun 2018
JUMLAH	0	-291.421.799	-291.421.799	
Ditjen Tanaman Pangan				
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	198.500.000	0	198.500.000	Utang Perjalanan Dinas Tahun 2019
JUMLAH	198.500.000	0	198.500.000	
Ditjen PSP				
Beban Perjalanan Biasa	0	-1.320.000	-1.320.000	Pengembalian Perjalanan Dinas TA 2019, dan sudah disetor Tahun 2020
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	-1.590.000	-1.590.000	Pengembalian Perjalanan Dinas TA 2019, dan sudah disetor Tahun 2020
JUMLAH	0	-2.910.000	-2.910.000	
Badan PPSDMP				
Beban Perjalanan Biasa	0	-5.111.100	-5.111.100	Pembayaran Perjalanan Dinas yang belum dibayar Tahun 2018
JUMLAH	0	-5.111.100	-5.111.100	
Barantan				
Beban Perjalanan Biasa	0	-3.470.100	-3.470.100	Uang Perjalanan Dinas TA 2019 ada di Bendahara, tapi belum diberikan ke pegawai
JUMLAH	0	-3.470.100	-3.470.100	
TOTAL	198.500.000	-302.912.999	-104.412.999	

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.889.019.897.241,00 dan Rp5.009.427.912.150,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan uang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (bantuan pemerintah) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.7.1 Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Tanah Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	3.934.356.342	-100,00%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	1.636.258.653.617	-100,00%

Uraian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	1.938.657.000	-100,00%
Beban Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	993.446.519.739	-100,00%
Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	173.706.196.700	13.990.323.808	1141,62%
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	108.237.512.214	205.802.372.926	-47,41%
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	498.537.663.945	75.876.591.044	557,04%
Beban Peralatan dan Mesin Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	0	984.742.679	-100,00%
Beban Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	0	196.415.000	-100,00%
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.991.754.996	756.006.438.755	-99,74%
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	2.876.960.434.633	1.320.992.841.240	117,79%
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	251.071.290.068	0	0,00%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	545.690.467.752	0	0,00%
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.878.824.780.635	0	0,00%
Beban persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.498.320.323	0	0,00%
Beban Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	85.103.811.468	0	0,00%
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.258.709.267.644	0	0,00%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	3.207.688.396.863	0	0,00%
Jumlah	13.889.019.897.241	5.009.427.912.150	177,26%

Apabila dibandingkan beban bantuan pemerintah (526) TA 2018 dengan TA 2019 mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh penyelesaian pertanggung jawaban belanja 526 TA 2018 senilai 7.199.812.662.256,00. Selanjutnya dapat dijelaskan untuk penyelesaian Satker konsolidasi pada akun Belanja Dibayar Dimuka senilai Rp7.199.812.662.256,00 adalah melalui aplikasi BAST BANPEM dengan mengunggah dokumen pertanggungjawaban berupa berita acara serah terima, dokumentasi penyaluran dan pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementan.

Untuk pencatatan dalam laporan keuangan, atas penyelesaian Belanja Dibayar Dimuka senilai Rp7.199.812.662.256,00 tersebut dialokasikan menjadi beban bantuan pemerintah yang diserahkan kepada Pemda/masyarakat.

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat merupakan beban atas penyerahan bantuan pemerintah berupa barang maupun uang. Mekanisme pembebanan (penyerahan persediaan yang diserahkan ke masyarakat) diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/PL.200/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

Jika dibandingkan realisasi belanja bantuan pemerintah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp9.912.836.875.211,00 dengan beban bantuan pemerintah sebesar Rp13.889.019.897.241,00 terdapat **selisih lebih** sebesar **Rp3.976.183.022.030,00**.

Adapun penjelasan atas selisih realisasi belanja dengan beban bantuan pemerintah sebagai berikut:

Tabel D.7.2 Penjelasan Atas Selisih Realisasi Belanja Dengan Beban Bantuan Pemerintah (dalam Rupiah)

No	Penjelasan	Nilai
1	Realisasi 526 Barang	6.904.620.549.722
2	Beban Bantuan Pemerintah berupa Barang	10.231.578.089.749
3	Selisih	(3.326.957.540.027)
1	Realisasi 526 Uang	3.008.216.325.489
2	Beban Bantuan Pemerintah berupa Uang	3.657.441.807.492
3	Selisih	(649.225.482.003)
	Jumlah Selisih	(3.976.183.022.030)

Rincian penjelasan selisih tersebut per Eselon I disajikan pada **Lampiran D.7**.

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp875.459.266.153,00 dan Rp771.362.654.956,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.8 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	582.046.645.070	581.991.260.123	0,01%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	224.178.798.380	139.545.216.667	60,65%
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	37.541.043.977	26.624.123.721	41,00%
Beban Penyusutan Irigasi	11.303.942.061	5.784.927.841	95,40%
Beban Penyusutan Jaringan	6.655.514.354	6.503.478.943	2,34%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	350.273.383	171.535.063	104,20%
Beban Amortisasi Hak Cipta	411.882	765.543	-46,20%
Beban Amortisasi Paten	38.853.398	45.887.367	-15,33%
Beban Amortisasi Software	2.869.659.830	2.260.484.177	26,95%
Beban Amortisasi Lisensi	220.559.074	251.213.474	-12,20%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	22.729.188	22.681.138	0,21%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	142.215.020	73.466.000	93,58%

Uraian Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	10.088.620.536	8.087.614.899	24,74%
Jumlah	875.459.266.153	771.362.654.956	13,50%

D.9 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.224.137.163,00 dan Rp2.345.388.111,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.9 Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Penyisihan Piutang PNPB	4.653.909.308	641.154.239	625,86%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	467.434.328	203.897.829	129,25%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1.216.252.031	-181.418.028	-770,41%
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	4.183.742	-9.233.962	-145,31%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-117.642.246	1.691.453.201	-106,96%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	-465.168	-100,00%
Jumlah	6.224.137.163	2.345.388.111	165,38%

D.10 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel D.10 Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Periode Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-111.749.124.193	-144.572.660.209	-22,70%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	8.148.326.869	11.384.732.827	-28,43%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	119.897.451.062	155.957.393.036	-23,12%
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0,00%
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	278.570.353.759	379.054.338.377	-26,51%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	304.690.111.793	760.581.735.377	-59,94%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	26.119.758.034	381.527.397.000	-93,15%
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	166.821.229.566	234.481.678.168	-28,86%

D.11. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 sebesar Rp111.749.124.193,00. Defisit ini turun sebesar Rp32.823.536.016,00 atau 22,70 persen dari Tahun 2018 yaitu sebesar Rp144.572.660.209,00. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp8.148.326.869,00 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp119.897.451.062,00.

D.12. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp8.148.326.869,00. Pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp3.236.405.958,00 atau 28,43 persen dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp11.384.732.827,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Eselon I yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel D.12.1 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I
Periode 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian	Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	Ditjen Peternakan	0	4.265.298.000	-100,00%
	Badan Litbang Pertanian	78.755.555	60.328.800	30,54%
	Badan PPSDMP	2.100.000	0	0,00%
	Badan Karantina Pertanian	20.394.298	18.389.000	10,90%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Sekretariat Jenderal	385.803.231	242.813.329	58,89%
	Inspektorat Jenderal	6.000.006	9.285.000	-35,38%
	Ditjen Tanaman Pangan	129.700.098	67.327.600	92,64%
	Ditjen Hortikultura	837.706.357	50.000	1675312,71%
	Ditjen Perkebunan	117.354.219	268.737.751	-56,33%
	Ditjen Peternakan	172.604.778	284.318.440	-39,29%
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	49.600.000	0	0,00%
	Badan Litbang Pertanian	832.185.902	376.570.670	120,99%
	Badan PPSDMP	228.123.122	40.366.000	465,14%
	Badan Ketahanan Pangan	4.300.000	9.895.000	-56,54%
	Badan Karantina Pertanian	1.306.078.110	1.178.495.427	10,83%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Sekretariat Jenderal	89.270.981	184.660.008	-51,66%
	Inspektorat Jenderal	0	13.500.000	-100,00%
	Ditjen Tanaman Pangan	56.177.000	0	0,00%
	Ditjen Hortikultura	0	71.106.999	-100,00%
	Ditjen Perkebunan	0	192.661.000	-100,00%
	Ditjen Peternakan	2.988.916.387	2.403.982.624	24,33%
	Badan Litbang Pertanian	335.188.910	1.148.555.191	-70,82%
	Badan PPSDMP	200.545.328	73.661.044	172,25%

Uraian	Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
	Badan Ketahanan Pangan	3.634.489	81.553.453	-95,54%
	Badan Karantina Pertanian	303.888.098	393.177.491	-22,71%
Jumlah		8.148.326.869	11.384.732.827	-28,43%

Tabel D.12.2 Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2019 (dalam Rupiah)

Uraian Akun	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar (Kegiatan Non Operasional)			
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	101.249.853	101.249.853	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	4.069.455.823	4.069.455.823	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.977.621.193	3.977.621.193	0,00
Jumlah	8.148.326.869	8.148.326.869	0,00

Tidak terdapat selisih antara realisasi pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan realisasi anggaran (LRA) dengan pendapatan pelepasan aset non lancar pada laporan operasional (LO) periode yang berakhir pada 31 Desember 2019.

D.13. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2019 adalah sebesar Rp119.897.451.062,00. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp36.059.941.974,00 atau 23,12 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp155.,957.393.036,00.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar per Eselon I untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

Tabel D.13. Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per Eselon I Periode 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Sekretariat Jenderal	3.243.539.604	1.600.123.770	102,71%
Inspektorat Jenderal	0	99.697.936	-100,00%
Ditjen Tanaman Pangan	2.449.706.211	18.666.974.656	-86,88%
Ditjen Hortikultura	4.688.454.974	1.909.685.950	145,51%
Ditjen Perkebunan	8.642.561.252	91.406.361.592	-90,54%
Ditjen Peternakan	17.449.084.796	11.568.046.771	50,84%
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	422.393.226	18.792.395.208	-97,75%
Badan Litbang Pertanian	5.648.295.687	11.742.953.063	-51,90%

Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Badan PPSDMP	66.317.782.750	5.092.317.415	1202,31%
Badan Ketahanan Pangan	2.260.282.862	917.218.267	146,43%
Badan Karantina Pertanian	8.775.349.700	54.580.325.230	-83,92%
Satker Konsolidasi	0	-60.418.706.822	-100,00%
Jumlah	119.897.451.062	155.957.393.036	-23,12%

Beban pelepasan aset non lancar yang signifikan berasal dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.243.539.604,00, Ditjen Hortikultura sebesar Rp4.688.454.974,00, Ditjen Peternakan sebesar Rp17.449.084.796,00, Badan PPSDMP sebesar Rp66.317.782.750,00 dan Badan Ketahanan Pangan sebesar Rp2.260.282.862,00. Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2019 disajikan pada **Lampiran D.12**.

D.14. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2019 adalah sebesar Rp278.570.353.759,00. Nilai tersebut turun sebesar Rp100.483.984.618,00 atau 26,51 persen dibanding Tahun 2018 yaitu sebesar Rp379.054.338.377,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp304.690.111.793,00 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp26.119.758.034,00.

D.15. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp304.690.111.793,00. Nilai tersebut turun sebesar Rp455.891.623.584,00 atau 59,94 persen dibanding Tahun 2018 sebesar Rp760.581.735.377,00. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel D.15.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	8.595.648	0	0,00%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1.055.347.523	2.511.126.563	-57,97%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	120.077.228	609.299.042	-80,29%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	18.457.288.437	40.436.856.540	-54,36%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.318.837.155	1.955.643.568	69,71%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	156.350.877.994	145.517.223.595	7,44%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	646.204.821	1.451.653.357	-55,48%
Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2.250.000	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	696.276.113	7.090.964.721	-90,18%
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	8.100.165	-100,00%

Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	122.891.551	128.576.197	-4,42%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	92.580.936.419	143.073.009.269	-35,29%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	31.332.778.904	417.797.032.360	-92,50%
Jumlah	304.690.111.793	760.581.735.377	-59,94%

Tabel D.15.2 Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2019 (dalam Rupiah)

Uraian Akun	LRA	LO	SELISIH
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	8.595.648	8.595.648	0
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	1.256.603.625	1.055.347.523	201.256.102
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	158.433.364	120.077.228	38.356.136
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	9.370.310.115	18.457.288.437	-9.086.978.322
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	3.339.916.030	3.318.837.155	21.078.875
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	246.446.184.872	156.350.877.994	90.095.306.878
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.949.985.299	646.204.821	1.303.780.478
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	696.276.113	696.276.113	0
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		122.891.551	-122.891.551
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya		92.580.936.419	-92.580.936.419
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		31.332.778.904	-31.332.778.904
Jumlah	263.226.305.066	304.690.111.793	-41.463.806.727

Jika dibandingkan realisasi pendapatan kegiatan non operasional lainnya pada laporan realisasi anggaran (LRA) sebesar Rp263.226.305.066,00 dengan pendapatan kegiatan non operasional lainnya pada laporan operasional (LO) sebesar Rp304.690.111.793,00 periode yang berakhir pada 31 Desember 2019, terdapat selisih sebesar Rp41.463.806.727,00. Selisih tersebut yang signifikan terdapat pada Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp90.095.306.878,00. Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp92.580.936.419,00 dan pendapatan penyesuaian persediaan sebesar Rp31.332.778.904,00 dikarenakan jurnal kiriman dari SIMAK-BMN.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per akun per Eselon I disajikan pada **Lampiran D.15**.

D.16. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp26.119.758.034,00. Beban ini mengalami penurunan sebesar Rp355.407.638.966,00 atau 93,15 dibandingkan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp381.527.397.000,00. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel D.16. Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
(dalam Rupiah)

Uraian	Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	Sekretariat Jenderal	1.567.895	29.804.856	-94,74%
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Sekretariat Jenderal	287.157.643	179.123.731	60,31%
	Inspektorat Jenderal	58.985.650	106.393.217	-44,56%
	Ditjen Tanaman Pangan	3.726.721.708	4.137.316.528	-9,92%
	Ditjen Hortikultura	52.226.249	244.445.953	-78,63%
	Ditjen Perkebunan	17.619.535	1.327.704.874	-98,67%
	Ditjen Peternakan	3.899.349.047	337.279.362.768	-98,84%
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	0	1.700.000	-
	Badan Litbang Pertanian	13.682.722.324	31.840.113.757	-57,03%
	Badan PPSDMP	358.409.472	152.704.366	134,71%
	Badan Ketahanan Pangan	581.144.190	150.425.859	286,33%
	Badan Karantina Pertanian	1.213.922.529	1.027.146.624	18,18%
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	Ditjen Tanaman Pangan	0	4.780.000	-
	Ditjen Hortikultura	51.220.500	1.127.777.500	-95,46%
	Ditjen Peternakan	346.911.465	659.095.300	-47,37%
	Badan Litbang Pertanian	354.197.054	2.183.257.920	-83,78%
	Badan PPSDMP	15.000.000	0	0,00%
	Badan Karantina Pertanian	1.349.711.222	947.667.550	42,42%
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	Sekretariat Jenderal	122.891.551	128.576.197	-4,42%
Jumlah		26.119.758.034	381.527.397.000	-93,15%

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar Rp25.807.319.732.927,00 dan Rp18.462.335.723.500,00 .

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp22.746.281.842.543,00 dan Rp13.833.515.444.469,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.012.466.860,00 dan Rp779.470.625,00.

Tabel E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Nilai Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	100.000	4.930.000	-97,97%
Suku Cadang	11.492.250	0	0,00%
Bahan Baku	5.204.058.610	188.717.125	2657,60%
Persediaan Lainnya	796.816.000	585.823.500	36,02%
Jumlah	6.012.466.860	779.470.625	671,35%

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp53.236.319.515,00 dan Rp0,00.

Tabel E.3.2 Koreksi Atas Reklasifikasi Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Koreksi Atas Reklasifikasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	51.269.817.000	0	0,00%
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	90.508.348.550	0	0,00%
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-146.622.500	0	0,00%
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.781.799.200	0	0,00%
Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	-125.759.941.030	0	0,00%
Bahan Baku	-16.900.023.720	0	0,00%
Persediaan Lainnya	-35.254.446	0	0,00%
Tanah	58.197.884.000	0	0,00%

Uraian Koreksi Atas Reklasifikasi	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Peralatan dan Mesin	2.425.243.500	0	0,00%
Gedung dan Bangunan	-4.082.794.064	0	0,00%
Jalan dan Jembatan	777.921.590	0	0,00%
Irigasi	-2.877.850.000	0	0,00%
Jaringan	-196.800.000	0	0,00%
Aset Tetap Renovasi	-3.059.300.000	0	0,00%
Aset Tetap Lainnya	15.850.000	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	615.274.531	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	745.513.713	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-63.631.960	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Irigasi	77.050.184	0	0,00%
Akumulasi Penyusutan Jaringan	917.217	0	0,00%
Software	117.940.000	0	0,00%
Aset Tak Berwujud Lainnya	-117.090.000	0	0,00%
Akumulasi Amortisasi Paten	-330.000	0	0,00%
Akumulasi Amortisasi Software	-55.561.250	0	0,00%
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-2.041.000	0	0,00%
Jumlah	53.236.319.515	0	0,00%

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp66.730.256.356.574,00 dan Rp0,00. Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan hasil inventarisasi dan penilaian kembali oleh KPKNL atas aset-aset pada Kementerian Pertanian. Revaluasi Aset Tetap lingkup Kementerian Pertanian sudah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018, namun berdasarkan hasil kesepakatan BPK-RI dan Kementerian Keuangan hasil revaluasi tersebut tidak boleh disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2018, hal ini sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-182/PB/2019 tanggal 11 Februari 2018 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2018 (*Unaudited*). Pada Tahun 2019 nilai hasil revaluasi aset tetap tahun 2017, 2018 dan koreksi hasil reval yang dilaksanakan tahun 2019 telah dimasukkan kembali pada Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2019 sesuai dengan hasil kesepakatan dengan BPK. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada **Lampiran E.3.3**.

E.3.4 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp143.537.164.072,00 dan Rp18.361.046.098,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada **Lampiran E.3.4**.

E.3.5 KOREKSI LAIN-LAIN

Saldo Koreksi Lain-lain untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.503.475.230,00 dan -Rp40.762.028.933,00. Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada **Lampiran E.3.5**.

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp18.726.727.299.563,00 dan Rp21.236.843.058.302,00. Rincian Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel E.4 Transaksi Antar Entitas Per 31 Desember 2019 dan 2018 (dalam Rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2019	31 Desember 2018	% Naik/ (Turun)
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.367.185.737.761	21.777.766.261.178	-11,07%
Diterima dari Entitas Lain	-785.201.377.571	-663.600.362.381	18,32%
Transfer Keluar	-6.574.221.035.516	-112.611.349.311	5737,97%
Transfer Masuk	6.660.893.884.010	115.263.799.193	5678,83%
Pengesahan Hibah Langsung	56.966.958.938	117.665.001.391	-51,59%
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-83.720	-9.091.768	-99,08%
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	1.103.215.661	2.368.800.000	-53,43%
Jumlah	18.726.727.299.563	21.236.843.058.302	-11,82%

E.4.1 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN / DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain (DDEL/DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar -Rp785.201.377.571,00 sedangkan DKEL sebesar Rp19.367.185.737.761,00.

E.4.2 TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK

Saldo transfer keluar disajikan sebesar Rp6.574.221.035.516,00 dan transfer masuk sebesar Rp6.660.893.884.010,00. Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L. antar K/L dan antara K/L dengan BA-BUN. Rincian saldo transfer masuk dan transfer keluar dapat disajikan pada **Lampiran E.4.2.1 dan E.4.2.2**.

Pada tahun 2019, terdapat transfer keluar dan transfer masuk antara Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga lain yang terdiri dari :

1. Transfer masuk dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berupa peralatan mesin senilai Rp 485.757.002,00 yang dicatat pada satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam.
2. Transfer keluar ke satker Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik, BPS dari Satker Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian berupa peralatan mesin senilai Rp1.679.048.240,00.

3. Transfer keluar ke satker Polresta, Bogor dari Satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor, Jabar berupa tanah senilai Rp 10.919.390.000,00.
4. Transfer keluar ke satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar, Kementerian PU dari satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berupa tanah senilai Rp359.651.000,00.

Jika dibandingkan saldo transfer keluar dan transfer masuk dengan tetap memperhitungkan akumulasi penyusutan terdapat selisih sebesar Rp86.672.848.494,00. Selisih tersebut merupakan akumulasi atas selisih transfer masuk dan transfer keluar. Rincian selisih disajikan pada **Lampiran E.4.2.3**.

Terkait dengan selisih transfer masuk dan transfer keluar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transfer keluar ke satker Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik, BPS dari Satker Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian berupa peralatan mesin senilai Rp1.679.048.240,00.
2. Transfer keluar ke satker Polresta, Bogor dari Satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor, Jabar berupa tanah senilai Rp 10.919.390.000,00.
3. Transfer keluar ke satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar, Kementerian PU dari satker Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong berupa tanah senilai Rp359.651.000,00.
4. Transfer masuk dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berupa peralatan mesin senilai Rp 485.757.002,00 yang dicatat pada satker Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam.
5. Satker PSEKP terlambat upload ke erekon sehingga transaksi transfer keluar tidak tercatat dan satker Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) sudah melakukan transfer masuk senilai 367.406.000.
6. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (029101) melakukan transfer keluar tanah ke satker Ditjen Perkebunan akan tetapi selisih senilai 158.037.215.
7. Terdapat selisih TK/TM antara satker Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Serpong (537628) dan satker BPPSDMP (412069) senilai 232.080.
8. STTP, Bogor (237160) telah melakukan transaksi transfer keluar seluruh aset ke POLBANGTAN, Bogor (417402) terdapat selisih nilai 2.184.560.462.
9. Terdapat selisih TK/TM antara satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Yogyakarta (237437) dan satker Polbangtan, Yogyakarta (417407) senilai 97.761.395.150.
10. Terdapat selisih TK/TM antara satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang (237490) dan satker Polbangtan, Malang (417409) senilai 242.559.603.
11. Terdapat selisih TK/TM antara satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Medan (237636) dan satker Polbangtan, Medan (417411) senilai 2.343.568.276.
12. Terdapat selisih TK/TM antara satker Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang (412090) dan satker Polbangtan, Magelang (417405) senilai 102.658.310

Atas semua permasalahan diatas akan diperbaiki pada Laporan Keuangan periode berikutnya.

E.4.3 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung secara bruto sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp56.966.958.938,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar –Rp83.720,00 yang terdapat pada Eselon I Badan Litbang Pertanian sehingga Pengesahan Hibah Langsung secara netto sebesar Rp56.966.875.218,00.

Tabel E.4.3 Rincian Pengesahan Hibah Langsung s.d. 31 Desember 2019

Eselon 1	Bentuk Hibah	Jumlah (Rp)
Sekretariat Jenderal	Uang	1.645.294.917,00
Ditjen Hortikultura	a. Jasa, pemberi hibah Japan International Cooperation Agency (JICA)	6.783.700.000,00
	b. Barang, pemberi hibah Japan International Cooperation Agency (JICA) berupa Fruit and Vegetable Washer, Brush Roller Root Fruit Washer /Peeler, Small Container, Large Container senilai 80.300.000 dan dari Kisarazu City, Shiba Prefecture, Jepang berupa Benih Rabbit Eye Blueberry senilai 29.250.000	109.550.000,00
	JUMLAH	6.893.250.000,00
Ditjen Peternakan dan Kewan	Barang, pemberi hibah The United States Department, of States/Biosecurity Engagement Program (Kedutaan Besar AS) untuk proyek Biosecurity Upgrades at Disease Investigation Centeres (DIC) Wates and Maros.	2.712.400.000,00
	JUMLAH :	2.712.400.000,00
Badan Litbang Pertanian	a. Uang, pemberi hibah ACIAR (Australia), Research Council of Norway, FAO, Arcadia Bioscience, Inc, OCP Maroko, yang terdapat pada 21 satker	20.573.739.071,00
	b. Barang berupa GPS, PC, Laptop, dan Camera pada satker BPSDLP	89.716.050,00
	JUMLAH :	20.663.455.121,00
Badan PPSDM Pertanian	Barang (Tanah) dari Pemda Jawa Barat dengan nomor register 29W28W3A	24.300.000.000,00
Badan Ketahanan Pangan	Jasa, pemberi hibah FAO	702.758.100,00
Badan Karantina Pertanian	Barang berupa tanah dari Pemda Kabupaten Kolaka Utara seluas 2.000 m2 ke BKP Kelas II Kendari dengan BAST nomor 5158/PL.130/K/2/2019	49.800.800,00
Jumlah		56.966.958.938,00
Pengembalian Hibah Langsung		-83.720,00
Jumlah Hibah Langsung		56.966.875.218,00

E.4.4 PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAHUN ANGGARAN YANG LALU (TAYL)

Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa yang diterima pada tahun 2018 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Pengesahan Hibah Langsung TAYL secara bruto sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.103.215.661,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL tersebut terdapat pada Kantor Pusat BPPSMP senilai Rp1.103.215.661,00 berupa hibah jasa dari COMCEC, Turki untuk proyek Developing Agriculture Market Information System for Horticulture Farmers.

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp88.731.310.972.198,00 dan Rp25.807.319.732.927,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca sebagaimana tersaji dalam pengungkapan lain-lain

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Monitoring daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut atas temuan BPK Tahun 2019 dijelaskan sebagaimana dalam **Lampiran F.2.1.**

F.2.2. MONITORING PINJAMAN DAN HIBAH

1. Proyek Pinjaman

- Jumlah proyek Pinjaman (*On-Going*) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 8 (Delapan) proyek.

Tabel F.2.2.1 Rekapitulasi Proyek Pinjaman TA 2019

NO	UNIT ESELON 1	PINJAMAN
1	DITJEN PSP	2 PROYEK
2	BADAN LITBANG PERTANIAN	1 PROYEK
3	BADAN PPSDM PERTANIAN	4 PROYEK
4	BADAN KETAHANAN PANGAN	1 PROYEK
	TOTAL	8 PROYEK

- Nilai Komitmen Pinjaman (*On-Going*) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :

Tabel F.2.2.2 Rekapitulasi Komitmen Pinjaman TA 2019

NO	UNIT ESELON 1	NAMA PROYEK PINJAMAN	NILAI KOMITMEN PINJAMAN	
			PUSAT	DAERAH
1	DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	<i>Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)</i>	USD 2.442.156 atau setara IDR 32.063.066.124	USD 15.041.155 atau setara IDR 197.475.321.360
		<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>	USD 50.208.263 atau setara IDR 685.242.373.424	-
2	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN PERTANIAN	<i>Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)</i>	USD 80.000.000 Atau setara IDR 1.000.000.000.000	-

NO	UNIT ESELON 1	NAMA PROYEK PINJAMAN	NILAI KOMITMEN PINJAMAN	
			PUSAT	DAERAH
3	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	USD 57.071.000 Atau setara IDR 742.690.000.000	USD 41.429.000 Atau setara IDR 537.810.000.000
		<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Revitalization Project (SIMURP)</i>	USD 13.200.000 Atau setara IDR 179.508.210.000	-
		<i>Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)</i>	USD 55.300.000 Atau setara IDR 757.610.000.000	-
		<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)</i>	USD 11.759.000 Atau setara IDR 158.746.500.000	USD 28.126.000 Atau setara IDR 365.000.000.000
4	BADAN KETAHAHAN PANGAN	<i>Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)</i>	USD 49.112.000 Atau setara IDR 542.606.000.000	-
TOTAL			USD 319.092.419 Atau setara IDR 4.098.466.149.548	USD 84.596.155 Atau setara IDR 1.100.285.321.360

- c. Nilai Realisasi Pinjaman (*On-Going*) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :

Tabel F.2.2.3 Rekapitulasi Realisasi Pinjaman TA 2019

NO	NAMA PROYEK PINJAMAN	PAGU DIPA 2019 (Rp)	REALIASI TA.2019 (Rp)	%
1	<i>Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)</i>	7.410.000.000	5.379.305.338	72,60
2	<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>	-	-	-
3	<i>Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)</i>	20.847.963.000	20.488.335.370	98,27
4	<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)</i>	19.905.492.000	12.770.489.465	64,16
5	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	38.590.000.000	14.840.055.651	38,46
6	<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Revitalization Project (SIMURP)</i>	8.818.516.000	6.098.630.730	69,16
7	<i>Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)</i>	3.419.867.000	2.748.879.592	80,38

NO	NAMA PROYEK PINJAMAN	PAGU DIPA 2019 (Rp)	REALIASI TA.2019 (Rp)	%
8	<i>Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)</i>	-	-	-
TOTAL		98.991.838.000	62.325.696.146	62,96

- d. Adapun tujuan proyek Pinjaman (*On-Going*) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 yaitu :

Tabel F.2.2.4 Rekapitulasi Tujuan Pinjaman TA 2019

NO	NAMA PROYEK PINJAMAN	TUJUAN PROYEK PINJAMAN
1	<i>Flood Management in Selected River Basins (FMSRB)</i>	Memperbaiki kondisi lahan pertanian di DAS Ciujung dalam hal pengendalian erosi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik, teknik konservasi air dan meningkatkan pendapatan petani dari pengelolaan daerah aliran sungai / agroforestry
2	<i>The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)</i>	Proyek yang didanai dari pinjaman IsDB dan IFAD bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi berupa pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agri bisnis dan penguatan sistem kelembagaan
3	<i>Sustainable Management for Agricultural Research Development and Technology Dissemination (SMARTD)</i>	Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui peningkatan kualitas SDM, infrastruktur, dan sistem manajemen penelitian.
4	<i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)</i>	Meningkatkan nilai pertanian beririgasi secara berkelanjutan.
5	<i>Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)</i>	Tujuan Program READSI adalah pemberdayaan rumah tangga di pedesaan di lokasi Program, baik secara individu maupun secara kelompok, dengan keterampilan, membangun rasa percaya diri dan pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pertanian dan non-pertanian serta meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
6	<i>Strategic Irrigation Modernization and Urgent Revitalization Project (SIMURP)</i>	Kegiatan yang didanai dari Lender WB dan AIIB ini bertujuan untuk memperbaiki sistem irigasi yang existing sehingga lebih efisien, efektif dan berkelanjutan dengan mengadaptasi pilar modernisasi irigasi
7	<i>Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS)</i>	Tujuan pengembangan program YESS meliputi pemuda pedesaan mendapatkan mata pencaharian yang stabil dan cukup melalui pekerjaan dan kewirausahaan di sektor berbasis pertanian. Indikator utamanya adalah: (i) 32.500 pemuda mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor berbasis pertanian; (ii) 6.500 pemuda mengakses magang; (iii) 33.800 petani/pengusaha muda pedesaan yang didukung YESS pendapatannya meningkat; (iv) tambahan 37.500 petani muda tradisional turut serta dalam kontrak pertanian yang adil dan menguntungkan; (v) 50.600 pemuda mendapatkan pekerjaan di perusahaan baru; (v) 60.250 pemuda pedesaan menggunakan jasa keuangan, di mana 4.300 pesertanya adalah rumah tangga migran muda.
8	<i>Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)</i>	Memperbaiki taraf hidup masyarakat (pendapatan dan ketahanan pangan) dan mengurangi kemiskinan di desa sasaran program.

- e. Ikhtisar Laporan Keuangan Pinjaman Luar Negeri (LK PLN)
Berdasarkan data pada e-Rekon&LK terdapat transaksi yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN), berikut ini dapat disajikan rincian Ikhtisar LK PLN pada **Lampiran F.2.2.1.**

2. Jumlah Proyek Hibah

- a. Proyek Hibah Terencana
- 1) Jumlah proyek Hibah Terencana (*On-Going*) lingkup Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2019 sebanyak 2 (Dua) proyek.
 - 2) Nilai Komitmen proyek Hibah Terencana lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2019, dirinci sebagai berikut :

Tabel F.2.2.5 Rekapitulasi Komitmen Hibah Terencana TA 2019

NO	ESELON I	NAMA PROYEK	NILAI KOMITMEN
1	BPPSDMP	Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programmme (YESS)	USD 2.000.000 Atau setara IDR 28.672.000.000
2	BKP	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)	SDR 675.000 Atau setara IDR 15.159.960.000
TOTAL			USD 3.080.000 Atau setara IDR 43.831.000.000

- 3) Nilai Realisasi Hibah Terencana lingkup Kementerian Pertanian pada tahun 2019, dirinci sebagai berikut :

Tabel F.2.2.6 Rekapitulasi Realisasi Hibah Terencana TA 2019

NO	NAMA PROYEK	PAGU DIPA TA.2020	REALISASI PAGU DIPA TA.2020
1	Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programmme (YESS)	-	-
2	Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID)	-	-
TOTAL		-	-

Proyek Hibah Terencana Youth Entrepreneurship and Employment Support Services Programmme (YESS) direncanakan kegiatannya pada tahun 2021, sedangkan proyek hibah terencana Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesia (SOLID) pada tahun 2019 sudah tidak ada kegiatannya dan proyeknya akan ditutup.

b. Proyek Hibah Langsung

- 1) Jumlah Proyek Hibah Langsung tahun 2019 di lingkup Kementerian Pertanian dirinci berdasarkan Eselon I sebagai berikut :

Tabel F.2.2.7 Rekapitulasi Komitmen Hibah Langsung TA 2019

NO	UNIT ESELON 1	JUMLAH HIBAH LANGSUNG	
		Uang	BJS
1	Sekretariat Jenderal	4 Proyek	
2	Ditjen Tanaman Pangan		1 Proyek
3	Ditjen Hortikultura		4 Proyek
4	Ditjen Perkebunan		2 Proyek
5	Ditjen Peternakan & Keswan		13 Proyek
6	Badan Litbang Pertanian	25 Proyek	1 Proyek
7	Badan Pp Sdm Pertanian		2 Proyek
8	Badan Ketahanan Pangan		2 Proyek
9	Badan Karantina Pertanian		1 Proyek
Total		29 Proyek	26 Proyek

- 2) Nilai Komitmen Hibah Langsung tahun 2019 di lingkup Kementerian Pertanian dirinci sebagai berikut :

Tabel F.2.2.8 Rekapitulasi Realisasi Hibah Langsung TA 2019

NO	ESELON I	NILAI KOMITMEN	
		UANG	BARANG/JASA
1.	SETJEN	AUD 491.203 Atau setara IDR 5.198.844.988	
2.	DITJEN TANAMAN PANGAN		USD 295.000 Atau setara IDR 4.267.175.000
3.	DITJEN HORTIKULTURA		JPY 656.333.080 Atau setara IDR 7.805.577.871.911
4.	DITJEN PERKEBUNAN		USD 15.500.000 atau setara IDR 199.950.000.000 ; dan EUR 4.000.000 atau setara IDR 62.593.500.000
5.	DITJEN PETERNAKAN & KESWAN		EUR 13.100.000 atau setara IDR168.875.679.000
			AUD 29.375.110 atau setara IDR 263.888.191.593
			USD 82.871.593 atau setara dengan IDR 843.075.493.255
			NZD 7.600.000 atau setara IDR 68.345.280.000

NO	ESELON I	NILAI KOMITMEN	
		UANG	BARANG/JASA
6.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN		AUD 5.086.120 atau setara IDR 41.724.829.077
			NZD 246.000 atau setara IDR 2.404.384.320
			EUR 48.400 atau setara IDR 784.570.292
			JPY 4.002.000 atau setara IDR 51.496.935.600
7.	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN		USD 97.650 atau setara 1.582.919.195
			IDR 24.300.000.000
8.	BADAN KETAHANAN PANGAN		USD 50.000 atau setara IDR 705.000.000; dan USD 1.204.163 atau setara dengan IDR 16.256.200.500
9.	BADAN KARANTINA PERTANIAN		IDR 49.800.800
TOTAL		USD 1.931.336 AUD 4.475.683 NZD 246.000 EUR 48.400 JPY 4.002.000	USD 103.173.190; NZD 7.600.000; AUD 29.375.110; EUR 17.100.000; JPY 656.333.080;
		Atau setara	Atau setara
		IDR 126.884.360.238	IDR 9.459.467.111.254

3) Total Realisasi Hibah yang diterima secara langsung oleh Kementerian Pertanian dari lembaga donor yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri pada Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut :

a) Bentuk Kas :

- a. Saldo Awal : Rp2.476.800.247.
- b. Pendapatan : Rp22.219.033.988
- c. Pagu DIPA Hibah Langsung : Rp19.776.783.000
- d. Belanja : Rp19.544.479.040
- e. Saldo Bruto : Rp5.151.355.195
- f. Setor ke Kas Negara : Rp131.563.
- g. Saldo Netto : Rp5.151.223.632.

b) Bentuk Barang&Jasa

1. Barang : Rp27.171.750.800
2. Jasa : Rp8.679.389.811

4) **Data Donor Pemberi Hibah**

Data Donor Pemberi Hibah Per 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu jumlah donor pemberi hibah di lingkungan Kementerian Pertanian sebanyak 27 donor yang terdiri dari berbagai Instansi Dalam Negeri, Organisasi Internasional, baik Bilateral maupun Multilateral. Lebih rinci monitoring hibah dapat dilihat pada **Lampiran F.2.2.2.**

F.2.3 . MONITORING PENYELESAIAN SATKER INAKTIF

Kementerian Pertanian mempunyai jumlah satker inaktif sebanyak 183 satker per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel F.2.3.1 Rekapitulasi Jumlah Satker Inaktif TA 2019

No	Eselon I	Total
1	Ditjen Tanaman Pangan	129
2	Ditjen Hortikultura	42
3	Ditjen Perkebunan	4
4	Ditjen PSP	1
5	Badan Ketahanan Pangan	7
	Total Inaktif Kementerian	183

Berikut ini dapat disajikan rincian akun satker inaktif pada tabel dibawah ini.

Tabel F.2.3.2 Rekapitulasi Neraca Percobaan Satker Inaktif TA 2019

Nama Akun	Total Aset Kementan
Piutang PNB	214.941.004
Bagian Lancar TP/TGR	847.183.848
Bahan Baku	949.500.000
Persediaan Lainnya	148.500.000
Tanah	3.351.683.000
Peralatan & Mesin	19.200.372.501
Gedung & Bangunan	5.534.474.130
Irigasi	6.126.834.600
Jaringan	1.185.290.923
Aset Tetap Lainnya	29.200.000
Piutang Tagihan TP/TGR	345.789.335
Aset Tetap yang tdk digunakan dlm operasi pemerintah	18.341.316.397
Aset Tak Berwujud yang tdk digunakan dlm operasional pemerintah	21.667.779
Total	56.296.753.517

Upaya penyelesaian atas satker inaktif yang sudah dilakukan antara lain:

1. Kementerian Pertanian telah menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.050/6/2017 tentang Pembentukan Pejabat Penanggungjawab Proses Likuidasi Entitas Akintansi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Seluruh Eselon I yang memiliki Satker Inaktif secara bertahap telah melakukan proses likuidasi atas beberapa Satker Inaktif yang memiliki saldo seperti Aset Tetap dan Kewajiban, namun demikian proses likuidasi tersebut masih membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya, misalnya : proses hibah dan penghapusan BMN dilakukan secara bertahap.
3. Pada bulan April tahun 2020, *Action Plan* yang dilakukan terkait Tindak Lanjut Satker Inaktif adalah kegiatan workshop likuidasi Satker Inaktif lingkup Kementerian Pertanian. Tujuan dari kegiatan tersebut dalam rangka melakukan proses likuidasi Satker Inaktif berupa kegiatan penyusunan usulan-usulan proses hibah, penghapusan dan pemindahtanganan atas aset dan kewajiban yang dimiliki satker inaktif.

Daftar rekapitulasi Satuan Kerja inaktif Kementerian Pertanian sampai dengan 31 Desember 2019 mempunyai 183 Satker in aktif dengan rincian penyelesaian sebagaimana tersaji pada **Lampiran F.2.3.**

F.2.4. PERMASALAHAN APLIKASI

Aplikasi e-Rekon LK menggunakan *database* tunggal (*single database*), data laporan keuangan yang diunggah satker merupakan (sama dengan) data laporan keuangan yang digunakan unit pelaporan jenjang atasnya (wilayah, eselon I, dan kementerian).

Dengan *database* tunggal, seharusnya permasalahan perbedaan data rekonsiliasi (*suspend*) antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian tidak terjadi lagi.

Pada saat proses penyusunan laporan keuangan TA 2019 masih terdapat permasalahan dalam aplikasi e-Rekon LK, yaitu:

1. Selisih pelaporan Aset pada SAIBA-SIMAK BMN
2. Uraian Akun Tidak Ada
3. Selisih pencatatan reklasifikasi Aset
4. Selisih pencatatan transfer masuk dengan transfer keluar
5. Validasi Nilai Perolehan Minus

Untuk meminimalkan berbagai permasalahan dalam aplikasi e-Rekon LK di atas, sudah dilakukan berbagai strategi :

1. Verifikasi oleh tim verifikator Pusat dan revidi oleh tim Itjen yang berjenjang dari tingkat satker sampai dengan tingkat kementerian.
2. Pendampingan dan koordinasi intensif dengan Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan mulai sejak penggunaan aplikasi e-Rekon LK sampai dengan saat ini.
3. Koordinasi dengan eselon I, wilayah maupun satker dalam berbagai forum.

Namun karena terkendala terbatasnya jumlah narasumber Kementerian Keuangan dan ADK perbaikan koreksi penilaian kembali BMN disampaikan oleh Kementerian Keuangan saat sudah memasuki jadwal penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian. Selain itu aplikasi Persediaan, SIMAK BMN maupun SAIBA yang sering diupdate namun kadang bermasalah, sehingga sampai dengan akhir penyusunan laporan keuangan belum tuntas diselesaikan. Atas kondisi tersebut, selanjutnya akan terus dikoordinasikan lebih lanjut ke Kemenkeu untuk

dilakukan perbaikan data dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Adapun rincian permasalahan dimaksud sebagaimana tersaji pada **Lampiran F.2.4**.

F.2.5. SATKER KONSOLIDASI

Pada Laporan Keuangan Tahun 2019 Kementerian Pertanian terdapat transaksi-transaksi yang dilakukan pada satker konsolidasi. Pembentukan satker konsolidasi mengacu pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 perihal Pembentukan Satker Konsolidasi. Pada Laporan Keuangan ini menyajikan jumlah nilai koreksi atas hasil penilaian kembali (revaluasi) barang milik negara seluruh satker di Kementerian Pertanian yang dilaksanakan pada TA 2017 dan 2018, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-182/PB/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2018 (*Unaudited*) dan Nomor : S-892/PB/2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Petunjuk Teknis Koreksi Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019. Selain itu dalam laporan keuangan ini disajikan kembali beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda sebesar Rp7.199.812.662.256,00 yang merupakan koreksi akun belanja dibayarkan dibayar dimuka sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK sehubungan dokumen pendukung pertanggung jawaban sudah diinput pada aplikasi BAST BANPEM.

Berikut ini disajikan tabel neraca per 31 Desember 2019 atas Laporan Keuangan Satker Konsolidasi.

Tabel F.2.5 Neraca Satker Konsolidasi Per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET		
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	7.199.812.662.256,00
Jumlah Aset Lancar	0,00	7.199.812.662.256,00
Tanah	0,00	(68.661.453.470.850,00)
Gedung dan Bangunan	0,00	(1.488.679.219.707,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	(51.274.936.319,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	(739.039.781.248,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	(135.225.350.312,00)
Jumlah Aset Tetap	0,00	(71.075.672.758.436,00)
Aset Lain-lain	0,00	(49.968.268.620,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(2.385.288.368,00)
Jumlah Aset Lainnya	0,00	(52.353.556.988,00)
Jumlah Aset	0,00	(63.928.213.653.168,00)
Ekuitas	0,00	(63.928.213.653.168,00)
Jumlah Ekuitas	0,00	(63.928.213.653.168,00)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0,00	(63.928.213.653.168,00)

F.2.6. TUNDA BAYAR

Pada Neraca Kementerian Pertanian per 31 Desember 2019 terdapat tunda bayar pada Ditjen Tanaman Pangan senilai Rp.286.964.650.840,00 dan Ditjen PSP untuk pengadaan alat dan

mesin pertanian sebesar Rp.251.244.500,00. Selain itu pada TA 2019 sudah diselesaikan pembayaran tunda bayar yang belum tercatat pada Neraca tahun 2018 di Ditjen Perkebunan sebesar Rp.545.422.296,00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 point C. Ketentuan Revisi Anggaran d. Pergeseran Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Tunggakan Tahun-Tahun Sebelumnya bahwa tunggakan dengan nilai Rp200.000.000,00 harus melampirkan surat pernyataan KPA, tunggakan nilai Rp200.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00 harus melampirkan hasil verifikasi/revisi APIP/KL, dan untuk tunggakan di atas nilai Rp2.000.000.000,00 melampirkan hasil verifikasi/revisi BPKP.

Berikut ini dijelaskan tunda bayar pada masing-masing Eselon I.

A. Ditjen Tanaman Pangan

Pada tahun 2018, Ditjen Tanaman Pangan mempunyai tunda bayar berupa tunggakan atas Bantuan Pemerintah yang sudah disalurkan oleh penyedia ke kelompok petani dan berita acara serah terima (BAST) sudah terbit, sehingga atas penyaluran tersebut sudah dilaporkan sebagai beban barang untuk diserahkan ke masyarakat/Pemda pada laporan keuangan periode TA 2018 sebesar Rp32.544.094.849,00. Namun, demikian sesungguhnya tunda bayar atas bantuan pemerintah sebesar Rp33.104.969.746,00 karena tagihan bantuan pemerintah untuk 4 (empat) gapoktan sebesar Rp560.874.897,00 belum tercatat pada laporan keuangan periode TA 2018.

Berdasarkan hasil revisi BPKP Nomor: LHR-92/D102/2019 tanggal 2 Juli 2019 dari total nilai tunda bayar sebesar Rp33.104.969.746,00, yang memenuhi kriteria layak bayar sebesar Rp31.818.738.392,72 setelah dikurangi denda keterlambatan dan kelebihan pembayaran ongkos kirim.

Matrik mutasi tunda bayar tahun 2018 sebesar Rp41.018.384.349,00 sebagaimana tersaji pada **Lampiran F.2.6.1.**

Sedangkan tunda bayar per 31 Desember 2019 berupa Bantuan Pemerintah dalam bentuk transfer uang dan belanja operasional sebesar Rp286.964.650.840,00 terdiri dari :

1. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi dengan kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (1761) dengan 2 kontrak sebesar Rp25.872.000,00 pada Akun beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311).
2. Direktorat Serealialia dengan kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealialia dengan 208 kontrak sebesar Rp216.102.697.000,00 pada Akun beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311) dan beban barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah (526312).
3. Direktorat Benih dengan kegiatan Pengelolaan Sistem penyediaan benih Tanaman Pangan dengan 20 kontrak sebesar Rp47.237.121.090,00 pada akun beban barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311).
4. Direktorat Perlindungan dengan kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan DPT dan DPI dengan 1 kontrak sebesar Rp92.717.000,00 pada akun Beban Jasa Konsultan (522131).
5. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan kegiatan Dukung Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan dengan 1 Kontrak sebesar Rp198.500.000,00 pada akun beban perjalanan dinas paket meeting luar kota (524119).

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) dengan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dengan 9 Kontrak sebesar Rp23.307.743.750,00 berupa Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112).

Tunda bayar sebesar Rp286.964.650.840,00 tersebut sebagian sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, BPKP maupun sudah dilengkapi dengan surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran. Perkembangan Tunda bayar TA 2019 sebagaimana tersaji pada **Lampiran F.2.6.2.**

B. Ditjen Perkebunan

Pada tahun 2018, Ditjen Perkebunan mempunyai tunda bayar sebesar Rp.545.422.296,00 dan telah dilaksanakan pembayarannya pada TA 2019. Rinciannya sebagai berikut :

1. Dinas Perkebunan Propinsi Jambi kode satker 109120 telah melakukan pembayaran tunda bayar pekerjaan tahun 2018 dengan diterbitkannya SP2D nomor 190121301003748 tanggal 25-03-2019 sebesar Rp92.045.004,00
2. Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan kode satker 199127 telah melakukan pembayaran tunda bayar kegiatan pengembangan tanaman jambu mete di kabupaten Jeneponto dikarenakan terjadi keterlambatan pengajuan SPM pada akhir tahun anggaran 2018 dengan SP2D nomor 190541302023221 tanggal 15-11-2019 sebesar Rp47.808.000,00
3. Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya kode satker 567338 telah melakukan pembayaran tunda bayar pekerjaan tahun 2018 berupa gedung bangunan pagar nursery di kabupaten Tuban, tendon air dan rumah pompa nursery di kabupaten Garut sebesar Rp405.569.292,00 dengan rincian nomor SP2D 190981301002313 tanggal 14-03-2019 dan SP2D 190981301006172 tanggal 28-05-2019.

C. Ditjen PSP

Di bulan Desember 2018, Ditjen PSP mengajukan tagihan pencairan kegiatan pengadaan alat dan mesin pertanian sebesar Rp 159.110.189.567 kepada KPPN Jakarta V telah ditolak dengan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-9914/PB/2018 tertanggal 31 Desember 2018 perihal Dispensasi Keterlambatan Pengajuan SPM sebagaimana terlampir. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan bantuan alat dan mesin pertanian pada TA. 2018, terdapat sejumlah tagihan pengadaan bantuan alsintan dari pihak ketiga yang belum dibayarkan oleh Satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Rincian tagihan pengadaan bantuan alsintan TA. 2018 yang belum dibayarkan sebagai berikut :

**Tabel F.2.6.1 Rincian Tagihan Pengadaan Bantuan Alsintan TA. 2018
Yang Belum Dibayarkan**

NO	NAMA PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	URAIAN	NILAI KONTRAK	NO SPP	TANGGAL SPP	NILAI SPP
1	PT. Probesco Disatama	23.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/03/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 LS47 (45HP)	16.527.520.813	487	23-Nov-18	5.193.970.813

NO	NAMA PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	URAIAN	NILAI KONTRAK	NO SPP	TANGGAL SPP	NILAI SPP
2	PT. Teknik Agro Lestari Jaya	18.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/09/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 2 (Yanmar Rotary)	2.846.210.000	512	5 Desember 2018	1.138.484.000
3	PT. Rutan	8.8/PPK.PSP.06/KONT RAK/02/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 Iseki NT548F	98.688.606.000	518	6 Desember 2018	39.066.693.600
4	PT. Tekno Agri Jaya	8.5/PPK.PSP.06/KONT RAK/02/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4 Yanmar EF494T	97.382.130.000	556	13 Desember 2018	40.468.472.000
5	PT. United Tractors Tbk.	3.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/04/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Komatsu	16.127.588.773	577	18 Desember 2018	16.127.588.773
6	PT. Trakindo Utama	22.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/03/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Mini	7.244.679.546	592	19 Desember 2018	2.054.042.554
7	PT. Rutan	2.11/PPK.PSP.06/KONT RAK/07/2018	Pembayaran Tahap II (50%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"	17.857.844.000	587	19 Desember 2018	7.065.995.100
8	PT. Bina Pertiwi	13.23/PPK.PSP.06/KONT RAK/12/2018	Pembayaran Pelunasan (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4	5.877.900.000	607	20 Desember 2018	5.877.900.000
9	PT. Rutan	2.11/PPK.PSP.06/KONT RAK/07/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"	17.857.844.000	591	20 Desember 2018	7.065.995.100
10	PT. Rutan	14.8/PPK.PSP.06/KONT RAK/12/2018	Pembayaran Pelunasan (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Pompa Air Niagara GTO 4"	2.813.850.000	610	20 Desember 2018	2.813.850.000
11	PT. Rutan	14.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/12/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Traktor Roda 4	24.054.300.000	612	20 Desember 2018	24.054.300.000
12	PT. United Equipment Indonesia	10.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/12/2018	Pembayaran Tahap III (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Excavator Hyundai	6.960.981.693	604	20 Desember 2018	3.004.053.547

NO	NAMA PENYEDIA	NOMOR KONTRAK	URAIAN	NILAI KONTRAK	NO SPP	TANGGAL SPP	NILAI SPP
13	PT. Tanikaya Multi Sarana	19.2/PPK.PSP.06/KONT RAK/09/2018	Pembayaran Tahap II (100%) Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian Alat Tanam Jagung	10.397.374.000	639	21 Desember 2018	5.178.844.080
			NILAI TOTAL KONTRAK	324.636.828.825		NILAI TOTAL SPP	159.110.189.567

Untuk menyelesaikan tagihan tunda bayar alsintan tahun 2018 tersebut, Direktur Alat dan Mesin Pertanian telah melayangkan nota dinas kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PSP hal usulan revisi anggaran untuk pembayaran tagihan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 sejumlah Rp. 159.110.189.567,00 dengan dipenuhi dari pengurangan unit cost kegiatan bantuan alsintan TA 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penyelesaian tunda bayar untuk tagihan Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Tunda Bayar Pengadaan Alsintan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pengadaan alsintan yang diajukan reviu tunda bayar berupa traktor roda dua TA. 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Teknik Agro Lestari Jaya sesuai SPK Nomor 18.2/PPK.PSP.06/KONTRAK/09/2018 tanggal 18 September 2018 dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 195 hari kalender atau berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, terdiri dari pengadaan alsintan di 4 (empat) propinsi (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan) sebanyak 74 unit sebesar Rp2.516.000.000,00 dan ongkos kirim sebesar Rp330.210.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Nilai kontrak	: Rp 2.846.210.000
Nilai yang sudah dibayar	: <u>Rp 1.707.726.000 (-)</u>
Nilai tagihan	: Rp 1.138.484.000
Total koreksi	: <u>Rp 330.210.000 –</u>
Nilai yang direkomendasikan bayar	: Rp 808.274.000

Total koreksi senilai Rp330.210.000 merupakan ongkos kirim yang belum dapat dinilai kewajarannya karena pihak penyedia belum menyerahkan dokumen pendukung berupa invoice ongkos kirim, sesuai ketentuan LKPP per 1 Juli 2018 kepada PPK.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Kronologis Reviu ongkos kirim oleh BPKP sebagai berikut :

- a) Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-12/RC.210/B/01/2019 tanggal 10 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan hal Permohonan Review Tunda Bayar Pengadaan Alsintan;

- b) Surat BPKP Nomor S-19/D102/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Direktur Alat dan Mesin Pertanian menjawab surat Dirjen PSP hal Permohonan Expose Permasalahan Tunda Bayar Pengadaan Alsintan TA.2018. Dalam hal ini, BPKP meminta Direktorat Alsintan melakukan expose/pemaparan atas permasalahan tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 dengan BPKP pada kesempatan pertama agar diperoleh informasi yang memadai sebagai dasar BPKP untuk melakukan review.
- c) Ditjen PSP telah melakukan expose/pemaparan atas permasalahan tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA. 2018 dengan BPKP sebagai dasar BPKP untuk melakukan review pada tanggal 11 Maret 2019 di RR LS PRO Dit Alsintan.
- d) Sesuai Laporan Hasil Reviu atas Tunggakan Pembayaran Pengadaan alat dan Mesin Pertanian TA.2018 pada satuan Kerja Pusat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor : LHR-110/D102/1/2019 tanggal 26 Agustus 2019, hasil reviu adalah sebagai berikut :
- Nilai tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA.2018 yang diusulkan untuk direviu sesuai dengan surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : B-12/RC.210/B/01/2019 tanggal 10 Januari sebanyak 11 kontrak dengan nilai setelah addendum terakhir sebesar Rp304.246.244.345,00 untuk pengadaan 4.928 unit alsintan dan telah dilakukan pembayaran pada TA.2018 sebesar Rp146.274.538.778,00 sehingga terdapat sisa tunggakan sebesar Rp157.971.805.567,00
 - Anggaran untuk pembayaran pengadaan alsintan TA.2018 yang belum dapat dibayarkan ini telah tersedia dalam DIPA TA.2018 (revisi terakhir) dan masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp266.125.132.446,00. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mengajukan revisi anggaran termasuk didalamnya untuk tunggakan pembayaran pengadaan alsintan TA.2018 sesuai DIPA nomor : DIPA-108.08.1.633656/2019 sebesar Rp159.110.190.000,00
 - Dari hasil reviu dapat disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan pengadaan alat dan mesin pertanian TA 2018 untuk 11 kontrak yang mengalami tunggakan pembayaran yang telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, lengkap, relevan, dan memadai sebesar Rp294.230.428.958,00 dengan pembayaran pada TA 2018 sebesar Rp146.274.538.778,00 sehingga masih terdapat sisa tunggakan yang harus dibayarkan pada TA 2019 sebesar Rp147.955.890.180,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Usulan (Rp)	Koreksi (Rp)	Hasil Reviu (Rp)
Nilai pekerjaan sesuai addendum terakhir didukung bukti sah, lengkap, relevan, dan memadai	304.246.244.345	(10.015.815.387)	294.230.428.958
Nilai pembayaran dalam TA 2018	(146.274.538.778)	0	(146.274.538.778)
Sisa tunggakan	157.971.705.567	(10.015.815.387)	147.955.890.180

Koreksi nilai tunggakan pembayaran sebesar Rp10.015.815.387,00 terjadi pada 6 kontrak dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Koreksi	Nilai Koreksi (Rp)
1.	Kesalahan aritmatika pada 1 (satu) kontrak	2.026.000
2.	Selisih ongkos kirim dalam kontrak dengan realisasi ongkos kirim sesuai invoice (at cost) pada 4 (empat) kontrak	5.298.659.387
3.	Ongkos kirim belum dapat diyakini kewajarannya (at cost) pada 1 (satu) kontrak.	4.715.130.000
Jumlah		10.015.815.387

Atas tunggakan sebesar Rp2.026.000,00 dan Rp5.298.659.387,00 tidak dapat diproses pembayarannya, sedangkan atas tunggakan sebesar Rp4.715.130.000,00 belum dapat dinilai kewajarannya (*at cost*-nya) karena invoice/bukti pengeluaran ongkos kirim tidak diserahkan sampai dengan berakhirnya revidi sehingga atas tagihan tersebut belum dapat diproses pembayarannya.

Pembayaran tunda bayar alsintan selama tahun 2019 adalah sebesar Rp148.764.163.300,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Tahun 2018	159.110.189.567
Koreksi Itjen Tahun 2019	330.210.000
Koreksi BPKP Tahun 2019	10.015.815.387
Nilai terhutang	148.764.164.180
Nilai dibayar	148.764.163.300
Pembulatan	880

- e) Tunggakan Ongkos Kirim Alsintan PT. Tekno Agri Jaya Tahun pada Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Hasil Revidi BPKP atas tunggakan pembayaran pengadaan alat dan mesin pertanian TA. 2018 sesuai LHR Nomor LHR-110/D102/1/2019 tanggal 26 Agustus 2019 sebesar Rp4.715.130.000,00 yang merupakan pekerjaan pengiriman alsintan TA. 2018 oleh PT. Tekno Agri Jaya masih mengalami tunggakan pembayaran dari Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,

Dari tunggakan sebesar Rp4.715.130.000,00 diajukan untuk dilakukan review oleh BPKP sebesar Rp2.608.708.017,00 sisanya sebesar Rp2.106.421.983,00 belum dimintakan review.

Dalam hal ini, PT Tekno Agri Jaya menyampaikan dokumen pengiriman berupa invoice atas pekerjaan pengiriman alsintan TA. 2018 yang atas pekerjaan pengiriman alsintan TA. 2018 yang masih mengalami tunggakan pembayaran pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp2.608.708.017,00 untuk 230 unit.

Hasil revidi dapat disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan pengiriman alat dan mesin pertanian TA. 2018 yang telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, lengkap, relevan dan memadai serta yang masih harus dibayarkan pada TA. 2020 sebanyak 127 unit alsintan sebesar Rp1.115.072.206,00. Koreksi nilai tunggakan pembayaran terjadi pada 103 unit alsintan sebesar Rp1.493.635.811,00 dikarenakan pekerjaan tidak didukung bukti pengiriman yang memadai.

Berdasarkan hasil rapat pada hari Jumat, 14 Pebruari 2020 di Ruang Rapat LS Pro yang dihadiri oleh Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Dit Alsintan, Tim Itjen IR 2 dan Tim BPKP bahwa sisa tunggakan sebesar Rp3.600.057.794,00 (Rp1.493.635.811,00 + Rp2.106.421.983,00) masih dapat diusulkan untuk dilakukan review kembali oleh BPKP. Dalam hal ini, Direktur Alat dan Mesin Pertanian akan bersurat ke PT. Tekno Agri Jaya untuk melengkapi kekurangan dokumen sebesar Rp3.600.057.794,00.

F.2.7. ONGKOS KIRIM DARI ALAT DAN MESIN PERTANIAN CADANGAN

Pengadaan alat dan mesin pertanian di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu alsintan regular (alsintan yang sudah diketahui alokasi/peruntukannya) dan alsintan persediaan (alsintan yang dialokasikan untuk persediaan/belum diketahui alokasi/peruntukannya). Nilai alsintan regular dalam kontrak ditetapkan sebagai harga satuan alsintan ditambah biaya kirim sampai ke lokasi titik bagi, sedangkan nilai alsintan persediaan ditetapkan sebesar harga satuan alsintan tanpa biaya kirim.

Kronologis Adanya Tagihan Ongkos Kirim Bantuan Alsintan

1. Penyaluran bantuan alsintan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian Ditjen PSP, dilaksanakan melalui :
 - a. Berdasarkan usulan daerah melalui E-Proposal
 - b. Usulan kelompok masyarakat melalui aspirasi Komisi IV DPR RI
 - c. Usulan/permintaan Dinas Pertanian untuk penanganan kegiatan yang bersifat mendesak (kekeringan, banjir, tanam serempak, dll)
 - d. Tindak lanjut kunjungan kerja Pimpinan (Presiden, Menteri, Pejabat Eselon I dan Pimpinan lainnya untuk menunjang peningkatan produksi pertanian).
2. Untuk mengakomodir penyaluran bantuan poin 1.b s/d 1.d tersebut di atas membutuhkan penanganan segera, sehingga diperlukan alsintan dalam bentuk persediaan yang sewaktu-waktu siap untuk disalurkan kepada penerima bantuan.
3. Dengan adanya alsintan persediaan, maka dibutuhkan anggaran pengiriman (ongkir) dari gudang penyedia ke titik bagi (Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota), dimana biaya pengiriman (ongkir) tersebut terpisah dari nilai kontrak pengadaan alsintan.
4. Untuk mengakomodir permintaan yang bersifat mendesak (poin 1.b s/d 1.d), penyaluran alsintan persediaan dari gudang penyedia alsintan dilaksanakan berdasarkan surat perintah pengiriman Direktur Alat dan Mesin Pertanian kepada pihak penyedia. Sedangkan pemberitahuan pengiriman alsintan persediaan disampaikan kepada Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota penerima bantuan dengan surat Direktur Alat dan Mesin Pertanian.
5. Pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan tahun 2016 disampaikan hal sebagai berikut :
 - a. Pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dilaksanakan setelah adanya bukti penyerahan alsintan persediaan sampai ke titik bagi (Dinas Pertanian Prov/Kab/Kota) yang dibuktikan dengan adanya dokumen BAP-STHP.
 - b. Penyampaian BAP-STHP dari pihak penyedia kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terlambat, sehingga menyebabkan proses penagihan oleh penyedia menjadi tertunda.

- c. Pada TA. 2016 biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan yang belum ditagihkan oleh pihak penyedia sebesar Rp38.502.372.182,00 yang terdiri dari 272 SPK (Kontrak ongkir) dari 14 penyedia dengan jumlah alsintan persediaan sebanyak 43.555 unit.
 - d. Adanya kebijakan penghematan anggaran tahun 2016 menyebabkan terjadinya self blocking anggaran kegiatan Direktorat Jenderal PSP sehingga Direktorat Alat dan Mesin Pertanian terkena penghematan sebesar Rp1.435.143.787.000,00 terdiri dari kegiatan pengadaan bantuan alsintan dan biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan.
 - e. Untuk self blocking (tunda bayar) kegiatan pengadaan bantuan alsintan telah diusulkan menjadi luncuran pembayaran pada TA. 2017, namun demikian untuk biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan karena dokumen pendukung (BAP-STHP) dari pihak penyedia belum semua disampaikan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sehingga tagihan ongkir 2016 tidak dapat didaftarkan menjadi luncuran pembayaran TA. 2017.
6. Upaya yang telah dilakukan terkait dengan pembayaran biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan TA. 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00 yakni :
 - a. Pada TA. 2017 Direktorat Alat dan Mesin Pertanian telah melakukan inventarisasi dan verifikasi tagihan biaya pengiriman (ongkir) alsintan persediaan TA. 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00.
 - b. Ditjen PSP mengajukan usulan revidi kepada BPKP melalui surat nomor : B-446/RC.110/B/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan Revidi Kontrak Ongkos Kirim TA. 2016 sebesar Rp38.502.372.182,00.
 - c. Balasan Surat BPKP kepada Dirjen PSP nomor : S-962/D/2/2017 tanggal 13 November 2017 perihal revidi Kontrak Ongkos Kirim TA. 2016, BPKP menyatakan bahwa mengingat terbatasnya waktu yang tersedia maka BPKP meminta penanggungjawab kegiatan dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi atas kebenaran data dukung sebelum revidi dilakukan oleh BPKP.
 - d. Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bahwa TA. 2016 nilai ongkos kirim yang dinyatakan layak bayar sebanyak 264 SPK (52.220 unit) sebesar Rp37.237.163.163,00. Berdasarkan surat Dirjen PSP kepada Inspektur Jenderal nomor : B-49/RC.210/B/01/2018 tanggal 19 Januari 2018, Tim Revidi Inspektorat Jenderal juga melakukan verifikasi terhadap tagihan ongkir TA. 2017 dan dinyatakan layak bayar sebanyak 105 SPK (27.379 unit) sebesar Rp4.237.525.709,00.
 - e. Ongkos kirim yang telah diverifikasi sebesar Rp41.474.688.872,00 terdiri dari TA. 2016 sebesar Rp37.237.163.163,00 dan TA. 2017 sebesar Rp4.237.525.709,00. Ongkos kirim yang belum diverifikasi sebesar Rp11.561.892.750,00 terdiri dari TA. 2016 sebesar Rp2.015.343.921,00 sebanyak 12 SPK (261 unit) dan TA. 2017 sebesar Rp9.546.548.829,00 sebanyak 58 SPK (16.797 unit).
 - f. Hasil verifikasi oleh Tim Inspektorat Jenderal akan segera disampaikan kepada BPKP guna dilakukan revidi terkait keabsahan tagihan ongkos kirim tersebut di atas.
 7. Dirjen PSP telah berkirim surat kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP dengan surat Nomor R.333/PW.170/B/06/2018 tanggal 21 Juni 2018 untuk permintaan revidi Ongkir TA 2016 dan 2017 yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil perhitungan revidi Itjen atas Ongkir tahun 2016 dan 2017 tersebut.
 8. Sesuai permintaan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian dalam surat nomor R-335/PW.170/B/06/2018 tanggal 21 Juni 2018, telah

dilakukan telaah atas Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R-206/PE.170/G.3/3/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan hasil sebagaimana dalam surat Direktur Pengawasan Produksi dan Sumber Daya Alam BPKP Nomor S-215/D102/2/2018 tanggal 3 September 2018 yang hasil telaahnya menyatakan masih terdapat beberapa kekurangan pengungkapan yang perlu dilengkapi untuk meyakini bahwa bukti-bukti telah mendukung jumlah ongkos kirim yang harus dibayar.

9. ITJEN menyampaikan hasil review ke BPKP. Hasil reviu BPKP Nomor LAP-225/D102/2/2018 tanggal 28 Oktober 2018 sebanyak 361 SPK sebesar Rp41.163.775.264, yang layak bayar sebanyak 352 SPK sebesar Rp38.968.296.016 dengan rincian sebagai berikut:

	Sisa Tunggakan	Layak Bayar
TA 2016	Rp 35.502.440.698,00	Rp 34.799.691.650,00
TA 2017	Rp 5.661.334.566,00	Rp 4.168.604.366,00
Jumlah	Rp 41.163.775.264,00	Rp 38.968.296.016,00

Nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp38.968.296.016,00 ini terdiri dari:

- Nilai tunggakan layak bayar yang telah diuji BPKP	Rp 10.638.627.423
- Nilai tunggakan layak bayar hasil reviu Itjen	Rp 28.329.668.593
Kementerian Pertanian yang tidak diuji BPKP	
Jumlah	Rp 38.968.296.016

Atas nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp10.638.627.423,00 berasal dari sisa tunggakan atas 92 SPK sebesar Rp11.058.627.423,00 yang ditelaah BPKP dengan koreksi sebanyak 3 SPK sebesar Rp420.000.000,00 yang tidak layak bayar. Atas nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp28.329.668.593,00 akan ditelaah pada tahapan berikutnya (bukti review BPKP terlampir).

10. Dari total nilai tunggakan layak bayar sebesar Rp38.968.296.016,00 selama tahun 2018 telah dibayar sejumlah Rp10.638.627.423,00 dengan rincian sebagai berikut: ongkir tahun 2016 sebesar Rp9.421.583.193,00 dan ongkir tahun 2017 sebesar Rp1.217.044.280,00. Sehingga saldo akhir audited tahun 2018 adalah sebesar Rp28.329.668.593,00.

11. Sesuai Surat Tugas BPKP Nomor ST-11/D102/2019 tanggal 11 Januari 2019, Tim BPKP akan melakukan Reviu pada tahun 2019 terhadap tunggakan ongkos kirim tahun 2016 dan tahun 2017 yang belum dibayar di tahun 2018 sebesar Rp28.329.668.593,00. Hasil Reviu BPKP Nomor LHR-98/D102/1/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas Tunggakan Ongkos Kirim Alsintan TA 2016 dan TA 2017 disimpulkan bahwa realisasi pekerjaan pengiriman alat dan mesin pertanian SPK/Kontrak TA 2016 dan TA 2017 yang telah didukung dengan bukti-bukti yang sah, lengkap dan memadai serta masih harus dibayarkan pada TA 2019 sebanyak 242 SPK/Kontrak sebesar **Rp26.870.390.498,00** untuk pengiriman 89.289 unit alsintan, dengan rincian sebagai berikut:

N o	TA.	SPK/Kontrak			Pembayaran TA. Sebelumnya (Rp.0,00)	Nilai Tunggakan (Rp0,00)
		Jumlah	Unit	Nilai (Rp.0,00)		
1	TA.2016	177	48.448	23.047.875.485	-	23.047.875.485

No	TA.	SPK/Kontrak			Pembayaran TA. Sebelumnya (Rp.0,00)	Nilai Tunggakan (Rp0,00)
		Jumlah	Unit	Nilai (Rp.0,00)		
2	TA.2017	65	40.841	3.822.515.031	-	3.822.515.031
JUMLAH		242	89.289	26.870.390.516	-	26.870.390.516

Terdapat keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada 21 SPK/Kontrak sebesar Rp 2.659.132.781 dengan nilai pekerjaan yang terlambat sebesar Rp940.166.960,00 untuk pengiriman 293 unit alsintan. Atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ini harus dikenakan sanksi keterlambatan sesuai pasal SPK/Kontrak berupa denda yang langsung dipotongkan dari nilai pembayaran atas SPK/Kontrak tersebut sebesar Rp382.724.601,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	TA.	Sanksi Keterlambatan		
		Tidak Dibayar (Rp0,00)	Denda 1/1000 (Rp0,00)	Total (Rp0,00)
1	TA.2016	363.291.885	18.232.160	381.524.045
2	TA.2017	-	1.200.556	1.200.556
JUMLAH		363.291.885	19.432.716	382.724.601

Atas saran BPKP, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dapat memproses hasil revidi atas tunggakan ongkos kirim alsintan TA. 2106 dan TA. 2017 yang belum di bayar pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp26.870.390.498,00 dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp382.724.601,00 sesuai ketentuan yang berlaku.

Uraian di atas dapat dirinci pada tabel berikut :

No	Keterangan	Nilai Layak Bayar
1	Ditjen PSP mengajukan usulan revidi kepada BPKP melalui surat nomor : B-446/RC.110/B/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan Revidi Kontrak Ongkos Kirim TA. 2016	38.502.372.182
2	Hasil Verifikasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sesuai surat Dirjen PSP kepada Inspektur Jenderal nomor : B-49/RC.210/B/01/2018 tanggal 19 Januari 2018 - TA. 2016 (264 SPK, 52.220 unit) 37.237.163.163 - TA. 2017 (105 SPK, 27.379 unit) 4.237.525.709 Ongkos kirim yang belum diverifikasi senilai Rp. 11.561.892.750,- terdiri dari TA. 2016 senilai Rp. 2.015.343.921,- sebanyak 12 SPK (261 unit) dan TA. 2017 senilai Rp. 9.546.548.829,- sebanyak 58 SPK (16.797 unit).	41.474.688.872
3	Hasil revidi BPKP Nomor LAP-225/D102/2/2018 tanggal 28 Oktober 2018, dari 361 SPK senilai Rp 41.163.775.264, yang layak bayar sebanyak 352 SPK	38.968.296.016
4	Pembayaran di tahun 2018	10.638.627.423
5	Saldo Audited LK 2018	28.329.668.593
6	Hasil Revidi BPKP Nomor LHR-98/D102/1/2019 tanggal 18 Juli 2019 sebanyak 242 SPK/Kontrak 89.289 unit	26.870.390.498

Dari jumlah Rp26.870.390.498,00 tersebut, sebesar Rp26.498.072.508,00 telah dibayar di tahun 2019. Sedangkan sisanya sebesar Rp372.317.990,00 masih menjadi utang di tahun berjalan.

Selain itu terdapat tunggakan ongkos kirim berupa pengiriman 15 unit alat dan mesin pertanian TR-4 tahun 2019 kepada PT Jose Feliks Olivia Logistik sebesar Rp174.000.000,00.

F.2.8. Progres Penyelesaian Alih Status TNI

Pada tabel dibawah ini, disajikan progres alih status TNI sebagai berikut.

**Tabel F.2.8 Progress Alih Status TNI
Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian
TA 2015 – 2020**

Tahun	Nilai	Unit	Progress	Nomor	Tanggal	Ket
2015	21.577.335.000	286	SK Penghapusan Alih Status ke TNI	270/Kpts/PL.320/4/2017	25 April 2017	
2015	12.274.360.000	24	Pesetujuan Alih Status TNI	S-11/MK.6/WKN.07/2018	13 Februari 2018	Alsin Rp.12.274.360.000
2015	170.000.000	1				Peralatan Kantor Rp.170.000.000
2015	31.515.076.400	1.140	Usulan Persetujuan Alih Status Penggunaan BMN	B-84/PL.310/B/02/ 2018	28 Februari 2018	Alsin Rp.31.515.076.400
2015	501.805.900	63				Peralatan Kantor Rp.501.805.900
2016	535.300.982.861	104.260	Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	B-129/PL.130/B/3/2018	13 Maret 2018	Rp.629.671.257.184
2017	94.370.274.323	12.330				
			Ditjen PSP telah Berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat untuk Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian	Surat Nomor : B-370/SR.440/B/07/2018	Tgl 16 Juli 2018	
Total	695.709.834.484	118.104				

Per tgl 10 Desember 2018

			Penetapan Status Penggunaan BMN	B 387/Kpts/PL.310/6/2017	13 Juni 2018	Sebesar Rp. 5.881.605.375 sebanyak 1191 unit
			Penetapan Status Pengguna BMN	B416/Kpts/P L.310/5/2018	31 Mei 2018	Sebesar Rp. 284.721.888.338
			Surat dari MABESAD terkait dengan SK Penghapusan Alih Status TNI sebesar Rp.21.571.335.000	B/3518/X/2018	09 Oktober 2018	Perihal Penatausahaan BMN Alsin yang diterima dari Kementerian Pertanian
			Surat Ke KASAD terkait dengan Penyelesaian Alih Status Alat Mesin Pertanian Rp. 695.038.028.584	B-370/SR.440/B/07/2018	16 Juli 2018	

			Surat Ke KASAD terkait Permintaan bantuan untuk cek fisik alat dan mesin pertanian	B-576/SR.420/B/11/2018	06 Nopember 2018	
			Surat Perintah KASAD terkait dengan cek Fisik Alsintan	Nomor Sprint/4097/XI/2018	9 Nopember 2018	
			Surat Penyelesaian Alih Status Alat dan Mesin Pertanian	B-499/PL.310/B.1/07/2019	23 Juli 2019	
Per tanggal 30 Juni 2019						
			Penetapan Status Penggunaan BMN	Kepmenkeu No.361/KM.6/2018	30 Juni 2019	Rp.344.949.368.846,-
Per 30 September 2019						
		82.413	Surat Permohonan penertiban surat pernyataan bersedia menerima alih status penggunaan dan Berita Acara Serah Terima BMN	Nomor : B-839/PL.130/B.1/09/2019	23 September 2019	Rp.301.152.419.736
			Surat Pembahasan Pendanaan Inventarisasi BMN	Nomor : B-860/KU.020/B.1/10/2019	03 Oktober 2019	
			Surat Inventarisasi alat dan mesin pertanian	Nomor : B-879/PL.220/B.1/10/2019	07 Oktober 2019	
		35.341	Proses Inventarisasi Tahan III			Rp.372.307.773.848
Per 31 Desember 2019						
Surat dari Sesditjen PSP ke Asisten Logistik Mabesad TNI		82.525	Permohonan Penerbitan surat pernyataan bersedia Menerima Alih Statuts Penggunaan dan BAST	B.1030/PL.130/B.1/12/2019	09 Desember 2019	Rp.307.151.843.736
Surat dari Kepala Staff AD (Asisten Logistik) ke Menteri Pertahanan RI		82.525	Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)	Nomer B/4649/XII/2019	19 Desember 2019	Rp.307.151.843.736
Surat dari Sesditjen PSP ke Asisten Logistik Mabesad TNI		34.125	Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)	Nomer B-1062/PL.310/B.1/12/2019	30 Desember 2019	Rp.370.117.263.581
Surat dari Kepala Staff AD (Asisten Logistik) ke Menteri Pertahanan RI		34.125	Permohonan izin penerimaan alih status Penggunaan BMN (Alsintan)	Nomer B/318/I/2020	27 Januari 2020	Rp.370.117.263.581

F.2.9 PROGRES SERTIFIKASI TANAH

Perkembangan proses sertifikasi tanah lingkup Kementan per 31 Desember 2019 berdasarkan aplikasi SIMAN sebagai berikut:

Tabel F.2.9 Rekapitulasi Dokumen Kepemilikan Tanah

Eselon I	Bersertipikat		Belum Bersertipikat		Total Tanah	
	Luas	Nilai	Luas	Nilai	Luas	Nilai
Sekretariat Jenderal	212.033	5.745.313.776.000	49.201	596.386.516.000	261.234	6.341.700.292.000
Ditjen Tanaman Pangan	6.394.338	1.509.220.637.200	126.480	57.819.801.736	6.520.818	1.567.040.438.936

Eselon I	Bersertipikat		Belum Bersertipikat		Total Tanah	
	Luas	Nilai	Luas	Nilai	Luas	Nilai
Ditjen Hortikultura	9.213	86.731.182.000	15.912	220.944.679.000	25.125	307.675.861.000
Ditjen Perkebunan	6.765.717	1.731.714.251.639	1.358.600	125.551.534.000	8.124.317	1.857.265.785.639
Ditjen Nakeswan	28.085.134	6.912.843.420.000	44.354.036	7.324.710.291.000	72.439.170	14.237.553.711.000
Balibang Pertanian	130.689.671	46.433.351.956.843	3.254.081	1.867.272.530.081	133.943.752	48.300.624.486.924
BPPSDM Pertanian	6.690.990	5.016.943.963.463	1.534.737	2.571.767.261.737	8.225.727	7.588.711.225.200
Barantan	1.393.709	1.662.843.926.825	33.045	21.702.701.895	1.426.754	1.684.546.628.720
Total	180.240.805	69.098.963.113.970	50.726.092	12.786.155.315.449	230.966.897	81.885.118.429.419

Rincian atas luas tanah yang bersertifikat maupun belum bersertifikat pada **Lampiran F.2.9**.

F.2.10 MONITORING DAFTAR PENGHAPUSAN DAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BMN KEMANTAN

Selama periode Tahun 2019 telah diterbitkan Keputusan Penghapusan BMN, dapat disajikan rekapitulasi daftar penghapusan per Eselon I dan per Satker sebagaimana pada **Lampiran F.2.10.1**, dan rekapitulasi Persetujuan Pemindahtanganan BMN per Eselon I dan per Satker disajikan pada **Lampiran F.2.10.2**.

F.2.11 MONITORING DAFTAR PEMANFAATAN BMN KEMANTAN

Selama periode Tahun 2019 telah dilakukan usul pemanfaatan BMN, dapat disajikan rekapitulasi daftar usul pemanfaatan per Eselon I sebagaimana pada **Lampiran F.2.11**.

F.2.12 MONITORING DAFTAR PERKARA GUGATAN BMN KEMANTAN

Selama periode Tahun 2019 telah dilakukan penyelesaian BMN yang bermasalah, dapat disajikan rekapitulasi daftar perkara gugatan BMN per Eselon I sebagaimana pada **Lampiran F.2.12**.

F.2.13. MONITORING TUNGGAKAN DPM-LUEP BERDASARKAN HASIL REKON KPKNL PADA BADAN KETAHANAN PANGAN

Dari hasil monitoring dan evaluasi perkembangan data tunggakan DPM-LUEP hasil rekon KPKNL sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp11.548.195.454,00 yang berada di 17 propinsi. Rekapitulasi sisa tunggakan DPM-LUEP DPM-LUEP disajikan pada **Lampiran F.2.13.1**.

Untuk pencatatan terkait DPM-LUEP sudah dilakukan monitoring melalui bukti setoran PNBP. Setoran PNBP sampai dengan 31 Desember 2019 dari pengembalian DPM-LUEP disajikan pada **Lampiran F.2.13.2**.

Tabel F.2.13 Daftar Nomor Rekening DPM-LUEP TA 2019

No	Propinsi	Ada Rekening LUEP/Tidak	No Rekening	Nama Bank	Nama Rekening
1	Jawa Barat	Ada	0014291237003	Bank BJB	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Propinsi Jawa Barat
2	Jawa Tengah	Ada	1022009751	Bank Jateng	Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah
3	Jawa Timur	Ada	0011200737	BPD Jatim	Badan Ketahanan Pangan Jatim
4	NAD	Ada	105201000273308	BRI	Dinas Pangan Aceh
5	Sumatera Utara	Tidak Ada	-	-	-
6	Sumatera Barat	Tidak Ada	-	-	-
7	Riau	Ada	017001001210302	Bank BRI	Fetri Yanti
8	Jambi	Tidak Ada	-	-	-
9	Sumatera Selatan	Ada	005901000949308	Bank BRI	Proyek Pengembangan Kelembagaan
10	Lampung	Tidak Ada	-	-	-
11	Kalimantan Barat	Ada	1001011888	Bank Kalbar	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat
12	Kalimantan Selatan	Tidak Ada	-	-	-
13	Sulawesi Utara	Tidak Ada	-	-	-
14	Sulawesi Tengah	Tidak Ada	-	-	-
15	Sulawesi Selatan	Ada	1300020000327369	Bank Sulselbar	Dinas Ketahanan Pangan, TPH Prov. Sulsel
16	NTB	Tidak Ada	-	-	-
17	NTT	Tidak Ada	-	-	-
18	Banten	Ada	008401001591301	Bank BRI	BPG 020 Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Banten (299444)
19	Gorontalo	Ada	002701000757306	Bank BRI	Badan Ketahanan Pangan Propinsi Gorontalo
20	Sulawesi Barat	Tidak Ada	-	-	-

F.2.14. LAPORAN KEUANGAN BLU

Laporan keuangan Kementerian Pertanian pada TA 2019 sudah selesai dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan hasil sebagai berikut:

1. Pusvetma sudah diaudit oleh KAP Made Sudarma dan Thomas dan Dewi (M&T&D) dengan Nomor lisensi KEP-607/KM.1/2014 dan KEP-212/KM.1/2015, sesuai dengan laporan KAP 00002/3.0307/AU.1/11/0009-1/1/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 dengan hasil opini wajar. Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai ketentuan pada PMK No. 42 tahun 2017 tentang Perubahan PMK No.220 tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan PMK No.217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual No.13 (PSAP 13) tentang penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. BBIB Singosari sudah diaudit oleh KAP Thoufan dan Rosyid dengan Nomor Lisensi No.KEP-435/KM.5/2005, sesuai dengan laporan KAP 00009/2.0694/AU.1/11/0385-1/1/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dengan hasil opini wajar. Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dan kinerja keuangan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

F.2.15. MONITORING BANK GARANSI ATAS PEKERJAAN KEMANTAN YANG DILANJUTKAN MENGGUNAKAN ANGGARAN TAHUN 2020

Selama tahun 2019 terdapat penyelesaian pekerjaan yang menggunakan Bank Garansi per tanggal 31 Desember 2019 atau pekerjaan yang dilanjutkan menggunakan anggaran Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Ditjen Tanaman Pangan
Dalam proses pekerjaan bantuan pemerintah transfer barang dengan BAST/BAPP Per 31 Desember 2019 mekanisme bank garansi masih di claim di KPPN sebesar Rp47.886.503.750,00 dan sudah disetor ke kas Negara Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu PT. PUPUK KUJANG sebesar Rp35.619.031.250,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu PT POLOWIJO GOSARI sebesar Rp12.267.444.140,00. Berikut ini dapat dijelaskan mekanisme bank garansi pada **Lampiran F.2.15.1.**

Penyaluran Bantuan Pemerintah transfer uang ke kelompok tani menggunakan mekanisme Rekening Penampungan Lain (RPL). Untuk saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp184.632.933.802,00 pada satker :

- a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (238251) merupakan sisa dana Rp184.592.178.802,00 per 31 des 2019 di RPL
- b. Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB (239126) sebesar Rp14.280.000,00 yang bilingnya dibuat tahun 2019 tetapi disetor bulan Januari 2020 dengan NTPN 83A2E3C1E6ALA38N sebesar Rp14.280.000,00.
- c. Dinas Pertanian Propinsi Sulbar (340141) sebesar Rp18.475.000,00 setoran PNBPN 425912 yang bilingnya dibuat tahun 2019 tetapi disetor bulan Januari 2020 dengan NTPN 01D8055DDRFB0001 sebesar Rp2.700.000, NTPN 0CF5748VUOSUJIQM sebesar Rp11.400.000 dan NTPN F6COEON9UMJCV sebesar Rp4.375.000,00
- d. Dinas TPH dan Perkebunan Propinsi Papua Barat (339086) sebesar Rp8.000.000,00 merupakan pengembalian Belanja 526 tetapi lupa disetor sehingga baru disetor di

tahun 2020 dengan NTPN 7AC381JNEH5RFREN sebesar Rp1.000.000,00 dan NTPN 4E8661JNEH5RFQHI sebesar Rp7.000.000,00.

Rekapitulasi setoran jasa giro sebesar Rp401.649.795,00 sebagaimana terlampir pada **Lampiran F.2.15.2.**

2. Ditjen Hortikultura

Bank Garansi pada TA. 2019 sebesar Rp536.041.650, berikut rekapitulasinya :

Tabel F.2.15.1 Piutang (Bank Garansi) Pada Ditjen Hortikultura TA 2019

Kode Satker	Nama Satker	Nilai Piutang	Kualitas	Nilai Penyisihan	Ket
625875	Direktorat Jenderal Hortikultura	5.959.000	Lancar	29.795	Pengembalian pengadaan benih alpukat yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan di setor ke negara pada tahun 2020
179104	Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Utara	305.019.000	Lancar	1.525.095	Jaminan Uang Muka
179104	Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Sulawesi Utara	50.836.500	Lancar	254.183	Jaminan Pelaksanaan
189916	Dinas TPH Prov. Sulawesi Tengah	167.379.400	Lancar	836.897	Setoran Klaim Bank Garansi
189224	Dinas Pertanian Kab.Donggala	6.547.750	Lancar	32.739	Pengembalian belanja yang baru disetor tahun 2020 dari akun 526311
230576	Diperta Kab.Sumbawa (PIUTANG LAINNYA)	300.000	Lancar	1.500	Honor yang salah pencairan, sedangkan honor sudah sudah pernah dibayarkan, tahun 2020 akan dikembalikan

3. Ditjen Perkebunan

Pada Tahun Anggaran 2018 Piutang Bukan Pajak tercatat pada Satker 059180 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp185.471.000,00 dikarenakan terdapat pencairan jaminan pembayaran setelah tanggal 31 Desember 2018, yang berasal dari adanya wanprestasi pekerjaan Pengadaan Benih Kopi Arabika Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso sesuai kontrak Nomor: 027/6927/121.4/2018 Tanggal 18 Desember 2018.

Telah dilakukan pencairan jaminan pembayaran yang berasal dari adanya wanprestasi pekerjaan Pengadaan Benih Kopi Arabika Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Bondowoso sesuai kontrak Nomor: 027/6927/121.4/2018 Tanggal 18

Desember 2018, sebesar Rp185.471.000,00 pada tanggal 15 Januari 2019 dan penyetoran ke kas negara dengan NTPN: ECCC3664PR5REIPO

4. Ditjen PKH

- a. Bank Garansi atas pekerjaan pengadaan Sapi pada Satker Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Baturraden (238823) sebesar Rp11.211.100.000,00 sudah disetor ke kas Negara.
- b. Bank Garansi atas pekerjaan pengadaan ayam program BEKERJA pada Balai Besar Veteriner Maros, Sulsel (239015) sebesar Rp2.412.056.072,00 sudah disetor ke kas Negara.
- c. Bank Garansi atas pekerjaan pengadaan ayam program BEKERJA pada Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali (239022) sebesar Rp13.918.827.244,00,00 sudah disetor ke kas Negara.
- d. Bank Garansi atas pekerjaan pengadaan ayam program BEKERJA pada Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Bali sebesar Rp15.504.248.000,00 sudah disetor ke kas Negara.

5. Badan Litbang

Tabel F.2.15.2 Piutang (Bank Garansi) Pada Badan Litbang TA 2019

No.	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Piutang (Rp)	Jenis Sumber Piutang
1	411971	Badan Litbang Kantor Pusat Jakarta	92.772.880,00	Temuan BPK Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan peralatan sistem informasi sumber daya lahan dan tanaman pertanian paket 2 TA 2012
2	634022	BPTP Sulut	24.667.542,00	Temuan Itjen: Denda keterlambatan CV Mulia Jaya Perkasa.
3	634040	BPTP NTB	73.251.288,00	Denda keterlambatan (CV. Mustika Terataimas)
4	567495	BPTP Sumsel	34.334.515,00	Denda Keterlambatan konsultan perencanaan (CV. Aji Sai)
5	500941	BPATP	153.308.950,00	Temuan BPK: royalti dan denda keterlambatannya PT Sang Hyang Seri dan PT Bio Industri
6	567449	BPTP Sumbar	21.833.235,00	Denda keterlambatan (CV Pralaksana)
		Total	400.168.410,00	

F.2.16 ANALISA PENDAPATAN

Berdasarkan analisa data transaksi pendapatan pada e-Rekon&LK terdapat transaksi yang mempengaruhi pendapatan yang berasal TA 2018 yaitu piutang, pendapatan yang masih harus diterima, bagian lancar TP/TGR. Berikut ini dapat disajikan Analisa pendapatan tersebut pada **Lampiran F.2.16.**

F.2.17 REKAPITULASI INPUT DATA PENYALURAN BELANJA 526 TAHUN 2019

Dalam rangka memperbaiki mekanisme pertanggungjawaban bantuan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda, Kementerian Pertanian telah membuat beberapa macam aplikasi, antara lain: pada aplikasi BAST BANPEM 2019, aplikasi MPO dan google drive dengan alamat bit.ly/banpem_2019. Berdasarkan input data pada aplikasi BAST BANPEM 2019, aplikasi MPO dan google drive dengan alamat bit.ly/banpem_2019, realisasi belanja 526 adalah senilai Rp.9.912.836.875.211,00 dengan BAST yang terupload pada aplikasi dimaksud senilai Rp.9.520.417.402.707,00. Atas kekurangan BAST yang belum terupload tersebut akan ditindaklanjuti pada TA 2020 dengan pendampingan dari Inspektorat Jenderal Kementan. Rincian rekapitulasi Input Data Penyaluran Belanja MAK 526 TA 2019 disajikan pada **Lampiran F.2.17**.

F.2.18 REVALUASI/PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

Kementerian Pertanian melaksanakan penilaian kembali BMN pada tahun 2017-2018. Namun hasil penilaian kembali tersebut secara umum tidak diyakini nilai hasil penilaiannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Adapun jumlah satker telah melaksanakan penilaian kembali dan terdapat perubahan neraca BMN sebagai dampak dari penilaian kembali oleh tim revaluasi pada tahun tahun sebanyak 350 satker. Satuan kerja yang melaksanakan penilaian kembali di tahun 2017-2018 masing-masing Eselon 1 sebagai berikut :

Tabel F.2.18.1 Jumlah Satker yang Melaksanakan Revaluasi BMN

No	Kode E1	Uraian E1	Tahun 2017	Tahun 2018
1	018.01	Sekretariat Jenderal	4	2
2	018.02	Inspektorat Jenderal	1	0
3	018.03	Ditjen Tanaman Pangan	19	27
4	018.04	Ditjen Hortikultura	14	19
5	018.05	Ditjen Perkebunan	30	20
6	018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	25	27
7	018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	5	1
8	018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	40	26
9	018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	10	13
10	018.11	Badan Ketahanan Pangan	2	4
11	018.12	Badan Karantina Pertanian	38	23
Jumlah			188	162

Hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN selama tahun 2017-2018 telah menghasilkan kenaikan nilai BMN Kementerian Pertanian sebesar Rp71.315.968.832.380. Namun demikian penyajian hasil penilaian kembali tahun 2017-2018 tidak dicatat pada Laporan Keuangan atau dilakukan *take out* dari neraca sedangkan pada Laporan Barang Milik Negara tetap disajikan. Kenaikan neraca BMN akibat hasil penilaian kembali untuk masing -masing akun disajikan sebagai berikut :

Tabel F.2.18.2 Kenaikan Nilai Neraca Hasil Revaluasi BMN

Akun	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Total Nilai (Rp)
113111	Tanah	34.495.426.558.419	34.276.098.996.292	68.771.525.554.711
133111	Gedung dan Bangunan	1.049.431.142.681	1.283.224.532.171	2.332.655.674.852
134111	Jalan dan Jembatan	67.153.395.749	35.790.618.581	102.994.014.330
134112	Jaringan	80.363.359.919	28.480.228.568	108.843.588.487
Jumlah		35.692.374.456.768	35.623.594.375.612	71.315.968.832.380

Dampak kenaikan aset tetap sebagai hasil penilaian kembali paling signifikan terjadi pada akun tanah yakni senilai Rp68.771.525.554.711 atau sebesar 96,43% dari total kenaikan aset. Hal ini mengingat bahwa harga tanah cenderung akan meningkat setiap tahunnya, diikuti dengan gedung dan bangunan senilai Rp2.332.655.674.852.

Berdasarkan jenis transaksi kejadiannya, perubahan nilai BMN sebagai akibat dari penilaian kembali disajikan sebagai berikut :

Tabel F.2.18.3 Jenis Transaksi BMN Hasil Revaluasi BMN

Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	71.228.948.456.189
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	76.844.802.670
225	Koreksi Kesalahan Input IP	10.175.573.521
Jumlah		71.315.968.832.380

Berdasarkan Eselon 1, dampak kenaikan nilai aset tertinggi terjadi pada Eselon 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yakni sebesar Rp42.076.650.877.839 diikuti oleh Eselon 1 Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan senilai Rp12.579.688.432.477. Adapun rincian kenaikan nilai BMN hasil revaluasi BMN 2017-2018 per Eselon 1 disajikan sebagai berikut :

Tabel F.2.18.4 Hasil Revaluasi BMN per Eselon I

No	Eselon 1	Nilai (Rp)
1	Sekretariat Jenderal	5.542.739.878.664
2	Inspektorat Jenderal	101.702.656
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1.257.511.014.667
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	340.107.888.942
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	1.627.281.536.448
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan	12.579.688.432.477
7	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	254.628.273
8	Badan Litbang Pertanian	42.076.650.877.839
9	Badan PPSDM Pertanian	6.549.188.503.342

No	Eselon 1	Nilai (Rp)
10	Badan Ketahanan Pangan	67.465.137
11	Badan Karantina Pertanian	1.342.376.903.935
Jumlah		71.315.968.832.380

Adapun perubahan uraian masing-masing akun per Eselon 1 disajikan sebagai berikut :

Eselon 1	Uraian Akun	Nilai (Rp)
Sekretariat Jenderal	Tanah	5.279.917.270.000
	Gedung dan Bangunan	262.803.038.790
	Jalan dan Jembatan	31.708.035
	Irigasi	-12.138.161
Inspektorat Jenderal	Gedung dan Bangunan	101.702.656
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Tanah	1.167.710.728.227
	Gedung dan Bangunan	89.223.165.320
	Jalan dan Jembatan	474.587.085
	Irigasi	102.534.035
Direktorat Jenderal Hortikultura	Tanah	284.292.129.104
	Gedung dan Bangunan	57.119.394.232
	Irigasi	-1.303.634.394
Direktorat Jenderal Perkebunan	Tanah	1.436.365.880.079
	Gedung dan Bangunan	190.641.293.529
	Jalan dan Jembatan	270.036.727
	Irigasi	4.326.113
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tanah	12.509.464.494.830
	Gedung dan Bangunan	36.880.261.738
	Jalan dan Jembatan	24.141.787.530
	Irigasi	9.201.888.379
Direktorat Jenderal PSP	Gedung dan Bangunan	254.628.273
Badan Litbang Pertanian	Tanah	40.605.463.895.530
	Gedung dan Bangunan	1.320.524.171.778
	Jalan dan Jembatan	58.664.795.254
	Irigasi	91.998.015.277
Badan PPSDM Pertanian	Tanah	6.220.113.727.589
	Gedung dan Bangunan	307.345.298.562
	Jalan dan Jembatan	15.377.054.167
	Irigasi	6.352.423.024
Badan Ketahanan Pangan	Gedung dan Bangunan	67.465.137
Badan Karantina Pertanian	Tanah	1.268.197.429.352
	Gedung dan Bangunan	67.695.254.837
	Jalan dan Jembatan	3.984.045.532
	Irigasi	2.500.174.214
Total		71.315.968.832.380

Mengingat bahwa nilai penilaian kembali tahun 2017-2018 masih dilakukan take out pada Laporan Keuangan TA 2017 dan Laporan Keuangan TA 2018 maka Kementerian Keuangan meminta agar satker-satker mengajukan kembali revaluasi BMN dengan nilai yang signifikan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK atas pelaksanaan revaluasi. Perbaikan yang dilakukan dalam pelaksanaan koreksi penilaian kembali di tahun 2019 diantaranya perbaikan metode penilaian dan pengisian serta verifikasi form pendataan.

Hasil pelaksanaan koreksi penilaian kembali 2019 telah dibukukan pencatatannya pada 158 satker dengan rincian per Eselon 1 sebagai berikut:

Tabel F.2.18.5 Jumlah Satker yang Membukukan Hasil Revaluasi BMN

No	Eselon 1	Jumlah Satker
1	Sekretariat Jenderal	5
2	Inspektorat Jenderal	1
3	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	8
4	Direktorat Jenderal Hortikultura	7
5	Direktorat Jenderal Perkebunan	17
6	Direktorat Jenderal Peternakan dan Keswan	22
7	Badan Litbang Pertanian	1
8	Badan PPSDM Pertanian	57
9	Badan Karantina Pertanian	15
Jumlah		158

Hasil pelaksanaan koreksi penilaian kembali BMN pada tahun 2019 kembali menghasilkan penurunan nilai BMN Kementerian Pertanian senilai Rp4.584.138.230.909. Penurunan terbesar terjadi pada tanah, diikuti gedung bangunan dan irigasi. Sedangkan yang mengalami kenaikan adalah jalan dan jembatan. Penurunan neraca BMN terjadi pada akun BMN sebagai berikut :

Tabel F.2.18.6 Penurunan Nilai Neraca yang Dibukukan dari Hasil Revaluasi BMN

Akun	Uraian	Nilai (Rp)
113111	Tanah	(4.024.301.486.044)
133111	Gedung dan Bangunan	(525.195.688.589)
134111	Jalan dan Jembatan	14.036.573.400
134112	Jaringan	(48.677.629.676)
Jumlah		(4.584.138.230.909)

Berdasarkan jenis transaksi kejadiannya, perubahan nilai BMN sebagai akibat dari koreksi penilaian kembali disajikan sebagai berikut :

Tabel F.2.18.7 Jenis Transaksi BMN yang Dibukukan dari Hasil Revaluasi BMN

Jenis Transaksi	Uraian Transaksi	Nilai (Rp)
205	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	100.920.154.000
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	778.377.712.003
225	Koreksi Kesalahan input IP	(3.993.573.873.575)
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(660.969.651.150)
237	Koreksi BMN ditemukan Kembali	7.651.636.929
238	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	(816.544.209.116)
Jumlah		(4.584.138.230.909)

Berdasarkan Eselon 1, hasil dari koreksi penilaian kembali di tahun 2019 mengakibatkan kenaikan tertinggi pada Eselon 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yakni sebesar Rp357.519.599.539,00. Adapun rincian kenaikan nilai BMN hasil koreksi penilaian kembali BMN 2019 per Eselon 1 disajikan sebagai berikut :

Tabel F.2.18.8 Hasil Revaluasi BMN yang Dibukukan per Eselon I

Kode E1	Uraian E1	Nilai (Rp)
018.01	Sekretariat Jenderal	(23.126.785.210)
018.02	Inspektorat Jenderal	(50.192.000)
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	3.757.560.353
018.04	Ditjen Hortikultura	(23.681.919.335)
018.05	Ditjen Perkebunan	(36.402.420.997)
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	(4.619.354.301.361)
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2.763.930
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	357.519.599.539
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	(254.722.338.610)
018.12	Badan Karantina Pertanian	11.919.802.782
Jumlah		(4.584.138.230.909)

Adapun perubahan uraian masing-masing akun per Eselon 1 disajikan sebagai berikut :

Kode E1	Uraian E1	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai
018.01	Sekretariat Jenderal	131111	Tanah	(35.692.481.000)
		133111	Gedung dan Bangunan	13.117.028.230
		134111	Jalan dan Jembatan	(319.568.000)
		134112	Irigasi	(231.764.440)
018.02	Inspektorat Jenderal	133111	Gedung dan Bangunan	(50.192.000)

Kode E1	Uraian E1	Kode Akun	Uraian Akun	Nilai
018.03	Ditjen Tanaman Pangan	131111	Tanah	10.240.770.000
		133111	Gedung dan Bangunan	(7.101.250.650)
		134111	Jalan dan Jembatan	425.848.000
		134112	Irigasi	192.193.003
018.04	Ditjen Hortikultura	131111	Tanah	(24.781.298.104)
		133111	Gedung dan Bangunan	815.661.942
		134111	Jalan dan Jembatan	207.414.000
		134112	Irigasi	76.302.827
018.05	Ditjen Perkebunan	131111	Tanah	(46.177.207.500)
		133111	Gedung dan Bangunan	9.774.786.503
018.06	Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	131111	Tanah	(4.589.610.069.000)
		133111	Gedung dan Bangunan	(19.782.233.754)
		134111	Jalan dan Jembatan	(5.382.222.600)
		134112	Irigasi	(4.579.776.007)
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	133111	Gedung dan Bangunan	2.763.930
018.09	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	131111	Tanah	1.003.462.273.560
		133111	Gedung dan Bangunan	(604.585.279.562)
		134111	Jalan dan Jembatan	1.549.360.000
		134112	Irigasi	(42.906.754.459)
018.10	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	131111	Tanah	(294.720.774.000)
		133111	Gedung dan Bangunan	29.325.928.390
		134111	Jalan dan Jembatan	12.408.472.000
		134112	Irigasi	(1.735.965.000)
018.11	Badan Ketahanan Pangan	-	-	0
018.12	Badan Karantina Pertanian	131111	Tanah	(47.022.700.000)
		133111	Gedung dan Bangunan	53.287.098.382
		134111	Jalan dan Jembatan	5.147.270.000
		134112	Irigasi	508.134.400
Jumlah				(4.584.138.230.909)

Berdasarkan proses penilaian kembali tahun 2017-2018 dan koreksi penilaian kembali tahun 2019, neraca Kementerian Pertanian mengalami kenaikan sebesar Rp66.731.830.601.471,00. Kenaikan tertinggi masih terjadi pada akun tanah. Kenaikan neraca BMN terjadi pada akun BMN sebagai berikut:

Tabel F.2.18.9 Kenaikan Nilai Neraca dari Koreksi Hasil Revaluasi BMN

Uraian Akun	2017	2018	2019	2017-2019
(131111) Tanah	34.495.426.558.419	34.276.098.996.292	(4.024.301.486.044)	64.747.224.068.667
(133111) Gedung dan Bangunan	1.049.431.142.681	1.283.224.532.171	(525.195.688.589)	1.807.459.986.263

Uraian Akun	2017	2018	2019	2017-2019
(134111) Jalan dan Jembatan	67.153.395.749	35.790.618.581	14.036.573.400	116.980.587.730
(134112) Irigasi	80.363.359.919	28.480.228.568	(48.677.629.676)	60.165.958.811
Jumlah	35.692.374.456.768	35.623.594.375.612	(4.584.138.230.909)	66.731.830.601.471

Berdasarkan jenis transaksi kejadiannya, perubahan nilai BMN sebagai akibat dari penilaian kembali BMN dan koreksinya disajikan sebagai berikut:

Tabel F.2.18.10 Jenis Transaksi BMN dari Koreksi Hasil Revaluasi BMN

Jenis / Uraian Transaksi	2017	2018	2019	2017-2019
(205) Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	35.692.374.456.768	35.536.573.999.421	100.920.154.000	71.329.868.610.189
(224) Koreksi Penilaian Kembali BMN	0	76.844.802.670	778.377.712.003	855.222.514.673
(225) Koreksi Kesalahan input IP	0	10.175.573.521	(3.993.573.873.575)	(3.983.398.300.054)
(229) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	0	(660.969.651.150)	(660.969.651.150)
(237) Koreksi BMN ditemukan Kembali	0	0	7.651.636.929	7.651.636.929
(238) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0	0	(816.544.209.116)	(816.544.209.116)
Jumlah	35.692.374.456.768	35.623.594.375.612	(4.584.138.230.909)	66.731.830.601.471

Berdasarkan Eselon 1, hasil dari koreksi penilaian kembali di tahun 2017-2019 mengakibatkan kenaikan tertinggi pada Eselon 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yakni sebesar Rp42.434.170.477.378,00. Adapun rincian kenaikan nilai BMN hasil revaluasi BMN 2017-2019 per Eselon 1 disajikan sebagai berikut :

Tabel F.2.18.11 Koreksi Hasil Revaluasi BMN per Eselon I

Uraian E1	2017	2018	2019	2017-2019
(018.01) Sekretariat Jenderal	449.138.510.012	5.093.601.368.652	(23.126.785.210)	5.519.613.093.454
(018.02) Inspektorat Jenderal	101.702.656	0	(50.192.000)	51.510.656
(018.03) Ditjen Tanaman Pangan	822.519.411.134	434.991.603.533	3.757.560.353	1.261.268.575.020
(018.04) Ditjen Hortikultura	436.639.767	339.671.249.175	(23.681.919.335)	316.425.969.607
(018.05) Ditjen Perkebunan	615.470.289.195	1.011.811.247.253	(36.402.420.997)	1.590.879.115.451
(018.06) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.298.953.871.292	8.280.734.561.185	(4.619.354.301.361)	7.960.334.131.116
(018.08) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	209.568.124	45.060.149	2.763.930	257.392.203
(018.09)	25.887.242.758.691	16.189.408.119.148	357.519.599.539	42.434.170.477.378

Uraian E1	2017	2018	2019	2017-2019
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian				
(018.10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	3.054.572.827.888	3.494.615.675.454	(254.722.338.610)	6.294.466.164.732
(018.11) Badan Ketahanan Pangan	(51.637.609)	119.102.746	0	67.465.137
(018.12) Badan Karantina Pertanian	563.780.515.618	778.596.388.317	11.919.802.782	1.354.296.706.717
Jumlah	35.692.374.456.768	35.623.594.375.612	(4.584.138.230.909)	66.731.830.601.471

Adapun hasil penilaian kembali TA 2017-2018 dan perubahan koreksi penilaian kembali TA 2019 per Eselon 1 per akun BMN disajikan pada **Lampiran F.2.18**.

Pelaksanaan koreksi hasil penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2019 belum mencakup seluruh BMN yang dilakukan penilaian kembali/revaluasi di tahun 2017-2018. Sehubungan dengan itu maka Kementerian Pertanian akan kembali melaksanakan koreksi penilaian kembali BMN pada tahun 2020 sehingga dipastikan hasil penilaian kembali tahun 2017-2018 telah dilakukan koreksi pada tahun 2019-2020.

Rincian jumlah NUP yang akan dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2020 dapat disajikan sebagai berikut :

Status Reval	Keterangan Obyek Reval (2017-2019)				Jumlah
	Berlebih	Ditemukan	Tidak Ditemukan	Obyek Reval Baru	
Sudah Reval Tahun 2019	215	5.997	83	414	6.709
Belum Reval Tahun 2019 / Dikoreksi	570	11.308	20.830	0	32.708
Jumlah	785	17.305	20.913	414	39.417

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Jumlah NUP keseluruhan yang telah dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2017-2018 sebanyak 39.003 NUP, dengan rincian :
 - Jumlah barang berlebih sebanyak 785 NUP
 - Jumlah barang ditemukan sebanyak 17.305
 - Jumlah barang tidak ditemukan sebanyak 20.913
- Jumlah NUP keseluruhan yang telah dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2019 sebanyak 6.709 NUP, dengan rincian :
 - Dari 785 NUP barang berlebih, pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN sebanyak 215 NUP
 - Dari 17.305 NUP barang ditemukan, pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN sebanyak 5.997 NUP
 - Dari 20.913 barang tidak ditemukan, pada tahun 2019 telah dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN sebanyak 83 dikarenakan pada saat dilakukan inventarisasi ulang ternyata barang tersebut ditemukan
 - Terdapat 414 NUP yang belum sama sekali dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2017-2018 namun dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN di tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017-2018 barang tersebut dalam proses

- pemindahtanganan namun pada tahun 2019 ternyata proses pemindahtanganan belum disetujui sehingga perlu dilakukan penilaian kembali/revaluasi
3. Jumlah NUP yang akan dilakukan penilaian kembali/revaluasi pada tahun 2020 sebanyak 11.878 NUP, dengan rincian :
 - a. Dari 785 NUP barang berlebih, akan dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2020 sebanyak 570 NUP
 - b. Dari 17.305 NUP barang ditemukan, akan dilakukan penilaian kembali/revaluasi BMN pada tahun 2020 sebanyak 11.308 NUP
 - c. Dari 20.913 barang tidak ditemukan, sebanyak 20.830 NUP tidak akan dilakukan penilaian pada tahun 2020 dikarenakan sudah dilakukan koreksi atau dalam proses penghapusan, diantaranya pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah (018.03.149065.DK) sebanyak 6.500 NUP dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 9.264 NUP telah dilakukan koreksi pencatatan.

F.2.19. PERMASALAHAN ASET TETAP

Dalam rangka meningkatkan penatausahaan aset, langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian akan fokus untuk melakukan inventarisasi Aset Tetap dan melengkapinya dengan foto, dokumen kepemilikan, melakukan proses penertiban atas aset tetap yang digunakan oleh pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan dengan melakukan proses pemindahtanganan melalui transfer, hibah dan atau menyelesaikan melalui jalur hukum, melakukan update data pada Aplikasi SIMAK BMN atas aset tetap yang belum mencantumkan status kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat), melakukan koreksi pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN atas aset tetap bernilai buku negatif dan bernilai perolehan negatif melalui proses normalisasi, melakukan koreksi pencatatan pada Aplikasi SIMAK BMN atas peralatan dan mesin yang telah dihentikan penggunaannya, namun masih tercatat dalam aset tetap melalui proses reklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lain-lain (aset tetap yang dihentikan dari operasional pemerintahan).
2. Rincian Peralatan dan Mesin Tidak Ditemukan Berdasarkan Eselon I

Status/ Eselon I		Nilai Perolehan	Nilai Buku
Masa Manfaat Belum Berakhir		21.345.726.099	2.652.623.549
-	Ditjen Tanaman Pangan	1.727.202.650	88.937.439
-	Ditjen Hortikultura	48.975.000	0
-	Ditjen Perkebunan	2.458.405.440	846.867.500
-	Ditjen Peternakan dan Keswan	16.517.872.095	1.653.707.791
-	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	593.270.914	63.110.819
Masa Manfaat Telah Habis		117.604.461.537	0
-	Ditjen Tanaman Pangan	11.539.177.548	0
-	Ditjen Hortikultura	1.299.732.000	0
-	Ditjen Perkebunan	8.366.968.896	0
-	Ditjen Peternakan dan Keswan	16.890.523.738	0
-	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	77.292.111.101	0

Status/ Eselon I		Nilai Perolehan	Nilai Buku
-	Badan PPSDM Pertanian	2.215.948.254	0
Total		138.950.187.636	2.652.623.549

3. Rincian Peralatan dan Mesin Tidak Ditemukan Berdasarkan Akhir Manfaat

Status/ Akhir Masa Manfaat		Nilai Perolehan	Nilai Buku
Masa Manfaat Belum Berakhir		21.345.726.099	2.652.623.549
-	< 2023	18.763.876.409	1.539.008.551
-	2023-2026	2.248.683.000	947.104.567
-	2027-2029	333.166.690	166.510.462
Masa Manfaat Telah Habis		117.604.461.537	0
-	<1991	392.882.396	0
-	1991-2000	767.725.102	0
-	2001-2010	15.373.870.039	0
-	2011-2018	101.069.984.000	0
Total		138.950.187.636	2.652.623.549

4. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan surat Sekretaris Jenderal No : B-1487/PL.330/A/05/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penyelesaian BMN Tidak Ditemukan Berupa Peralatan dan Mesin yang berisi langkah percepatan penyelesaian antara lain :

- Satker membentuk tim penghapusan yang bertugas melaksanakan inventarisasi, penelitian BMN tidak ditemukan/hibah BMN yang digunakan pihak lain sesuai dengan ketentuan;
- Satker melaksanakan inventarisasi dan penelitian BMN yang sebelumnya dinyatakan tidak diketahui keberadaannya;
- Satker melakukan penghentian penggunaan atas BMN yang tidak ditemukan/rusak berat sesuai hasil inventarisasi;
- Satker mengusulkan penghapusan atas BMN yang tidak ditemukan/rusak berat ke KPKNL.Sekretariat Jendral (sesuai kewenangan).
- Satker melakukan proses usulan hibah sesuai ketentuan atas BMN yang ditemukan dalam kondisi baik tetapi digunakan oleh pihak lain ke KPKNL/Sekretariat Jenderal (sesuai kewenangan);
- Mengelola secara memadai atas BMN yang ditemukan dalam kondisi baik dan digunakan oleh satker UPT dan melengkapi dokumen pendukungnya.

Selanjutnya, Biro Keuangan dan Perlengkapan melakukan verifikasi atas dokumen usulan penghapusan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian (sesuai dengan kewenangannya) kemudian diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F.2.20. PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA KEMENTERIAN PERTANIAN

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III maka Kementerian Pertanian akan melepas atas BMN yang telah dicatat pada Kementerian Pertanian sesuai dengan daftar yang dilampirkan dalam peraturan pemerintah tersebut. Namun saat ini, Kementerian

Pertanian masih mencatat atas BMN tersebut dikarenakan pemindahtanganannya dari Kementerian Pertanian kepada PT. Perkebunan Nusantara III sebagai bagian dari penambahan penyertaan modal masih dalam proses penyelesaian administrasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Pasal 108 huruf o dan Pasal 109 huruf o. Yang dimaksud dengan penyelesaian administrasi tersebut berupa proses penandatanganan berita acara serah terima antara Kementerian Pertanian dan PT. Perkebunan Nusantara III yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Penghapusan dari Kementerian Pertanian. Hal ini juga sesuai surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Ditjen Kekayaan Negara Nomor S-138/KN.5/2020 tanggal 31 Januari 2020 hal Penyertaan Modal Negara kepada PT. Perkebunan Nusantara III.

Adapun keragaan atas nilai BMN tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai yang dicantumkan dalam penyertaan modal negara pada Kementerian Pertanian yakni senilai Rp6.156.254.841.144,00. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Pasal 108 huruf g untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan (tanah, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) merupakan hasil penilaian oleh Tim Penilai dari Direktorat Penilaian Ditjen Kekayaan Negara yang dilakukan pada Tahun 2018, sedangkan untuk BMN selain tanah dan.atau bangunan (peralatan dan mesin serta tanaman) mengacu pada Pasal 109 huruf b angka 3) penilaian dilakukan oleh Tim Internal pada Kementerian Pertanian yang dalam hal ini berdasarkan penilaian oleh Tim Internal Satker yang mencatat BMN.
2. Nilai BMN yang diserahkan Kementerian Pertanian sebagai modal negara tersebut berupa:
 - a. Tanah sebanyak 112 Persil dengan luas 71.463.975 M2 senilai Rp6.000.294.271.117,00;
 - b. Bangunan sebanyak 437 unit dengan luas 62.857,11 M2 senilai Rp90.055.032.123,00;
 - c. Peralatan dan mesin sebanyak 7.200 unit senilai Rp13.721.360.757,00;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 224 unit senilai Rp51.317.387.116,00;
 - e. Tanaman sebanyak 8.014 unit senilai Rp866.790.031,00.
3. Adapun berdasarkan nilai yang dicatat dalam neraca BMN Kementerian Pertanian sebelum dilakukan penilaian dalam rangka penyertaan modal pemerintah, nilai tersebut dicatat sebesar Rp4.055.039.852.385,00 sehingga terdapat kenaikan berdasarkan hasil penilaian sebesar Rp2.101.214.988.759,00;
4. Rincian nilai yang dicatat pada neraca Kementerian pertanian adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah sebanyak 112 Persil senilai Rp3.968.530.498.000,00;
 - b. Bangunan sebanyak 437 unit senilai Rp58.190.100.145,00;
 - c. Peralatan dan mesin sebanyak 7.200 unit senilai Rp24.664.982.399,00;
 - d. Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 224 unit senilai Rp2.787.481.810,00;
 - e. Tanaman sebanyak 8.014 unit senilai Rp866.790.031,00.
5. Jumlah satker yang memiliki BMN untuk penyertaan modal negara pada Kementerian Pertanian sebanyak 9 satker yang terdiri dari 8 satker berada dibawah eselon I Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian serta 1 satker dibawah Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel F.2.20 Penyertaan Modal Negara Pada Kementerian Pertanian

No	Nama Satker/ Jenis BMN	Nilai BMN
A.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	4.048.075.917.385
1	Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	2.273.409.480.900
	- Tanah	2.271.492.049.000
	- Bangunan	1.758.862.100
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.569.800
2	Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat	177.728.234.232
	- Tanah	158.786.918.000
	- Peralatan dan Mesin	82.691.000
	- Bangunan	17.906.051.020
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	503.942.043
	- Tanaman	448.632.169
3	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat	3.323.379.457
	- Peralatan dan Mesin	1.114.443.283
	- Bangunan	2.193.147.000
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.789.174
4	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah	819.323.279
	- Peralatan dan Mesin	722.873.279
	- Tanaman	96.450.000
5	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur	299.918.888.350
	- Tanah	274.980.900.000
	- Peralatan dan Mesin	12.610.196.350
	- Bangunan	12.327.792.000
6	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan	183.496.779.708
	- Tanah	179.615.402.000
	- Peralatan dan Mesin	595.861.799
	- Bangunan	1.521.986.222
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.345.371.825
	- Tanaman	418.157.862
7	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara	1.100.018.805.209
	- Tanah	1.083.655.229.000
	- Peralatan dan Mesin	441.237.288
	- Bangunan	15.884.044.203
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	38.294.718
8	Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	9.361.026.250
	- Peralatan dan Mesin	2.133.744.400
	- Bangunan	6.501.767.600
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	725.514.250
	Jumlah A	4.048.075.917.385

No	Nama Satker/ Jenis BMN	Nilai BMN
B.	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN	
9	Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	6.963.935.000
	- Peralatan dan Mesin	6.963.935.000
	Jumlah B	6.963.935.000
	Total (A + B)	4.055.039.852.385

F.2.21. PELAPORAN HEWAN TERNAK

Kementerian Pertanian menyajikan akun persediaan hewan ternak sebagai bagian dari akun Persediaan Lainnya, selain itu terdapat pula Hewan ternak yang tersaji pada laporan BMN Aset Tetap Lainnya maupun ekstrakomptabel. Pelaporan Hewan ternak sampai dengan saat ini belum dapat direkonsiliasi antar akun (Persediaan dan Aset Lainnya) dan antar laporan (intrakomptabel, ekstrakomptabel dan direktorat teknis).

Saldo Persediaan Lainnya tahun 2019 adalah Rp39.963.176.448,00 yang tersebar pada 48 satker. Sebanyak 10 dari 48 satker tersebut merupakan satker Ditjen PKH yang berdasarkan data aplikasi e-Rekon memiliki hewan ternak senilai Rp21.240.897.023,00. Hasil pemeriksaan atas berita acara stok opname Persediaan, daftar Aset Tetap Lainnya, dan laporan populasi hewan ternak pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak (dimuat dalam aplikasi bitpro2.ditjenpkh.pertanian.go.id) menunjukkan adanya selisih (nilai mutlak) jumlah ternak sebanyak 52.911 ekor disajikan pada **Lampiran F.2.21**.

Terkait permasalahan di atas, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Kementerian Pertanian akan membuat SOP Penatausahaan Persediaan hewan ternak antara pembukuan persediaan serta pembukuan teknis hewan ternak.
2. Kementerian Pertanian secara rutin akan melakukan rekonsiliasi antara petugas persediaan aplikasi dengan petugas teknis.
3. Kementerian Pertanian akan melakukan monitoring secara rutin atas rekonsiliasi antara petugas persediaan aplikasi dengan petugas teknis.

F.2.22. DAMPAK PENANGANAN COVID-19

Sehubungan dengan penanganan pandemic COVID-19 yang terjadi mulai bulan Maret 2020, terdapat potensi dampak terhadap anggaran dan realisasi anggaran termasuk penerimaan hibah langsung, pekerjaan fisik yang terhambat sehingga berpotensi meningkatkan nilai Piutang Tak Tertagih, dan turunnya penerimaan penerimaan bukan pajak.



Biro Keuangan dan Perlengkapan
Sekretariat Jenderal – Kementerian Pertanian
Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Gedung A Lantai 8
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan - Jakarta Selatan